



# RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023





**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 4720);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);



**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2018 -2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.



8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.



18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategis dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
28. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan,



akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

#### **Pasal 3**

Sistematika penulisan RPJMD yakni sebagai berikut :

- a. Bab I. Pendahuluan;
- b. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III. Gambaran Keuangan Daerah;
- d. Bab IV. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
- e. Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Bab IX. Penutup.

#### **Pasal 4**

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dipedomani dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.



**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**Pasal 6**

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJMD dan RPJPD dan Rencana RTRW Kabupaten;
- c. konsistensi antara RKPD dan RPJMD; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**Pasal 7**

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**Pasal 8**

- (1). Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota tetangga;
- (2). Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD;
- (3). Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah kabupaten dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan untuk



memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sekaligus sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten periode berikutnya.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Bupati.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan pemerintahan dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan Peraturan Daerah yang mengatur susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap RPJMD ini.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 24 Maret 2019

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**



**A.SURYA DARMA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.03.017.19.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2018-2023**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dokumen ini merupakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bone untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai tahun dengan 2023. Penyusunan rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati / Wakil Bupati terpilih. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merancang, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan dan hasilnya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

Sehubungan dengan pentingnya perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka penyelenggaraan



pemerintahan daerah, sebagai dokumen perencanaan komprehensif maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas

#### **Ayat (2)**

- Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- Pendekatan partisipatis dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
- Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD
- Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT, yang dengan segala cintaNya telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 sebagai bentuk kewajiban Kepala Daerah Terpilih sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RPJMD memuat deskripsi kinerja pembangunan yang akan dicapai pada akhir periode rencana secara terukur. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan pencapaian hasil pembangunan yang telah ditetapkan, dibutuhkan komitmen dan kerjasama antar pemangku kepentingan bersama masyarakat agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dicapai sesuai harapan.

Apresiasi dan terima kasih khususnya kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bone dan seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya, yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian dokumen RPJMD ini sehingga dapat ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Bone tepat waktu serta disajikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone sebagai acuan dan referensi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2018 – 2023.

Segala keterbatasan dan kekurangan dalam dokumen ini menjadi tugas bagi kita untuk melakukan perbaikan diwaktu yang akan datang. Semoga saya diberi kekuatan untuk mampu menyelesaikan periode ini dan mengemban amanah yang diberikan masyarakat menuju Bone yang **Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Watampone, 24 Maret 2019

**BUPATI BONE,**

**DR.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan .....	3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	6
	1.4. Maksud dan Tujuan .....	8
	1.5. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>11</b>
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	11
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	44
	2.3. Aspek Daya Saing Daerah .....	102
	2.4. Aspek Pelayanan Umum .....	107
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>278</b>
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	279
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	296
	3.3. Kerangka Pendanaan .....	306
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>318</b>
	4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	318
	4.2 Isu Strategis .....	342
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>351</b>
	5.1 Visi .....	351
	5.2 Misi .....	352
	5.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 .....	353
	5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 .....	356
	5.5 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2014-2019 .....	359
	5.6. Tujuan dan Sasaran .....	361
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>366</b>
	6.1 Strategi Pembangunan Daerah .....	366
	6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	368



6.3 Prioritas Pembangunan Daerah .....	373
6.4 Program Pembangunan Daerah .....	374
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>384</b>
7.1 Kerangka Pendanaan .....	384
7.2 Program Perangkat Daerah .....	385
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>421</b>
8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	421
8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) .....	443
8.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) .....	447
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>450</b>
9.1 Pedoman Transisi .....	450
9.2 Kaidah Pelaksanaan .....	450

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Terhitung sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Periode 2018-2023 pada tanggal 26 September 2018, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone berkewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen tersebut harus selesai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Dari segi muatan, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ini sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dari sisi proses, penyusunan RPJMD Kabupaten Bone menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Sedangkan dari sisi substansi, penyusunan RPJMD Kabupaten Bone menggunakan 3 (tiga)



pendekatan, yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bone terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, forum konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD terhadap rancangan awal RPJMD, konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Gubernur, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah.

Persiapan Penyusunan RPJMD meliputi, penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah, tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, Orientasi mengenai RPJMD, Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025. Dari segi pentahapan lima tahunan, RPJMD periode ini merupakan tahapan ketiga dan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bone. RPJPD penting menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam perspektif jangka panjang melalui pentahapan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga memperhatikan konsepsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) untuk memastikan tujuan, target, dan indikator TPB benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menggunakan analisis TPB juga menjadi pedoman dan acuan di dalam penyusunan dokumen RPJMD.

Secara teknis, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan

- Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
  31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor );
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);



38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 mempunyai kaitan erat dengan RPJPD Kabupaten Bone 2005-2025, dimana RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari arahan pembangunan jangka panjang untuk berbagai bidang pembangunan yang terdapat di dalam RPJPD tahapan ketiga dan keempat.

Dari segi keruangan, RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2008-2028. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone juga disertai dengan Kajian Lingkungan Hiduo Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone benar-benar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

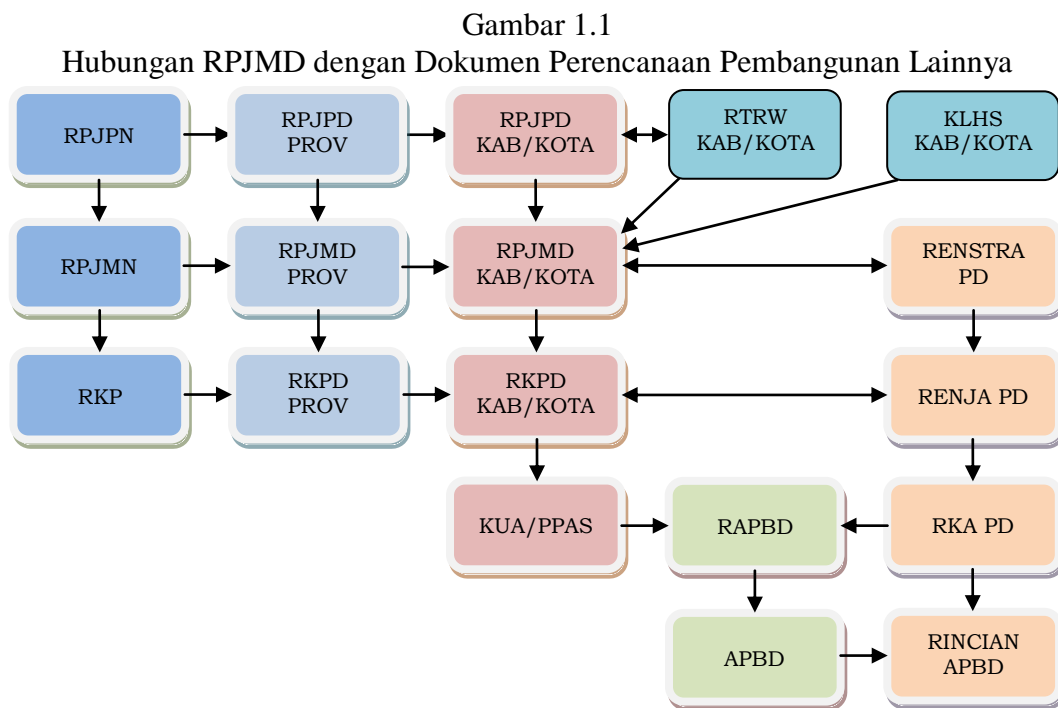
Disamping mengacu pada RTRW Kabupaten, Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMD Kabupaten daerah tetangga antara lain RPJMD Kabupaten Soppeng yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, RPJMD Kabupaten Wajo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang RPJMD Kabupaten Wajo Tahun, serta

memperhatikan beberapa RPJMD daerah tetangga lainnya seperti Kabupaten Maros dan Kabupaten Sinjai yang sementara dalam proses penyusunan.

Sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 bahwa visi Indonesia 2045 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Visi tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Bone tahun 2023 yang akan mewujudkan masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Visi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN dijabarkan kedalam delapan misi dengan 3 (tiga) kata kunci yaitu : struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah serta sumber daya manusia yang berkualitas. Isu-isu strategis yang diangkat diantaranya adalah isu strategis pembangunan ekonomi (pertumbuhan ekonomi stagnan, defisit transaksi berjalan relatif masih tinggi, dan tantangan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru), tingkat kemiskinan kronis (*extreme poverty*), pelayanan dasar yang belum memadai, infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi yang belum optimal, infrastruktur perkotaan (*smart city*) belum memadai, energi, ketenagalistrikan dan TIK belum memadai termasuk isu lingkungan hidup (dampak perubahan iklim serta daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan Lingkungan Hidup), isu strategis kehutanan, isu strategis sumber daya air nasional, serta isu strategis kewilayahan.

Tema rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Dengan sebuah kesimpulan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan infrastruktur pendukung untuk revolusi industri 4.0 seperti telekomunikasi (Palapa Ring Barat), jaringan internet, dan jaringan listrik (*hard infrastructure*). Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi dan vokasi sehingga memiliki kemampuan dalam hal teknologi dan kewirausahaan (contoh pengembangan *start up*) serta penyusunan regulasi yang mendorong dunia usaha dan wirausaha untuk mengembangkan industri 4.0 (*soft infrastructure*). Skenario pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dengan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2024 sebesar 6,8 – 7,8% yang menitikberatkan pada sektor pertanian, perdagangan, industri dan konstruksi yang diarahkan pada perkembangan kawasan strategis dengan sektor unggulannya.

Revolusi industri 4.0 yang menjadi salah satu isu strategis nasional dalam rancangan Teknokratik RPJMN, juga ditetapkan sebagai isu strategis global yang akan mempengaruhi dinamika dan perkembangan ekonomi serta keunggulan wirausaha di Kabupaten Bone.



RPJMD Kabupaten Bone juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone harus menunjukkan sinergitas dengan provinsi dan Nasional yang secara substansial tercermin dari formulasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 selanjutnya menjadi acuan bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bone, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Selain itu, RPJMD ini dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun selama periode 2018-2023 dimana RKPD ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(APBD). Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dalam RPJMD ini akan dicapai secara bertahap setiap tahun, sehingga proses pembangunan daerah akan terlaksana dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023;
2. Menjabarkan lebih lanjut RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 ke dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahunan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode 2018-2023.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).
3. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Menjadi instrumen bagi dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah Kabupaten Bone.
5. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah Kabupaten Bone.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terdiri atas 9 (sembilan) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini berisi uraian mengenai kondisi geografi dan demografi serta tiga aspek pembangunan daerah, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah selama lima tahun terakhir.

### **Bab III Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan masa lalu dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta proyeksi keuangan ke depan dengan tetap memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, rencana penggunaan kapasitas riil dan alokasi anggaran berdasarkan prioritas.

### **Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah**

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah selama ini dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

### **Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Terpilih Periode Tahun 2018-2023 serta menjelaskan pengertian dari kata-kata kunci yang ada dalam pernyataan visi tersebut, dan kemudian menjabarkan ke dalam pernyataan misi. Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

### **Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**

Bab ini menguraikan tentang bagaimana strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana arah kebijakan dari setiap strategi, dan rincian program pembangunan daerah berdasarkan arah kebijakan.

### **Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini akan menguraikan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, indikator dan target kinerja program, dan pagu indikatif yang dirinci per tahun selama periode 2018-2023.

### **Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Terpilih pada akhir periode masa jabatan.

### **Bab IX Penutup**

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan

daerah jangka menengah dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah penting dikemukakan sebagai landasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan mengenai kondisi geografi dan demografi serta tiga aspek pembangunan daerah, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum.

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Pemahaman tentang kondisi dan potensi sumber daya alam serta kependudukan dapat dicermati dari aspek geografi dan demografi. Uraian kondisi geografi Kabupaten Bone diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan uraian tentang aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

##### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **2.1.1.1. Luas dan Batasan Wilayah**

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Letak wilayah kabupaten ini berjarak 174 km dari Kota Makassar. Lokasi Kabupaten Bone terletak pada posisi  $4^{\circ}13'56''$  Lintang Selatan dan antara  $119^{\circ}42' - 120^{\circ}30'$  Bujur Timur serta mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah Selatan kearah Utara. Posisi geografis ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bone berada pada wilayah tropis. Kondisi ini menunjukkan ada potensi pengembangan berbagai jenis tanaman tropis.

Secara administratif, Kabupaten Bone berbatasan dengan berbagai wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
2. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai dan Gowa.

3. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Kabupaten Bone memiliki posisi strategis di Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Bone pada Bagian Timur Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Bone memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara. Posisi tersebut juga menempatkan Kabupaten Bone sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pengembangan perekonomian di kawasan tersebut.

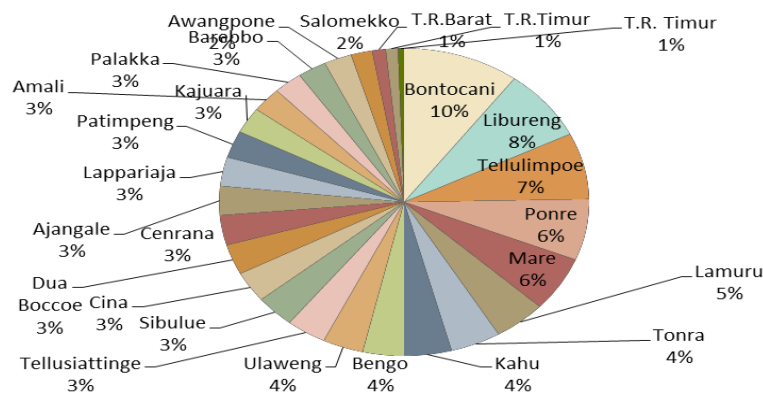
Tabel 2.1  
Jarak dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Jarak (Km)	Luas (Km2)	Persentase
1	Bontocani	Kahu	112	463,35	10,16
2	Kahu	Palattae	100	189,50	4,16
3	Kajuara	Bojo	70	124,13	2,72
4	Salomekko	Manera	62	84,91	1,86
5	Tonra	Bulu-bulu	52	200,32	4,39
6	Patimpeng	Latobang	77	130,47	2,86
7	Libureng	Camming	83	344,25	7,55
8	Mare	Kadai	37	263,50	5,78
9	Sibulue	Pattiro Bajo	15	155,80	3,42
10	Cina	Tanete Harapan	17	147,50	3,24
11	Barebbo	Apala	9	114,20	2,50
12	Ponre	Lonrong	30	293,00	6,43
13	Lappariaja	Matango	51	138,00	3,03
14	Lamuru	Lalebata	62	208,00	4,56
15	Tellu Limpoe	Tujue	74	318,10	6,98
16	Bengo	Bengo	44	164,00	3,60
17	Ulaweng	Taccipi	17	161,67	3,55
18	Palakka	Passippo	12	115,32	2,53
19	Awangpone	Componge	8	110,70	2,43
20	Tellu Siattange	Tokaseng	17	159,30	3,49
21	Amali	Taretta	36	119,13	2,61
22	Ajangale	Pompanua	46	139,00	3,05
23	Dua Boccoe	Uloe	30	144,90	3,18
24	Cenrana	Ujung Tanah	38	143,60	3,15
25	TR Barat	Macanang	0	53,68	1,18
26	Tanete Riattang	Salekoe	3	23,79	0,52
27	TR Timur	Lonrae	8	48,88	1,07
	Kabupaten Bone	Watampone		4.559,00	100,00

Sumber : Kabupaten Bone Dalam Angka, 2018

Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone kurang lebih 4.559 Km<sup>2</sup> atau 7,30 persen dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan, dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang. Wilayah kecamatan terjauh dari Ibu kota Kabupaten Bone adalah Kecamatan Bontocani dan kecamatan terdekat adalah Kecamatan Tanete Riattang Barat.

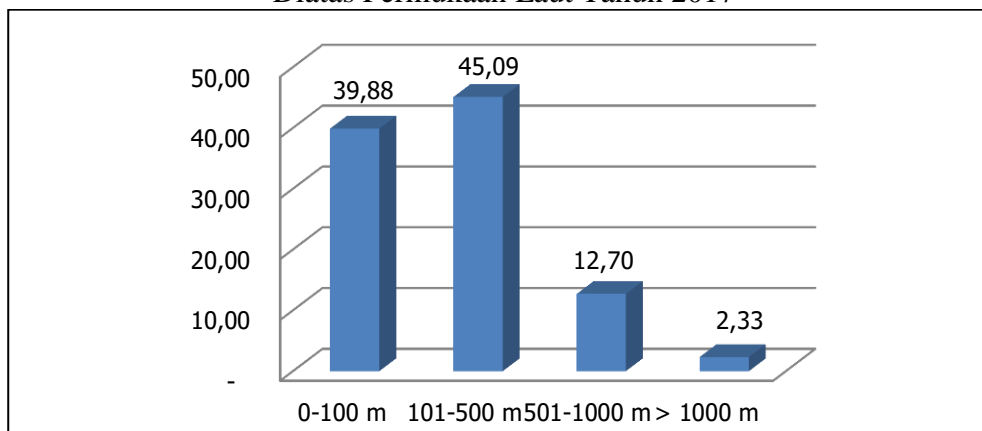
Grafik 2.1  
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bone Menurut Kecamatan Tahun 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

#### 2.1.1.2. Topografi

Grafik 2.2  
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bone Menurut Ketinggian Lokasi Diatas Permukaan Laut Tahun 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018



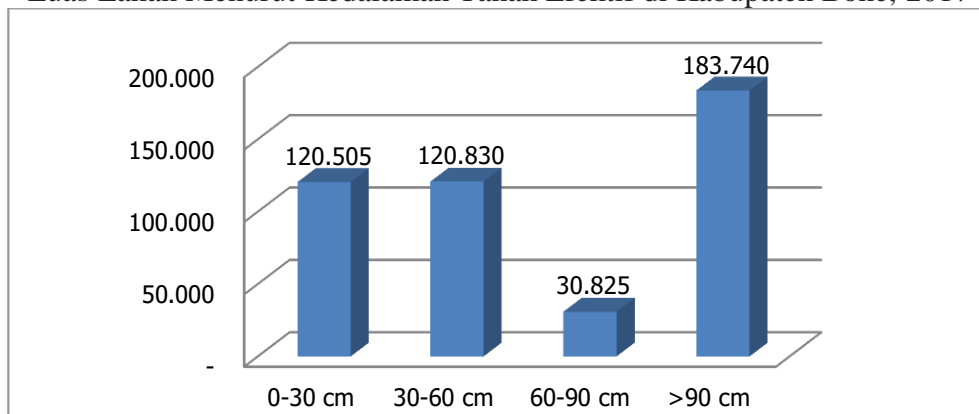
Kabupaten Bone memiliki wilayah pedalaman, pegunungan dan pesisir. Wilayah bagian barat Kabupaten Bone pada umumnya merupakan wilayah pedalaman dan pegunungan, sedangkan wilayah bagian timur pada umumnya merupakan wilayah pesisir. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dapat dilihat bahwa pada umumnya wilayah Kabupaten Bone berada pada ketinggian 0 – 500 meter diatas permukaan laut. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan komoditas pada wilayah tersebut mayoritas sesuai untuk tanaman dataran rendah.

### 2.1.1.3. Geologi

Kondisi kedalaman efektif tanah di Kabupaten Bone cukup baik untuk pertumbuhan tanaman. Pada umumnya (40,30%) luas lahan memiliki kedalaman di atas 90 Cm. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kedalaman tanah pada umumnya cukup baik untuk berbagai jenis tanaman termasuk tanaman tahunan.

Kabupaten Bone memiliki berbagai jenis tanah yang memungkinkan tumbuh berbagai jenis tanaman. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial Gleyhumus, Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah mediteran seluas 67,6 persen dari total wilayah kemudian Renzina 9,59 persen, dan Litosol 9 persen. Penyebaran jenis tanahnya yaitu sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial.

Grafik 2.3  
Luas Lahan Menurut Kedalaman Tanah Efektif di Kabupaten Bone, 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

#### 2.1.1.4. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembapan udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26<sup>0</sup>C-43<sup>0</sup>C. Suhu cukup tinggi rata-rata terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus di musim kemarau. Pada periode April-September bertiup Angin Timur yang membawa hujan, sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu : Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur.

Tabel 2.2  
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara dan Curah Hujan  
Menurut Bulan di Kabupaten Bone, 2017

No.	Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	27,6	80	40
2	Februari	26,2	83	184
3	Maret	26,3	83	148
4	April	26,4	82	150
5	Mei	25,6	85	589
6	Juni	25,2	88	482
7	Juli	25,1	87	272
8	Agustus	25,3	84	114
9	September	25,9	81	49
10	Oktober	27,1	79	59
11	November	26,6	81	197
12	Desember	27,0	82	102

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

#### 2.1.1.5. Hidrologi

Ketersediaan air untuk pengembangan sektor pertanian dan pemukiman bersumber dari sungai dan jaringan irigasi. Kondisi ketersediaan air di wilayah Kabupaten Bone dapat dilihat dari banyaknya sungai, baik yang langsung bermuara ke laut, maupun bermuara di Danau Tempe di Kabupaten Wajo (melalui Sungai Walanae) dan sungai-sungai besar lainnya.

Beberapa lokasi-lokasi yang berkontribusi terhadap ketersediaan sumber-sumber air baku di Kabupaten Bone, diantaranya bersumber dari

sungai-sungai besar dan prasarana jaringan irigasi. Sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Bone seperti Sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulubulu, Salomekko, Tobunne dan Sungai Lekoballo. Sedangkan Wilayah Kabupaten Bone memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Pada beberapa wilayah kecamatan merupakan kawasan pertanian dengan sistem irigasi teknis. Beberapa kawasan pertanian tersebut didukung oleh ketersediaan air yang memadai namun beberapa kawasan lainnya masih memiliki keterbatasan terutama pada musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan air, maka beberapa prasarana dan potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan diantaranya adalah:

1. Beberapa sungai besar yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk irigasi.
2. Perluasan irigasi guna mengembangkan penggunaan air, melindungi areal produksi dan menghindari kerusakan lahan akibat banjir dan kekeringan serta mendukung pemanfaatan areal pertanian baru dan penyediaan air bagi masyarakat.
3. Sistem Prasarana Penyediaan Air Bersih, baik untuk permukiman maupun untuk keperluan industri dan kegiatan lainnya.
4. Sistem Prasarana Irigasi Pertanian dan Sistem Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai.
5. Sistem Prasarana Konservasi Sungai dan Waduk.

Potensi lain yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya di Kabupaten Bone adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagian besar sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bone bermuara pada pesisir pantai Timur Kabupaten Bone, sedangkan hulu DASnya berada di kabupaten lain, seperti Kabupaten Wajo, Sinjai, Maros dan Soppeng. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, perlu menjalin kerjasama dengan kabupaten lain disekitarnya dalam mengelola sumberdaya air tersebut.

Pengelolaan air di Kabupaten Bone dilakukan dengan pembentukan waduk dan embung, yang secara rinci diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.3  
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bone

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Wilayah Kecamatan
1	Lonrong	37.009,37	Kec. Tonra, Sibulue, Cina, Ponre dan Barebbo
2	Bulu-Bulu	8.558,84	Kec. Salomekko, Tonra, Mare
3	Marek	35.489,71	Kec. Tonra, Mare, Libureng, Cina, Ponre
4	Baleng	21.581,59	Kec. Cina, Ponre, Barebbo, Lappariaja, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Palakka, Awangpone, Ulaweng.
5	Awangpone	12.760,84	Kec. Cina, Ponre, Barebbo, Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Palakka, Awangpone
6	Lisu	667,67	Kec. Lamuru
7	Tippulue	736,88	Kec. Tanete Riattang Timur
8	Bajoe	379,98	Kec. Tanete Riattang Timur
9	Barebbo	2.812,56	Kec. Cina, Barebbo, Palakka
10	Boarenge	2.039,74	Kec. Sibulue dan Barebbo
11	Boto	202,06	Kec. Sibulue
12	Cumene	577,57	Kec. Sibulue
13	Maros	134,51	Kec. Bontocani
14	Lab Lang	10.199,88	Kec. Kajuara, Salomekko, Tonra
15	Matuju	15.677,37	Kec. Palakka, Awangpone, Ulaweng, Tellu Siattinge
16	Benteng Barang	1.883,00	Kec. Sibulue
17	Marek Ds	14.077,22	Kec. Mare, Sibulue, Cina, Ponre
18	Tangka	9.715,81	Kec. Kajuara, Bontocani, Kahu
19	Salomekko Ds	21.040,71	Kec. Kajuara, Salomekko, Bontocani, Kahu dan Tonra
20	Sigeri	4,20	Kec. Lamuru
21	Bila Walannae	257.531,25	Kec. Salomekko, Bontocani, Kahu, Tonra, libureng, Ponre, lappariaja, Lamuru, Awangpone, Ulaweng, Tellusiattinge, Dua Bocoe, Cenrana, Ajangale
22	Pangkajenne	4.843,57	Kec. Lamuru
23	Tanete Riattang	2.341,44	Kec. Barebbo, Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, Palakka.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2017

#### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bone berdasarkan fungsi utama lahan. Secara makro penggunaan lahan dibagi kedalam beberapa kawasan yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan pada kawasan lindung diarahkan pada pemantapan kawasan yang berfungsi lindung, sedangkan kawasan budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya, baik permukiman/perkotaan

maupun budidaya produktif (pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan sebagainya) sesuai arahan dalam RTRW.

### **2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah menurut arahan dalam RTRW di Kabupaten Bone, meliputi beberapa kawasan diantaranya adalah kawasan lindung dan kawasan budidaya.

#### **1. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Bone dijadikan titik tolak didalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya ditetapkan guna mengakomodasi kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya produksi maupun permukiman. Pengelolaan kawasan lindung yang ada perlu dimantapkan fungsinya karena terkait dengan kepentingan untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim pada wilayah belakangnya.

Pengelolaan kawasan lindung mengacu pada Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Bone meliputi : Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam dan Kawasan cagar budaya, Kawasan rawan bencana alam, Kawasan lindung geologi dan Kawasan lindung lainnya. Sesuai dengan kondisi wilayah, kawasan lindung yang perlu ditetapkan di Kabupaten Bone sesuai dengan kriterianya masing-masing adalah:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi: kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
2. Kawasan Perlindungan Setempat, yang terdiri dari: kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, meliputi: kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar alam.

4. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi: kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin puting beliung dan kawasan rawan tanah longsor.
5. Kawasan Lindung Geologi terdiri atas: kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
6. Kawasan Lindung Lainnya merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kawasan konservasi terumbu karang yang terdiri atas: zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

Kawasan hutan lindung tersebar pada beberapa kecamatan dan luasnya bervariasi antar kecamatan. Luas kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Bone seluas 37.942,12 Ha dan tersebar di Kecamatan Awangpone seluas 456,89 Ha (1,20%), Kecamatan Tellu Siattinge seluas 396,57 Ha (1,05%), Kecamatan Cenrana seluas 2.046,72 Ha (5,39%), Kecamatan Mare seluas 4.680,66 Ha (12,34%), Kecamatan Sibulue seluas 1.605,96 Ha (4,23%), Kecamatan Barebbo seluas 235,95 Ha (0,62%), Kecamatan Tanete Riattang Timur seluas 303,10 Ha (0,80%), Kecamatan Lamuru seluas 15.824 Ha (41,71%), Kecamatan Ponre seluas 1.100,88 Ha (2,90%), Kecamatan Lappariaja seluas 2.505,65 Ha (6,60%), Kecamatan Tonra seluas 6.129,28 Ha (16,15%), Kecamatan Libureng seluas 2,81 Ha (0,01%), Kecamatan Cina seluas 2.361 Ha (6,22%), Kecamatan Dua Boccoe seluas 223,56 Ha (0,59%) dan Kecamatan Bontocani seluas 68,46 Ha (0,18%). Upaya dan arahan untuk melestarikan kawasan hutan lindung yang perlu dipertahankan dan tingkatkan dapat dilakukan melalui kebijakan yang sifatnya mengikat, antara lain:

- Pemantapan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dipertahankan,
- Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya dapat mengganggu fungsi lindung,
- Pelarangan/pencegahan kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang telah ditetapkan,

- Pembatasan kegiatan budidaya yang ada dengan tindakan konservasi secara intensif,
- Pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung.

Kawasan resapan air ditetapkan pada Daerah Aliran Sungai disebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagaian wilayah Kecamatan Lappariaja dan sebagian wilayah Kecamatan Lamuru.

Kawasan Sempadan Pantai ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bone di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Cenrana, Tellu Siattinge, Awangpone, Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara dengan ketentuan : daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan Sempa dan Sungai ditetapkan dan tersebar disepanjang tepian sungai di kabupaten Bone dengan kriteria : daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar, daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Kawasan Sekitar Mata Air ditetapkan di mata air Wollangi 1, Wollangi 2 dan Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng, mata air Batu-batu di Kecamatan Kajuara, mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru dan mata air Maccedde di Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan ketentuan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan Sekitar Mata Air perlu mendapat perlindungan dan pelestarian. Kebutuhan air bersih penduduk Kota Watampone dan sekitarnya sangat tergantung pada sumber mata air ini. Kemampuan cadangan air yang

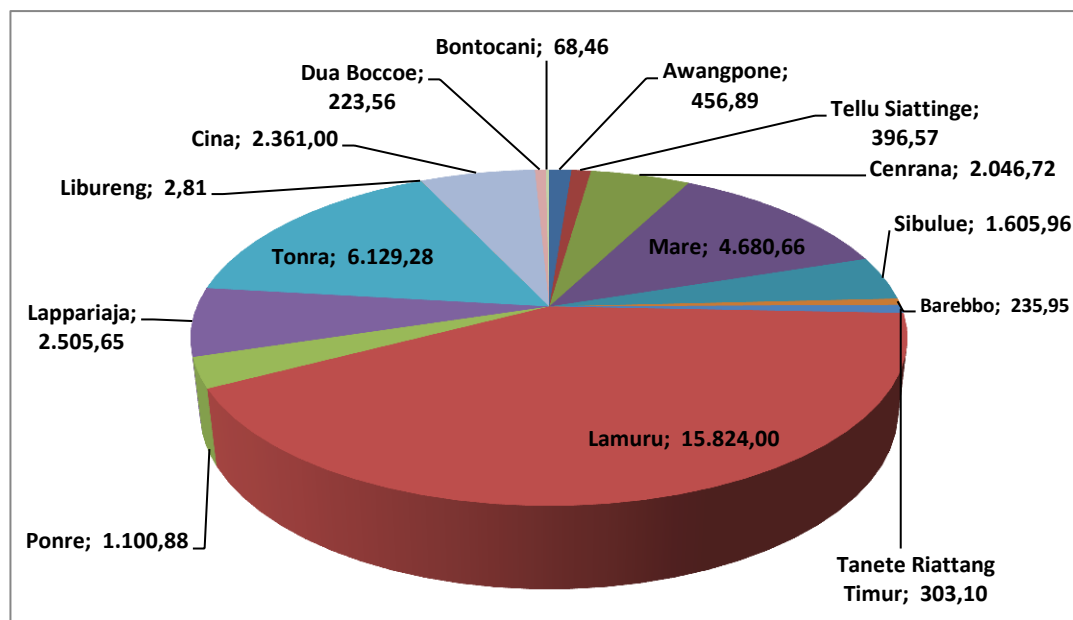


bersumber dari mata air, diperkirakan sebesar 293 Liter/Detik, dimana yang dimanfaatkan baru 36,86 persen (108 Detik/Liter).

Kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp, PPK dan PPL.

Kawasan taman wisata alam dengan luasan sekitar 3.770 Ha tersebar di beberapa kecamatan diantaranya disebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagaian wilayah Kecamatan Bengo, sebagaian wilayah Kecamatan Palakka dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng. Sedangkan Kawasan cagar alam yang merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Cani Sirenreng yang berada disebagian wilayah Kabupaten Bone dengan luas sekitar 712,7 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Lappariaja seluas 108,93 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe seluas 603,77 Ha.

Grafik 2.4  
Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bone, 2017



Sumber: RTRW Kabupaten Bone, 2012-2032

Kawasan Rawan Bencana Alam merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terjadinya bencana alam. Kawasan rawan banjir ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dan sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja.

Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Amali, Sibulue dan Libureng. Sedangkan kawasan rawan tanah longsor ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre.

Kawasan Lindung Geologi merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi agar fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak saling merugikan. Kawasan rawan bencana alam geologi merupakan kawasan rawan gempa bumi ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas: kawasan sempadan mata air ditetapkan di mata air Wollangi 1, mata air Wollangi 2, mata air Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng , mata air Batu-Batu di Kecamatan Kajuara, mata air

Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru dan mata air Maccedde di Kecamatan Tanete Riattang Timur serta kawasan imbuhan air tanah ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Cina dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Siattinge.

Pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan wilayah, diserasikan dengan kemampuan dan daya dukung wilayahnya. Dikaitkan dengan kondisi pemanfaatan ruang eksisting, delineasi kawasan lindung kemungkinan akan berhadapan dengan permasalahan tumpang tindih dengan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindungnya. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan pengendaliannya agar tidak mengganggu fungsi lindung yang telah ditetapkan. Di samping untuk mencegah erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjada hidro-orologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Beberapa kasus permasalahan yang terjadi dan perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Bone adalah:

- Perambahan atau intervensi hutan lindung oleh masyarakat untuk kegiatan perlandangan berpindah, sehingga menyebabkan semakin meluasnya lahan-lahan kritis,
- Kondisi eksisting pada kawasan hutan lindung yang ternyata sudah tidak mempunyai fungsi lindung lagi,
- Kegiatan budidaya yang telah lama berkembang yang menurut kriteria fisik merupakan kawasan lindung, dan
- Permukiman yang telah berkembang lama di dalam kawasan lindung.

## **2. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya secara umum merupakan kawasan di luar yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam dan manusia serta sumberdaya buatan. Kawasan ini perlu dimanfaatkan secara terencana dan terarah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia. Kawasan budidaya yang akan diarahkan pengembangannya meliputi:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang mencakup; kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan 16.309,73 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tonra, Sibulue, Cina, Ponre, Lappariaja, Ulaweng, Salomekko, Libureng dan Mare.

Kawasan hutan produksi terbatas seluas 80.471 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tonra, Cina, Ponre, Lappariaja, Ulaweng, Libureng, Mare, Kahu, Bontocani, Lamuru, Tellu Siattinge, Awangpone, Palakka dan Barebbo

2. Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas : kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas 119.216 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ajangale seluas 5.626 Ha (4,72%), Kecamatan Awangpone seluas 5.525,31 Ha (4,63%), Kecamatan Barebbo seluas 3.053,14 Ha (2,56%), Kecamatan Bontocani seluas 4.286,40 (3.60%), Kecamatan Cenrana seluas 5.162,60 Ha (4.33%), Kecamatan Cina seluas 4.970,85 Ha (4,17%), Kecamatan Dua Boccoe seluas 1.295,15 Ha (1,09%), Kecamatan Kahu seluas 9.767,08 Ha (8,19%), Kecamatan Kajuara seluas 4.026,44 (3,38%), Kecamatan Lamuru seluas 6.341,08 Ha (5,32%), Kecamatan Lappariaja seluas 5.765,48 Ha (4,84%), Kecamatan Libureng seluas 19.731,70 Ha (16,55%), Kecamatan Mare seluas 3.884,50 Ha (3,26%), Kecamatan Palakka seluas 10.310,70 Ha (8,65%), Kecamatan Ponre seluas 1.700,02 Ha (1,43%), Kecamatan Salomekko seluas 8.915,28 Ha (7,48%), Kecamatan Sibulue seluas 6.009,37 Ha (5,04%), Kecamatan Tanete Riattang seluas 276,04 Ha (0,23%), Kecamatan Tanete Riattang Barat seluas 908,28 Ha (0,76%), Kecamatan Tanete Riattang Timur seluas 1.209,87 Ha (1,01%), Kecamatan Tellu Siattinge seluas 1.915,77 Ha (1,61%), Kecamatan Tonra seluas 7.284,82 Ha (6,11%) dan Kecamatan Ulaweng seluas 1.249,96 Ha (1,05%).



Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan 185.881,18 Ha ditetapkan disebagian Kecamatan Ajangale seluas 11.720,02 Ha (6,31%), Kecamatan Awangpone seluas 6.455,30 Ha (3,47%), Kecamatan Barebbo seluas 6.298,69 Ha (3,39%), Kecamatan Bontocani seluas 10.363,24 Ha (5,58%), Kecamatan Cenrana seluas 2.615,38 Ha (1,41%), Kecamatan Cina seluas 8.852,20 Ha (4,76%), Kecamatan Duaboccoe seluas 14.247,05 Ha (7,66%), Kecamatan Kahu seluas 7.358,54 Ha (3,96%), Kecamatan Kajuara seluas 4.125,58 Ha (2,22%), Kecamatan Lamuru seluas 19.524,29 Ha (10,50%), Kecamatan Lappariaja seluas 18.220,33 Ha (9,80%), Kecamatan Libureng seluas 8.524,18 Ha (4,59%), Kecamatan Mare seluas 9.438,67 Ha (5,08%), Kecamatan Palakka seluas 146,10 Ha (0,08%), Kecamatan Ponre seluas 8.824,40 Ha (4,75%), Kecamatan Salomekko seluas 3.730,98 Ha (2,01%), Kecamatan Sibulue seluas 4.682,12 Ha (2,52%), Kecamatan Tanete Riattang seluas 574,14 Ha (0,31%), Kecamatan Tante Riattang Barat seluas 1.507,82 Ha (0,81%), Kecamatan Tanete Riattang Timur seluas 431,07 Ha (0,23%), Kecamatan Tellusiattinge seluas 12.963,93 Ha (6,97%), Kecamatan Tonra seluas 5.876,43 Ha (3,16%), dan Kecamatan Ulaweng seluas 19.400,73 Ha (10,44%).

Kawasan peruntukan perkebunan meliputi : kawasan perkebunan komoditas kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada dan kelapa hibrida ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ajangale, Awangpone, Barebbo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Mare, Palakka, Ponre, Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Tonra dan Ulaweng serta Kawasan perkebunan komoditi tebu untuk kebutuhan industri pabrik Gula Camming dan pabrik Gula Arasoe ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Libureng, Ponre, Kahu, Patimpeng, Tonra, Cina, Mare dan Salomekko.

Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, Awangpone, Barebbo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Mare, Palakka, Ponre, Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Tonra, Amali, Bengo, Tellu Limpoe, Patimpeng, dan Ulaweng.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luas 119.216 Ha.

3. Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, kawasan pengolahan ikan dan pelabuhan perikanan.
4. Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara serta kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.
5. Kawasan peruntukan industri , terdiri atas kawasan peruntukan industri besar dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.
6. Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.
7. Kawasan peruntukan pemukiman, terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman pedesaan.
8. Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan perdagangan, olahraga, pertahanan dan keamanan serta keselamatan operasi penerbangan.

### **2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan

pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu :

1. Jasa penyediaan (*provisioning*);

2. Jasa pengaturan (*regulating*);
3. Jasa budaya (*cultural*);
4. Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Bone akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Bone. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.



Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4  
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Bone

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang Diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd
4	IV	Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

*Sumber : Klingebiel dan Montgomery (1961, diringkaskan) dan Fenton (2014), 2018*

*Keterangan : Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd= Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: Penggembalaan intensif; Pgsd: Penggembalaan sedang; Pgt: Penggembalaan terbatas.*

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Bone. Hasilnya 27,86% luas lahan kelas VI, 24,03% luas lahan kelas V, 22,97% luas lahan kelas IV, 17,79% luas lahan kelas II, 0,93% luas lahan kelas VII dan 6,42% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Bone umumnya hanya mampu untuk penggunaan semua jenis penggembalaan sedang, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Bone umumnya mengandung krikil atau batuan dan jenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu

kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Sementara lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan budidaya hanya 40,76% dari total luas wilayah Kabupaten Bone, itupun pertanian yang terbatas.

Tabel 2.5  
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Bone

Kelas	Luas (Hektar)	Persentase (%)
II	81389,4773	17,79
IV	105071,9351	22,97
V	109937,5415	24,03
VI	127452,8688	27,86
VII	4249,18324	0,93
VIII	29373,07582	6,42
Total	457474,0817	100,00

*Sumber : Diolah dari Data Land System, 2017*

Adapun kecamatan yang potensial untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada tabel berikut:

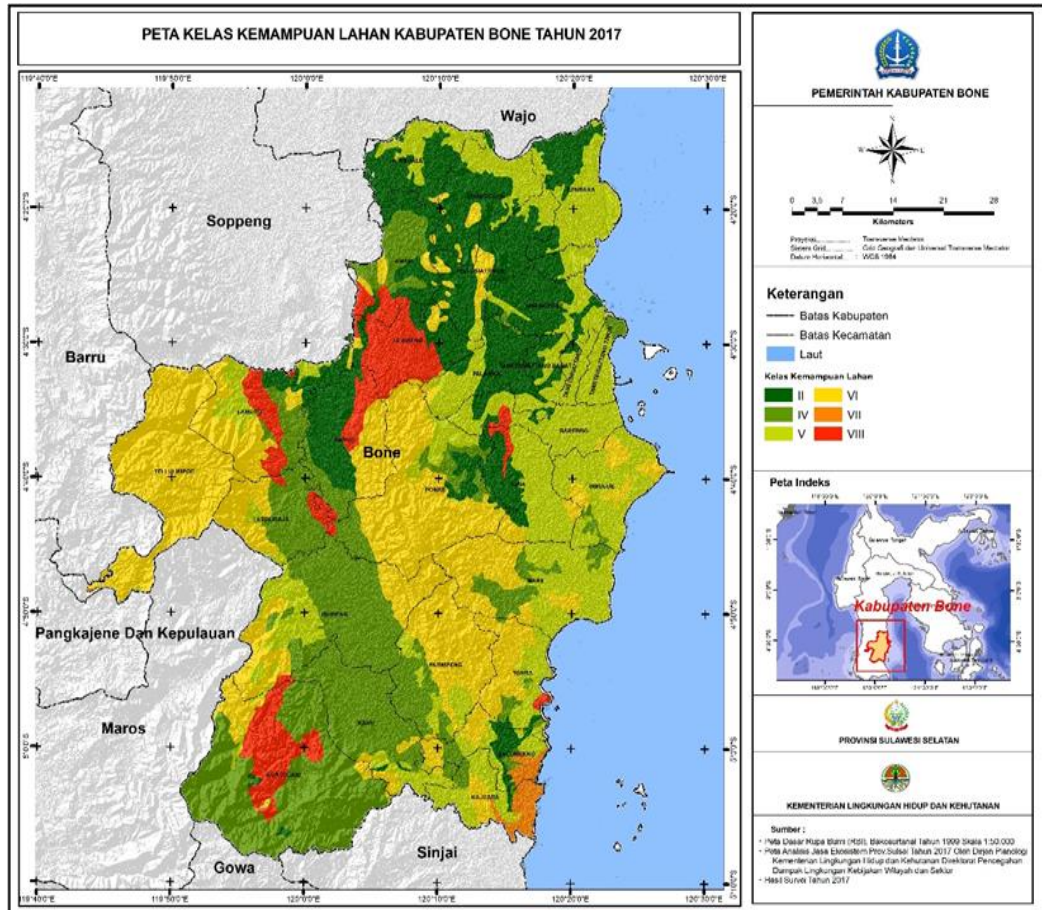
Tabel 2.6  
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Bone

Kecamatan	Kelas						Total
	II	IV	V	VI	VII	VIII	
AJANGALE	62,65	0,00	36,44	0,90	0,00	0,00	100,00
AMALI	36,95	39,31	0,00	7,95	0,00	15,78	100,00
AWANGPONE	68,51	1,91	29,47	0,11	0,00	0,00	100,00
BAREBBO	10,91	0,00	82,81	1,36	0,00	4,92	100,00
BENGO	41,93	13,96	0,00	28,49	0,00	15,62	100,00
BONTOCANI	0,77	71,58	1,34	7,10	0,00	19,21	100,00
CENRANA	38,25	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	100,00
CINA	28,04	0,66	56,06	10,46	0,00	4,78	100,00
DUABOCCOE	59,75	0,00	33,36	6,89	0,00	0,00	100,00
KAHU	1,03	78,44	12,88	7,42	0,00	0,22	100,00
KAJUARA	1,81	7,26	46,57	15,69	28,66	0,00	100,00
LAMURU	14,76	15,39	17,31	35,46	0,00	17,08	100,00
LAPPARIAJA	0,00	50,54	6,81	35,46	0,00	7,19	100,00
LIBURENG	0,00	53,36	18,49	27,41	0,00	0,73	100,00
MARE	0,00	18,30	43,06	38,64	0,00	0,00	100,00
PALAKKA	54,99	1,01	41,01	2,99	0,00	0,00	100,00
PATIMPENG	0,00	26,33	14,72	58,95	0,00	0,00	100,00
PONRE	7,69	14,79	8,48	68,23	0,00	0,81	100,00
SALOMEKKO	18,18	13,95	28,86	25,05	13,97	0,00	100,00
SIBULUE	0,00	4,65	73,13	22,22	0,00	0,00	100,00
TANETERIATTANG	9,02	0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	100,00
TANETERIATTANG BARAT	51,71	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	100,00
TANETERIATTANG TIMUR	0,00	15,06	84,94	0,00	0,00	0,00	100,00
TELLULIMPOE	0,00	0,00	0,44	99,43	0,13	0,00	100,00
TELLUSIATTINGE	65,22	0,00	22,15	12,63	0,00	0,00	100,00
TONRA	3,66	8,21	35,16	50,03	0,00	2,94	100,00
ULAWENG	29,53	0,00	2,62	7,05	0,00	60,81	100,00

Sumber: Analisis Data, 2018

Berdasarkan tabel diatas daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Palakka, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Taneteriattang Barat, dan Kecamatan Duaboccoe.

Gambar 2.1  
Peta Kemampuan Lahan di Kabupaten Bone



Sumber: Analisis Data, 2018

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Bone diperlihatkan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.7  
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kab.Bone

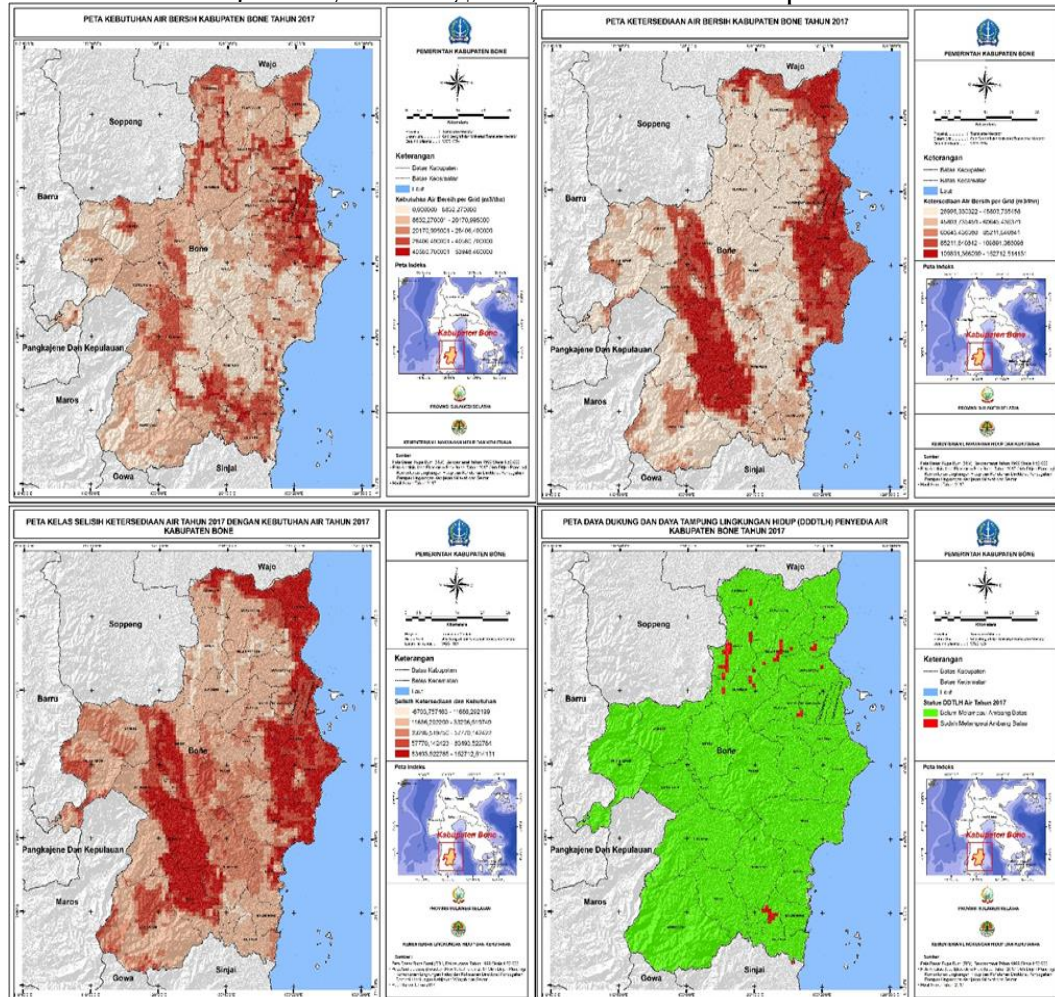
KECAMATAN	KETERSEDIAAN (m3/Tahun)	KEBUTUHAN (m3/Tahun)	SELISIH (m3/Tahun)
AJANGALE	14.766.239,50	4.869.087,22	9.897.152,27
AMALI	9.320.675,22	5.578.175,28	3.742.499,94
AWANGPONE	11.642.337,54	4.051.624,83	7.590.712,71
BAREBBO	17.035.388,54	4.690.770,86	12.344.617,69
BENGO	20.648.955,97	4.735.767,69	15.913.188,28
BONTOCANI	32.042.742,59	7.304.406,65	24.738.335,94
CENRANA	22.817.020,27	4.044.582,89	18.772.437,38
CINA	16.654.784,94	3.057.755,75	13.597.029,20
DUABOCCOE	15.224.822,36	3.724.353,42	11.500.468,94
KAHU	26.036.632,06	5.953.546,75	20.083.085,31
KAJUARA	8.506.209,43	4.081.463,58	4.424.745,85
LAMURU	20.502.462,91	5.691.681,89	14.810.781,02
LAPPARIAJA	16.646.464,59	4.271.715,45	12.374.749,14
LIBURENG	39.571.726,94	8.253.636,96	31.318.089,98
MARE	23.344.376,73	3.298.852,85	20.045.523,89
PALAKKA	9.846.836,29	3.891.808,49	5.955.027,81
PATIMPENG	18.901.486,20	3.629.585,55	15.271.900,65
PONRE	24.112.568,90	3.728.888,91	20.383.679,99
SALOMEKKO	7.721.676,37	4.165.012,08	3.556.664,29
SIBULUE	23.431.929,07	4.339.031,67	19.092.897,40
TANETERIATTANG	6.148.656,64	2.256.167,57	3.892.489,08
TANETERIATTANG BARAT	5.038.787,84	2.101.841,55	2.936.946,29
TANETERIATTANG TIMUR	8.054.893,04	2.264.522,42	5.790.370,63
TELLULIMPOE	21.800.505,37	4.028.708,67	17.771.796,70
TELLUSIATTINGE	14.671.658,77	5.567.433,33	9.104.225,44
TONRA	10.386.982,89	2.200.786,85	8.186.196,05
ULAWENG	8.055.478,17	4.300.599,36	3.754.878,81
<b>Total</b>	<b>452.932.299,16</b>	<b>116.081.808,48</b>	<b>336.850.490,68</b>

*Sumber : Analisis Data, 2018*

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Bone sebesar 452.932.299,16 M3/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 116.081.808,48 M3/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 336.850.490,68 M3/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Libureng (31.318.089,98 M3/Tahun), dan Kecamatan Mare (20.045.523,89M3/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Tanete Riattang Barat (2.936.946,29M3/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan Tanete Riattang Barat merupakan pusat perkotaan Kabupaten

Bone, dimana jumlah penduduk dan aktivitas relatif cukup besar dibandingkan dengan kecamatan lain.

Gambar 2.2  
Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Bone



Sumber: Analisis Data Tahun 2018

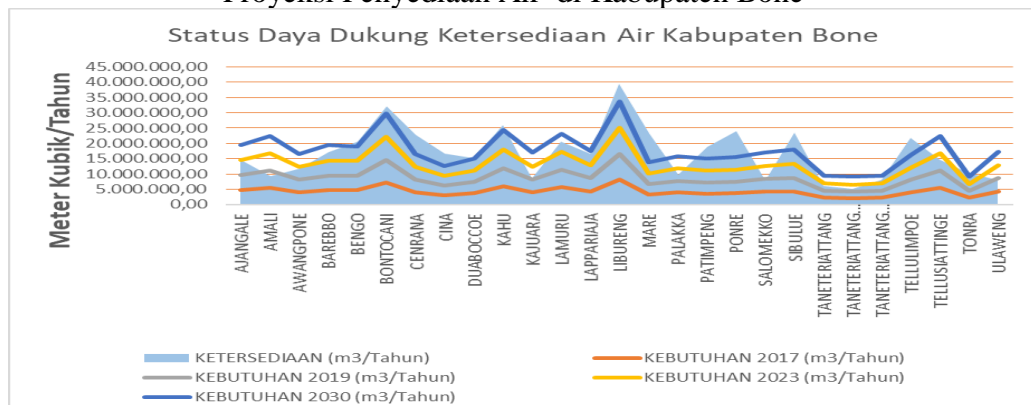
Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2019, 2023 dan 2030 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1-2%, dengan asumsi ketersediaan air tetap, meskipun pada daerah perkotaan cenderung melampaui ambang batas seperti pada Kecamatan Taneteriattang. Pada tahun 2019, 2023 dan 2030 kebutuhan air di Kabupaten Bone masing-masing 117.122.878,25 M3/Tahun, 119.245.270,99 M3/Thn, 123.093.156,02 M3/Thn. Adapun proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Bone untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8  
Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kab.Bone

KECAMATAN	KETERSEDIAAN (m3/Tahun)	KEBUTUHAN 2019 (m3/Tahun)	KEBUTUHAN 2023 (m3/Tahun)	KEBUTUHAN 2030 (m3/Tahun)
AJANGALE	14.766.239,50	4.878.830,26	4.898.374,89	4.932.766,56
AMALI	9.320.675,22	5.589.337,21	5.611.728,15	5.651.128,30
AWANGPONE	11.642.337,54	4.084.102,65	4.149.841,41	4.267.440,66
BAREBBO	17.035.388,54	4.747.228,97	4.862.191,99	5.070.116,82
BENGO	20.648.955,97	4.745.243,94	4.764.253,45	4.797.703,44
BONTOCANI	32.042.742,59	7.348.298,84	7.436.876,02	7.594.463,03
CENRANA	22.817.020,27	4.085.129,82	4.167.447,26	4.315.514,12
CINA	16.654.784,94	3.094.558,90	3.169.499,42	3.305.038,62
DUABOCCOE	15.224.822,36	3.731.805,84	3.746.755,50	3.773.061,61
KAHU	26.036.632,06	6.013.231,05	6.134.400,69	6.352.352,24
KAJUARA	8.506.209,43	4.138.804,06	4.255.913,08	4.468.883,59
LAMURU	20.502.462,91	5.737.304,45	5.829.649,74	5.994.844,84
LAPPARIAJA	16.646.464,59	4.305.957,48	4.375.267,32	4.499.254,73
LIBURENG	39.571.726,94	8.319.798,11	8.453.715,71	8.693.279,20
MARE	23.344.376,73	3.358.499,41	3.481.047,41	3.706.364,29
PALAKKA	9.846.836,29	3.915.194,36	3.962.388,54	4.046.351,35
PATIMPENG	18.901.486,20	3.687.891,21	3.807.327,44	4.025.723,60
PONRE	24.112.568,90	3.781.276,09	3.888.268,73	4.082.841,88
SALOMEKKO	7.721.676,37	4.206.766,33	4.291.534,79	4.444.010,41
SIBULUE	23.431.929,07	4.399.990,73	4.524.490,13	4.750.900,53
TANETERIATTANG	6.148.656,64	2.301.516,53	2.394.967,33	2.567.729,14
TANETERIATTANG BARAT	5.038.787,84	2.165.369,71	2.298.244,49	2.550.694,95
TANETERIATTANG TIMUR	8.054.893,04	2.305.467,24	2.389.591,26	2.544.261,73
TELLULIMPOE	21.800.505,37	4.052.917,18	4.101.771,49	4.188.687,81
TELLUSIATTINGE	14.671.658,77	5.578.573,75	5.600.921,58	5.640.245,85
TONRA	10.386.982,89	2.240.579,27	2.322.335,59	2.472.652,82
ULAWENG	8.055.478,17	4.309.204,84	4.326.467,58	4.356.843,88
Grand Total	452.932.299,16	117.122.878,25	119.245.270,99	123.093.156,02

Sumber: Analisis Data, 2018

Grafik 2.5  
Proyeksi Penyediaan Air di Kabupaten Bone



Sumber: Analisis Data, 2018

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Bone sebesar 4.102.115.460,42 Kkal/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 2.001.658.782,36 Kkal/Tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 2.100.456.678,06 Kkal/Tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan

kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Bontocani (202.075.581,41 Kkal/Tahun) diikuti dengan Kecamatan Mare (188.719.506,90 Kkal/Tahun), Kecamatan Tellulimpoe (184.378.387,37 Kkal/Tahun) dan Kecamatan Ponre (184.920.228,44 Kkal/Tahun).

Tabel 2.9  
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kab.Bone

KECAMATAN	KETERSEDIAAN (kkal/tahun)	KEBUTUHAN (kkal/tahun)	SELISIH (kkal/tahun)
AJANGALE	115.863.621,80	72.465.672,12	43.397.949,68
AMALI	107.414.177,21	86.394.878,04	21.019.299,17
AWANGPONE	129.372.927,21	74.699.042,88	54.673.884,33
BAREBBO	119.952.695,37	74.889.056,04	45.063.639,33
BENGO	138.119.818,40	73.722.241,56	64.397.576,84
BONTOCANI	324.471.746,81	122.396.165,40	202.075.581,41
CENRANA	169.891.037,52	63.176.033,76	106.715.003,76
CINA	146.814.411,29	59.302.247,88	87.512.163,41
DUABOCCOE	113.974.345,60	52.809.335,88	61.165.009,72
KAHU	190.503.106,21	112.904.100,96	77.599.005,25
KAJUARA	140.430.749,67	81.289.348,56	59.141.401,11
LAMURU	153.492.250,86	73.636.305,96	79.855.944,90
LAPPARIAJA	102.694.255,36	61.522.250,88	41.172.004,48
LIBURENG	264.426.757,60	129.575.607,36	134.851.150,24
MARE	278.367.524,01	89.648.017,92	188.719.506,09
PALAKKA	105.884.451,85	65.184.062,28	40.700.389,57
PATIMPENG	179.226.284,61	74.742.010,68	104.484.273,93
PONRE	257.863.320,56	72.943.092,12	184.920.228,44
SALOMEKKO	101.115.500,34	69.491.345,52	31.624.154,82
SIBULUE	203.198.519,28	93.010.009,56	110.188.509,72
TANETERIATTANG	39.210.652,72	37.983.535,20	1.227.117,52
TANETERIATTANG BARAT	57.835.385,90	47.071.702,32	10.763.683,58
TANETERIATTANG TIMUR	58.247.235,04	41.994.818,04	16.252.417,00
TELLULIMPOE	261.651.678,89	77.273.291,52	184.378.387,37
TELLUSIATTINGE	136.449.541,35	86.151.393,84	50.298.147,51
TONRA	132.889.988,09	53.827.195,32	79.062.792,77
ULAWENG	72.753.476,85	53.556.020,76	19.197.456,09
Grand Total	4.102.115.460,42	2.001.658.782,36	2.100.456.678,06

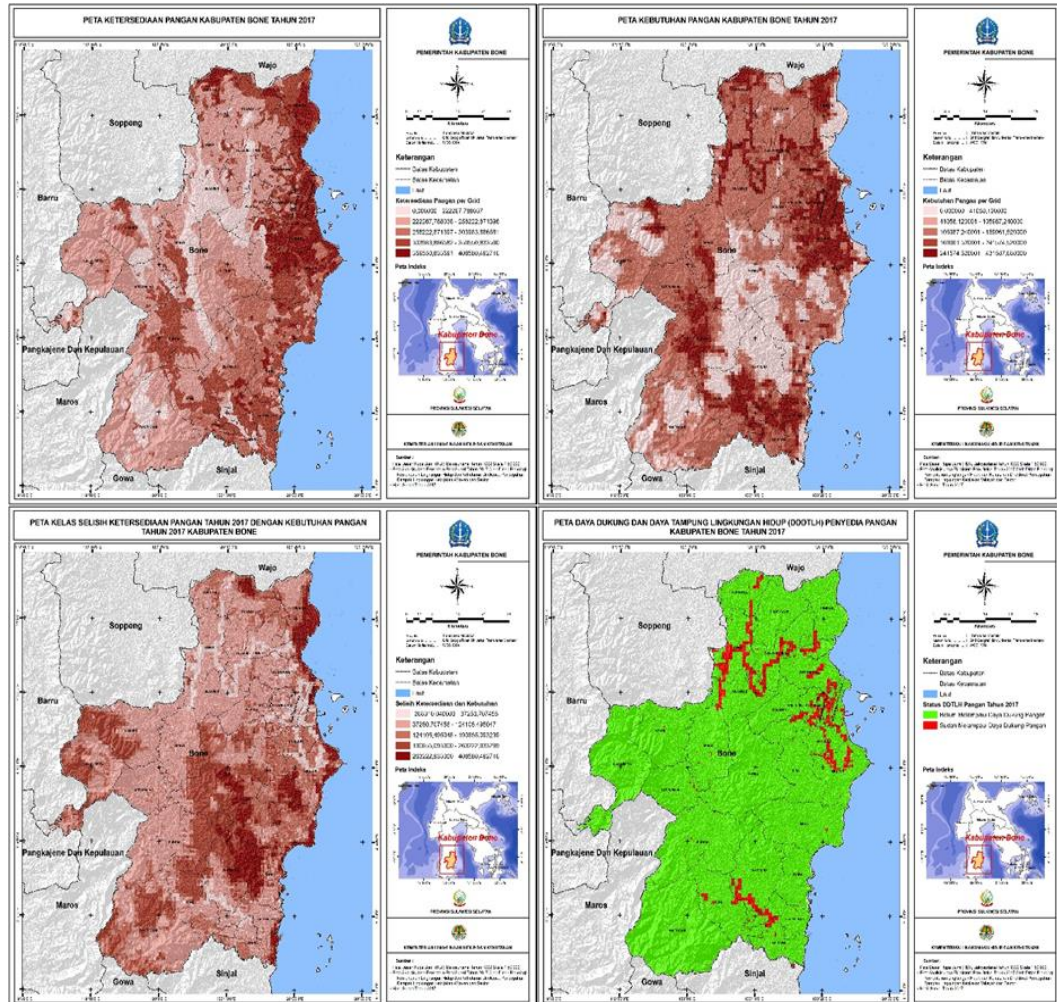
Sumber : Analisis Data, 2018

Hal ini menunjukkan bahwa daerah Bontocani, Mare Tellu Limpoe dan Ponre dalam pengembangannya tetap diarahkan sebagai sumber produksi pangan untuk Kabupaten Bone secara umum. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan terkecil terdapat pada Kecamatan Tanete Riattang (1.227.117,52 M<sup>3</sup>/Tahun). Untuk Kecamatan Tanete Riattang merupakan merupakan pusat perkotaan dimana jumlah penduduknya paling



besar sehingga kebutuhan pangan juga akan besar, sementara produksi pertaniannya paling kecil.

Gambar 2.3  
Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Bone



Sumber: Analisis Data, 2018

Adapun hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2019, 2023 dan 2030 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1-2%, dengan asumsi ketersediaan pangan tetap, meskipun pada daerah perkotaan cenderung melampaui ambang batas seperti pada Kecamatan Taneteriattang. Pada tahun 2019, 2023 dan 2030 kebutuhan pangan di Kabupaten Bone masing-masing 2.034.870.530,09 M3/Tahun, 2.118.227.064,24 M3/Thn, 2.365.351.840,00 M3/Thn. Adapun proyeksi



kebutuhan pangan di Kabupaten Bone untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

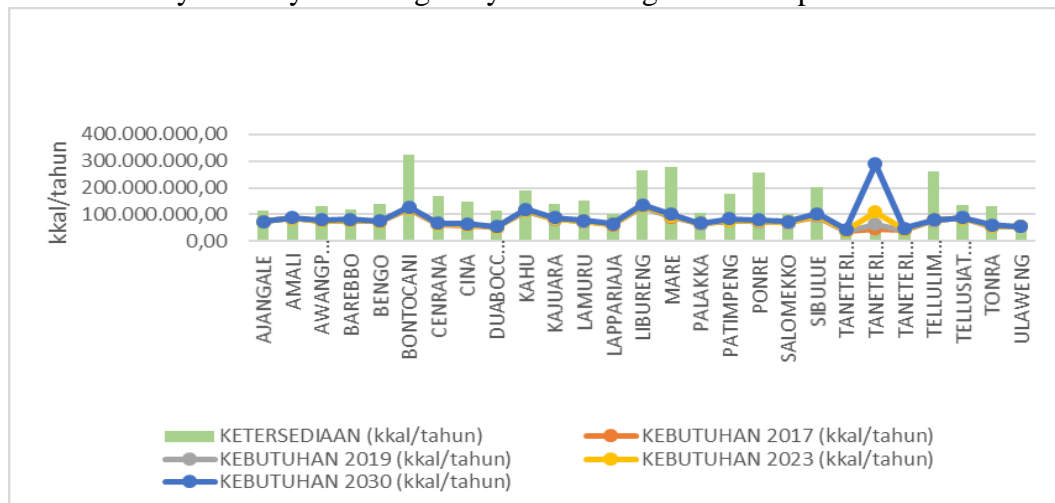
Tabel 2.10  
Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Pangan di Kab.Bone

KECAMATAN	KETERSEDIAAN (kkal/tahun)	KEBUTUHAN 2019 (kkal/tahun)	KEBUTUHAN 2023 (kkal/tahun)	KEBUTUHAN 2030 (kkal/tahun)
AJANGALE	115.863.621,80	72.610.675,93	72.901.554,59	73.409.968,00
AMALI	107.414.177,21	86.567.754,19	86.914.544,96	87.494.296,00
AWANGPONE	129.372.927,21	75.297.830,41	76.509.843,58	78.674.144,00
BAREBBO	119.952.695,37	75.790.420,72	77.625.827,13	80.944.152,00
BENGO	138.119.818,40	73.869.759,77	74.165.682,32	74.680.168,00
BONTOCANI	324.471.746,81	123.131.643,96	124.615.886,10	127.186.440,00
CENRANA	169.891.037,52	63.809.373,50	65.095.164,32	67.427.472,00
CINA	146.814.411,29	60.016.009,74	61.469.409,36	64.109.184,00
DUABOCCOE	113.974.345,60	52.915.007,36	53.126.985,09	53.478.632,00
KAHU	190.503.106,21	114.035.964,57	116.333.846,35	120.486.792,00
KAJUARA	140.430.749,67	82.431.382,62	84.763.809,45	89.011.528,00
LAMURU	153.492.250,86	74.226.574,59	75.421.344,55	77.595.496,00
LAPPARIAJA	102.694.255,36	62.015.413,24	63.013.629,23	64.832.760,00
LIBURENG	264.426.757,60	130.614.285,43	132.716.686,44	136.482.552,00
MARE	278.367.524,01	91.268.943,73	94.599.249,15	100.739.416,00
PALAKKA	105.884.451,85	65.575.753,31	66.366.210,53	67.746.920,00
PATIMPENG	179.226.284,61	75.942.666,34	78.402.149,49	82.898.216,00
PONRE	257.863.320,56	73.967.869,62	76.060.818,19	79.839.808,00
SALOMEKKO	101.115.500,34	70.187.996,26	71.602.319,52	74.175.592,00
SIBULUE	203.198.519,28	94.316.707,18	96.985.433,73	101.850.184,00
TANETERIATTANG	39.210.652,72	38.747.004,26	40.320.288,01	43.229.432,00
TANETERIATTANG BARAT	57.835.385,90	62.252.326,32	108.879.707,81	289.619.616,00
TANETERIATTANG TIMUR	58.247.235,04	42.754.126,34	44.314.178,35	47.182.528,00
TELLULIMPOE	261.651.678,89	77.737.626,73	78.674.684,48	80.297.664,00
TELLUSIATTINGE	136.449.541,35	86.323.782,78	86.669.596,20	87.254.272,00
TONRA	132.889.988,09	54.800.444,84	56.800.054,03	60.475.536,00
ULAWENG	72.753.476,85	53.663.186,36	53.878.161,30	54.229.072,00
Grand Total	4.102.115.460,42	2.034.870.530,09	2.118.227.064,24	2.365.351.840,00

Sumber: Analisis Data, 2018

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten menunjukkan bahwa terdapat 2 Kecamatan yang diperkirakan kebutuhannya pangannya sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya pada tahun 2023 dan 2030. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tanete Riattang dan Tanete Riattang Barat. Dimana ketersediaan pangannya masing-masing 39.210.652,72 Kkal/Tahun dan 57.835.385,90 Kkal/Tahun, sementara kebutuhan pangannya ditahun 2030 diperkirakan masing-masing 43.229.432,00 Kkal/Tahun dan 289.619.616,00 Kkal/Tahun. Besarnya kebutuhan pangan pada 2 kecamatan tersebut didorong oleh pertumbuhan penduduk pada 2 wilayah tersebut sebagai pusat kegiatan di Kabupaten Bone.

**Grafik 2.6**  
**Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Bone**



Sumber: Analisis Data 2018

#### 2.1.4. Demografi

Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan wilayah yang relatif luas. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 751.026 jiwa sedangkan luas wilayah Kabupaten Bone mencapai 4.559 Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2017 mencapai 165 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2.214 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 34 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena terkait dengan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain. Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, seringkali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Fenomena demografi yang menarik diungkap di Kabupaten Bone adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk karena kelahiran maupun karena migrasi. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari 734.119 jiwa menjadi 751.026 jiwa. Meskipun

demikian laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir masih relatif kecil, yaitu hanya bertambah 2,30 persen.

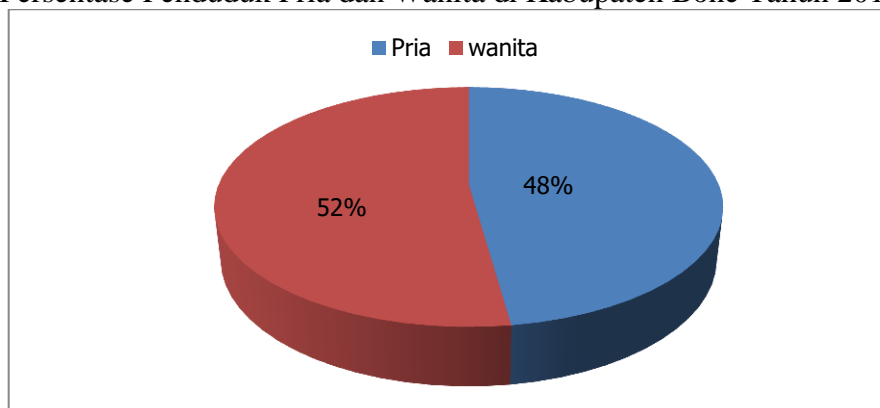
Tabel 2.11  
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bone, 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Sex Ratio
1	2013	734.119	0,60	161	
2	2014	738.515	0,60	162	91,11
3	2015	742.912	0,60	163	91,27
4	2016	746.973	0,55	164	91,39
5	2017	751.026	0,54	165	91,52

Sumber : BPS Kabupaten Bone, 2018.

Proporsi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bone lebih didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2017 lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 358.889 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 392.137 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin adalah 91,52 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 91 hingga 92 penduduk laki-laki. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan sebesar 0,54 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,62 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,48 persen. Proporsi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.7  
Persentase Penduduk Pria dan Wanita di Kabupaten Bone Tahun 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

Penduduk Kabupaten Bone tersebar di 27 kecamatan, dimana jumlah penduduk paling banyak berada di sembilan kecamatan yaitu Tanete Riattang dengan 52.677 jiwa, Tanete Riattang Barat sebanyak 49.143 jiwa, Tanete Riattang Timur 43.574 jiwa, Tellu Siattinge 40.135 jiwa, Kahu 38.947 jiwa, Kajuara 36.688 jiwa, Sibulue 34.418 jiwa, Dua Boccoe 30.242 jiwa, dan Libureng sebanyak 30.010 jiwa. Penduduk Kabupaten Bone yang menetap di kecamatan ini mencapai 47,38 persen atau akumulasinya mencapai 355.834 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah di Kabupaten Bone adalah Tonra, Ponre, Tellu Limpoe, Salomekko, Bontocani, Patimpeng, Amali, Palakka, dan Lappariaja. Total penduduk di sembilan kecamatan ini hanya 157.341 jiwa atau 20,95 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Bone.

Tabel 2.12  
Penduduk Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan, 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin					Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Laki-Laki	Persentase Perempuan	
1	Bontocani	7.858	7.911	15.769	49,83	50,17	99,33
2	Kahu	18.728	20.219	38.947	48,09	51,91	92,63
3	Kajuara	17.912	18.776	36.688	48,82	51,18	95,40
4	Salomekko	7.687	7.930	15.617	49,22	50,78	96,94
5	Tonra	6.672	7.093	13.765	48,47	51,53	94,06
6	Patimpeng	8.106	8.596	16.702	48,53	51,47	94,30
7	Libureng	15.108	14.902	30.010	50,34	49,66	101,38
8	Mare	13.110	13.846	26.956	48,63	51,37	94,68
9	Sibulue	16.248	18.170	34.418	47,21	52,79	89,42
10	Cina	12.744	13.843	26.587	47,93	52,07	92,06
11	Barebbo	12.944	14.799	27.743	46,66	53,34	87,47
12	Ponre	6.826	7.140	13.966	48,88	51,12	95,60
13	Lappariaja	11.420	12.491	23.911	47,76	52,24	91,43
14	Lamuru	11.669	13.390	25.059	46,57	53,43	87,15
15	Tellu Limpoe	7.086	7.057	14.143	50,10	49,90	100,41
16	Bengo	12.295	13.217	25.512	48,19	51,81	93,02
17	Ulaweng	11.563	13.199	24.762	46,70	53,30	87,61
18	Palakka	10.543	12.170	22.713	46,42	53,58	86,63
19	Awangpone	13.707	15.788	29.495	46,47	53,53	86,82
20	Tellu Siattinge	18.682	21.453	40.135	46,55	53,45	87,08

No	Kecamatan	Jenis Kelamin					Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Laki-Laki	Persentase Perempuan	
21	Amali	9.458	11.297	20.755	45,57	54,43	83,72
22	Ajangale	12.767	14.707	27.474	46,47	53,53	86,81
23	Dua Boccoe	13.963	16.279	30.242	46,17	53,83	85,77
24	Cenrana	11.536	12.727	24.263	47,55	52,45	90,64
25	TR Barat	23.643	25.500	49.143	48,11	51,89	92,72
26	Tanete Riattang	24.776	27.901	52.677	47,03	52,97	88,80
27	TR Timur	21.838	21.736	43.574	50,12	49,88	100,47
<b>Total</b>		<b>358.889</b>	<b>392.137</b>	<b>751.026</b>	<b>47,79</b>	<b>52,21</b>	<b>91,52</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bone Dalam Angka, 2018

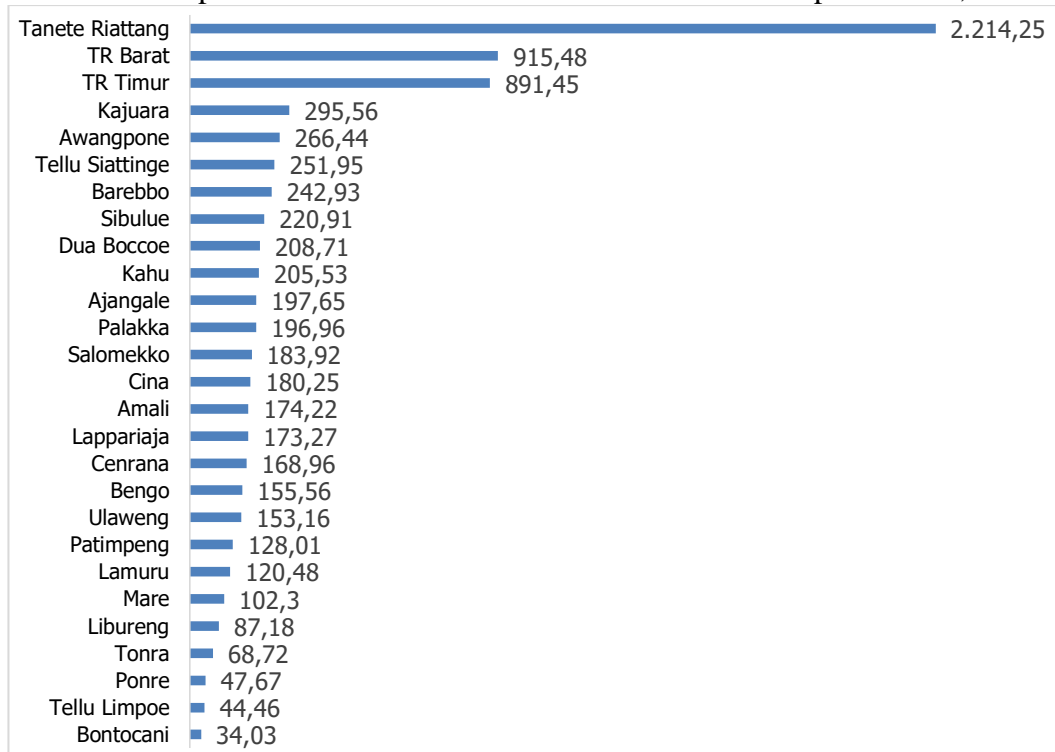
Proporsi penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, sehingga rasio jenis kelamin Kabupaten Bone tahun 2017 menunjukkan angka 91,52. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Jika  $SR > 100$  berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan,  $SR = 100$  berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan, dan  $SR < 100$  berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin yang berada dibawah 100 menunjukkan bahwa jumlah perempuan relatif lebih banyak daripada laki-laki. Hanya tiga kecamatan di Kabupaten Bone yang memiliki rasio jenis kelamin diatas 100 atau jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan yaitu Taneteriattang Timur, Tellu Limpoe, dan Libureng dengan masing-masing angka rasio jenis kelamin mencapai 100,47, 100,41, dan 101,38.

Banyaknya jumlah penduduk yang bermukim di Kecamatan Tanete Riattang, Taneteriattang Barat, dan Taneteriattang Timur dan wilayah yang relatif sempit, menyebabkan ketiganya menjadi wilayah terpadat di Kabupaten Bone.



Grafik 2.8

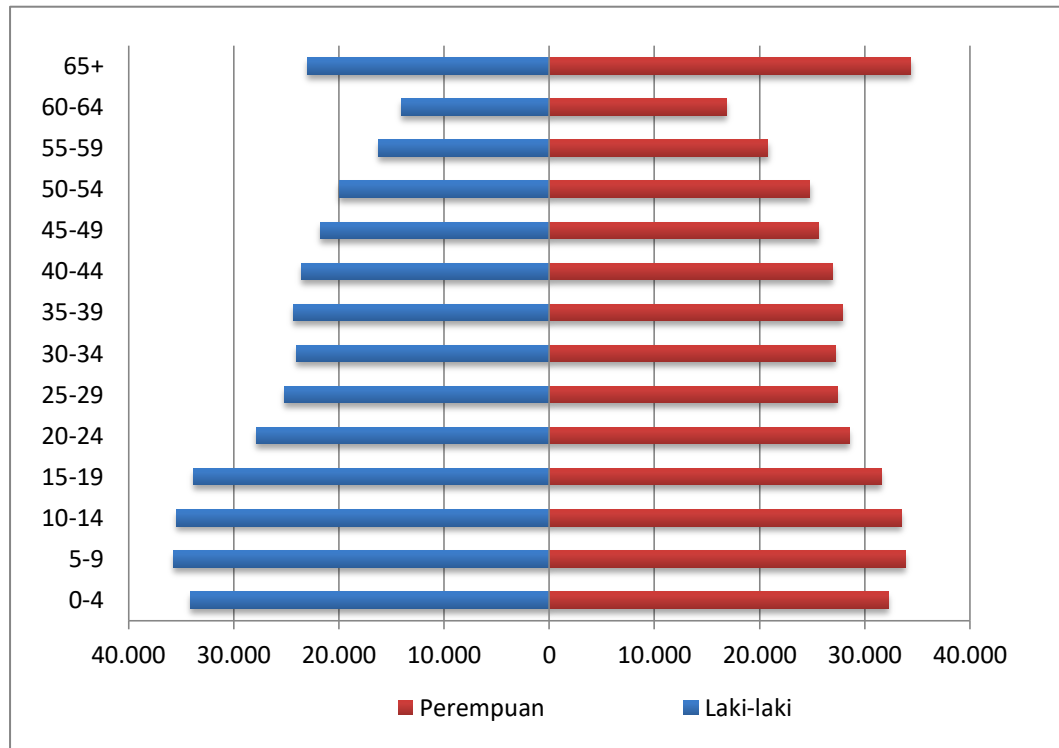
Distribusi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017



Sumber : BPS, Kabupaten Bone dalam Angka 2018

Setiap Km<sup>2</sup> wilayah di Kecamatan Tanete Riattang dihuni oleh 2.214,25 jiwa, sementara Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur masing-masing 915,48 jiwa dan 891,45 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kecamatan lain yang juga memiliki tingkat kepadatan diatas 200 jiwa per Km<sup>2</sup> adalah Kajuara, Awangpone, Tellu Siattinge, Barebbo, Sibulue, Dua Boccoe, dan Kahu. Masing-masing kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> sebanyak 295,56 jiwa, 266,44 jiwa, 251,95 jiwa, 242,93 jiwa, 220,91 jiwa, 208,71 jiwa, dan 205,53 jiwa. Sedangkan lima kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> dibawah 100 adalah Bontocani, Tellu Limpoe, Ponre, Tonra, dan Libureng. Di Kecamatan Bontocani, setiap Km<sup>2</sup> wilayahnya dihuni oleh 34,03 penduduk, sehingga menjadikanya wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah di Kabupaten Bone. Setelah Kecamatan Bontocani, Tellu Limpoe, Ponre, Tonra, dan Libureng hanya memiliki tingkat kepadatan sebanyak 44,46 jiwa, 47,67jiwa, 68,72jiwa, dan 87,18jiwa untuk setiap Km<sup>2</sup> dari luas wilayahnya.

Grafik 2.9  
Piramida penduduk Kabupaten Bone, 2017



Sumber : Data Diolah, BPS Kabupaten Bone dalam Angka, 2018

Selain memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, Kabupaten Bone juga sepertinya sudah mulai memasuki periode bonus demografi dilihat dari proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-44 tahun) sebesar 43,73 persen pada tahun 2017. Meski persentasenya masih dibawah 50 persen, namun diperkirakan kedepan Kabupaten Bone akan memasuki periode emas seperti yang dialami Indonesia saat ini, dimana penduduk usia produktif akan mendominasi piramida penduduk.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penduduk usia tidak produktif (usia pensiun dan anak-anak) jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan penduduk produktif. Penduduk berusia 0-14 tahun di Kabupaten Bone jumlahnya mencapai 204.900 jiwa atau 27,29 persen dari seluruh penduduk, sementara penduduk usia pensiun (usia 60 tahun ke atas) totalnya mencapai 88.282 jiwa atau 11,75 persen. Jika kelompok usia tidak produktif ini ditambahkan, maka proporsi penduduk berusia tidak produktif mencapai 39,04 persen.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun), atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). Terdapat dua perhitungan PDRB yakni berdasarkan atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pasar pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB Kabupaten Bone menurut Harga Konstan tahun 2010, mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017). Pada tahun 2013, PDRB Harga konstan Kabupaten Bone sebesar Rp. 13,53 Trillium meningkat menjadi Rp. 18,97 Trillium pada tahun 2017, atau meningkat rata-rata Rp. 1,36 trillium setiap tahunnya. PDRB Harga Konstan Kabupaten Bone yang meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.13  
Nilai PDRB Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Rp. Juta)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.200.476	7.025.787	7.654.002	8.454.418	9.161.587
2	Pertambangan dan Penggalan	352.962	403.602	458.872	507.048	563.003
3	Industri Pengolahan	968.557	1.047.185	1.123.606	1.225.643	1.315.917
4	Pengadaan Listrik, Gas	16.805	20.563	19.798	22.591	23.893
5	Pengadaan Air	7.045	7.051	7.084	7.411	7.787
6	Konstruksi	1.408.360	1.435.943	1.550.585	1.661.701	1.809.377

No	Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Rp. Juta)				
		2013	2014	2015	2016	2017
7	Real Estate	482.653	519.066	557.384	571.167	598.212
8	Perdagangan Besar dan Eceran, d Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.732.887	1.883.107	2.000.488	2.213.676	2.449.477
9	Transportasi dan Pergudangan	343.470	374.856	401.171	413.906	442.960
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79.753	85.155	88.617	94.562	105.612
11	Informasi dan Komunikasi	294.900	303.913	335.636	372.027	410.727
12	Jasa Keuangan	406.323	429.133	462.260	522.869	550.048
13	Jasa Perusahaan	9.396	9.999	10.656	11.416	12.328
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	684.238	697.328	762.835	754.192	793.690
15	Jasa Pendidikan	357.224	375.489	399.960	429.187	470.396
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.161	153.465	165.214	177.883	194.117
17	Jasa lainnya	46.641	49.735	53.704	58.484	64.923
	PDRB	13.531.849	14.821.376	16.051.871	17.498.179	18.974.053

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

Tabel 2.14  
Nilai PDRB Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku

NO	Sektor	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.947.853	9.815.107	11.470.718	12.970.861	14.518.220
2	Pertambangan dan Penggalan	489.674	664.942	866.106	985.688	1.066.132
3	Industri Pengolahan	1.169.670	1.379.734	1.615.162	1.791.531	2.017.319
4	Pengadaan Listrik, Gas	15.956	18.229	17.416	20.108	23.815
5	Pengadaan Air	7.611	7.869	8.095	8.730	9.321
6	Konstruksi	1.710.143	1.899.379	2.235.912	2.558.767	2.878.691
7	Real Estate	652.781	752.424	885.068	979.273	1.055.711
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.990.764	2.212.186	2.555.956	3.045.777	3.489.725
9	Transportasi dan Pergudangan	390.051	473.861	589.663	608.304	648.179
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94.699	108.691	118.090	129.814	148.551
11	Informasi dan Komunikasi	281.333	297.932	324.985	382.903	432.319
12	Jasa Keuangan	539.079	612.707	698.817	811.429	895.770
13	Jasa Perusahaan	11.714	12.901	14.583	15.945	17.935
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	818.425	909.189	1.100.997	1.127.273	1.218.453
15	Jasa Pendidikan	415.795	466.511	520.234	558.995	639.952
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.354	170.728	199.311	220.701	249.088
17	Jasa lainnya	55.306	64.555	75.005	84.939	96.214
	PDRB	16.734.207	19.866.945	23.296.118	26.301.035	29.405.396

Sumber: BPS Kabupaten Bone , 2018

Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, jenis barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat terus mengalami perubahan. Selain itu

elastisitas permintaan barang dan jasa terhadap perubahan pendapatan masyarakat juga berbeda-beda. Perubahan permintaan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap berbagai barang dan jasa serta perbedaan elastisitas permintaan dari berbagai barang dan jasa berimplikasi terhadap peningkatan jumlah produksi dan harga barang dan jasa setiap sektor juga berbeda-beda. Perubahan tersebut selanjutnya mempengaruhi kontribusi sektoral terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Perubahan kontribusi sektoral terhadap PDRB inilah yang sering disebut sebagai pergeseran struktur perekonomian. Uraian tersebut mengisyaratkan bahwa perubahan permintaan masyarakat serta perbedaan elastisitas permintaan berbagai barang dan jasa merupakan dua alasan utama terjadinya pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah. Karena itu pergeseran struktur perekonomian daerah adalah sebuah keniscayaan bagi daerah-daerah yang perekonomiannya sedang mengalami perkembangan. Secara umum arah pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah akan bergerak dari dominasi sektor pertanian menuju dominasi sektor industri dalam struktur perekonomiannya, kemudian berlanjut pergeserannya ke arah dominasi sektor jasa ketika kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi atau mapan.

Analisis pergeseran struktur ekonomi daerah, yang tercermin dari pergeseran kontribusi sektoral terhadap PDRB daerah, setidaknya dapat menjelaskan dua hal yang utama, yakni (1) struktur ekonomi menggambarkan sektor-sektor apa saja yang ada di dalam wilayah yang menjadi penopang utama perekonomian, gambaran ini sekaligus menjelaskan ciri perekonomian daerah, apakah berciri agraris, industri atau jasa; (2) analisis struktural dan pergeserannya juga memberikan informasi mengenai sektor-sektor apa saja yang kontribusi terhadap PDRB memiliki trend peningkatan, dan sektor apa saja yang memiliki kontribusi terhadap PDRB cenderung menurun atau tetap. Dengan analisis ini arah perkembangan perekonomian dapat diprediksi.

Struktur perekonomian atau kontribusi sektoral Kabupaten Bone dihitung dengan membagi PDRB per sektor dengan total PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan struktur perekonomian daerah ini terlihat bahwa



perekonomian Kabupaten Bone selama periode 2013-2017 masih bertumpu pada dominasi sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bone pada tahun 2017 mencapai 47,49 persen. Kemudian sektor penyumbang terbesar kedua dalam PDRB daerah ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, dengan kontribusi sekitar 11,87 persen, selanjutnya disusul oleh sektor konstruksi dengan kontribusi sekitar 9,79 persen dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi sekitar 6,86 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.15  
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bone  
Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku

N O	Sektor	Struktur PDRB Menurut Harga Berlaku				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,49	49,40	49,24	49,32	49,37
2	Pertambangan dan Penggalan	2,93	3,35	3,72	3,75	3,63
3	Industri Pengolahan	6,99	6,94	6,93	6,81	6,86
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,10	0,09	0,07	0,08	0,08
5	Pengadaan Air	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	10,22	9,56	9,60	9,73	9,79
7	Real Estate	3,90	3,79	3,80	3,72	3,59
8	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,90	11,14	10,97	11,58	11,87
9	Transportasi dan Pergudangan	2,33	2,39	2,53	2,31	2,20
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,55	0,51	0,49	0,51
11	Informasi dan Komunikasi	1,68	1,50	1,40	1,46	1,47
12	Jasa Keuangan	3,22	3,08	3,00	3,09	3,05
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,89	4,58	4,73	4,29	4,14
15	Jasa Pendidikan	2,48	2,35	2,23	2,13	2,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	0,86	0,86	0,84	0,85
17	Jasa lainnya	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

Berdasarkan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir (2013-2017), terlihat bahwa terdapat dua sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah mengalami peningkatan yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalan, kedua sektor ini sering juga diklasifikasikan sebagai sektor primer. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB meningkat 1,88

poin atau meningkat dari 47,49 persen tahun 2013 menjadi 49,37 persen tahun 2017. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian meningkat 0,70 poin dalam periode yang sama atau meningkat dari 2,93 persen tahun 2013 menjadi 3,63 persen tahun 2017. Sementara kontribusi sektor-sektor lainnya terhadap PDRB semuanya mengalami penurunan. Sebagai sektor sekunder, kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan yakni dari 6,99 persen tahun 2013 turun menjadi 6,86 persen tahun 2017.

Demikian pula sektor-sektor tersier atau sektor jasa semuanya mengalami penurunan dalam memberikan andil terhadap PDRB daerah. Sektor tersier (jasa) yang mengalami penurunan paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB daerah ditempati oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan penurunan kontribusi sekitar 0,75 poin dalam kurun waktu 2013-2017, atau menurun kontribusi dari 4,89 persen tahun 2013 menurun menjadi 4,14 persen tahun 2017. Selain itu kontribusi Sektor konstruksi juga mengalami penurunan yang signifikan yakni sekitar 0,43 poin selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2013 sektor konstruksi berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bone sekitar 10,22 persen menurun menjadi 9,79 persen tahun 2017.

Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bone yang disertai dengan kontribusi yang cenderung meningkat mengisyaratkan bahwa sektor pertanian di daerah ini masih menjadi sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pergeseran struktural Kabupaten Bone seperti yang diuraikan sebelumnya sesungguhnya menunjukkan pola pergeseran struktural yang tidak lazim seperti halnya pola pergeseran ekonomi di daerah lainya, dimana lazimnya, pergeseran struktural umumnya dicirikan oleh merosotnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB sementara sektor sekunder dan tersier cenderung meningkat kontribusinya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain.

Selama kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode tersebut perekonomian daerah tumbuh rata-rata 8,31 persen pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang hanya tumbuh sebesar 7,4 persen per tahun dalam periode yang sama. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kabupaten Bone, maka terdapat enam (6) sektor ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah ini, masing masing adalah sektor pertambangan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 12,06 persen pertahun, kemudian diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (10,41 persen), sektor informasi dan komunikasi (9,20 persen), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (9,05 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,85 persen) dan sektor jasa keuangan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,47 persen.

Tabel 2.16

Pertumbuhan PDRB atas Dasar harga Konstan Tahun 2013- 2017 Kabupaten Bone

No	Sektor	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata2
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,16	13,31	8,94	10,46	8,36	9,05
2	Pertambangan dan Penggalan	10,74	14,35	13,69	10,50	11,04	12,06
3	Industri Pengolahan	7,13	8,12	7,30	9,08	7,37	7,80
4	Pengadaan Listrik, Gas	1,30	22,37	(3,72)	14,11	5,77	7,97
5	Pengadaan Air	4,79	0,08	0,47	4,61	5,08	3,01
6	Konstruksi	9,88	1,96	7,98	7,17	8,89	7,18
7	Real Estate	5,52	7,54	7,38	2,47	4,73	5,53
8	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,06	8,67	6,23	10,66	10,65	8,85
9	Transportasi dan Pergudangan	7,53	9,14	7,02	3,17	7,02	6,78

No	Sektor	Pertumbuhan PDRB (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	Rata2
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,38	6,77	4,07	6,71	11,69	7,92
11	Informasi dan Komunikasi	11,28	3,06	10,44	10,84	10,40	9,20
12	Jasa Keuangan	10,70	5,61	7,72	13,11	5,20	8,47
13	Jasa Perusahaan	7,60	6,42	6,57	7,13	7,99	7,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,50	1,91	9,39	(1,13)	5,24	3,58
15	Jasa Pendidikan	9,65	5,11	6,52	7,31	9,60	7,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,10	9,49	7,66	7,67	9,13	10,41
17	Jasa lainnya	6,46	6,63	7,98	8,90	11,01	8,20
	PDRB	6,30	9,53	8,30	9,01	8,43	8,31

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

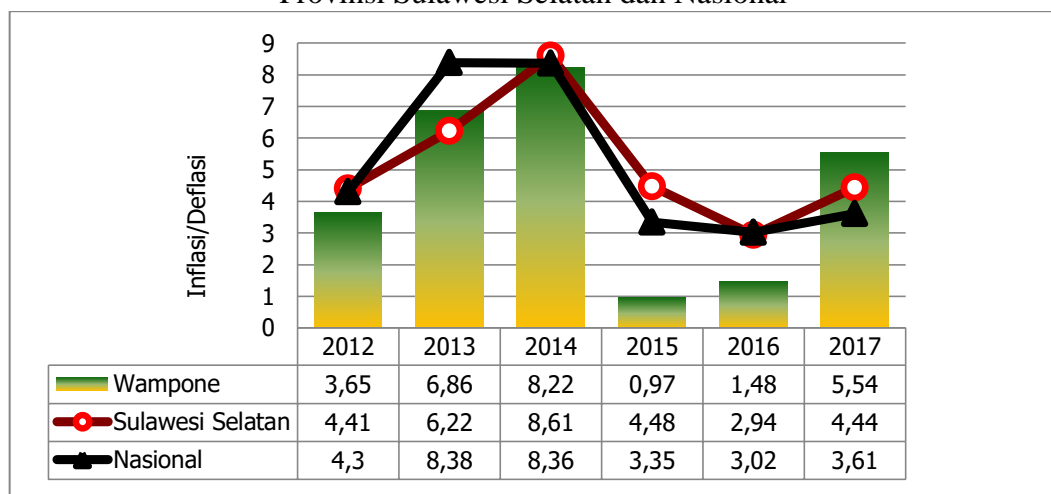
Karena kontribusinya yang cukup besar dalam pembentukan PDRB, maka sektor yang memberikan andil paling besar dalam menciptakan pertumbuhan di daerah ini masing masing ditempati oleh sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone sebesar 8,47 persen per tahun, sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan andil sekitar 4,47 persen dalam rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah ini, kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil sekitar 1,05 persen dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone, sementara andil sektor lainnya berada dibawah angka 1 persen.

### 2.2.2. Laju Inflasi

Inflasi merepresentasikan keadaan perekonomian dimana terdapat kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat harga-harga secara umum. Dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang cukup tinggi akan berdampak buruk bagi perekonomian. Tingginya inflasi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. selain itu inflasi juga menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan barang impor, dengan demikian barang domestik lebih sulit bersaing dengan barang impor. Merujuk pada data inflasi di Kota Watampone, memperlihatkan bahwa tren inflasi tahun ke tahun (yoy) Kabupaten Bone cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 inflasi daerah ini

hanya sekitar 3,65 persen, meningkat hingga mencapai puncaknya menjadi 8,22 persen pada tahun 2014, kemudian menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 0,97 persen dan pada tahun 2017 inflasi di daerah ini mencapai 5,54 persen. Selama periode tahun 2014-2016, inflasi tahunan Kota Watampone berada di bawah inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun pada tahun 2017 justru terjadi sebaliknya.

Grafik 2.10  
Perkembangan inflasi rata-rata Tahun 2013-2017 Kabupaten Bone,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: BPS, *Inflasi Sulawesi Selatan*, 2017

Pada tahun 2017 Kabupaten Bone telah mengalami inflasi bulanan sebanyak 9 (sembilan) kali dan deflasi sebanyak 3 (tiga) kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 1,83 persen, sedangkan deflasi tertinggi berada pada bulan Oktober sebesar 0,51 persen. Adapun yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kabupaten Bone sepanjang tahun 2017 adalah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil sebesar 2,20 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran sandang menjadi kelompok pengeluaran dengan andil terkecil, yaitu sebesar 0,12 persen.

### 2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu tolak ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya, karena



itu PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan mengukur besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bone atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di daerah ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita di daerah ini sebesar Rp. 22,79 juta per tahun meningkat menjadi Rp. 39,15 juta per tahun pada tahun 2017. Jika PDRB perkapita tahun 2017 dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun diperoleh nilai PDRB perkapita per bulan sebesar Rp. 3,26 juta per kapita per bulan, yang berarti setiap penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2017 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 3,26 juta per bulan.

Tabel 2.17  
PDRB Perkapita Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

Uraian	PDRB Per Kapita Kabupaten Bone				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai PDRB (HB : Rp juta)	16.734.207	19.866.945	23.296.118	26.301.035	29.405.396
Jumlah Penduduk (jiwa)	734.119	738.515	742.912	746.973	751.026
PDRB perkapita (HB: Rp Juta/ jiwa)	22,79	26,90	31,36	35,21	39,15

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

#### 2.2.4. Indeks Gini

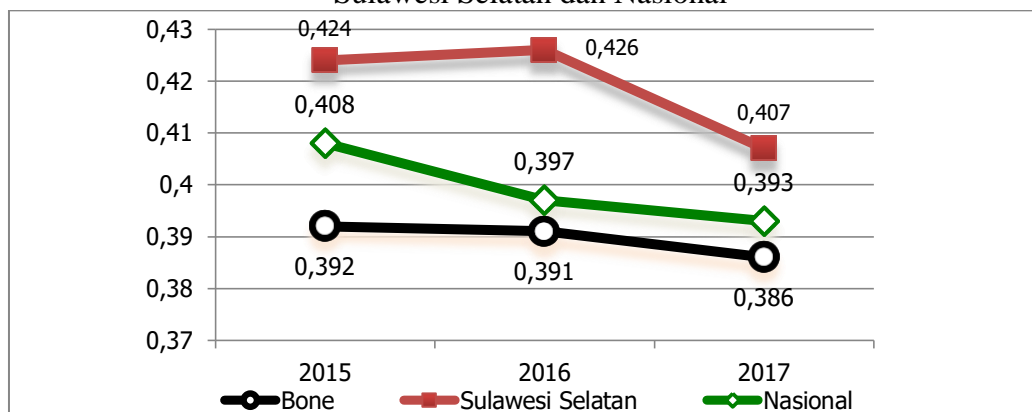
Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini didasarkan pengukuran luas Kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk

semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Todaro 1994 memberikan kriteria ketimpangan berdasarkan nilai Gini rasio sebagai berikut:

- Gini Rasio  $< 0,35$  : Kategori ketimpangan “rendah”;
- Gini Rasio  $0,35 - 0,5$  : Kategori ketimpangan “moderat”
- Gini Rasio  $> 0,5$  : Kategori ketimpangan “tinggi”

Nilai Gini rasio Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2017 memiliki nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan nilai Gini rasio Sulawesi Selatan dan nasional. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bone relatif lebih merata dibandingkan distribusi pendapatan rata-rata masyarakat Sulawesi Selatan dan nasional.

Grafik 2.11  
Perkembangan Nilai Gini Ratio Tahun 2015-2017 Kabupaten Bone,  
Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2017

Selanjutnya, nilai Gini Rasio Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2017 juga menunjukkan kecenderungan yang semakin kecil. Pada tahun 2015 nilai Gini Rasio Kabupaten Bone sebesar 0,392 menurun menjadi 0,386 pada tahun 2017, yang berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini semakin membaik. Meskipun ada kecenderungan distribusi pendapatan daerah ini semakin baik, namun berdasarkan nilai Gini Rasio yang dicapai ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini masuk dalam kategori “moderat”.

#### **2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia digunakan untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan versi Bank Dunia, pendapatan penduduk dikategorikan ke dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu (a) kelompok 40 persen berpendapatan terendah, (b) 40 persen berpendapatan menengah, dan (c) 20 persen berpendapatan tertinggi. Tingkat ketimpangan diukur dengan melihat besaran bagian pendapatan yang dapat dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Ketimpangan rendah : 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
- b. Ketimpangan sedang (moderat) : 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12 – 17 persen jumlah pendapatan
- c. Ketimpangan tinggi : 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan.

Berdasarkan kriteria ketimpangan versi Bank Dunia, kelompok yang menjadi fokus penggolongan ketimpangan adalah kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menikmati lebih dari sama dengan 17 persen dari total pendapatan yang ada. Tabel berikut menunjukkan persentase pendapatan menurut kelompok penghasilan penduduk versi Bank Dunia

#### **2.2.6. Indeks Ketimpangan Williamson**

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan wilayah adalah indeks Williamson. Perhitungan indeks Williamson Kabupaten Bone didasarkan pada data PDRB per kapita dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Semakin indeks Williamson mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakin

mendekati angka 1, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar.

#### **2.2.7. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

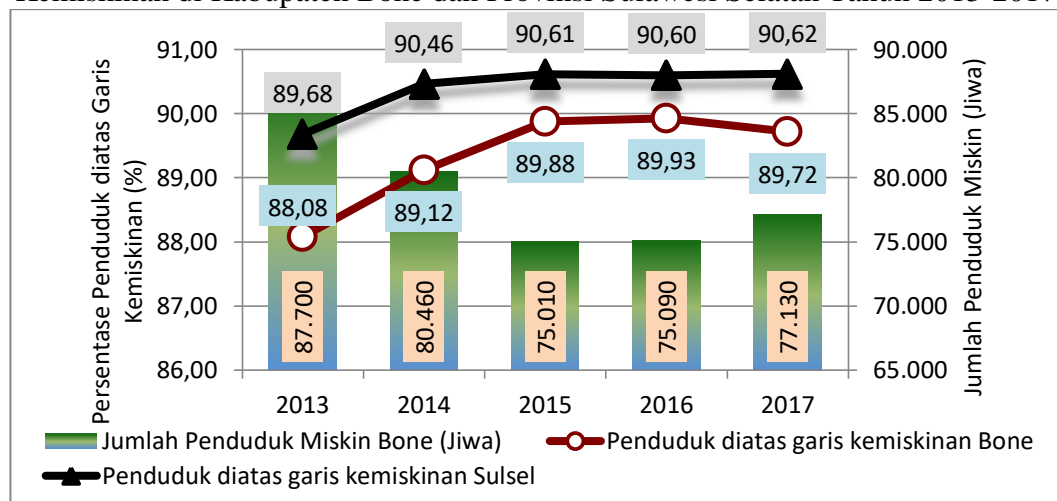
Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan data jumlah dan prosentase penduduk miskin yang dirilis BPS, menunjukkan bahwa jumlah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone selama periode 2013-2017 memiliki kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di daerah ini berjumlah 87.700 jiwa menurun menjadi 77.130 jiwa pada tahun 2017, yang berarti dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat pengurangan jumlah penduduk miskin sekitar 10.570 jiwa. Data tingkat kemiskinan yang diukur dari Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan juga kecenderungannya menurun. Pada tahun 2013 prosentase penduduk miskin di daerah ini mencapai 11,92 persen, menurun menjadi 10,28 persen tahun 2017. Meskipun ada penurunan jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir, namun dari tingkat prosentase penduduk miskin di Kabupaten Bone masih tinggi, karena lebih tinggi dari tingkat kemiskinan rata-rata daerah di Sulawesi Selatan. Selama periode 2013-2017 Kabupaten Bone selalu menjadi kontributor terbesar dalam jumlah penduduk miskin di

Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 Kabupaten Bone berkontribusi sekitar 9,49 persen dari total kemiskinan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data tingkat kemiskinan yang selanjutnya dikonversi ke angka persentase penduduk diatas garis kemiskinan dengan menggunakan formula:  $100 - \text{tingkat kemiskinan}$ , maka diperoleh persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

Grafik 2.12

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2018

### 2.2.8. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

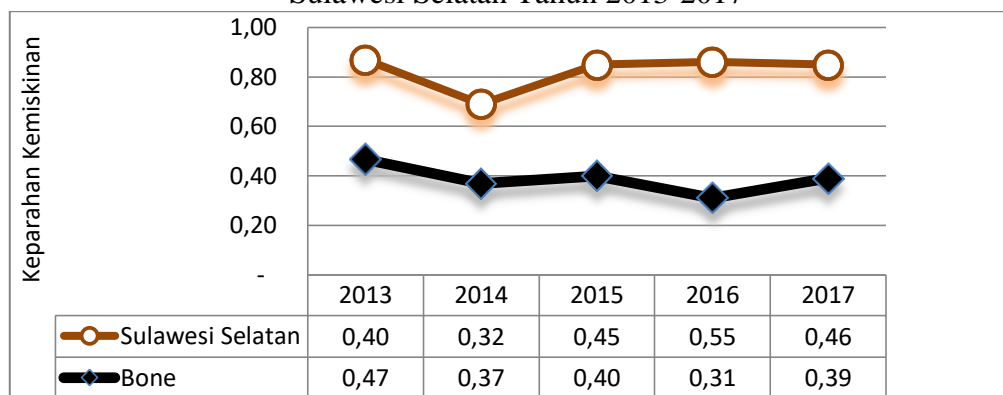
Rasio kesenjangan kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk. indikator ini sering pula disebut sebagai ndeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan data rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone, terlihat bahwa dalam periode 2013-2015, nilai kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan indek serupa di Sulawesi Selatan, akan tetapi dalam dua tahun terakhir kondisi sebaliknya terjadi dimana rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone lebih rendah dibandingkan nilai



indikator serupa di Sulawesi Selatan. Berdasarkan perkembangan nilai indeks kesenjangan kemiskinan selama periode 2013-2017, terlihat bahwa nilai indeks kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone cenderung menurun, sedangkan di Sulawesi Selatan cenderung meningkat. Gambaran perkembangan rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan periode tahun 2013-2017 tersaji pada gambar berikut.

Grafik 2.13

Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2018

### 2.2.9. Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari

Indikator Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari, merupakan salah satu indikator pencapaian tujuan 1 MDGS yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Indikator ini dimaksudkan untuk memonitor kemajuan upaya pengetasan kemiskinan setiap negara termasuk Indonesia, dan untuk memonitor tren kemiskinan pada tingkat global. Untuk Indonesia sendiri indikator ini sudah tercapai dengan acuan dasar 20,60% penduduk yang hidup di bawah pendapatan \$1 (PPP)/hari tahun 1990, menjadi hanya 5,90% penduduk pada tahun 2008. Berarti Indonesia sudah berhasil mengurangi kemiskinan ekstrim dalam 20 tahun terakhir.

Dalam pengukuran tingkat kemiskinan daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten Kota di Indonesia, BPS tidak melakukan pendataan dengan tolok ukur proporsi penduduk dengan pendapatan kurang

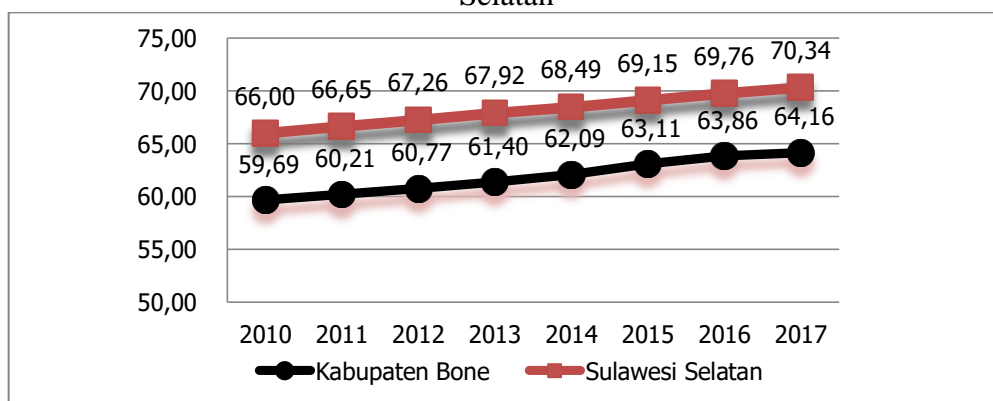
dari US\$ 1,00, tetapi tolok ukur yang dipakai adalah garis kemiskinan (*poverty line*) per kapita-perhari, sehingga data penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tidak tersedia (*n.a.=not available*). Akan tetapi pada tingkat nasional, BPS pusat menerbitkan data proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional (1,90 USD Per Hari). Indikator ini juga digunakan oleh Bank Dunia sebagai standar garis kemiskinan internasional yakni *Purchasing Power Parity* (PPP) atau paritas daya beli sebesar 1,9 dolar (PPP).

#### 2.2.10. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui atau menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatu Negara atau daerah. IPM memiliki 3 (tiga) aspek utama, antara lain : Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta daya beli riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone meski mengalami peningkatan namun capaian skor IPM masih tertinggal dari skor IPM Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 Nilai IPM Kabupaten Bone hanya sebesar 64,16, sementara Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,34.

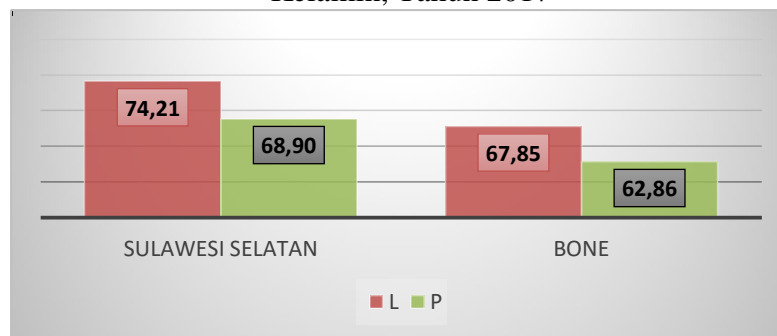
Grafik 2.14  
Perkembangan nilai IPM Tahun 2010-2017 Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan



Sumber: BPS IPM Kabupaten Kota di Indonesia, 2018

Berdasarkan jenis kelamin, IPM Laki-laki Kabupaten Bone masih lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan perbedaan 4,99. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, IPM Laki-laki Kabupaten Bone lebih rendah 6,36 dan perempuan 6,04.

Grafik 2.15  
Nilai IPM Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017



Sumber : BPS, 2018

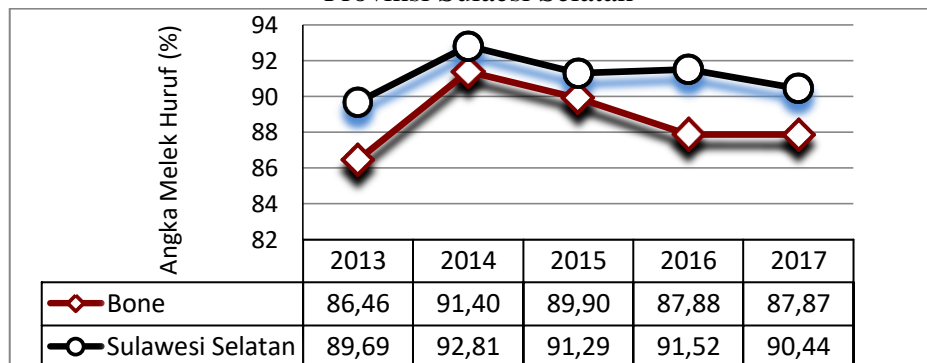
#### 2.2.11. Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan, karena itu, Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan terwujudnya sistem pendidikan yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

Kemampuan membaca penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Bone tampaknya masih tertinggal dari rata-rata kemampuan membaca penduduk di daerah lainnya di Sulawesi Selatan, hal ini tercermin dari capaian angka melek huruf Kabupaten Bone selama periode 2013-2017 masih dibawah rata-

rata angka melek huruf penduduk di Sulawesi Selatan. Berdasarkan statistik kependidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 tercatat penduduk Kabupaten Bone yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 87,87 persen, yang berarti pemerintah Kabupaten Bone masih mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 12,13 persen. Selengkapnya perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan, tahun 2013-2017 terlihat pada gambar berikut.

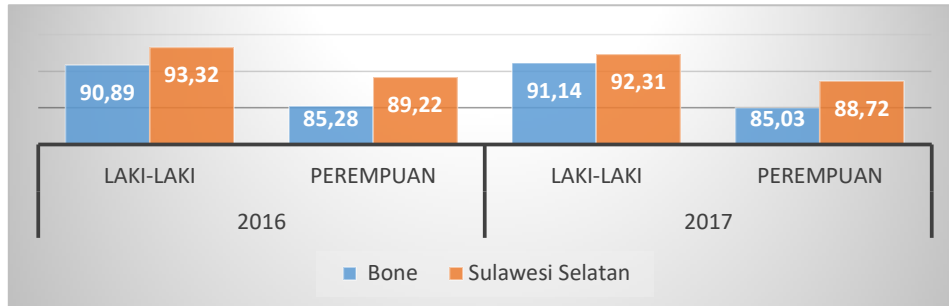
Grafik 2.16  
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013-2017 Kabupaten Bone dan Provinsi Sulaesi Selatan



*Sumber : BPS, Kabupaten Bone dalam Angka 2014-2015, Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017*

Berdasarkan jenis kelamin, Angka Melek Huruf laki-laki di Kabupaten Bone baik pada tahun 2016 maupun 2017, masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing 5,61 dan 6,11 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Angka Melek Huruf laki-laki di Kabupaten Bone lebih rendah 2,43 persen dan perempuan 3,94 persen pada tahun 2016. Demikian juga pada tahun 2017 laki-laki lebih rendah 1,17 persen dan perempuan 3,69 persen.

Grafik 2.17  
Angka Melek Huruf Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut  
Jenis Kelamin Tahun 2017



*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, BPS tahun 2016 dan 2017*

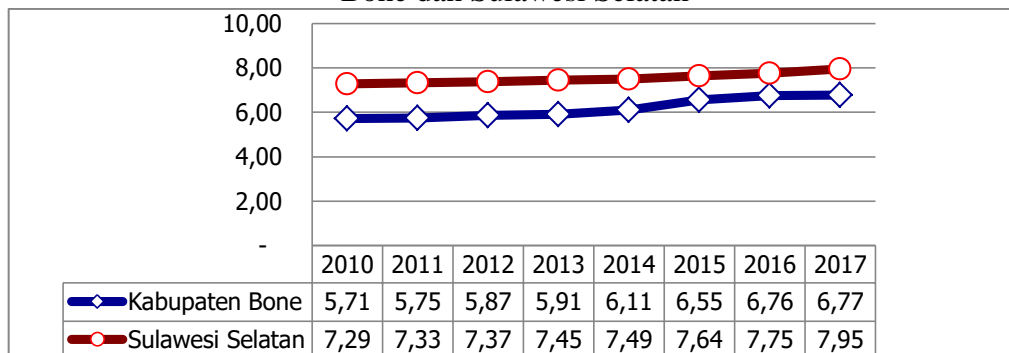
#### 2.2.12. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bone menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk di daerah ini sebesar 5,71 tahun kemudian meningkat menjadi 6,77 tahun, ini berarti bahwa saat ini penduduk Kabupaten Bone memiliki pendidikan formal setara dengan duduk dibangku kelas satu SMP. Dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata yang pada tahun 2017 mencapai 7,95 tahun, menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bone relatif tertinggal dengan capaian pendidikan penduduk Sulawesi Selatan pada umumnya.



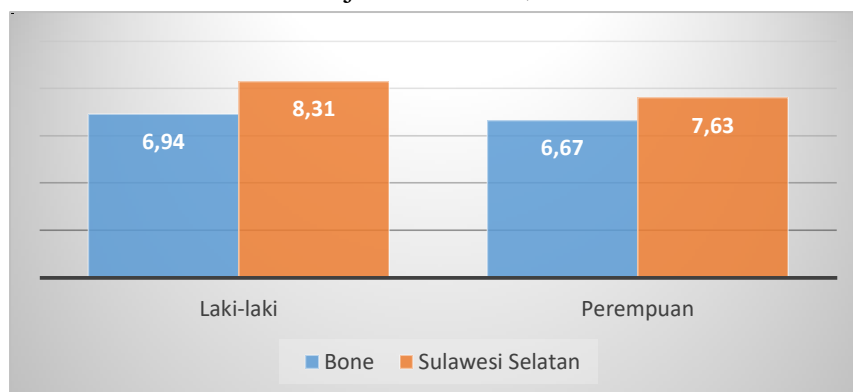
**Grafik 2.18**  
Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2017 Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

Berdasarkan jenis kelamin, seperti halnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Rata-rata Lama Sekolah perempuan di Kabupaten Bone masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dimana pada tahun 2017, perempuan berada di 6,67 tahun sedangkan laki-laki 6,94 tahun.

**Grafik 2.19**  
Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut jenis Kelamin, tahun 2017

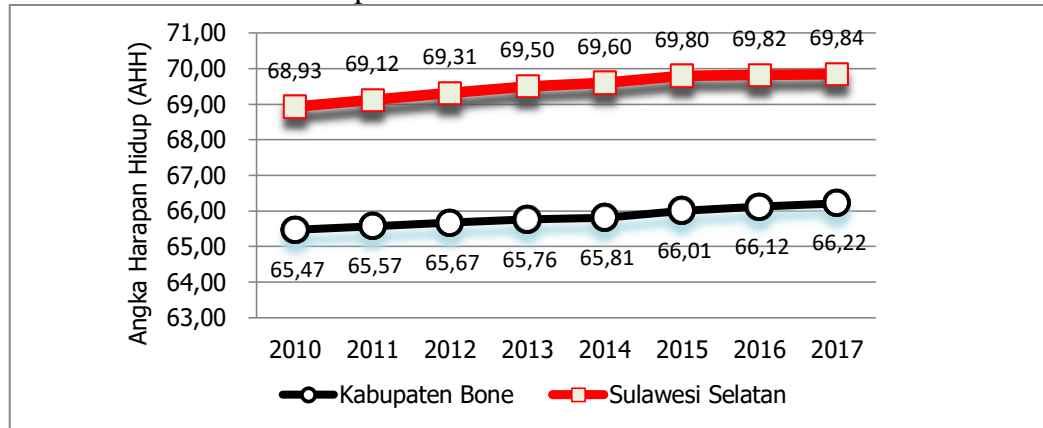


Sumber : BPS, 2018

### 2.2.13. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi capaian angka harapan hidup penduduk disuatu wilayah, maka derjat kesehatan penduduk di daerah tersebut juga tinggi.

Grafik 2.20  
Perkembangan Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2010-2017  
Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan

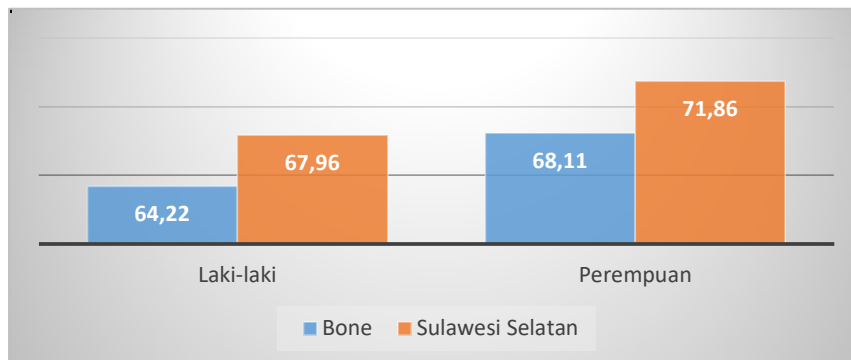


Sumber: BPS Kabupaten Bone

Perkembangan AHH penduduk di Kabupaten Bone menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 AHH penduduk di daerah ini sebesar 65,47 tahun kemudian meningkat menjadi 62,22 tahun, yang berarti derajat kesehatan penduduk di daerah ini terus membaik. AHH pada tahun 2017 sebesar 62,22 tahun diartikan bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 62,22 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian angka harapan hidup penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata yang pada tahun 2017 mencapai 69,87 tahun, menunjukkan bahwa peluang untuk bern hidup penduduk di Kabupaten Bone relatif lebih pendek dibandingkan dengan penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017 AHH laki-laki di Kabupaten Bone lebih rendah dibandingkan perempuan, yaitu 64,22 tahun bagi laki-laki dan 68,11 tahun bagi perempuan. Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, namun AHHnya masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bone baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Grafik 2.21  
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut  
Jenis Kelamin, Tahun 2017

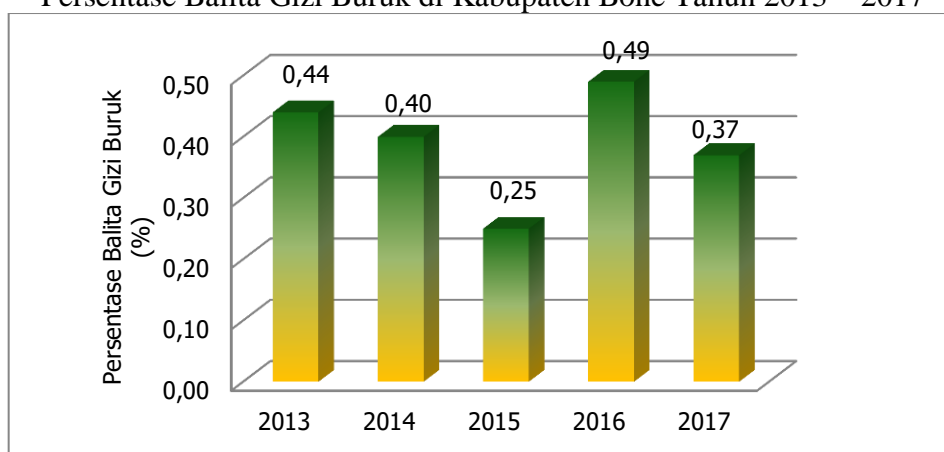


Sumber : BPS, 2018

#### 2.2.14. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di suatu wilayah. Porsi Balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Bone cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 porsi balita pada usia yang sama mengalami gizi buruk sebesar 0,44 persen, kemudian menurun menjadi 0,37 persen tahun 2017.

Grafik 2.22  
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017

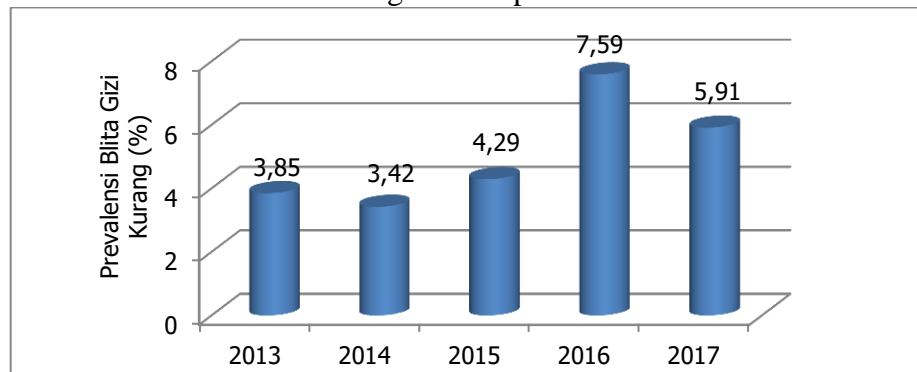


Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

#### 2.2.15. Persentase Balita Gizi Kurang

Kurang gizi berarti tubuh dalam kondisi kekurangan nutrisi penting yang diperlukan, baik makanan-makanan sumber kalori, vitamin ataupun mineral. Apabila hal ini terus dibiarkan maka status gizi bisa jatuh menjadi gizi buruk yang dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan pada fungsi vital tubuh. Berdasarkan data diatas dari tahun 2013 – 2017 balita yang mengalami gizi kurang tertinggi pada tahun 2016 dengan 7,59 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 5,91 persen. Hal ini menandakan balita gizi kurang di Kabupaten Bone masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang.

Grafik 2.23  
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



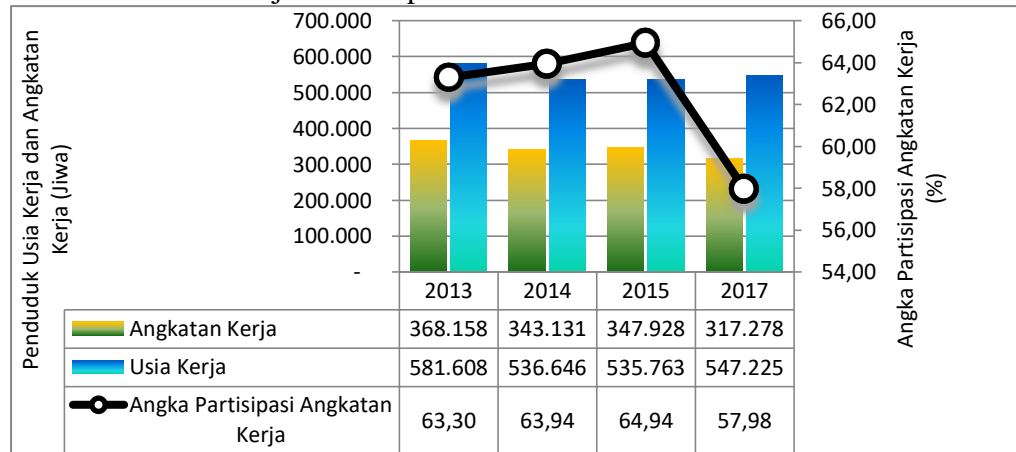
Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

#### 2.2.16. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan penduduk usia 15 tahun keatas yang tergolong angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun keatas yang tergolong dalam usia kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun keatas yang baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab serta mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja menurut kegiatan utamanya dibagi menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Grafik 2.24

Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



Sumber: BPS, Bone dalam Angka Tahun 2013-2018

Berdasarkan data Sakernas tahun 2017 penduduk usia kerja di Kabupaten Bone mencapai 547.225 jiwa, dimana sekitar 57,98 persen diantaranya merupakan penduduk 15 tahun keatas yang digolongkan sebagai golongan angkatan kerja.

### 2.2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

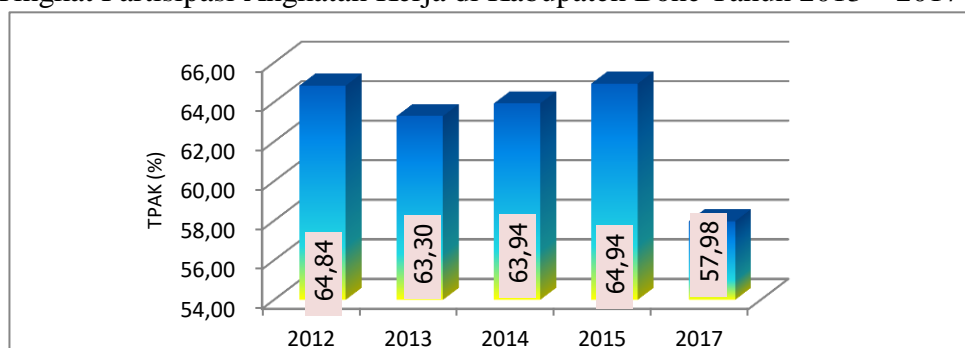
Ukuran yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam golongan angkatan kerja. Dengan demikian semakin banyak pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk dapat meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan data ketenaga kerjaan Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah ini mengalami penurunan. Pada Tahun 2013, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bone mencapai hampir 64,84 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 65 orang termasuk dalam golongan angkatan kerja. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah ini menurun menjadi 57,98 persen.



Gambaran tersebut menjelaskan bahwa ada kecenderungan penurunan dari jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja, penyebabnya diantaranya adalah terbatasnya kesempatan kerja, atau kecenderungan minngkatnya penduduk yang lebih memilih masuk golongan bukan angkatan kerja, seperti melanjutkan sekolah atau mengurus rumah tangga. Gambaran terhadap perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, tersaji pada gambar berikut.

Grafik 2.25  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017

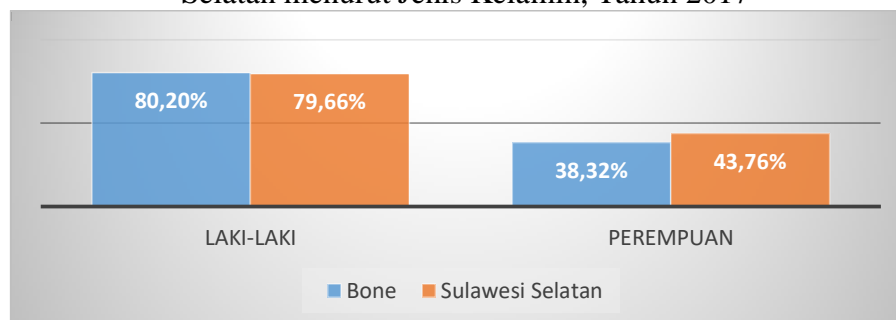


*Sumber: BPS, Bone dalam Angka Tahun 2013-2018*

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017, TPAK laki-laki di Kabupaten Bone jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dari TPAK 57,98 persen, laki-laki mencapai 80,2 persen dan perempuan hanya 38,73 persen.

Dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, TPAK laki-laki di Kabupaten Bone lebih tinggi sedikit sedangkan perempuan lebih rendah.

Grafik 2.6  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017



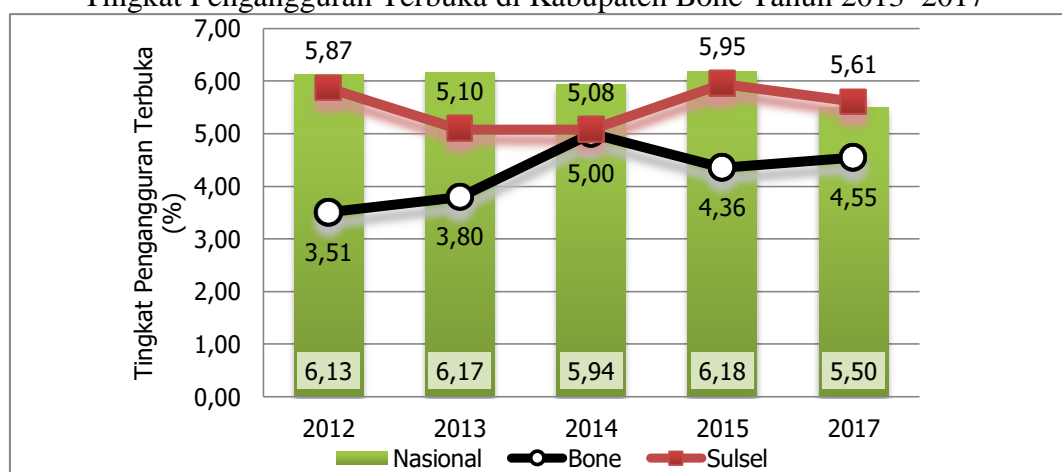
*Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2018*

### 2.2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka akan menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat dan stabilnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat akan tinggi.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, terlihat bahwa tingkat Pengangguran Terbuka di daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran yang dicapai daerah Sulawesi Selatan. Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka di daerah ini dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung meningkat. Pada Tahun 2013, tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bone sebesar 3,51 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 3,51 persen orang termasuk dalam golongan angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat Pengangguran Terbuka di daerah ini meningkat menjadi 4,55 persen. Gambaran tentang perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, tersaji pada gambar berikut.

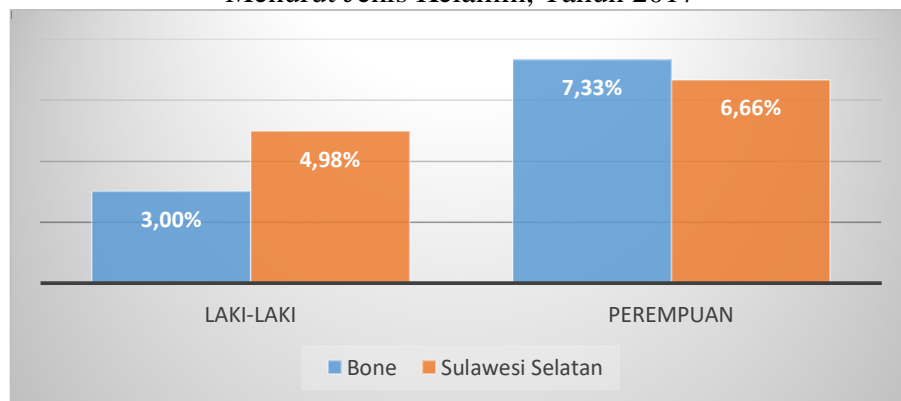
Grafik 2.27  
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



Sumber: BPS, Bone dalam Angka Tahun 2013-2018

Berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan di Kabupaten Bone lebih tinggi dibandingkan laki-laki, masing-masing 7.33 persen dan 3.00 persen. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, TPT laki-laki di Kabupaten Bone masih lebih rendah, tetapi perempuan tetap lebih tinggi

Grafik 2.28  
Tingkat Partisipasi Terbuka di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017

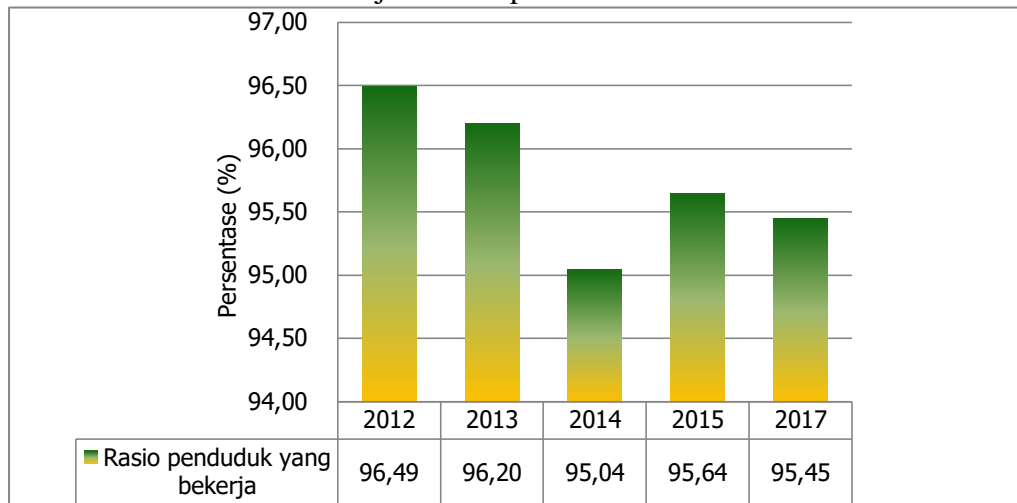


Sumber : Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.2.19. Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja. Rasio penduduk bekerja yang diukur dari perbandingan penduduk bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Bone memperlihatkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 rasio penduduk bekerja di daerah ini mencapai 96,49 persen menurun menjadi 95,45 persen pada tahun 2017. Menurunnya rasio penduduk bekerja di daerah ini dalam lima tahun terakhir mengisyaratkan semakin sempitnya kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini untuk memberikan penghidupan yang layak bagi penduduknya.

**Grafik 2.29**  
**Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2017**

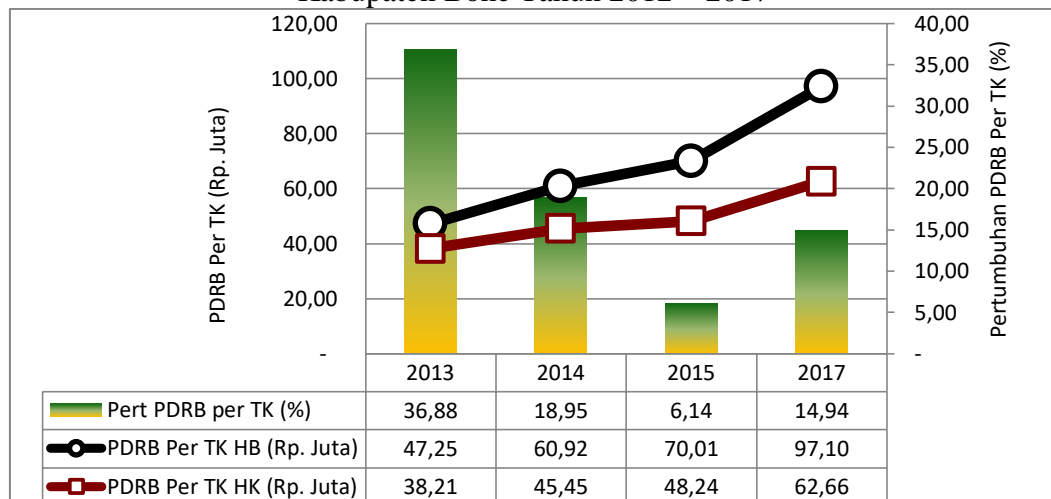


*Sumber: BPS, Bone dalam Angka Tahun 2013-2018*

#### **2.2.20. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja**

PDRB per tenaga kerja merupakan indikator yang merepresentasikan produktivitas tenaga kerja, PDRB per tenaga kerja yang diukur dari rasio antara PDRB harga berlaku dengan jumlah penduduk bekerja merupakan besarnya nilai tambah berdasarkan harga berlaku yang diciptakan oleh setiap penduduk bekerja selama satu tahun. Indikator ini sekaligus menggambarkan besar pendapatan yang diterima setiap satu penduduk bekerja sesuai harga berlaku pada tahun analisa. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Grafik 2.30  
PDRB Per Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja  
Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2017



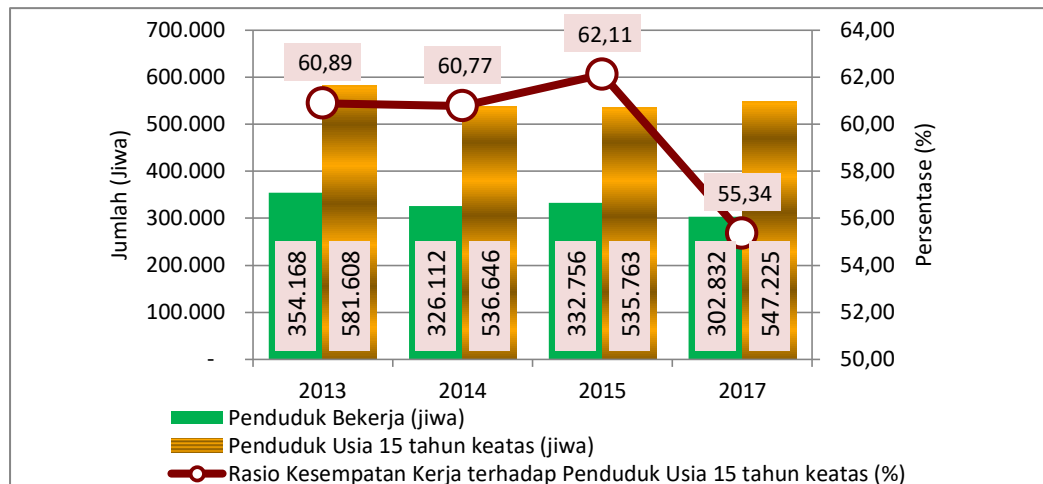
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Bone dan Bone dalam Angka Tahun 2013-2018

#### 2.2.21. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, merupakan Persentase penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun keatas. Semakin tinggi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, berarti semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia disuatu daerah.

Berdasarkan data ketenaga kerjaan Kabupaten Bone, selama kurun waktu 2013-2017, baik penduduk bekerja, maupun penduduk usia kerja 15 tahun keatas keduanya menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia di daerah ini berjumlah 581.608 jiwa menurun menjadi 547.225 jiwa pada tahun 2017. Kecenderungan serupa juga terjadi untuk penduduk bekerja, bahkan kecenderungan penurunannya lebih tajam dibandingkan penurunan penduduk usia kerja. Pada tahun 2013 penduduk bekerja yang ada di daerah ini sebanyak 354.168 jiwa, menurun menjadi 302.832 jiwa pada tahun 2017.

Grafik 2.31  
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2017



Sumber: BPS, Bone dalam Angka Tahun 2013-2018

Kecenderungan penurunan jumlah penduduk bekerja yang lebih tajam dibandingkan penurunan jumlah penduduk usia kerja, berimplikasi terhadap menurunnya rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun keatas. Pada tahun 2013 rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 60,89 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia, sebanyak 61 orang merupakan penduduk bekerja. Selanjutnya pada tahun 2017 rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas menurun menjadi 55,34 persen yang berarti hanya 55 orang penduduk di Kabupaten Bone yang bekerja untuk memproduksi barang dan jasa, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia. Uraian tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini mengalami penyempitan, karena itu sejumlah kebijakan diperlukan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja.

#### **2.2.22. Proporsi TK yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja**

Indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, diukur dengan membandingkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas



yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator bertujuan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal. Pengertian proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, sebagai indikator pekerja informal sedikit berbeda dengan dengan definisi pekerja informal yang dijelaskan dalam Kepmen Ketenagakerjaan RI No. 206 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, bahwa Penduduk yang bekerja secara Informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non - pertanian dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Perkembangan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Bone baik berstatus berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja, serta perkembangan proporsi penduduk bekerja sebagai tenaga kerja formal dan informal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18

Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Terhadap Total Kesempatan Kerja di Kabupaten Bone Tahun 2014-2017

No	Status Pekerjaan	Proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan		
		2014	2015	2017
<b>A</b>	Tenaga Kerja Formal	24,82	23,28	31,21
<b>1</b>	Buruh/Karyawan	21,47	20,43	28,99
<b>2</b>	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,35	2,85	2,22
<b>B</b>	Tenaga Kerja Informal	75,18	76,72	68,79
<b>1</b>	Berusaha Sendiri (BS)	19,59	15,99	19,59
<b>2</b>	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	24,79	25,99	31,34
<b>3</b>	Pekerja bebas (PB)	9,14	6,25	4,21
<b>4</b>	Pekerja keluarga/tidak dibayar (PK)	21,66	28,48	13,65
<b>C</b>	Total Penduduk Bekerja	100,00	100,00	100,00
<b>D</b>	<b>Berusaha Sendiri + Pek Bebas + Pek Keluarga</b>	<b>50,39</b>	<b>50,73</b>	<b>37,45</b>

Sumber : Keadaan angkatan kerja Sulawesi Selatan, 2014-2017

Berdasarkan pada Tabel yang telah disajikan terlihat bahwa proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Bone dengan status berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja selama kurun waktu 2014-2017 mengalami

penurunan. Pada tahun 2014, proporsi tersebut sebesar 50,39 persen menurun menjadi 37,45 persen. Secara keseluruhan, proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja sebagai tenaga kerja informal juga mengalami penurunan, yakni sekitar 75,18 persen tahun 2014 menurun menjadi 68,79 persen tahun 2017. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa proporsi pekerja formal di daerah ini relatif kecil yakni hanya 32,21 persen dari total Kesempatan Kerja di Kabupaten Bone pada 2017.

#### **2.2.23. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**

Indikator keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I merupakan tolok ukur kemiskinan yang dikembangkan oleh BKKBN. Berbeda dengan indikator kemiskinan yang digunakan BPS yaitu kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Tahapan keluarga sejahtera didasarkan pada faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga, yang terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I. Adapun pengertian dari tahapan keluarga sejahtera yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1. Keluarga Pra Sejahtera** yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan .
- 2. Keluarga Sejahtera Tahap I** yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*sociopsychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein

hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

- 3. Keluarga Sejahtera Tahap II** yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (development needs) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi dari media.
- 4. Keluarga Sejahtera Tahap III** yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan social kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan social, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
- 5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus** yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, social psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan data perkembangan jumlah keluarga menurut tahapan keluarga Sejahtera di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2010-2016, menunjukkan bahwa jumlah keluarga pra-sejahtera (KPS) dan Keluarga sejahtera I (KS-I) mengalami peningkatan yakni KPS meningkat dari 12.260 keluarga tahun 2010 menjadi 12.459 keluarga tahun 2016, atau meningkat sekitar 0,27 persen per tahun. Dalam periode yang sama KS-I juga mengalami peningkatan dari 42.002 keluarga tahun 2010 menjadi 42.275 keluarga pada tahun 2016, atau meningkat 0,11 persen per tahun.

Meskipun jumlah keluarga yang berkategori miskin (KPS dan KS-I) mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2016, namun jumlah keluarga yang berkategori tidak miskin juga mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan total keluarga yang lebih tinggi dari pertumbuhan keluarga KPS dan KS-I, dalam periode yang sama. Selama kurun waktu 2010-2016 total keluarga di Kabupaten Bone tumbuh sekitar 1,67 persen per tahun, atau meningkat dari 179.336 keluarga tahun 2010 menjadi 196.729 keluarga tahun 2016. Selama periode tersebut, tercatat tahapan keluarga di Kabupaten Bone yang mengalami pertumbuhan paling tinggi ditempati oleh tahapan keluarga KS-III plus dengan pertumbuhan sekitar 3,55 persen per tahun, kemudian disusul tahapan keluarga KS-II dengan pertumbuhan 2,93 persen per tahun.

Selanjutnya berdasarkan data proporsi jumlah keluarga menurut tahapan keluarga terhadap total keluarga di Kabupaten Bone sepanjang tahun 2010-2016, menunjukkan bahwa tahapan keluarga yang dominan di Kabupaten Bone adalah keluarga sejahtera II (KS-II) dengan proporsi sekitar 43,18 persen tahun 2016, kemudian disusul keluarga sejahtera III (KS-III) dengan proporsi sekitar 23,58 persen pada tahun yang sama. Gambaran mengenai proporsi keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Bone sekaligus mengisyaratkan bahwa porsi keluarga yang berkategori miskin (KPS dan KS-I) di daerah ini masih cukup besar. proporsi keluarga yang berkategori miskin terhadap total keluarga di Kabupaten mencapai 30,26 persen tahun 2010, dengan rincian KPS sekitar 6,84 persen dan KS-I sebesar 23,42 persen, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 27,82 persen tahun 2016, dengan rincian KPS sekitar 6,33 persen dan KS-I sebesar 21,49 persen. Selengkapnya gambaran mengenai proporsi keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2010-2016 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.19  
Perkembangan Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera dan Rasionya Terhadap Total Keluarga, di Kabupaten Bone Tahun 2010-2016

No.	Tahapan Keluarga	Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera dan Rasionya Terhadap Total Keluarga						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A</b>	Jumlah Keluarga (Keluarga)							
1	Pra Sejahtera	12.260	12.093	11.480	11.562	12.459	12.459	12.459
2	KS-I	42.002	43.339	43.451	41.433	42.275	42.275	42.275
3	KS-II	72.234	74.875	75.684	83.029	84.952	84.952	84.952
4	KS-III	44.058	44.917	45.743	44.457	46.390	46.390	46.390
5	KS-III Plus	8.782	9.141	9.630	9.685	10.653	10.653	10.653
6	Total Keluarga	179.336	184.365	185.988	190.166	196.729	196.729	196.729
<b>B</b>	Rasio Terhadap Total Keluarga (%)							
1	Pra Sejahtera	6,84	6,56	6,17	6,08	6,33	6,33	6,33
2	KS-I	23,42	23,51	23,36	21,79	21,49	21,49	21,49
3	KS-II	40,28	40,61	40,69	43,66	43,18	43,18	43,18
4	KS-III	24,57	24,36	24,59	23,38	23,58	23,58	23,58
5	KS-III Plus	4,90	4,96	5,18	5,09	5,42	5,42	5,42
6	Total Keluarga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Bone Dalam Angka 2014-2017

#### 2.2.24. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004, dikembangkan 14 unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Adapun ke 14 unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;



13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Nilai indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Bone yang telah dikonversi ke nilai skor indeks 25-100, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 skor IKM sebesar 75,66 yang berarti masuk dalam kategori mutu pelayanan B atau dengan kinerja unit pelayanan tergolong baik, namun pada tahun 2016 skor IKM menurun menjadi 55,03 atau dengan kinerja pelayanan berkategori kurang baik, akan tetapi pada tahun 2017 kinerja pelayanan di daerah ini kembali berkategori baik. Selengkapnya skor konversi IKM dan kategori mutu dan kinerja unit pelayanan di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.20  
Skor IKM dan Kategori Mutu dan Kinerja Unit Pelayanan di Kabupaten Bone  
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Indek Kepuasan Masyarakat				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Skor Konversi IKM	Na	75.66	76,00	58,22	78.00
2	Mutu Pelayanan	Na	A-	A-	B	A-
3	Kinerja Unit Pelayanan	Na	Baik	Baik	Kurang Baik	Baik

Sumber: Data Diolah, 2018

#### **2.2.25. Persentase PAD terhadap Pendapatan**

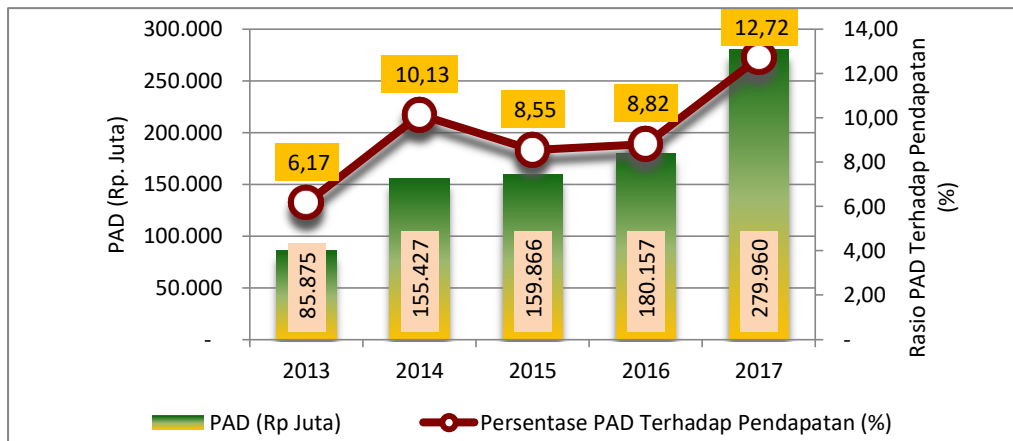
Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil

ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah.

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Dengan kata lain persentase PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan indikator derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan perkembangan data keuangan daerah Kabupaten Bone selama periode 2013-2017, memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 pendapatan Kabupaten Bone yang bersumber PAD sebesar Rp. 85,88 Miliar meningkat menjadi Rp. 279,96 Miliar pada tahun 2017, yang berarti selama periode 2013-2017 penerimaan PAD Kabupaten Bone tumbuh sekitar 23,61 persen per tahun. Nilai pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan total pendapatan daerah yang hanya tumbuh sekitar 10,71 persen per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi ini menyebabkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memiliki trend peningkatan.

Grafik 2.32  
 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone  
 Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPKAD Kabupaten Bone, 2018

Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bone selama periode 2013-2017 memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2013 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah ini sebesar 6,17 persen meningkat menjadi 12,72 persen pada tahun 2017. Kecenderungan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang terus meningkat, menunjukkan ketergantungan Kabupaten Bone terhadap transfer dana dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya) semakin kecil, yang berarti pula bahwa derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan.

#### 2.2.26. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini BPK yakni (1) Wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*); (2) Wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*); (3) Tidak

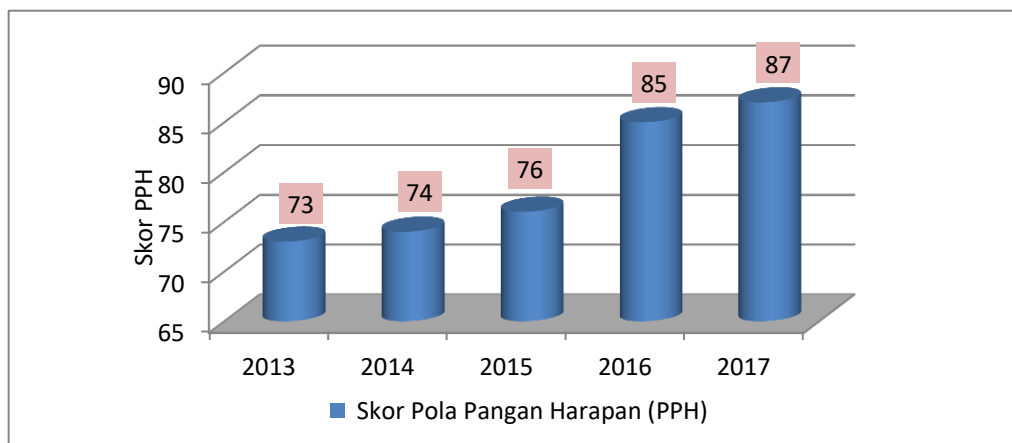
wajar (*Adversed Opinion*); (4) Tidak menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Bone dalam tiga tahun terakhir meporelh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP). Adapun jenis opini BPK yang diperoleh Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir adalah:

- Tahun 2013 : Opini Wajar dengan pengecualian (WDP)
- Tahun 2014 : Opini Wajar dengan pengecualian (WDP)
- Tahun 2015 : Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
- Tahun 2016 : Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
- Tahun 2017 : Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)

#### 2.2.27. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya.

Grafik 2.33  
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, 2018

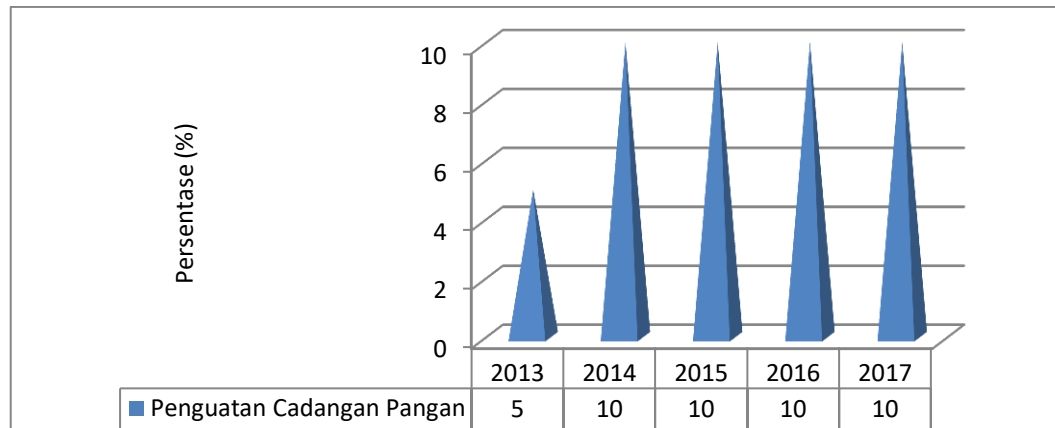
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017 terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 skor PPH di daerah ini sebesar 73 poin meningkat menjadi 87 pada tahun 2017 yang berarti kualitas pangan masyarakat semakin baik dalam artian baik dari jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangannya. Akan tetapi berdasarkan skor yang dicapai tahun 2017, skor PPH daerah ini belum mencapai pola pangan yang ideal (skor 100).

#### **2.2.28. Penguatan Cadangan Pangan**

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan pangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Dasar hukum penguatan cadangan pangan telah diamanatkan dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dimana disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan lumbung fisik, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Grafik 2.34  
Proporsi Jumlah Cadangan Pangan per 100 Ton dalam Persen Kabupaten Bone  
Tahun 2013 – 2017



*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, 2018*

Penguatan cadangan pangan diukur dari jumlah cadangan pangan kabupaten per 100 ton yang dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah cadangan pangan per 100 ton di Kabupaten Bone pada tahun 2013 sebesar 5 persen kemudian pada tahun 2014-2017 sebesar 10 persen, yang berarti selama kurun waktu 4 tahun terakhir pemerintah daerah Kabupaten Bone menyediakan cadan pangan sebesar 10 ton per tahun.

#### **2.2.29. Penanganan Daerah Rawan Pangan**

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Target penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Bone lebih diutamakan pada daerah rawan pangan kronis dan daerah rawan pangan Transien. Daerah rawan pangan kronis adalah daerah yang mengalami keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh ketersediaan SDA dan keterbatasan kemampuan SDM sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Sedangkan rawan pangan transien adalah



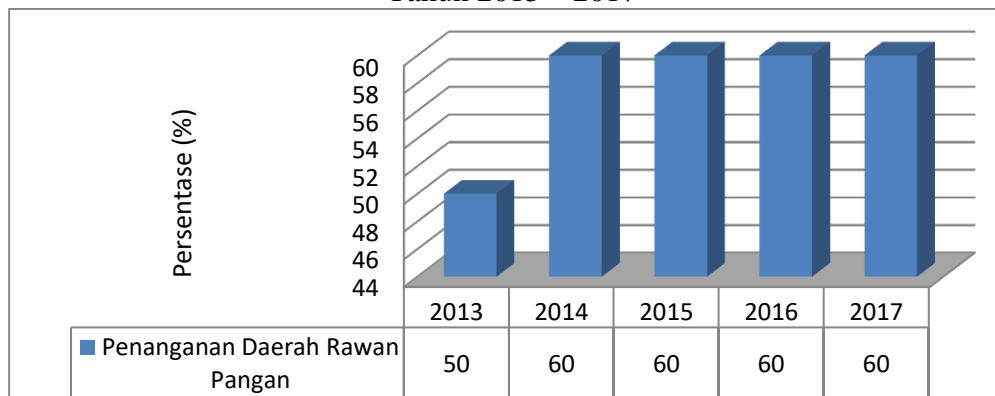
keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah seperti bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

Penanganan rawan pangan di Kabupaten Bone dilakukan dengan dua bentuk, pertama upaya pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis dan daerah rawan pangan transien. Adapun upaya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut

1. Mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi mengalami rawan pangan
2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan pengolahan pangan
3. Identifikasi balita yang mengalami gizi buruk
4. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan pakarangan
5. Penyaluran bantuan kepada keluarga yang mengalami kerawanan pangan Trasien
6. Pemberian bantuan medis pada keluarga yang memiliki balita gizi buruk
7. Dll.

Persentase penangana daerah yang berpotensi rawan pangan serta daerah rawan pangan kronis maupun daerah rawan transien di Kabupaten Bone mencakup 50 persen tahun 2013 kemudian meningkat 60 persen pada tahun 2014-2017.

Grafik 2.35  
 Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Bone  
 Tahun 2013 – 2017



*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, 2018*

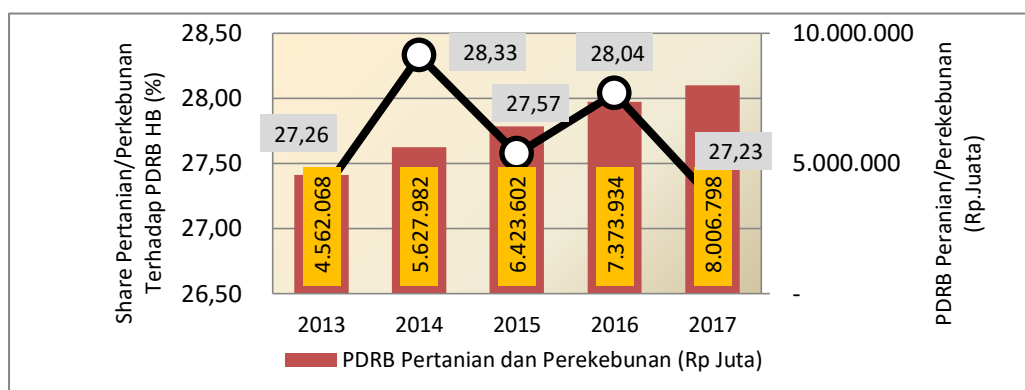
### 2.2.30. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB merupakan ukuran untuk melihat peranan sektor pertanian/perkebunan dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai ukuran untuk melihat kinerja pembangunan sektor pertanian/perkebunan itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian/perkebunan dengan total PDRB menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan mencakup nilai tambah dari sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor jasa pertanian.

Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan yang didasarkan pada nilai PDRB harga berlaku selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian/perkebunan sebesar Rp. 4,56 Trillion meningkat menjadi Rp. 8,01 trillion pada tahun 2017. Selanjutnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan dalam PDRB harga berlaku Kabupaten Bone menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2013-2014 kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB meningkat yakni dari 27,26 persen tahun 2013 meningkat menjadi 28,33 persen tahun 2014. Akan tetapi pada periode berikutnya cenderung menurun bahkan pada tahun 2017 kontribusi sektor ini mengalami penurunan secara tajam yakni hanya sekitar 27,23

persen. Penurunan tajam kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada tahun 2017, terkait berbagai kondisi sepanjang tahun 2017, seperti trut herjadinya anomali cuaca El Nino di awal tahun dan berlanjut El Nina di pertengahan hingga akhir tahun, yang berdampak kurang baik bagi produktivitas pertanian karenabanyak tanaman pertanian yang terserang hama penyakit dan bencana alam berupa banjir di daerah Bone bagian utara.

Grafik 2.36  
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bone  
Tahun 2013–2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

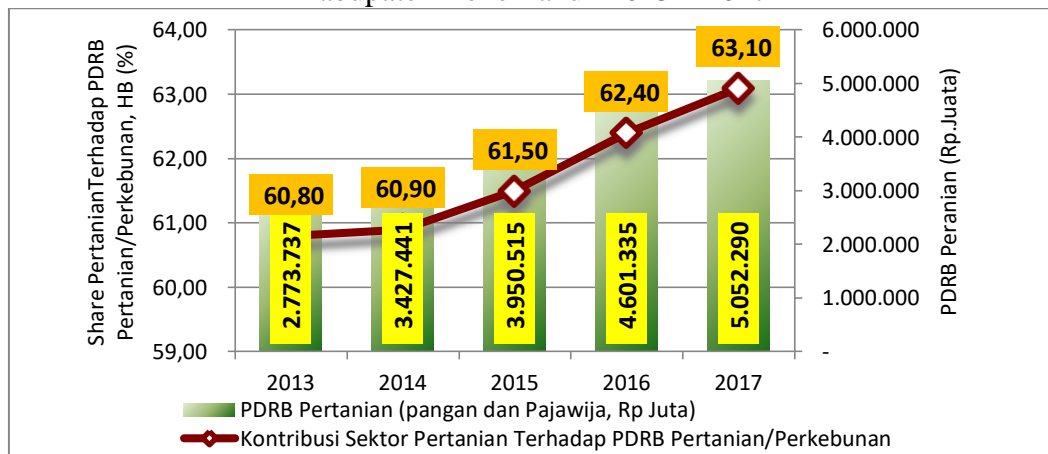
### 2.2.31. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui porsi nilai tambah pertanian (palawija) terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan, sekaligus mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian (palawija) itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya), serta tanaman serelia lainnya.

Nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup

tinggi. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian (pangan dan palawija) sebesar Rp. 2,77 Trillium meningkat menjadi Rp. 5,05 trillium pada tahun 2017. Sektor pertanian pangan dan palawija di Kabupaten Bone tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, tetapi kecenderungan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian (pangan dan palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 60,80 persen meningkat yakni dari 63,10 persen tahun 2017. Uraian tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) yang merupakan basis utama pertanian Kabupaten Bone memiliki kinerja perkembangan yang cukup baik.

Grafik 2.37  
Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan  
Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

### 2.2.32. Produksi Sektor Pertanian

Kabupaten Bone merupakan sentra utama pengembangan komoditi pangan dan palawija di Sulawesi Selatan, terutama komoditi padi, jagung dan kedelai. Peran ini didukung oleh sumberdaya lahan yang cukup luas. daerahKondisi tanaman pangan di Kabupaten Bone didukung dengan lahan sawah yang ada di beberapa kecamatan. Menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikulutra Kabupaten Bone, pada tahun 2015 dihasilkan 983.219 ton padi sawah dan 284.071 ton jagung.

Tabel 2.21  
Produksi Pertanian Pangan dan Palawija di Kabupaten Bone 2013-2017

No.	Komoditi	Jumlah Produksi (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi	777.733	885.654	983.219	1.057.381	1.207.187
2	Jagung	136.310	209.963	284.071	67.824	424.445
3	Kedelai	17.616	32.616	28.546	29.141	12.958
4	Kacang Tanah	11.229	20.254	16.953	7.806	1.969
5	Kacang Hijau	3.092	5.580	1.485	1.210	704
6	Ubi Kayu	4.788	7.069	3.497	289	2.958
7	Ubi Jalar	4.016	5.439	2.225	1.148	1.265

*Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017*

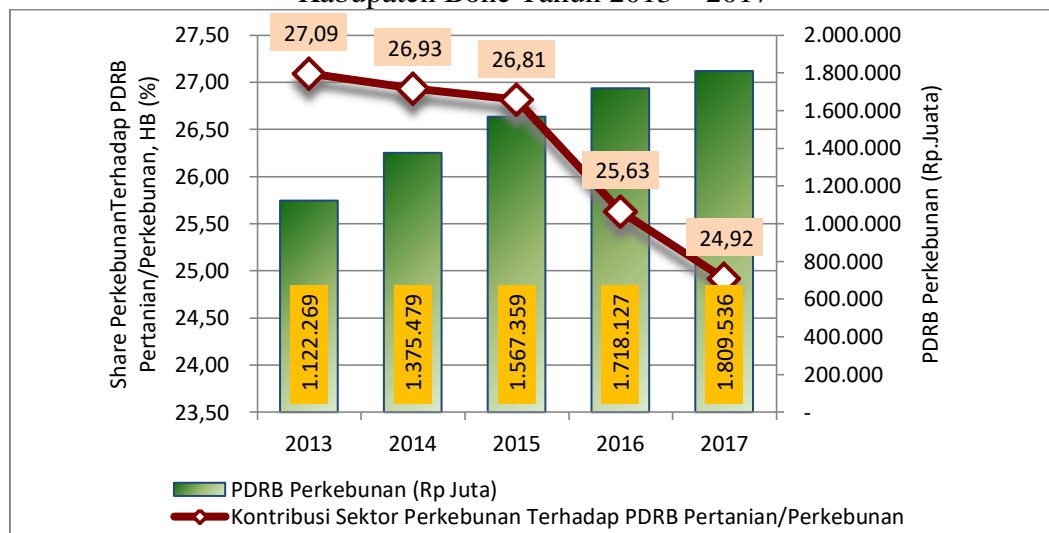
### 2.2.33. Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Pertanian/perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan sektor perkebunan, yang sekaligus menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas dari tanaman Perkebunan yang terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2013-2017 memiliki kecenderungan meningkat, meski dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian pangan dan palawija. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp. 1,12 Trillion meningkat menjadi Rp. 1,81 triliun pada tahun 2017. Meskipun demikian sektor perkebunan merupakan sektor pertanian yang masih cukup penting di daerah ini karena merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor tanaman pangan dan

palwija. Kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Bone mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan yang terus mengalami kemerosotan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 27,09 persen sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 24,92 persen. Turunnya kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan mengisyaratkan bahwa kinerja pertumbuhan sektor perkebunan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani.

Grafik 2.38  
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan  
Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

#### 2.2.34. Produksi Sektor Perkebunan

Kabupaten Bone selain sebagai salah satu sentra produksi tanaman pangan, seperti padi dan jagung, daerah ini juga menjadi sentra utama beberapa komoditi perkebunan, baik kelompok komoditi perkebunan tahunan, maupun komoditi perkebunan yang bersifat musiman. Pada kelompok komoditi perkebunan tahunan, daerah ini memiliki potensi produksi yang



cukup besar untuk komoditi seperti : Kelapa, kakao, cengkeh, jambu mete dan aren. Pada tahun 2017, Kabupaten Bone adalah sebagai sentra produksi kelapa terbesar kedua di Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Selayar dengan kontribusi produksi sekitar 20,19 persen terhadap produksi kelapa Sulawesi Selatan. Pada tahun yang sama daerah ini juga sebagai produsen Cengkeh terbesar ke dua setelah Kabupaten Luwu dengan kontribusi sekitar 23,47 persen, juga terbesar kedua dalam produksi Aren setelah Kabupaten Luwu Utara dengan kontribusi sekitar 24,53 persen, sebagai produsen kakao terbesar ketiga setelah Kabupaten Luwu dan Luwu Utara dengan kontribusi sekitar 11,47 persen, bahkan daerah ini menduduki peringkat pertama sebagai produsen jambu mete dengan kontribusi produksi sekitar 14,57 persen terhadap produksi jambu mete Sulawesi Selatan. Gambaran perkembangan produksi tanaman perkebunan tahun di Kabupaten Bone, tahun 2013-2017 terlihat pada Tabel berikut

Tabel 2.22  
Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Kabupaten Bone 2013-2017

No.	Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Tanaman Tahunan (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelapa Dalam	14.046,00	13.647,70	13.795,72	15.040,00	15.567,37
3	Kopi	285,00	271,00	289,72	275,00	277,65
4	Kakao	15.791,00	16.412,00	17.474,30	18.079,00	12.183,03
5	Kemiri	9.453,00	2.916,00	2917,925	2.974,00	2.998,55
6	Kapuk	755,00	304,00	304,09	311,00	193,87
7	Jambu Mete	2.854,00	2.168,00	2.175,35	2.199,00	2.199,01
8	Cengkeh	2.968,00	2.197,00	3.753,31	4.748,00	4.737,89
9	Lada	93,00	76,00	150,00	152,00	152,03
10	Pala	0,90	0,71	12,60	12,87	12,88
11	Vanili	40,00	29,00	27,64	29,00	29,00
12	Pinang	492,00	204,26	200,14	212,00	182,57
13	Aren	4.692,00	1.017,00	953,56	1.011,00	1.011,03
14	Siwalan	815,00	534,00	623,35	641,00	641,03
15	Sagu	58,00	55,00	65,31	66,00	66,01
16	Asam Jawa	49,00	50,00	49,57	51,00	51,00
17	Nipa	35,00	35,00	35,45	36,00	36,24
18	Kayu Manis	160,00	160,00	17,07	18,00	18,46
	<b>TOTAL</b>	<b>52.586,90</b>	<b>40.076,67</b>	<b>42.845,10</b>	<b>45.854,86</b>	<b>40.357,61</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2014-2018

Tabel 2.23  
Produksi Tanaman Perkebunan Semusim Kabupaten Bone 2013-2017

No.	Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Tanaman Semusim (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tebu Rakyat	44.890,20	50.248,20	37.033,80	36.238,80	40.133,70
2	Tembakau	534,97	331,46	373,53	373,53	530,37
3	Kapas	118,89	168,00	168,00	0,80	20,96
4	Jahe	254,00	120,00	130,91	133,53	Na
5	Kunyit	856,00	113,10	303,11	266,02	Na
6	Kencur	23,00	0,90	1,40	1,25	Na
7	Sereh Wangi	76,00	104,70	118,30	23,61	Na
8	Temu Lawak	14,00	16,20	16,00	21,65	Na
9	Lempuyang	11,00	11,20	11,00	12,50	Na
10	Lengkuas	220,00	220,00	280,10	259,56	Na
11	Wijen	146,00	137,50	137,95	139,33	144,37
12	Nilam		46,40	30,25	21,29	22,43
	<b>TOTAL</b>	<b>47.144,06</b>	<b>51.517,66</b>	<b>38.604,35</b>	<b>37.491,84</b>	<b>40.851,82</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2014-2018

Selain potensi perkebunan tahunan, daerah ini juga memiliki potensi komoditi perkebunan semusim yang cukup besar. Pada tahun 2017 Kabupaten Bone tercatat sebagai penghasil tebu rakyat paling besar di Sulawesi Selatan, dengan kontribusi sekitar 70,84 persen dari produksi tebu rakyat di Sulawesi Selatan, Selain itu daerah ini juga masih tercatat sebagai peringkat pertama dalam memproduksi komoditi kemiri dengan kontribusi sekitar 21,29 persen terhadap produksi Kemiri Sulawesi Selatan. Selain itu daerah ini juga sebagai sentra utama dalam memproduksi komoditi wijen, vanili, kunyit, jahe dan lain-lain. Gambaran perkembangan produksi tanaman perkebunan semusim di Kabupaten Bone tahun 2013-2017 terlihat pada Tabel yang disajikan diatas.

#### 2.2.35. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuh kembangkan “*dari, oleh dan untuk petani* “. Keberadaan organisasi non formal ini memiliki peran penting tidak hanya dalam peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, tetapi juga memberi pengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah, termasuk pada indikator PDRB daerah. Pengaruh keberadaan kelompok tani terhadap perekonomian daerah, terkait fungsi kelompok tani yang diemban yakni (1) sebaga wadah belajar, dengan fungsi ini pengetahuan, keterampilan dan sikap

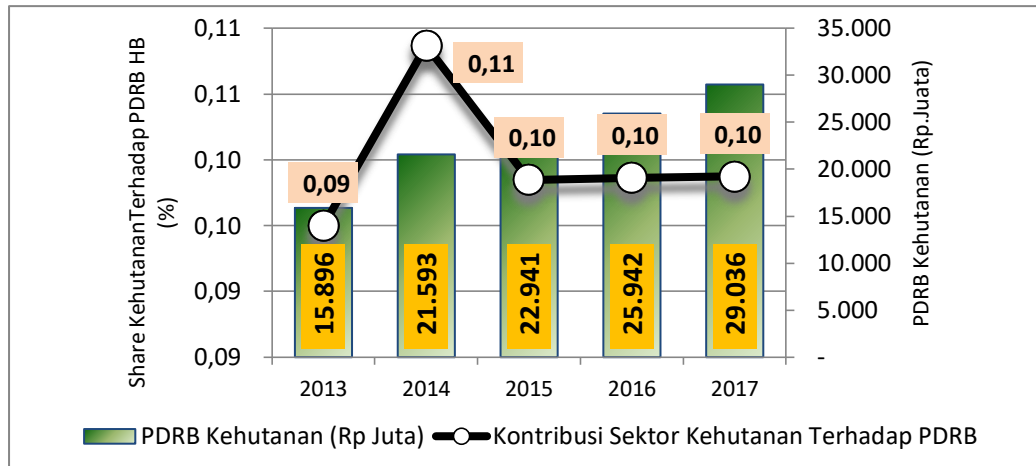
anggota kelompok dapat berkembang lebih cepat; (2) sebagai wadah kerjasama, Melalui kerjasama petani dapat meningkatkan efisiensi produksinya serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, (3) sebagai unit produksi; usahatani yang dilaksanakan oleh masing masing anggota kelompoktani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Pengukuran kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB selain tidak disediakan oleh BPS, indikator ini juga sulit untuk diukur, karena dasar pembentukan kelompok tani bervariasi, diantaranya berdasarkan hamparan lahan, kelompok tani berdasarkan komoditi yang diusahakan, atau berdasarkan tempat tinggal petani. Keberadaan kelompok-kelompok tani tersebut banyak diantaranya tumpang tindih, sehingga estimasi produksinya menurut lokasi dan menurut komoditi sulit dilakukan. Sifat acak produksi kelompok tani ini menyulitkan untuk mengukur kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB Kabupaten Bone.

#### **2.2.36. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB**

Luas kawasan hutan di Kabupaten Bone berdasarkan SK Menhut No. : 434/Menhut-II/2009, adalah seluas 145.053 Ha, dari luasan tersebut sekitar 62,85% merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan sekitar 22,48 persen merupakan kawasan hutan lindung, sisanya terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan wisata. Berbagai potensi ekonomi dari kawasan kehutanan di daerah ini, diantaranya hutan pinus, hutan rakyat dengan berbagai potensi kayu, jasa lingkungan seperti air terjun, hutan wisata. Selain itu kawasan hutan di daerah ini juga menghasilkan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti damar, rotan lebah madu dan lainnya.

Grafik 2.39  
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Bone  
Tahun 2013 – 2017



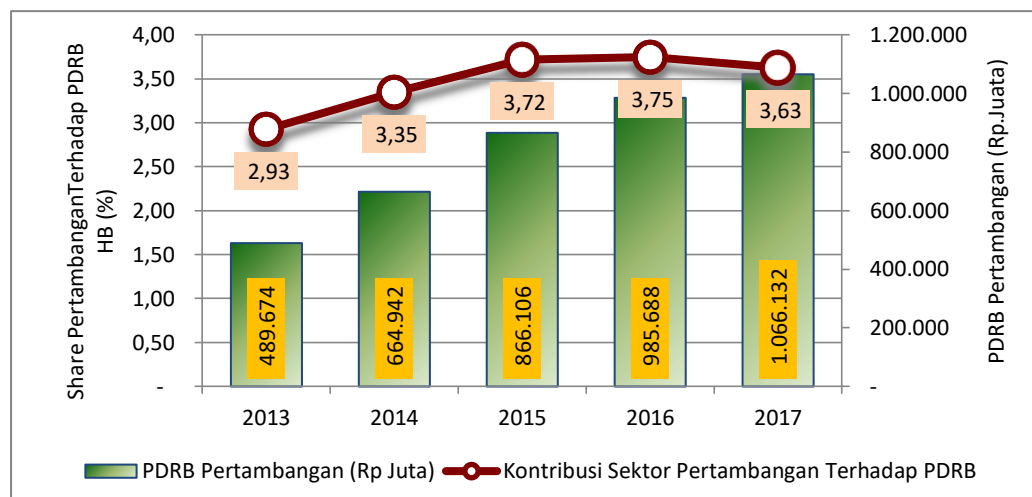
*Sumber: PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017*

Data PDRB Harga berlaku Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013 nilai tambah yang diciptakan sektor ini sekitar 15,90 Milliar dan meningkat menjadi 29,04 Milliar tahun 2017. Kontribusi sektor kehutana dalam total PDRB harga berlaku Kabupaten Bone juga mengalami peningkatan tipis. Pada tahun 2013 Sektor kehutanan berkontribusi sekitar 0,09 persen dan meningkat menjadi 0,10 persen tahun 2017.

#### **2.2.37. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB**

Sektor pertambangan Kabupaten Bone memiliki potensi yang cukup besar dan beragam. Potensi pertambangan di daerah ini terdiri sejumlah potensi mineral logam dan bukan logam. Potensi mineral logam diantaranya seperti potensi emas, Tembaga, Zeng, Mangan dan endapan besi. Selain itu daerah juga memiliki potensi batu bara dan berbagai mineral non logam seperti Batugamping, Marmer, Dolomit, Kuarsa, Batu Sabak dan Basal, Batu tempel (ornamen stone) dari jenis riolit dan tufa hijau, yang tersebar di beberapa wilayah. Adapun komoditas yang telah diusahakan diantaranya seperti bijih besi, mangan, batubara, pasir, sirtu, tanah timbun, batu gamping dan lainnya. Berbagai potensi tambang yang ada di daerah ini telah berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bone.

Grafik 2.40  
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Bone  
Tahun 2013 – 2017



Sumber: PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Selama kurun waktur 2013-2017, nilai PDRB sektor pertambangan di Kabupaten Bone memiliki kecenderungan yang terus meningkat, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Nilai PDRB sektor pertambangan menurut harga berlaku di Kabupaten Bone pada tahun 2013 sebesar Rp. 489,67 Milliar meningkat menjadi Rp. 1.066,13 Milliar pada tahun 2017. Dengan kinerja pertumbuhan yang relatif tinggi yakni tumbuh rata-rata 12,06 persen per tahun menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku Kabupaten Bone sebesar 2,93 persen meningkat menjadi 3,63 persen tahun 2017.

#### 2.2.38. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

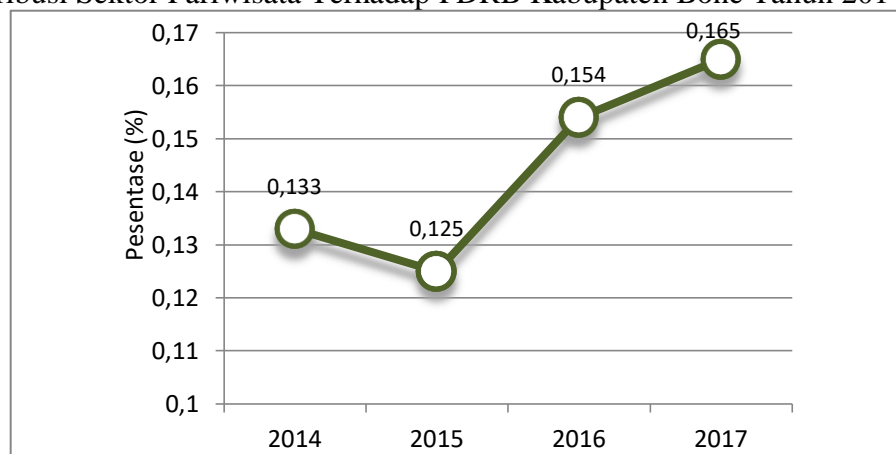
Kabupaten Bone memiliki banyak kawasan-kawasan wisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah. Objek wisata yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari objek wisata alam, seperti Tanjung Pallette, Gua Mampu, Gua Jepang, Gua Janci, Pantai Ujung Pattiro dan lain-lain. Objek wisata budaya meliputi Mesium Arajange, Kawasan Manurun, Bola Soba, Tana Bangkalae, Makam Kalokkoe dll selain itu juga

terdapat objek wisata buatan seperti Waterboom Tanjung Pallette, Wisata Kuliner Pusat Jajan dan Wisata Kuliner Pantai Kering dll.

Menurut Hysa (2012) dua komponen utama yang mempengaruhi Pergerakan pariwisata adalah jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Lama tinggal wisatawan merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan besarnya perolehan nilai tambah dari sektor pariwisata. Secara Teoritis, semakin lama seorang wisatawan berada di suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) akan semakin banyak uang yang dikeluarkan di daerah tersebut (Wijaya, 2011). Uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan oleh wisatawan selama melakukan kunjungan dapat berupa pengeluaran untuk akomodasi, transportasi, makan, minum dan cinderamata.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir secara umum kontribusi sector pariwisata dalam PDRB Kabupaten Bone trus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sektor ini hanya menyumbang sekitar 0,133 persen terhadap PDRB meningkat menjadi 0,165 persen tahun 2017. Selengkapnya gambaran perkembangan kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bone tahun 2014-2017 terlihat pada Gambar berikut.

Grafik 2.41  
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2014–2017



Sumber: Data Diolah, 2018

#### **2.2.39. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB**

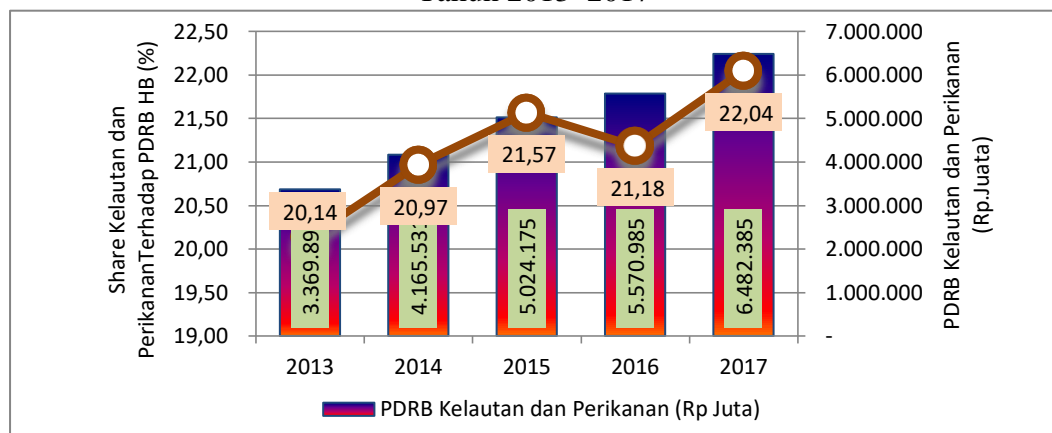
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki garis pantai sepanjang 138



Km dari arah selatan ke arah utara. Dengan kondisi geografis yang dimiliki daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan kelautan dan perikanan, seperti potensi penangkapan ikan, budidaya laut dan air payau. Potensi penangkapan dan budidaya laut tersebar di 10 kecamatan yang memiliki wilayah pesisir, potensi budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone.

Grafik 2.42

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Bone, Tahun 2013–2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

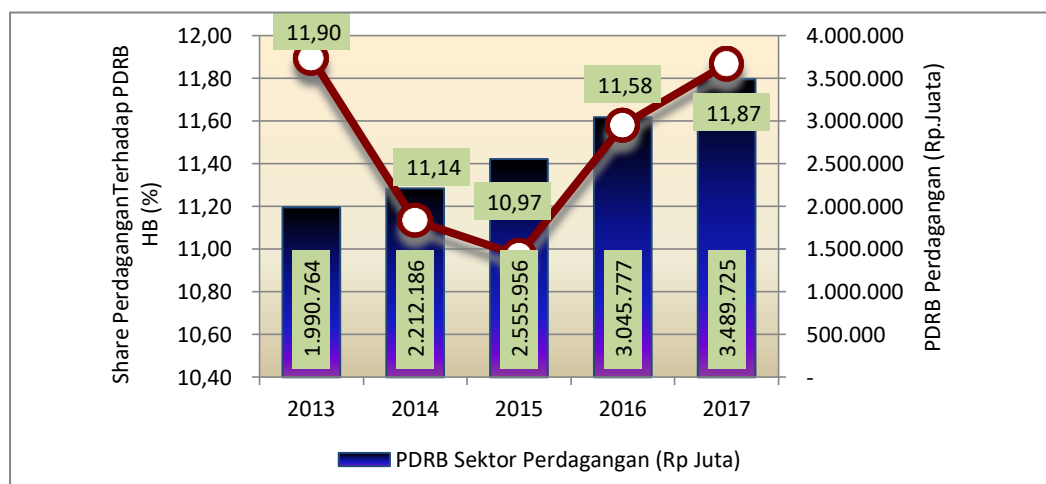
Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Bone. Pada tahun 2013 nilai tambah yang diciptakan oleh sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 3.37 trillium kemudian pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 6,48 trillium. Kinerja pertumbuhan sektor ini dalam lima tahun terakhir juga relatif lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor lainnya di Kabupaten Bone. Hal ini tercermin dari nilai kontribusi nilai tambah sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bone berkontribusi terhadap PDRB sekitar 20,13 persen, kemudian meningkat menjadi 22,04 persen tahun 2017.

#### 2.2.40. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bone diukur dengan membagi nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Bone menurut harga berlaku. Berdasarkan nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di kabupaten Bone, tercatat pada tahun 2013 sebesar Rp. 1,99 trillium kemudian meningkat menjadi Rp. 3,49 trillium tahun 2017. Kontribusi sektor ini dalam penciptaan nilai tambah juga cukup pliktuatif, paruh pertama dalam lima tahun terakhir (2013-2015) kontribusi sektor ini merosot dari 11,90 persen tahun 2013 menjadi sekitar 10,97 persen tahun 2015. Akan tetapi paruh berikutnya meningkat hingga 11,87 persen pada tahun 2017. Nilai kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB yang fluktuatif menggambarkan bahwa pertumbuhan PDRB riil sektor ini tidak stabil.

Grafik 2.43  
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bone  
Tahun 2013-2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

#### 2.2.41. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

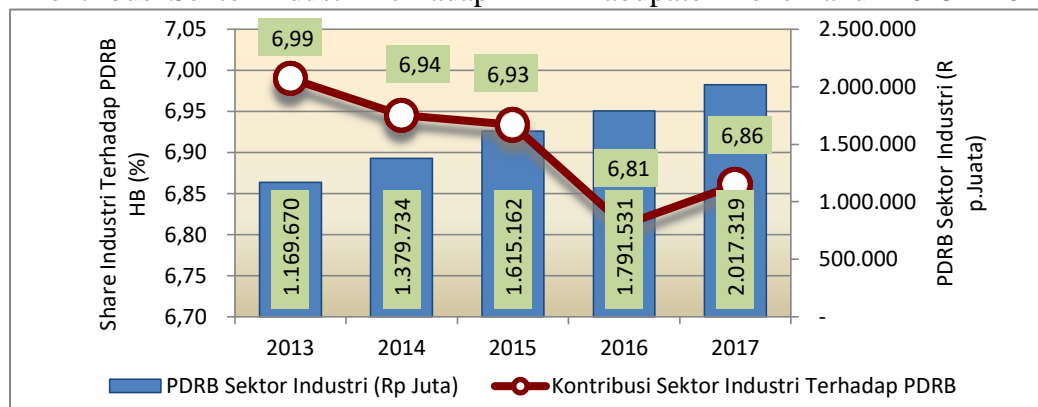
Perkembangan sektor industri disetiap wilayah memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi daerah, karena sektor industri seringkali dianggap memiliki kemampuan untuk menciptakan keterkaitan dan angka pengganda yang besar. Kabupaten Bone memiliki beberapa industri besar dan sejumlah industri kecil yang tersebar diberbagai kecamatan. Industri besar yang ada di daerah ini terdiri dari Pabrik Gula Camming, Pabrik Gula Arasoe

dan industri pengolahan alkohol/Spritus di Kecamatan Cina. Sedangkan berbagai ragam industri kecil seperti industri pengolahan pertanian, industri makanan, kerajinan, Meubel dan lainnya. Berbagai industri yang ada di daerah ini telah berkontribusi dalam penciptaan nilai tambah di sektor ini.

Berdasarkan nilai PDRB harga berlaku sektor industri, tercatat bahwa nilai tambah yang diciptakan sektor ini selama periode 2013-2017 terus meningkat, yakni meningkat dari Rp 1,17 trillium tahun 2013 menjadi Rp. 2,02 Trillium tahun 2017. Namun demikian kontribusi nilai tambaha yang bersumber dari sektor ini terhadap total PDRB daerah cenderung merosot dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang berarti kinerja pertumbuhan sektor ini lebih lambat dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor lainnya. Pada tahun 2013 kontribusi sektor industri terhadap total PDRB sebesar 6,99 persen turun menjadi 6,86 persen tahun 2017.

Grafik 2.44

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRBKabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

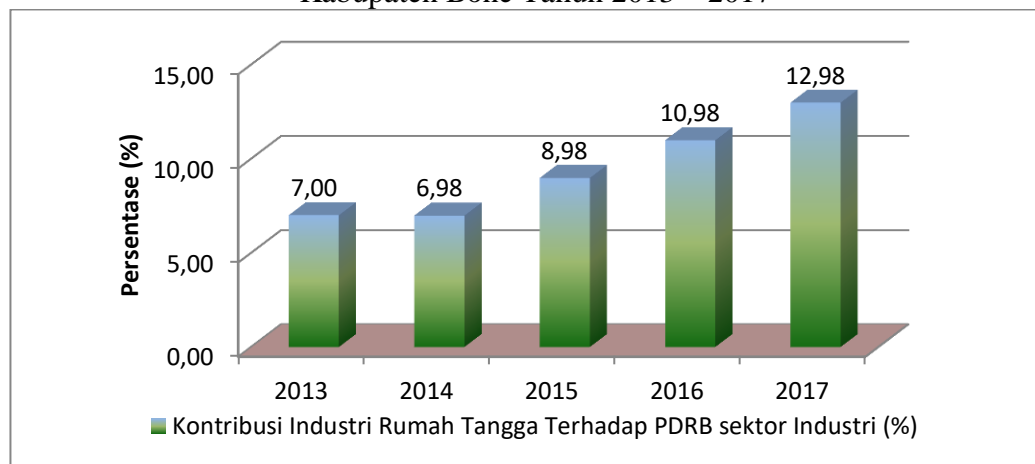
#### 2.2.42. Kontribusi Sektor Industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

Industri kecil dan industri rumah tangga di Kabupaten Bone beragam dan tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone, hanya saja kontribusi sector industri rumah tangga terhadap PDRB sector industri tidak dipublikasi oleh BPS. Di daerah ini terdapat beberapa konsentrasi (aglomerasi) Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga dengan kegiatan usaha : Pengolahan Hasil

Pertanian, Industri Makanan, Industri Kerajinan, Industri Meubel dan Industri Pertukangan.

Kontribusi sektor industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sektor industri rumah tangga hanya memberikan kontribusi sekitar 7,0 persen terhadap PDRB sektor industri, namun pada tahun 2017 perenannya meningkat menjadi 12,98 persen. Gambaran ini mengisyaratkan bahwa perkembangan sektor industri rumah tangga di daerah berkembang lebih cepat dibandingkan kelompok industri lainnya. Gambaran perkembangan kontribusi sektor industri rumah tangga di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, terlihat pada Gambar berikut.

Grafik 2.45  
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri di Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



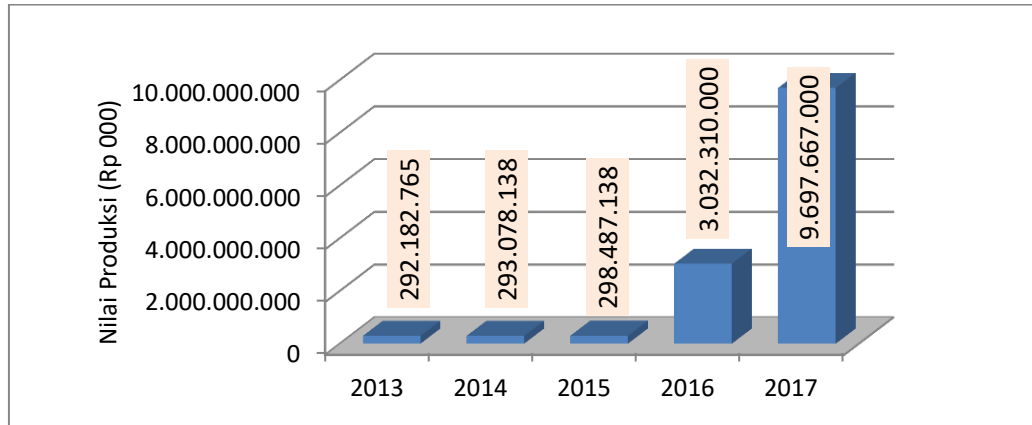
Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.2.43. Pertumbuhan Industri

Kabupaten memiliki sejumlah industri, baik yang berkategori besar dan sedang, maupun industri yang berkategori industri kecil dan rumah tangga. Industri besar yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari Pabrik Gula Camming di Kecamatan Libureng, Pabrik Gula Arasoe di Kecamatan Cina, Pengolahan Alkohol/Spritus di Kecamatan Cina. Sedangkan industri kecil beragam seperti Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Makanan, Industri Kerajinan, Industri

Meubel dan Industri Pertukangan. Perkembangan industri di Kabupaten Bone digambarkan berdasarkan besarnya nilai produksi seluruh unit usaha industri di Kabupaten Bone, seperti yang digambarkan pada Gambar berikut.

Grafik 2.46  
Perkembangan Nilai Produksi Industri (Rp.000) Di Kabupaten Bone  
Tahun 2013–2017



*Sumber: Data Diolah, 2018*

#### 2.2.44. Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Pengembangan kawasan transmigrasi, tidak hanya sekedar mengembangkan pemukiman transmigrasi, tetapi juga ditujukan untuk mengembangkan atau mendukung pusat pertumbuhan baru. Uraian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi sesungguhnya diharapkan dapat mendorong tumbuh kembangnya berbagai usaha produktif, seperti pertanian dan usaha-usaha lainnya serta mendorong terciptanya keterkaitan ekonomi daerah yang lebih kuat. Dengan demikian keberadaan kawasan transmigrasi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk pengaruhnya terhadap PDRB daerah.

UU No 29/2009 juga menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis transmigrasi, yakni transmigrasi umum, Transmigrasi Swakarsa berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Selanjutnya Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Sedangkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Mengacu pada jenis-jenis transmigrasi seperti yang diamanatkan dalam UU No 29 Tahun 2009 tersebut, maka di Kabupaten Bone hingga tahun 2007 belum ada lokasi pengembangan transmigrasi baik dalam tataran implementasi maupun dalam tahap perencanaan. Rencana tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak memiliki rencana pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Bone. Berdasarkan uraian tersebut maka peranan transmigrasi terhadap PDRB Kabupaten Bone tidak dapat dihitung.

### **2.3. Aspek Daya Saing Daerah**

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri atas: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Nilai Tukar Petani, Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita, Produktivitas Total Daerah, Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa, Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi), Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum, Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR, Angka Kriminalitas Yang Tertangani, dan Rasio Ketergantungan.



### 2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumahtangga perkapita di Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan secara progresif. Pengeluaran konsumsi rumahtangga tahun 2013 sebanyak Rp. 196.538 perkapita dan pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi telah mencapai Rp. 331.890 perkapita. Pengeluaran konsumsi ini dapat terjadi akibat meningkatnya pemenuhan berbagai jenis kebutuhan rumahtangga. Selain itu peningkatan tersebut juga dapat disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai jenis kebutuhan barang konsumsi rumahtangga.

Tabel. 2.24  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi RumahTangga Perkapita Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (Rp)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga Per Kapita	196.538	234.675	259.057	310.213	331.890

Sumber : Data Diolah, 2018

### 2.3.2. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Sejak lima tahun terakhir, persentase pengeluaran konsumsi non pangan rumahtangga telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi dari tahun 2013 sampai tahun 2016, namun demikian kembali mengalami penurunan pada tahun 2017. Data dalam waktu lima tahun terakhir proporsi pengeluaran non pangan meningkat dari 47.58 % menjadi 48.90 %. Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone. Asumsi tersebut berdasarkan teori Engel yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat maka proporsi pengeluaran untuk non pangan semakin besar.

Tabel 2.25  
Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita di  
Kabupaten Bone 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)	47.58 %	48.47 %	49.02 %	49.65 %	48.90 %

Sumber: Data Diolah, 2018

### 2.3.3. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Jumlah kecamatan yang berstatus swasembada belum mencapai 100%. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2017, kecamatan yang berstatus swasembada hanya 70% dan meningkat menjadi 75% pada tahun 2016. Kecamatan yang berstatus swasembada pada tahun 2017 telah mencapai 81%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam dua tahun terakhir di Kabupaten Bone.

Tabel. 2.26  
Perkembangan Persentase Kecamatan Bersatus Swasembada Terhadap Total  
Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Kecamatan Berstatus Swasembada terhadap total Kecamatan	70 %	70 %	70 %	75 %	81 %

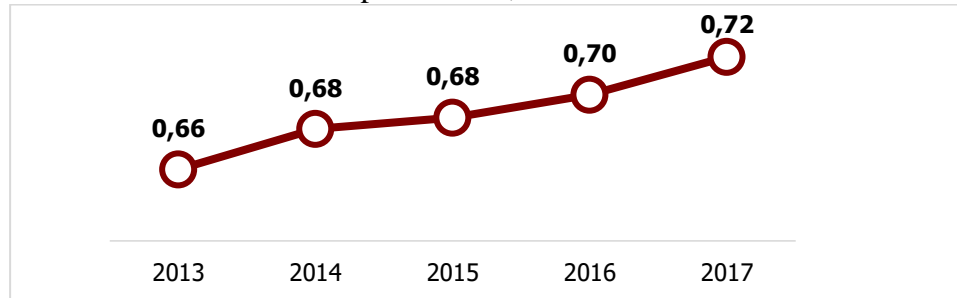
Sumber: Data Diolah, 2018

### 2.3.4. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Perekonomian daerah tidak hanya bertumpu pada produksi barang dan jasa domestic, namun berkaitan juga dengan aktivitas perdagangan dengan daerah lain. Semakin besar aktivitas perdagangan daerah maka semakin terbuka perekonomian daerah tersebut dan tentu menguntungkan jika aktivitas ekspor lebih besar daripada impor. Hal itu pula yang terjadi di Kabupaten Bone, dimana dalam lima tahun terakhir perekonomiannya semakin terbuka. Keterbukaan ekonomi Kabupaten Bone dapat dilihat dari rasio ekspor dan impor terhadap PDRB yang konsisten meningkat dari 0,66 tahun 2013

menjadi 0,68 tahun 2014 dan 2015. Kenaikan angka keterbukaan ekonomi Kabupaten Bone terulang di tahun 2016 dan 2017 masing-masing mencapai 0,70 dan 0,72.

Grafik 2.47  
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)  
Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber : Data Diolah, 2018

### 2.3.5. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Dalam berbagai survei tentang daya tarik investor, ada beberapa faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan investasi di Indonesia, tidak hanya stabilitas politik tetapi penegakan hukum, kejelasan regulasi, perijinan ilegal, korupsi yang dilakukan birokrasi, premanisme, terorisme, perburuan bahkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko yang akan mempengaruhi para investor untuk menentukan sikap apakah akan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 2.27  
Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Bone, 2017

Kasus Kriminal	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase Kasus yang Dilaporkan	Persentase Kasus yang Diselesaikan
Kebakaran	35	35	2,93	3,75
Perzinaan	5	9	0,42	0,96
Perjudian	6	3	0,50	0,32
Pembunuhan	8	11	0,67	1,18
Penganiayaan Berat	6	5	0,50	0,54
Penganiayaan Ringan	107	107	8,97	11,46
Pencurian Berat	3	3	0,25	0,32
Pencurian Ringan	86	49	7,21	5,25
Pencurian dengan Kekerasan	3	2	0,25	0,21
Pencurian Kendaraan Bermotor	18	12	1,51	1,28
Pencurian Hewan	8	7	0,67	0,75

Kasus Kriminal	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase Kasus yang Dilaporkan	Persentase Kasus yang Diselesaikan
Narkoba	62	58	5,20	6,21
Penggelapan	20	14	1,68	1,50
Penipuan	18	19	1,51	2,03
Pengrusakan	19	10	1,59	1,07
Panadahan	-	-	0,00	0,00
Kejahatan Lain-lain	153	121	12,82	12,96
Pelanggaran KUHP/Non KUHP	-	-	0,00	0,00
Laka Lantas	636	469	53,31	50,21
<b>Jumlah</b>	<b>1.193</b>	<b>934</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Bone Dalam Angka 2018

Sepanjang tahun 2017, tercatat angka kriminalitas di Kabupaten Bone yang dilaporkan sebesar 1.193 kasus, namun yang bisa diselesaikan hanya 934 kasus atau 78,29 persen. Masyarakat Kabupaten Bone sebagian besar melaporkan beberapa kasus kriminal, namun yang paling banyak dilaporkan adalah kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas). Pada tahun 2017, lebih dari 1/2 tindakan kriminal Laka Lantas dilaporkan ke pihak berwenang dengan jumlah kasus mencapai 636, namun yang mampu ditangani hanya 469 kasus atau 50,21 persen. Tidak hanya Laka Lantas yang tidak semua laporan mampu diselesaikan, beberapa kasus seperti pencurian ringan, pencurian kendaraan bermotor, narkoba, dan kejahatan lainnya belum sepenuhnya tuntas diselesaikan.

Pada tahun 2017, pelaporan pencurian ringan mencapai 86 kasus atau 7,21 persen dari total tindakan kriminal yang dilaporkan, tapi hanya 49 kasus yang dapat diselesaikan atau proporsinya hanya 5,25 persen dari seluruh kasus yang diselesaikan. Begitupun dengan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dimana persentase kasus yang dilaporkan mencapai 1,51 persen sedangkan kasus terselesaikan hanya 1,28 persen.

Kasus kriminal ekstraordinari (luar biasa) seperti peredaran narkoba nampaknya juga masih sulit untuk diselesaikan di Kabupaten Bone meski pihak berwenang berupaya untuk menekan laju perdagangan obat-obat terlarang. Tahun 2017, sebanyak 62 kasus kejahatan narkoba dilaporkan, jumlah tersebut setara dengan 5,20 persen dari seluruh laporan kasus kriminal yang masuk sepanjang tahun 2017. Tetapi, pihak berwenang hanya mampu

menyesaikan sebanyak 58 kasus atau 6,21 persen dari semua kasus yang berhasil diselesaikan.

### 2.3.6. Rasio Ketergantungan

Distribusi umur penduduk dapat dikelompokkan secara baik untuk memberikan gambaran terhadap struktur umur dengan kategori usia produktif, usia tidak produktif, dan menentukan rasio ketergantungan. Data yang tersedia di tahun 2015, 2016, dan 2017 memperlihatkan bahwa rata-rata rasio ketergantungan berkisar 45.9 % yang memberikan gambaran bahwa setiap usia produktif setidaknya akan menanggung beban setengah dari usia yang tidak produktif.

Tabel. 2.28  
Rasio Ketergantungan Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bone

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun			204,424	204,812	199,335
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun			62,305	67,912	73,551
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)			266,729	272,724	272,886
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun			580,069	590,930	595,306
5	Rasio ketergantungan (3)/ (4)			45.98	46.15	45.84

Sumber: BPS Kabupaten Bone

### Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel 2.29  
Lama Proses Pelayanan Perizinan

NO	JENIS IZIN	JANGKA WAKTU PELAYANAN
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12 (dua belas) Hari Kerja.*
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 (tiga) Hari Kerja.*
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	3 (tiga) Hari Kerja.*
4	Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (IUI dan TDI)	5 (lima) Hari Kerja.*
5	Tanda Daftar Gudang	5 (lima) Hari Kerja.*
6	Izin Reklame	5 (lima) Hari Kerja.*
7	Izin Sarana Kesehatan	5 (lima) Hari Kerja.*
8	Izin Tenaga Kesehatan	5 (lima) Hari Kerja.*
9	Izin Penelitian	3 (tiga) Hari Kerja.*
10	Izin Lingkungan	3 (tiga) Hari Kerja.*
11	Izin Lokasi	5 (lima) Hari Kerja.*
12	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan	5 (lima) Hari Kerja.*
13	Izin Trayek	5 (lima) Hari Kerja.*
14	Tanda Daftar Perusahaan	3 (tiga) Hari Kerja.*

NO	JENIS IZIN	JANGKA WAKTU PELAYANAN
15	Izin Prinsip Penanaman Modal:	
	Izin Prinsip PMDN	3 (tiga) Hari Kerja.*
	Izin Prinsip Perluasan PMDN	3 (tiga) Hari Kerja.*
	Izin Prinsip Perubahan PMDN	5 (lima) Hari Kerja.*
	Izin Prinsip Penggabungan PMDN	7 (tujuh) Hari Kerja.*
16	Izin Usaha Penanaman Modal :	
	Izin Usaha PMDN	6 (enam) hari kerja.*
	Izin Usaha Perluasan PMDN	6 (enam) hari kerja.*
	Izin Usaha Perubahan PMDN	6 (enam) hari kerja.*
	Izin Usaha Penggabungan PMDN	6 (enam) hari kerja.*
17	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	3 (tiga) Hari Kerja.*

Lama proses penerbitan layanan perizinan pada tabel diatas adalah merupakan standard pelayanan maksimal, yang mana rata rata proses layanan selama 3 (tiga) hari kerja, kecuali beberapa izin yang memerlukan kajian dan kunjungan lapangan (bila diperlukan), memerlukan waktu proses layanan perizinan lebih dari 3 hari kerja tergantung dari jumlah tim teknis yang terlibat dalam kajian teknis terkait izin tersebut. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang prosesnya mencapai 12 (dua belas) hari kerja, izin Tenaga Izin Usaha Penanaman Modal 6 (enam) hari kerja, Izin Prinsip Penanaman Modal 7(tujuh) hari kerja dan beberapa izin yang penerbitannya maksimal 5 (lima) hari kerja.

Lama Proses layanan perizinan telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone Nomor 30 Tahun 2017 dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan ketentuan pada ayat 6 pasal 4 Peraturan Bupati Bone Nomor 16 tahun 2017, proses pengelolaan pelayanan perizinan mengacu pada standar pelayanan.

Evaluasi kinerja terkait pelaksanaan Standar Pelayanan terkait kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP akan dimonitoring melalui kartu kontrol dan sistem monitoring oleh Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan 3 Bulan sekali yang hasilnya dipublikasikan dan dilaporkan secara tertulis setiap tahun kepada Bupati. Adapun Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi yaitu : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011



tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal.

## **2.4. Aspek Pelayanan Umum**

### **2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar**

#### **2.4.1.1. Pendidikan**

Pemerintah Daerah sebagai supporting sistem demokrasi daerah mempunyai andil besar dalam penerapan maupun pelaksanaan cita-cita dan hak-hak rakyat. Pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harus dijadikan prioritas. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan Pendidikan sebagai orientasi pendidikan guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-undang Dasar. Adapun peran pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut melalui beberapa indikator terkait pendidikan mulai tingkat pendidikan usia dini, tingkat dasar dan menengah, baik itu terkait kualitas manajemen maupun fasilitas infrastruktur penunjangnya.

##### **2.4.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang Pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik maupun non fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spritual), motorik, akal pikiran, emosional dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Upaya penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Bone terus dikembangkan, melalui program dan kegiatan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan mutu layanan PAUD, diantaranya penancangan PAUD yang holistik dan terintegrasi yang dikenal dengan Taman Paditunga.

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan PAUD di Kabupaten Bone adalah sebagaimana semua Desa dan Kelurahan memiliki layanan PAUD yang holistik dan terintegratif serta berbasis masyarakat agar kepastian dapat diperoleh yaitu semua anak yang akan masuk kejenjang Sekolah Dasar sudah melewati Pendidikan pra sekolah.

Tabel 2.29  
Perkembangan Capaian APK PAUD Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	PAUD					
1	Jumlah Sekolah	517	545	538	538	553
2	Jumlah Siswa	22.956	23.773	22.830	22.279	22.232
3	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	34.485	35.283	36.099	36.895	37.695
4	Jumlah Guru	1.944	1.743	1.696	1.830	1.746
5	Jumlah Kelas / Rombel	1.569	1.562	1.374	1.371	1.371
6	Ruang Kelas menurut Kondisi					
	• Baik	851	891	897	930	925
	• Rusak Ringan	273	275	257	257	262
	• Rusak Berat	173	144	118	120	120
7	Rasio Siswa / Sekolah	44	44	42	41	40
8	Rasio Siswa / Guru	12	14	13	12	13
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK	66,57	67,38	63,24	60,38	59,00

Sumber : Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten Bone) 2013-2017

#### 2.4.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi Kasar (APK) di kabupaten bone cenderung terjadi penurunan dalam lima tahun terakhir. Untuk jenjang pendidikan SD/MTs terjadi penurunan drastis dari 99,56% daya serap partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurun menjadi 77,36%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs nilai tertinggi sebesar 86,87% menurun menjadi 60,42%, dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tertinggi 70,59 % turun menjadi 58,22%. Ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk yang sedang

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut semakin menurun setiap tahunnya.

Tabel 2.30  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017  
Kabupaten Bone

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	96.674	94.657	92.034	88.236	80.195
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	93.499	95.077	96.001	96.791	97.591
1.3.	APK SD/MI	103,40	99,56	95,87	91,16	82,17
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	38.225	39.701	39.974	40.005	40.071
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	44.926	45.704	46.622	47.417	48.217
2.3.	APK SMP/MTs	85,08	86,87	85,74	84,37	83,10
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	27.148	29.093	29.716	30.504	22.757
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	41.739	42.185	42.779	43.213	39.088
3.3.	APK SMA/MA/SMK	65,04	68,97	69,46	70,59	58,22

*Sumber : Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2013-2017*

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bone pada tahun 2017 secara umum belum berhasil dalam program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Untuk jenjang pendidikan SD/MI Kecamatan yang tertinggi dalam menyerap pendidikan sebesar 112,5 % namun Kecamatan yang terendah menyerap pendidikan sebesar 59,69 %. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs kecamatan yang tertinggi menyerap pendidikan sebesar 110,29 % dan terendah adalah 28,39 %. Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK kecamatan yang mempunyai nilai tertinggi dalam menyerap pendidikan sebesar 1,21 % dan yang terendah sebesar 0,13 %. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK masih sangat kurang dalam

mengelola penduduk untuk program pembangunan pendidikan warganya.

Tabel 2.31  
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18 th	APK
1	Bontocani	1.983	2.589	76,59	678	1.087	62,37	358	587	0,61
2	Kahu	3.490	4.805	72,63	1.727	2.399	71,99	1.478	1.869	0,79
3	Kajuara	3.912	4.256	91,92	1.325	2.217	59,77	1.285	2.009	0,64
4	Salomekko	1.842	2.419	76,15	744	1.051	70,79	308	815	0,38
5	Tonra	1.632	1.829	89,23	466	921	50,60	600	654	0,92
6	Patimpeng	1.583	2.288	69,19	709	1.096	64,69	487	883	0,55
7	Libureng	3.274	3.878	84,42	1.123	1.914	58,67	1.032	1.481	0,70
8	Mare	3.284	3.468	94,69	1.386	1.653	83,85	1.553	1.423	1,09
9	Sibulue	3.682	4.341	84,82	1.243	2.109	58,94	893	1.892	0,47
10	Cina	3.964	3.524	112,5	1.195	1.684	70,96	676	1.402	0,48
11	Barebbo	2.763	3.515	78,61	1.261	1.738	72,55	241	1.483	0,16
12	Ponre	1.472	2.115	69,6	455	954	47,69	326	665	0,49
13	Lappariaja	2.075	3.437	60,37	1.344	1.549	86,77	1.015	1.173	0,87
14	Lamuru	2.064	3.458	59,69	632	1.630	38,77	514	1.139	0,45
15	Tellu Limpoe	1.749	2.054	85,15	453	982	46,13	165	1.251	0,13
16	Bengo	2.199	3.126	70,35	610	1.686	36,18	411	1.330	0,31
17	Ulaweng	2.477	3.378	73,33	1.033	1.650	62,61	893	1.273	0,70
18	Palakka	2.370	2.816	84,16	942	1.485	63,43	253	1.254	0,20
19	Awangpone	2.841	4.185	67,89	1.069	1.884	56,74	539	1.683	0,32
20	Tellu Siattinge	4.001	5.027	79,59	1.367	2.571	53,17	718	592	1,21
21	Amali	1.885	2.926	64,42	567	1.410	40,21	435	927	0,47
22	Ajangale	2.928	3.584	81,7	890	1.811	49,14	845	1.405	0,60
23	Dua Boccoe	3.165	4.235	74,73	686	1.973	34,77	260	1.587	0,16
24	Cenrana	2.912	3.777	77,1	901	1.579	57,06	777	1.281	0,61
25	TR Barat	3.742	4.764	78,55	778	2.740	28,39	3.338	3.121	1,07
26	Tanete Riattang	3.606	6.012	59,98	3.376	3.061	110,29	1.810	3.121	0,58
27	TR Timur	3.979	4.985	79,82	1.655	2.583	64,07	1.547	2.788	0,55
	Jumlah	74.874	96.791	77,36	28.615	47.417	60,35	22.757	39.088	0,58

Sumber: Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2009-2016

#### 2.4.1.1.3. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Aspek layanan pendidikan pada penduduk 5 tahun ke atas sampai dengan tingkat perguruan tinggi di tahun 2017 telah menghasilkan masyarakat terdidik sebesar 591.618 orang. Penduduk yang sempat menyelesaikan sampai pada jenjang pendidikan tinggi hanya 4,48 % saja, dan terdapat penduduk yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD sebesar 33,34 %. Ini adalah dua permasalahan yang sangat serius harus diselesaikan dalam sistem pelayanan pendidikan di Kabupaten Bone.

Tabel 2.32  
Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi  
Kabupaten Bone Tahun 2017

No	Pendidikan yang Ditamatkan	laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Tidak punya Ijazah SD	67.218	133.733	200.951	33,45
2	SD/MI Sederajat	70.091	139.450	209.541	34,88
3	SMP	24.074	47.896	71.970	11,98
4	SMA	26.706	53.134	79.840	13,29
5	Perguruan Tinggi	9.806	19.510	29.316	4,88
	Jumlah	197.896	393.722	591.618	98,48

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone*

Perkembangan pendidikan yang ditamatkan (APT) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Bone pada tingkat pendidikan SD dan SMP sangat berfluktuasi dan cenderung stagnan di tahun 2017. Jika dilihat dari perkembangan siswa SD yang ditamatkan di tahun 2013 sebanyak 14.952 terjadi peningkatan ditahun selanjutnya, namun di tahun 2017 turun menjadi 14.247. demikian juga untuk tingkat pendidikan SMP. Hal yang menjadi masalah adalah pada jenjang pendidikan SMA yang memperlihatkan angka fluktuasi yang sangat serius karena di tahun 2013 Kabupateb Bone menamatkan sebanyak 7.862 orang dan meningkat tajam di tahun 2015 sebesar 9.020, namun terjadi penurunan yang sangat tinggi di tahun 2017 hingga hanya mampu menamatkan 6.285 orang.

Tabel 2.33  
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)  
Tahun 2013-2017 Kabupaten Bone

No	APT	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	14.952	15.182	15.449	14.915	14.247
2	SMP	11.596	12.069	12.735	12.584	11.248
3	SMA	7.862	8.551	9.020	8.913	6.285
4	Perguruan Tinggi					

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone*

#### 2.4.1.1.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) yang ada di Kabupaten Bone terjadi penurunan setiap tahunnya terutama pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Untuk tingkat pendidikan SD/MI angka partisipasi Murni pada tahun 2013 sebesar 103,40% dan turun menjadi 87,16 % di tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa masih ada 12,84 %

anak usia sekolah 7 – 12 tahun yang belum tersepa dalam dunia pendidikan. Demikian juga halnya pada tingkat pendidikan SMP/MTs ditahun 2015 angka partisipasi murni sebesar 85,91% dan turun menjadi 81,53 % di tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa masih ada 18% lebih usia anak sekolah 13 – 15 tahun yang belum terserap pada tingkat pendidikan SMP/MTs. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dalam kurun 3 tahun terakhir cenderung stagnan atau tidak mengalami peningkatan. Dalam jumlah siswa yang berumur 16 – 18 tahun masih terdapat sekitar 30% yang tidak atau belum ikut serta dalam pendidikan SMA/MA/SMK.

Tabel 2.34  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	96.674	95.170	92.034	87.987	84.361
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	93.499	95.077	96.001	96.791	96.791
1.3.	APM SD/MI	103,40	100,10	95,87	90,90	87,16
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	38.045	38.911	40.054	39.614	38.658
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	44.926	45.704	46.622	47.417	47.417
2.3.	APM SMP/MTs	84,68	85,14	85,91	83,54	81,53
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	27.198	28.478	29.656	30.051	31.872
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	41.739	42.185	42.779	43.213	44.754
3.3.	APM SMA/MA/SMK	65,16	67,51	69,32	69,54	71,21

*Sumber : Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2009-2016*

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bone di tahun 2017 masih relatif rendah, terutama pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Untuk jenjang pendidikan SD/MI terdapat variasi APM dimasing-masing kecamatan. APM tertinggi pada jenjang pendidikan SD/MI ditunjukkan oleh Kecamatan Mare (98,86%) dan angka yang terendah di Kecamatan Amali (76,49%). Demikian juga



pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dimana masih banyak penduduk usia 13-15 tahun yang belum dapat terserap pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK memperlihatkan masalah yang sangat serius karena ada kecamatan yang hanya menunjukkan APM sebesar 13,19% (Kecamatan Tellu Limpoe).

Tabel. 2.35  
Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	Jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18th	APM
1	Bontocani	2.052	2.589	79,26	823	1.087	75,71	358	587	60,99
2	Kahu	4.463	4.805	92,88	2.275	2.399	94,83	1.478	1.869	79,08
3	Kajuara	4.165	4.256	97,86	2.068	2.217	93,28	1.285	2.009	63,96
4	Salomekko	2.069	2.419	85,53	886	1.051	84,30	308	815	37,79
5	Tonra	1.659	1.829	90,71	601	921	65,26	600	654	91,74
6	Patimpeng	1.943	2.288	84,92	887	1.096	80,93	487	883	55,15
7	Libureng	3.322	3.878	85,66	1.689	1.914	88,24	1.032	1.481	69,68
8	Mare	3.420	3.468	98,62	1.482	1.653	89,66	1.553	1.423	109,14
9	Sibulue	4.112	4.341	94,72	1.682	2.109	79,75	893	1.892	47,20
10	Cina	3.142	3.524	89,16	1.374	1.684	81,59	676	1.402	48,22
11	Barebbo	3.093	3.515	87,99	1.399	1.738	80,49	241	1.483	16,25
12	Ponre	1.686	2.115	79,72	596	954	62,47	326	665	49,02
13	Lappariaja	2.966	3.437	86,30	2.157	1.549	139,25	1.015	1.173	86,53
14	Lamuru	2.715	3.458	78,51	1.226	1.630	75,21	514	1.139	45,13
15	Tellu Limpoe	1.835	2.054	89,34	429	982	43,69	165	1.251	13,19
16	Bengo	2.677	3.126	85,64	809	1.686	47,98	411	1.330	30,90
17	Ulaweng	2.844	3.378	84,19	1.175	1.650	71,21	893	1.273	70,15
18	Palakka	2.476	2.816	87,93	839	1.485	56,50	253	1.254	20,18
19	Awangpone	3.754	4.185	89,70	1.524	1.884	80,89	539	1.683	32,03
20	Tellu Siattinge	4.328	5.027	86,10	1.912	2.571	74,37	718	592	121,28
21	Amali	2.238	2.926	76,49	799	1.410	56,67	435	927	46,93
22	Ajangale	2.978	3.584	83,09	1.288	1.811	71,12	845	1.405	60,14
23	Dua Boccoe	3.405	4.235	80,40	1.508	1.973	76,43	260	1.587	16,38
24	Cenrana	2.993	3.777	79,24	1.263	1.579	79,99	777	1.281	60,66
25	TR Barat	4.685	4.764	98,34	911	2.740	33,25	3.338	3.121	106,95
26	Tanete Riattang	4.564	6.012	75,91	5.076	3.061	165,83	1.810	3.121	57,99
27	TR Timur	4.777	4.985	95,83	1.980	2.583	76,66	1.547	2.788	55,49
	Jumlah	84.361	96.791	87,16	38.658	47.417	81,53	22.757	39.088	58,22

Sumber : Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2009-2016

#### 2.4.1.1.5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bone setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di tahun 2013 daya serap sekolah di Kabupaten Bone sebesar 84,68 persen yang

menunjukkan bahwa ada sebesar 15.32 persen penduduk usia sekolah yang tidak terserap dalam pendidikan masyarakat di Kabupaten Bone. Hal ini terjadi penurunan tingkat partisipasi dari tahun ketahun yang puncaknya di tahun 2017 angka Partisipasi sekolah menjadi 81,53 persen. Ini menjadi permasalahan utama untuk dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bone.

Tabel. 2.36  
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017 Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah murid 7-12 tahun	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM
1	Bontocani	2.052	2.589	79,26	823	1.087	75,71
2	Kahu	4.463	4.805	92,88	2.275	2.399	94,83
3	Kajuara	4.165	4.256	97,86	2.068	2.217	93,28
4	Salomekko	2.069	2.419	85,53	886	1.051	84,30
5	Tonra	1.659	1.829	90,71	601	921	65,26
6	Patimpeng	1.943	2.288	84,92	887	1.096	80,93
7	Libureng	3.322	3.878	85,66	1.689	1.914	88,24
8	Mare	3.420	3.468	98,62	1.482	1.653	89,66
9	Sibulue	4.112	4.341	94,72	1.682	2.109	79,75
10	Cina	3.142	3.524	89,16	1.374	1.684	81,59
11	Barebbo	3.093	3.515	87,99	1.399	1.738	80,49
12	Ponre	1.686	2.115	79,72	596	954	62,47
13	Lappariaja	2.966	3.437	86,30	2.157	1.549	139,25
14	Lamuru	2.715	3.458	78,51	1.226	1.630	75,21
15	Tellu Limpoe	1.835	2.054	89,34	429	982	43,69
16	Bengo	2.677	3.126	85,64	809	1.686	47,98
17	Ulaweng	2.844	3.378	84,19	1.175	1.650	71,21
18	Palakka	2.476	2.816	87,93	839	1.485	56,50
19	Awangpone	3.754	4.185	89,70	1.524	1.884	80,89
20	Tellu Siattinge	4.328	5.027	86,10	1.912	2.571	74,37
21	Amali	2.238	2.926	76,49	799	1.410	56,67
22	Ajangale	2.978	3.584	83,09	1.288	1.811	71,12
23	Dua Boccoe	3.405	4.235	80,40	1.508	1.973	76,43
24	Cenrana	2.993	3.777	79,24	1.263	1.579	79,99
25	TR Barat	4.685	4.764	98,34	911	2.740	33,25
26	Tanete Riattang	4.564	6.012	75,91	5.076	3.061	165,83
27	TR Timur	4.777	4.985	95,83	1.980	2.583	76,66
	Jumlah	84.361	96.791	87,16	38.658	47.417	81,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

Tabel. 2.37  
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
<b>1.1.</b>	jumlah siswa usia 7-12 tahun	96.674	95.170	92.034	87.987	84.361
<b>1.2.</b>	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	93.499	95.077	96.001	96.791	96.791
<b>1.3.</b>	APS SD/MI	103,40	100,10	95,87	90,90	87,16
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
<b>2.1.</b>	jumlah siswa usia 13-15 tahun	38.045	38.911	40.054	39.614	38.658
<b>2.2.</b>	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	44.926	45.704	46.622	47.417	47.417
<b>2.3.</b>	APS SMP/MTs	84,68	85,14	85,91	83,54	81,53

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018*

#### 2.4.1.1.6. Angka Putus Sekolah

Tabel. 2.38  
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,12	0,1	0,09	0,8	0,08

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018*

Jumlah anak putus Sekolah jenjang pendidikan dasar SD/MI dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 0,12 pada tahun 2013 turun menjadi 0,1 pada tahun 2014 dan turun lagi menjadi 0,09 pada tahun 2015 dan semakin berkurang di tahun 2017 sebesar 0,08.

Tabel. 2.39  
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,02	0,07	0,05	0,1	0,1

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018*

Jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama SMP/MTs dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Dari 0,02 pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 0,07 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mulai menurun menjadi 0,05 namun mengalami peningkatan kembali sebesar 0,1 di tahun 2016 dan 2017.

Tabel. 2.40  
Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,03	0,02	0,01	-	-

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018*

Jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas SMA/SMK/MA dari tahun 2013 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan. Dari 0,03 pada tahun 2013 turun menjadi 0,02 pada tahun 2014 dan 0,01 pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 sudah menjadi kewenangan provinsi.

#### 2.4.1.1.7. Angka Kelulusan

Tabel. 2.41  
Angka Kelulusan (AL) SD/MI

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Lulusan	14.952	15.182	15.449	14.915	13.677
2	Jumlah Siswa Kelas VI	14.982	15.189	15.449	14.915	13.984
3	Angka Lulusan SD/MI	99,80	99,95	100	100	97,80

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018*

Angka kelulusan SD/MI dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2015 dan 2016, peserta didik tingkat SD di Kabupaten Bone yang lulus dan menyelesaikan pendidikan mencapai 100 persen. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan hingga 97,80 persen akibat adanya beberapa faktor penyebab antara lain kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel. 2.42  
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Lulusan	11.596	12.069	17.524	12.584	12.245
2	Jumlah Siswa Kelas IX	11.764	12.090	17.524	12.584	12.431
3	Angka Lulusan SMP/MTs	98,57	99,83	100	100	98,50

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018*

Angka kelulusan SMP/MTs dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2015 dan 2016, peserta didik

tingkat SMP/MTs di Kabupaten Bone yang lulus dan menyelesaikan pendidikan mencapai 100 persen. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 98,50 persen akibat adanya beberapa faktor penyebab antara lain kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan.

#### 2.4.1.1.8. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Ketersediaan sekolah adalah merupakan bentuk layanan dasar dari sebuah sistem pemerintahan daerah. Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah dengan rasio 1:24,7 dan terjadi peningkatan rasio disetiap tahunnya sehingga di tahun 2017 mencapai 1:42,15. Ini menjadi permasalahan berkaitan dengan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah murid yang semakin bertambah di tahun yang akan datang.

Tabel 2.44  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>SD/MI</b>					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	756	756	756	758	759
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 - 12 Tahun	93.499	95.077	96.001	96.791	97.591
1.3	Rasio	8,09	7,95	7,87	7,83	7,78
2	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	209	217	211	211	219
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun	44.926	45.704	46.622	47.417	48.215
2.3	Rasio	4,65	4,75	4,53	4,50	4,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

Ketersediaan sekolah untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone untuk jenjang sekolah Dasar/MI dan Sekolah Menengah Pertama/MTs cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk disetiap kecamatan. Angka rata-rata perbandingan antara jumlah sekolah dengan penduduk mempunyai rasio 1:19 untuk sekolah Dasar/MI dan untuk tingkat sekolah menengah Pertama /MTs rata-rata perbandingannya adalah 1:35. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruangan menunjukkan peningkatan ketersediaan layanan pendidikan.

Tabel 2.45  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	Bontocani	39	2.589	1:66	27	1.087	1:40
2	Kahu	212	4.805	1:23	79	2.399	1:30
3	Kajuara	230	4.256	1:19	40	2.217	1:55
4	Salomekko	130	2.419	1:19	57	1.051	1:18
5	Tonra	102	1.829	1:18	25	921	1:37
6	Patimpeng	112	2.288	1:20	19	1.096	1:58
7	Libureng	253	3.878	1:15	48	1.914	1:40
8	Mare	230	3.468	1:15	74	1.653	1:22
9	Sibulue	259	4.341	1:17	74	2.109	1:29
10	Cina	220	3.524	1:16	53	1.684	1:32
11	Barebbo	227	3.515	1:15	59	1.738	1:29
12	Ponre	116	2.115	1:18	37	954	1:26
13	Lappariaja	133	3.437	1:26	44	1.549	1:35
14	Lamuru	152	3.458	1:23	42	1.630	1:39
15	Tellu Limpoe	89	2.054	1:23	22	982	1:45
16	Bengo	150	3.126	1:21	28	1.686	1:60
17	Ulaweng	183	3.378	1:18	31	1.650	1:53
18	Palakka	187	2.816	1:15	47	1.485	1:32
19	Awangpone	234	4.185	1:18	58	1.884	1:32
20	Tellu Siattinge	291	5.027	1:17	89	2.571	1:29
21	Amali	157	2.926	1:19	10	1.410	1:141
22	Ajangale	198	3.584	1:18	43	1.811	1:42
23	Dua Boccoe	305	4.235	1:14	39	1.973	1:51
24	Cenrana	229	3.777	1:16	53	1.579	1:30
25	TR Barat	134	4.764	1:36	-	2.740	-
26	Tanete Riattang	301	6.012	1:20	74	3.061	1:41
27	TR Timur	201	4.985	1:25	166	2.583	1:16
	Jumlah	5.074	96.791	1:19	1.338	47.417	1:35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.1.9. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio jumlah Guru dan murid untuk pendidikan SD/MI dan SMP/MTs setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rasio jumlah guru dan murid di tahun 2013 untuk Pendidikan Dasar SD/MI sebesar 1:12,79 meningkat menjadi 1:13,81 di tahun 2017. Sedangkan untuk sekolah SMP/MTs di tahun 2013 adalh 9,98 meningkat menjadi 13,99. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bone berada pada titik batas rasio secara nasional untuk SD atau yang sederajat 20:1; dan untuk SMP/MTs sebesar 15:1.

Tabel 2.46  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bone. 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>SD/MI</b>					
1.1	Jumlah Guru	8.565	6.986	6.633	6.792	7.010
1.2	Jumlah Murid	96.674	95.537	92.034	88.236	88.153
1.3	Rasio	88,60	73,12	72,07	76,98	79,52
2	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah Guru	3.830	3.505	3.386	3.264	3.195
2.2	Jumlah Murid	38.225	39.701	39.974	47.703	47.884
2.3	Rasio	100,20	88,28	84,71	68,42	66,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

Aspek layanan pendidikan disetiap kecamatan masih dalam batas normal. Rata-rata disetiap kecamatan untuk perbandingan Guru dan Murid pada tingkat sekolah Dasar/MI sebesar 1:12 dan untuk SMP/MTs perbandingannya adalah 1:14.

Tabel 2.47  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Bontocani	171	1.983	1:12	53	678	1:13
2	Kahu	283	3.490	1:12	108	1.727	1:16
3	Kajuara	292	3.912	1:13	84	1.325	1:15
4	Salomekko	126	1.842	1:14	53	744	1:14
5	Tonra	169	1.632	1:10	41	466	1:17
6	Patimpeng	134	1.583	1:12	59	709	1:14
7	Libureng	266	3.274	1:12	98	1.123	1:11
8	Mare	273	3.284	1:12	106	1.386	1:13
9	Sibulue	290	3.682	1:13	105	1.243	1:11
10	Cina	249	3.964	1:16	84	1.195	1:14
11	Barebbo	282	2.763	1:10	108	1.261	1:12
12	Ponre	157	1.472	1:9	45	455	1:10
13	Lappariaja	160	2.075	1:12	80	1.344	1:17
14	Lamuru	164	2.064	1:13	42	632	1:15
15	Tellu Limpoe	112	1.749	1:16	35	453	1:13
16	Bengo	173	2.199	1:13	47	610	1:13
17	Ulaweng	227	2.477	1:10	55	1.033	1:19
18	Palakka	193	2.370	1:12	86	942	1:11
19	Awangpone	266	2.841	1:11	87	1.069	1:12
20	Tellu Siattinge	329	4.001	1:12	80	1.367	1:17
21	Amali	189	1.885	1:10	51	567	1:11
22	Ajangale	201	2.928	1:15	71	890	1:13
23	Dua Boccoe	297	3.165	1:11	46	686	1:15
24	Cenrana	248	2.912	1:12	56	901	1:16
25	TR Barat	213	3.742	1:17	56	778	1:14
26	Tanete Riattang	392	3.606	1:9	219	3.376	1:15
27	TR Timur	251	3.979	1:16	91	1.655	1:18
	Jumlah	6.107	74.874	1:12	2.046	28.615	1:14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018



#### 2.4.1.1.10. Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Angka melek huruf di Kabupaten Bone sudah cukup baik di tahun 2017 karena secara prosentase telah mencapai angka 100 %, namun jika dilihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 capaiannya masih berada disekitar 49% sampai dengan 51 %. Namun jika dilihat dari angka mutlak dari angka jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang sudah bisa membaca dibandingkan dengan jumlah penduduk diatas usia 15 tahun masih ada beberapa yang belum melek huruf secara keseluruhan.

Tabel 2.48  
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013-2017 Kabupaten Bone

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	313.638	307.852	313.638	326.479	326.479
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	631.406	633.660	628.904	641.724	326.511
3	Angka Melek Huruf	50	49	50	51	100

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel 2.49  
Angka Melek Huruf Tahun 2017 Menurut Kecamatan Kabupaten Bone

No	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Bontocani	13.583	13.697	110
2	Kahu	36.426	35.162	110
3	Kajuara	35.980	32.400	259
4	Salomekko	15.539	13.652	497
5	Tonra	13.194	11.985	701
6	Patimpeng	16.488	14.982	1.312
7	Libureng	23.563	26.543	200
8	Mare	25.022	23.297	1.817
9	Sibulue	34.206	30.348	110
10	Cina	25.455	23.376	110
11	Barebbo	27.523	24.708	570
12	Ponre	12.715	12.337	120
13	Lappariaja	23.824	21.619	838
14	Lamuru	24.969	22.826	1.686
15	Tellu Limpoe	14.097	12.258	140
16	Bengo	25.481	23.210	1.665
17	Ulaweng	24.731	22.044	834
18	Palakka	22.639	20.174	949
19	Awangpone	28.560	26.337	149
20	Tellu Siattinge	38.218	35.960	130
21	Amali	19.799	18.774	120
22	Ajangale	26.100	24.631	120
23	Dua Boccoe	28.827	26.971	30
24	Cenrana	23.269	21.188	680

25	TR Barat	48.098	44.584	431
26	Tanete Riattang	51.404	45.645	382
27	TR Timur	42.409	39.138	270
	Jumlah	722.119	667.846	14.340

Sumber: Data Diolah, 2018

Angka melek huruf secara keseluruhan di Kabupaten Bone berdasarkan sebaran Kecamatan, maka angka melek huruf diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone sebesar 14.340 Penduduk. Namun besaran angka melek huruf tersebut di setiap Kecamatan mempunyai variasi melek huruf yang sangat timpang dan sangat jauh perbedaanya. Perbedaan tersebut antara setiap kecamatan sangat berbeda, yakni kecamatan yang memiliki angka melek huruf yang paling rendah adalah sebesar 30 Penduduk dan yang paling tinggi adalah 1.817 Penduduk. Ini menunjukkan bahwa permasalahan pemerataan melek huruf di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone masih sangat Timpang. Ini menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang belum merata pada sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

#### 2.4.1.1.11. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Tabel. 2.50  
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

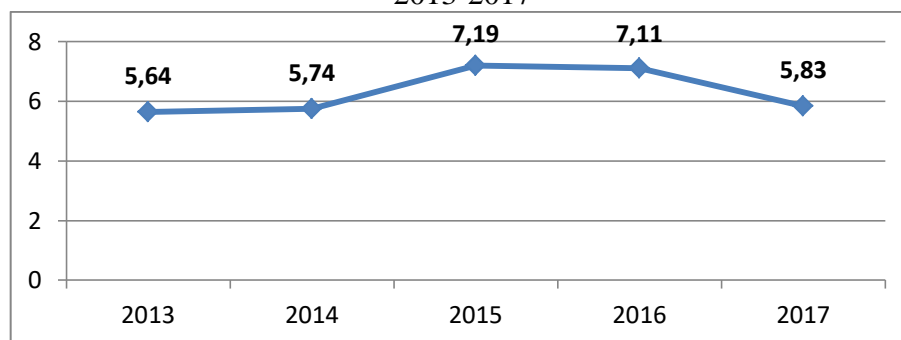
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Guru berkualifikasi S1 Keatas SD/MI	72,75	82,57	87,31	90,63	100
2	Persentase Guru berkualifikasi S1 keatas SMP/MTs	100	100	100	96,72	100
3	Persentase Guru berkulifikasi S1 keatas SMA/SMK/MA	96,68	98,36	99,25	-	-

#### 2.4.1.2. Kesehatan

##### 2.4.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2013 sebesar 5,64 dan pada tahun berikutnya turun menjadi 5,74. Pada tahun berikutnya meningkat menjadi 7,19 pada tahun 2015, dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan kembali dari 7,11 pada tahun 2016 menjadi 5,83 pada tahun 2017. Dimana pencapaian tersebut lebih tinggi dari target SDG'S tahun 2017 sebesar 1,02. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius untuk segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait agar di tahun mendatang angka kematian bayi (AKB) dapat terus ditekan.

Grafik 2.48  
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone,  
2013-2017



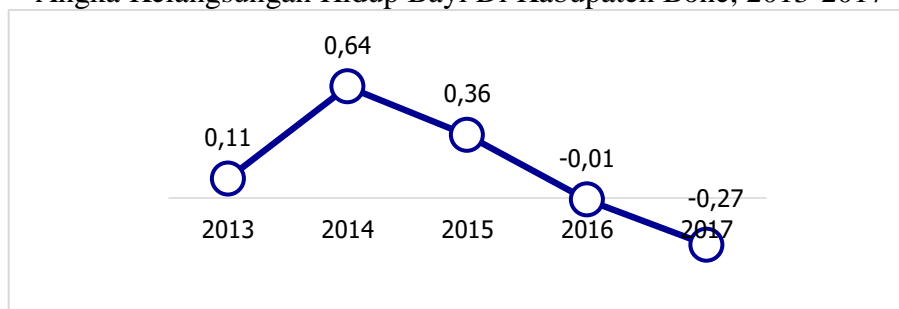
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

##### 2.4.1.2.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Karena angka kematian bayi terus meningkat dalam lima tahun terakhir, berdampak pada semakin rendahnya angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Bone. Angka kelangsung hidup bayi paling tinggi hanya di tahun 2014 mencapai 0,46, naik dari 0,11 tahun 2013. Setelah tahun 2014, angka kelangsung hidup bayi di Kabupaten Bone terus menurun dari 0,36 ke -0,01 dan akhirnya mencapai angka terendah -0,27 masing-masing di tahun 2015, 2016, dan 2017.

Rendahnya angka kelangsung hidup bayi menjadi gambaran bahwa pemerintah daerah harus berupaya lebih keras untuk memperbaiki kualitas kesehatan ibu dan anak, terutama pada masa kehamilan dan pasca melahirkan.

Grafik 2.49  
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Di Kabupaten Bone, 2013-2017

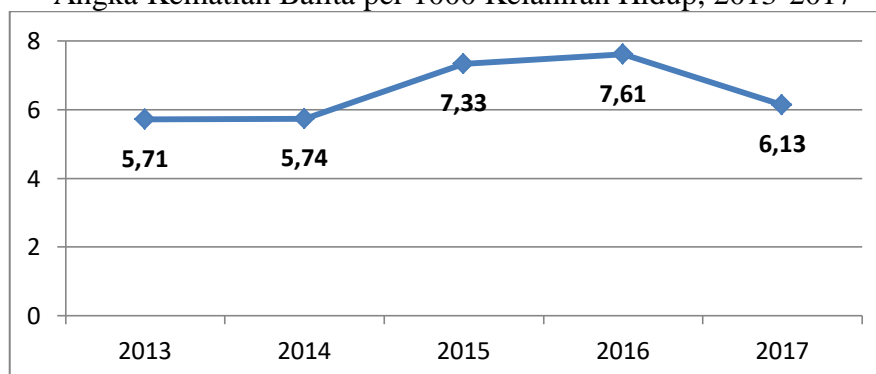


Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.1.2.3. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) menjadi fokus utama bagi Dinas Kesehatan. Berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada target tersebut dilanjutkan kembali, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya, mengingat bahwa perlu keterpaduan berbagai kegiatan dan kesinambungan program dari tahun ke tahun. Puncak tertinggi dari angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016 sebesar 7,61 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 6,13.

Grafik 2.50  
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup, 2013-2017

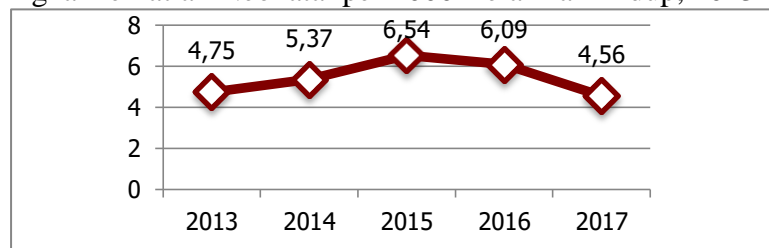


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Tahun 2016 dan 2017 angka kematian Neonatal mengalami penurunan walaupun pada tahun sebelumnya (2013-2015) cenderung meningkat. Hal ini menandakan adanya keseriusan dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian neonatal yang ada di Kabupaten Bone.

Grafik 2.51  
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup, 2013-2017

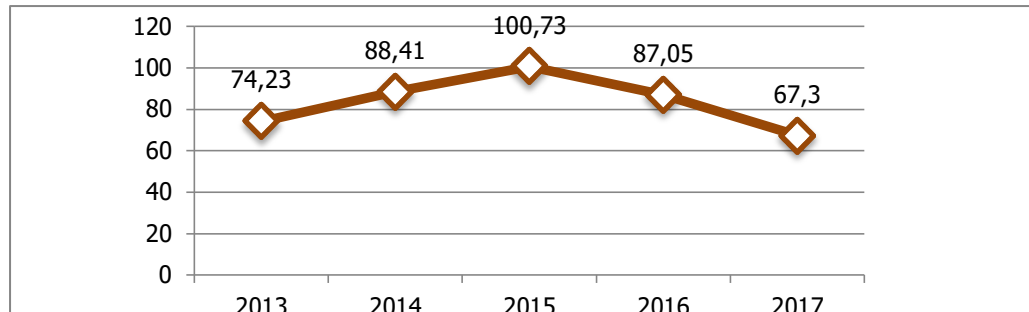


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bone mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 Tahun. Angka kematian ibu pada tahun 2013 yaitu 74,23/100.000 KH menjadi 100,73 pada tahun 2015 dan ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 87,04 per 100.000 KH, dan pada tahun 2017 berkurang kembali menjadi 67,30. Angka ini jauh dibawah target RPJMD yang mencanangkan 27,1 per 100.000 KH. Hal ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia perlu menjadi perhatian serius dan penanganan secara berkesinambungan

Grafik 2.52  
Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone,  
2013-2017

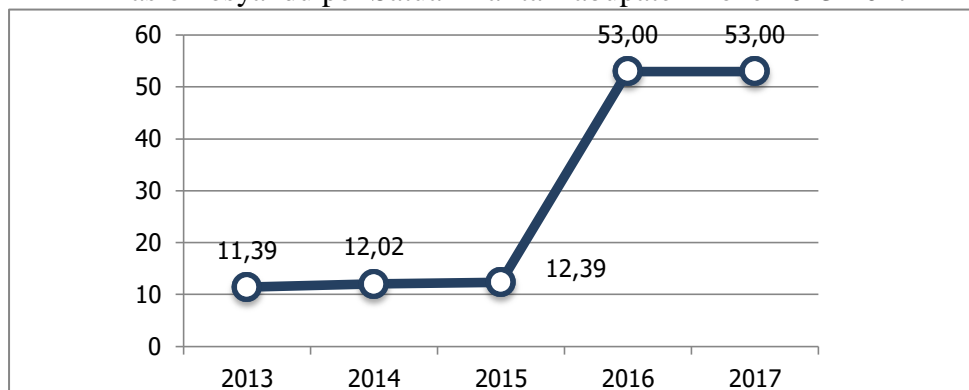


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu dibagi jumlah balita pada tahun tertentu dikalikan 1000. Pada tahun 2017 jumlah Posyandu Aktif yang tersebar di Kabupaten Bone mencapai jumlah 970 dengan rasio meningkat pada tahun 2016 - 2017 sebesar 53 persen.

Grafik 2.53  
Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten Bone 2013-2017



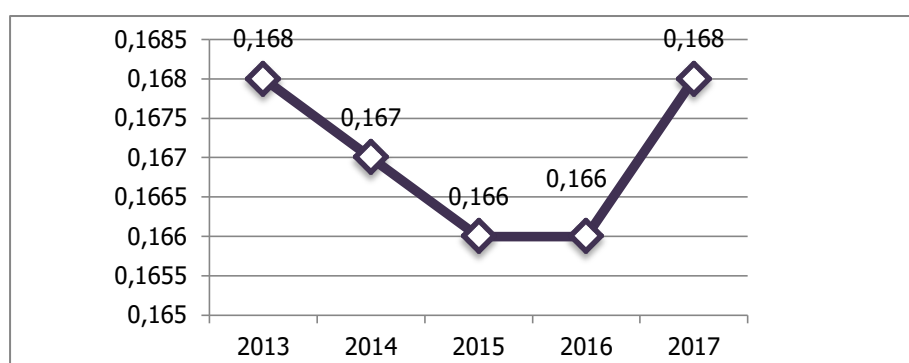
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu PerSatuan Penduduk

Laporan Kementerian Kesehatan dalam Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan bahwa pada 2015, rasio ketersediaan Puskesmas terhadap 30.000 penduduk di Indonesia adalah 1,15. Dalam hal ini berarti bahwa, satu puskesmas dapat melayani sekitar

26.000 penduduk di Indonesia. Di Kabupaten Bone jumlah Puskesmas adalah 38, Pustu 74 dan 14 Klinik. Adapun rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kabupaten Bone tahun 0,168 persen. Hal ini didapatkan dari penjumlahan dari 38 Puskesmas ditambah 74 Pustu dan 14 Klinik totalnya 126 dan di bagi total jumlah penduduk Kabupaten Bone (746.973) dikalikan 1000 dan hasilnya adalah 0,168 persen.

Grafik 2.54  
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kabupaten Bone, 2013-2017



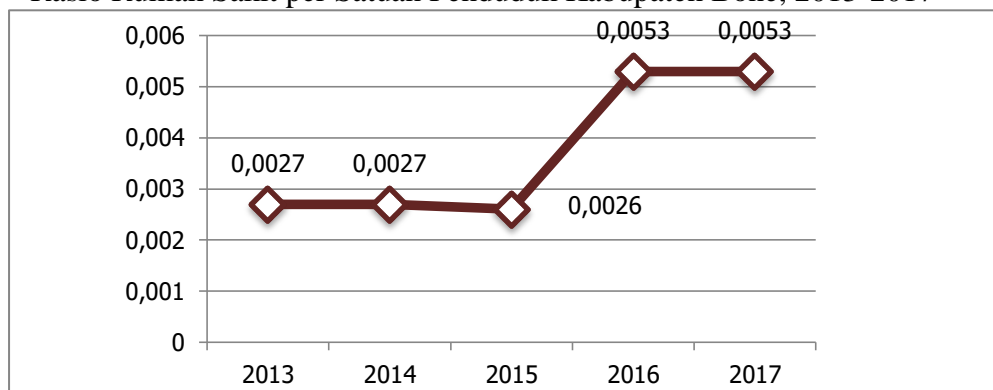
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.8. Rasio Rumah Sakit PerSatuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Bone sejak 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Bone sudah bertambah. Tahun 2013 sampai dengan 2015 jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Bone adalah 2 Rumah Sakit Pemerintah. Pada Tahun 2016 ada 2 tambahan Rumah Sakit, 1 Rumah Sakit Swasta dan 1 Rumah Sakit Pemerintah tipe c, sehingga pada tahun selanjutnya diharapkan Rumah Sakit ini mampu menangani permasalahan kesehatan bagi masyarakat Bone.



Grafik 2.55  
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Bone, 2013-2017



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018*

#### 2.4.1.2.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan ketersediaan SDM dokter di Kabupaten Bone masih sangat tinggi. Kabupaten Bone memiliki 27 Kecamatan dan penduduk yang besar dan tentunya membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang tinggi dari tenaga kesehatan khususnya dokter.

Tabel.2.51  
Persebaran Tenaga Medis Menurut Unit Kerja Kabupaten Bone, 2017

No	Jenis Tenaga	Puskesmas	Rumah Sakit	Balai Kesehatan Gigi	Dinkes
1	Dokter Spesialis	0	12	0	1
2	Dokter Umum	30	15	0	2
3	Dokter Gigi	15	2	4	0
	Total	45	29	4	3

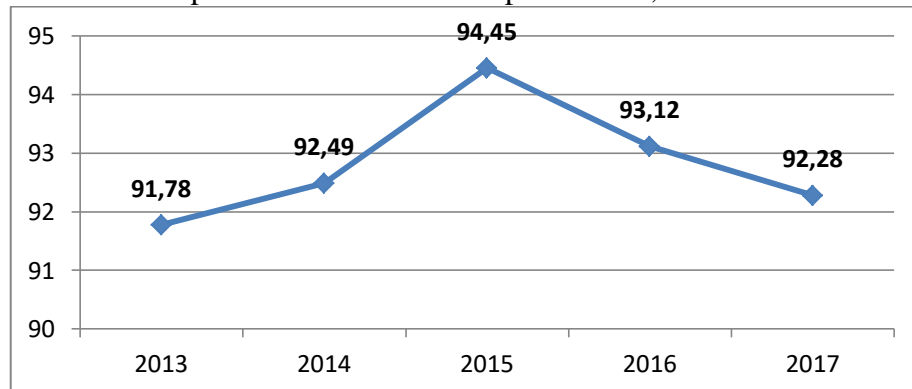
*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018*

#### 2.4.1.2.10. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Indikator Cakupan Persalinan yang ditolong oleh Bidan atau tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan mencapai 110,42 persen. Hal ini merupakan sebuah prestasi besar dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi mengingat bahwa seringkali penyebab kematian ibu dan bayi saat melahirkan adalah karena ditolong/ditindak oleh dukun atau orang yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dibidang persalinan. Kejadian pendarahan, infeksi, atau pun timbulnya eklampsia pasca persalinan adalah penyebab utama kefatalan dalam persalinan. Faktor lain yang cukup

berhasil dan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program adalah indikator gizi buruk, gizi kurang dan penanganannya yang telah sesuai target.

Gambar. 2.56  
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Bone, 2013-2017



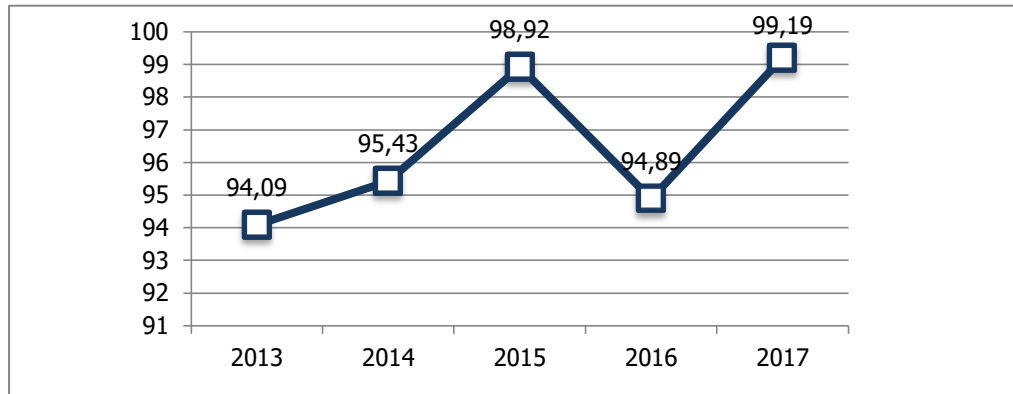
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.11. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Pencapaian UCI desa/ kelurahan tahun 2009 di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 69,6 persen. Hal ini disebabkan antara lain karena fokus perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah belum optimal terhadap program imunisasi, terbatasnya dana operasional untuk imunisasi baik rutin maupun tambahan, dan tidak tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang adekuate. Selain itu juga kurangnya koordinasi lintas sektor termasuk pelayanan kesehatan swasta, kurang sumber daya yang memadai serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program dan manfaat imunisasi.

Guna mecapai target 100 persen UCI desa/ kelurahan pada tahun 2014 perlu dilakukan berbagai upaya percepatan melalui Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional untuk mencapai UCI (GAIN UCI). Di Kabupaten Bone Program UCI sendiri sudah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan dikarenakan masih menggunakan data proyeksi di tahun 2015. Namun di Tahun 2017 sudah meningkat lagi dan sudah menggunakan data riil.

Grafik 2.57  
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* Kabupaten Bone, 2013-2017

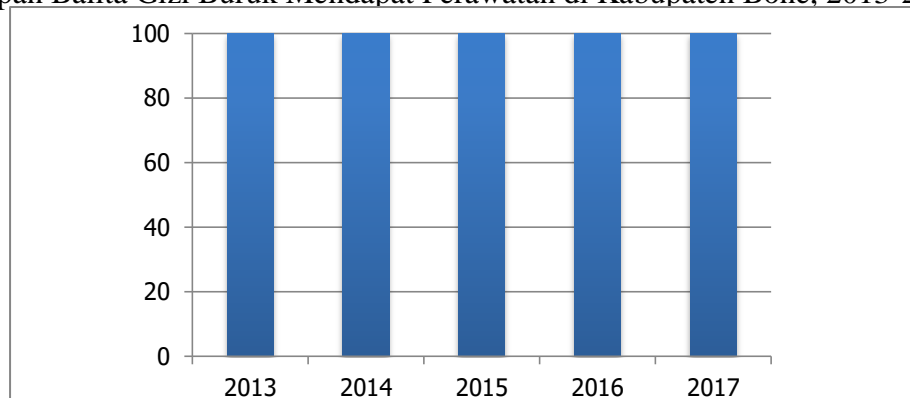


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.12. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan energi dan protein juga mikronutrien dalam jangka waktu lama. Anak disebut gizi buruk apabila berat badan dibanding umur tidak sesuai (selama 3 bulan berturut-turut tidak naik). Perawatan bagi balita Gizi Buruk di Kabupaten sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 telah tertangani dengan baik. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan, menunjukkan angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kabupaten bone memiliki perhatian serius terhadap permasalahan gizi buruk tersebut.

Grafik 2.58  
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Bone, 2013-2017

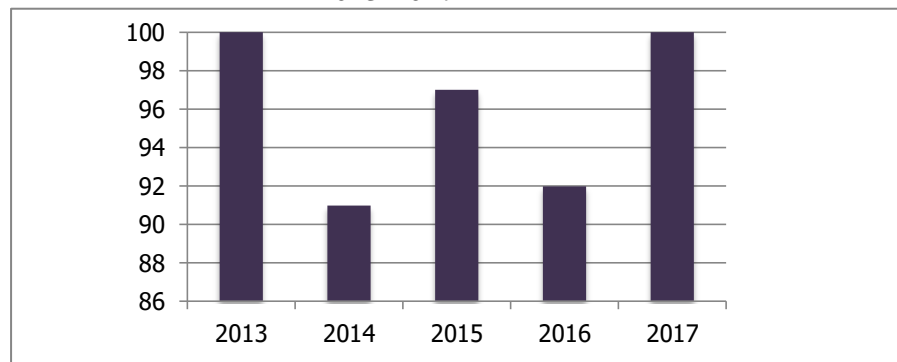


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.13. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Indonesia dinyatakan telah berhasil menekan terjangkitnya jumlah penyakit cacar dan polio. Pada 2020 mendatang, Indonesia diharapkan untuk terbebas dari penyakit campak. Di Kabupaten Bone selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan dan penurunan persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi. Pada tahun 2017 telah menunjukkan nilai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa imunisasi campak bagi anak usia 1 tahun di Kabupaten Bone telah merata dan dilakukan secara menyeluruh, dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya tetap akan berada di persentase 100 persen.

Grafik 2.59  
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Bone, 2013-2017

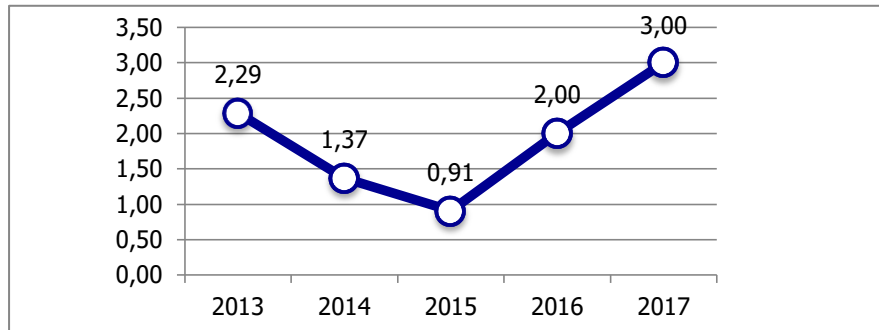


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.14. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Jumlah Non Polio AFR Rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Bone sejak tahun 2013 mencapai angka 2,29 persen terjadi penurunan selama 2 tahun menjadi 0,91 persen dan pada 2016 dan 2017 meningkat menjadi 3 persen.

Grafik 2.60  
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kabupaten Bone, 2013-2017

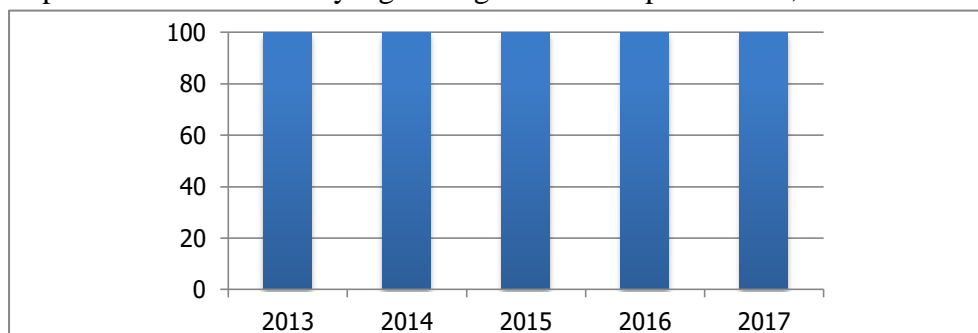


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.15. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia merupakan infeksi saluran pernafasan bawah akut umumnya menyebabkan hampir semua kematian ISPA pada balita. Di negara berkembang pneumonia merupakan penyakit yang terabaikan (*the neglected disease*) atau penyakit yang terlupakan (*the forgotten disease*) karena begitu banyak anak yang meninggal karena pneumonia, namun sangat sedikit perhatian yang diberikan kepada masalah pneumonia. Tetapi hal ini tidak berlaku di Kabupaten Bone karena cakupan balita pneumonia yang ditangani telah mencapai 100 persen selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

Grafik 2.61  
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Di Kabupaten Bone, 2013-2017

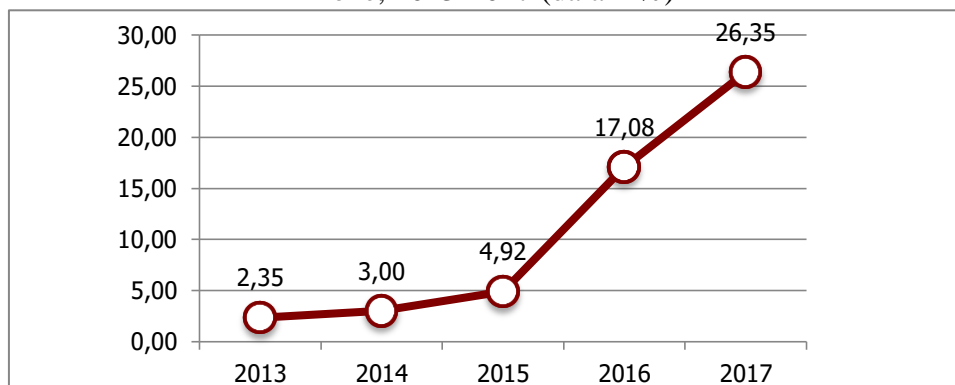


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.16. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC-BTA

Penemuan pasien baru TBC-BTA Positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Di tahun 2013 Dinas Kesehatan dalam hal ini Seksi P2M Dinas Kesehatan telah mendapatkan nilai Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TB-BTA selama 5 tahun terakhir. Di tahun 2013 sampai 2017 penanggulangan terus meningkat dari 2,35 dan terus naik sehingga pada tahun 2017 mencapai nilai 26,35 persen.

Grafik 2.62  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)



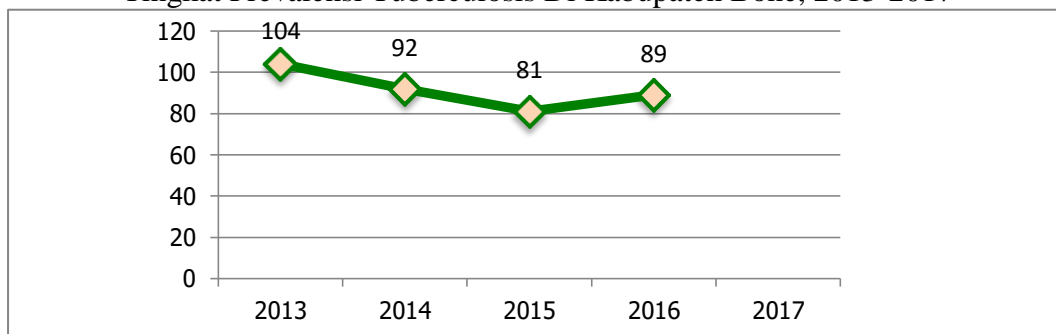
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.17. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Penanganan penyakit TB dilakukan secara komprehensif dari penemuan kasus hingga pengobatan pada pasien TB. Tanpa pengobatan maka angka kematian akibat TB menjadi tinggi. Selain untuk menyembuhkan pasien dan mencegah kematian, tujuan pengobatan TB lainnya yaitu mencegah kekambuhan dan memutuskan rantai penularan. Salah satu upaya untuk menekan timbulnya kasus TB serta kematian akibat TB adalah membentuk strategi pengobatan TB secara global. Sekitar 37 juta orang berhasil diselamatkan melalui

diagnosa dan pengobatan TB pada periode 2000-2013 (WHO,2014). Adapun tingkat prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Bone per 100.000 penduduk dari tahun 2013 adalah 104,0, 2014 dan 2015 terjadi penurunan dari 92,0 menjadi 81,0 dan 2016 naik menjadi 89,0 persen.

Grafik 2.63  
Tingkat Prevalensi Tuberculosis Di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

Penanganan penyakit TB dilakukan secara komprehensif dari penemuan kasus hingga pengobatan pada pasien TB. Selain untuk menyembuhkan pasien dan mencegah kematian, tujuan pengobatan TB lainnya yaitu mencegah kekambuhan dan memutuskan rantai penularan. Salah satu upaya untuk menekan timbulnya kasus TB serta kematian akibat TB maka dibentuk strategi pengobatan TB secara global. Sekitar 37 juta orang berhasil diselamatkan melalui diagnosa dan pengobatan TB pada periode 2000-2013 (WHO,2014). Adapun tingkat prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Bone per 100.000 penduduk dari tahun 2013 adalah 104,0, 2014 dan 2015 terjadi penurunan dari 92,0 menjadi 81,0 dan 2016 naik menjadi 89,0 persen.

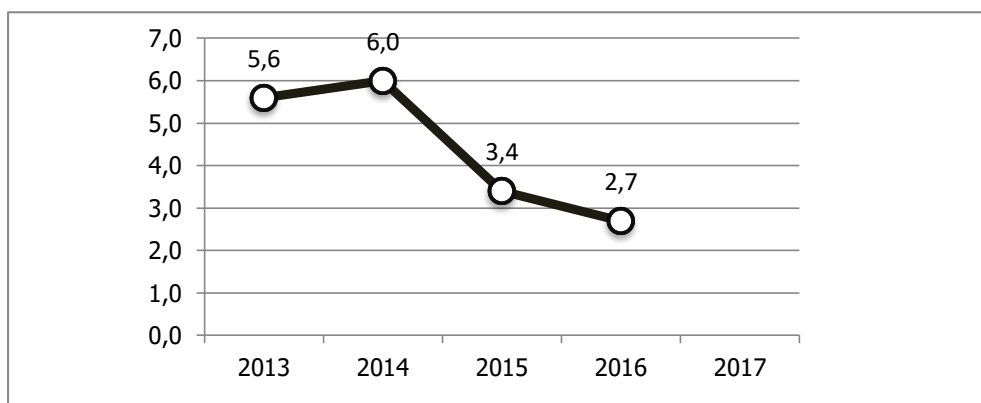
#### **2.4.1.2.18. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular yang sangat berbahaya. Di Indonesia, kasus TBC terus meningkat. Menurut Kepala Bidang Penyakit Menular dan Tropis, Departemen Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas



Indonesia, *Hindri*, tuberkulosis berada di urutan kedua dari sejumlah penyakit menular yang masuk 10 besar penyebab kematian di Indonesia. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini tidak lepas dari rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih. Tempat hidup yang kotor merupakan tempat tumbuh kembang virus, bakteri, dan kuman penyakit. Selain itu kualitas air dan sanitasi juga memiliki dampak yang fatal. Di Kabupaten Bone tingkat kematian karena Tuberkulosis dari tahun ketahun mengalami penurunan jumlah kasus kematian per 100.000 penduduk. Tahun 2013 angka mencapai 5,60% dan tahun 2016 turun menjadi 2,70%.

Grafik 2.64  
Tingkat Kematian Karena Tuberculosis Di Kabupaten Bone, 2013-2017



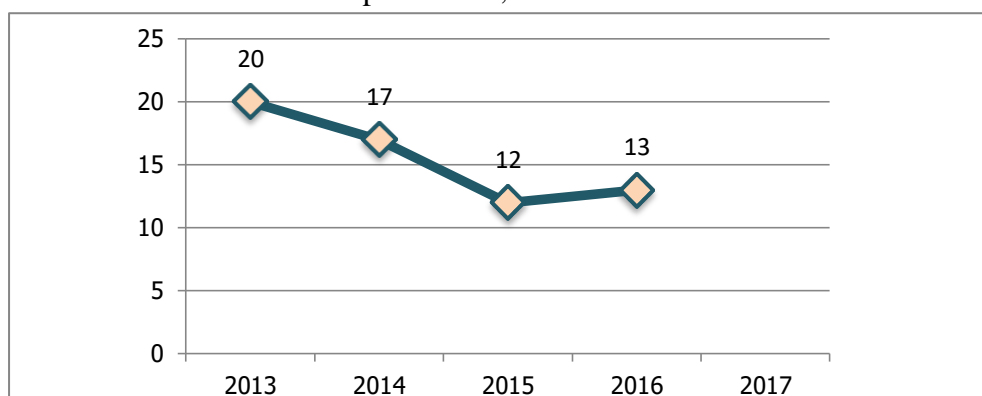
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.19. Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment, Short-course*) adalah pengawasan langsung pengobatan jangka pendek. DOTS dapat dimulai dengan keharusan setiap pengelola program tuberkulosis untuk *direct attention* dalam usaha menemukan penderita dengan kata lain mendeteksi kasus dengan pemeriksaan mikroskop. Kemudian setiap penderita harus di *observed* dalam memakan obatnya, setiap obat yang ditelan penderita harus di depan seorang pengawas. Selain itu tentunya penderita harus menerima *treatment* yang tertata dalam sistem pengelolaan, distribusi dengan penyediaan obat yang cukup.

Kemudian, setiap penderita harus mendapat obat yang baik, artinya pengobatan *short course* standar yang telah terbukti ampuh secara klinis. Akhirnya, harus ada dukungan dari pemerintah yang membuat program penanggulangan tuberkulosis mendapat prioritas yang tinggi dalam pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone khususnya Dinas Kesehatan telah melaksanakan Program DOTS ini selama beberapa tahun dengan didaptkannya Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi. Pada tahun 2013 sampai 2015 terjadi penurunan jumlah proporsi dan tahun 2016 meningkat menjadi 13 persen.

Grafik 2.65  
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

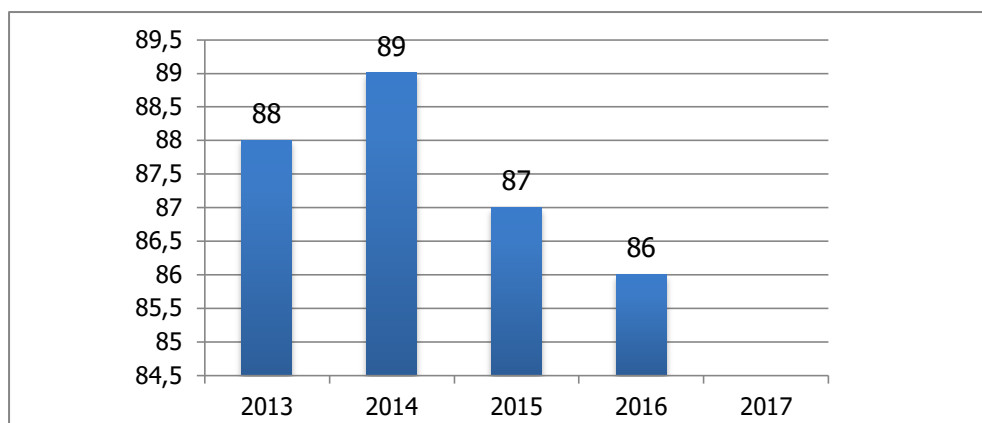
#### 2.4.1.2.20. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Indonesia merupakan an negara dengan jumlah penderita TB paru terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Cina. Jumlah penderita TBC sebesar 10 persen dari total penderita TB paru dunia. Pelayanan TB strategi DOTS merupakan program nasional dan menjadi sasaran Millenium Development Goals (MDG's), disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran mutakhir dan standar yang telah disepakati oleh seluruh organisasi profesi di dunia, yang memanfaatkan kemampuan dan fasilitas rumah sakit secara optimal dengan mengupayakan kesembuhan dan pemulihan

pasien melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan serta memenuhi etika kedokteran. Proporsi kasus Tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Bone sudah baik. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 meningkat dari angka 88 persen menjadi 89 persen. Pada tahun berikutnya 2015 dan 2016 terjadi penurunan dari angka 87 persen menjadi 86 persen.

Grafik 2.66

Proporsi Kasus Tuberculosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)

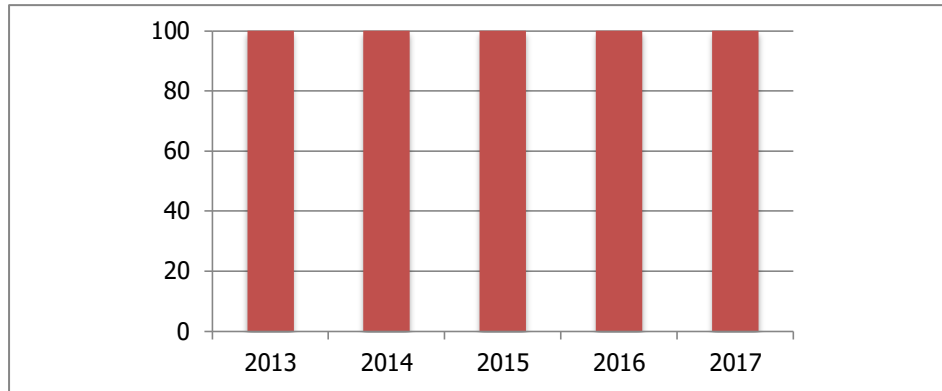


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.21. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Penyakit ini dikenal dengan gejala yang sangat khas, yaitu suhu tubuh tinggi atau panas sekaligus nyeri sendi, sakit kepala, otot, tulang, dan sakit area belakang mata. Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Di Kabupaten Bone sendiri penanganan untuk penderita DBD sudah tertangani dengan baik dalam kurun waktu 5 tahun.

Grafik 2.67  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)

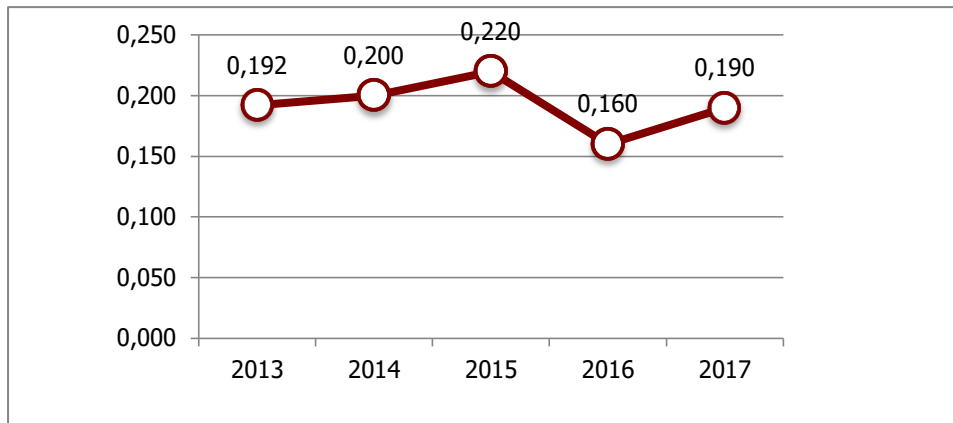


*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018*

#### **2.4.1.2.22. Penderita Diare yang Ditangani**

Diare merupakan kondisi yang ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan dengan frekuensi buang air besar (BAB) yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari, namun pada sebagian kasus memanjang hingga berminggu-minggu. Diare bisa berdampak fatal apabila penderita mengalami dehidrasi akibat kehilangan banyak cairan dari tubuh. Oleh sebab itu diare tidak boleh dianggap enteng walaupun kondisi ini umum terjadi. Adapun penderita diare yang ditangani oleh petugas di fasilitas kesehatan di Kabupaten Bone pada tahun 2013 sampai 2015 terjadi peningkatan dari 0,192, 020 dan 0,22, sedangkan ditahun 2016 menurun menjadi 0,160. Kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 0,190 dengan jumlah penderita Diare sebanyak 14.257 (sumber Seksi P2M).

Grafik 2.68  
Penderita Diare yang Ditangani Di Kabupaten Bone, 2013-2017

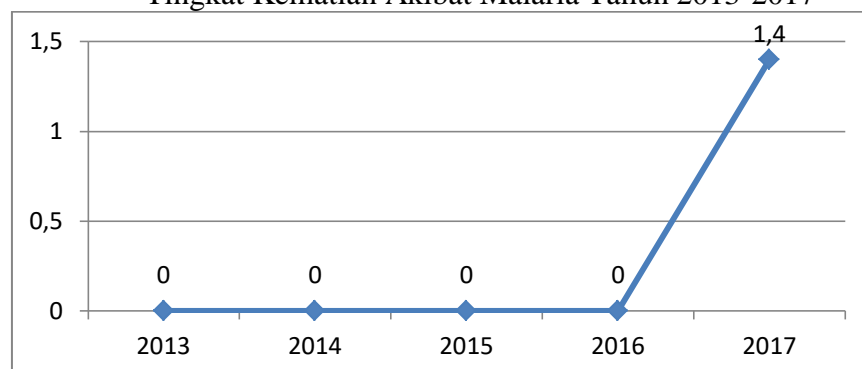


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.23. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Malaria adalah penyakit yang menyebar akibat gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi parasit. Infeksi malaria bisa terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk. Jika tidak ditangani dengan benar, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Malaria jarang sekali menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini bisa menular jika terjadi kontak langsung dengan darah penderita. Janin di dalam kandungan juga bisa terinfeksi malaria karena tertular dari darah sang ibu. Angka kematian akibat malaria di Kabupaten Bone dari Tahun 2013 sampai dengan 2016 tidak ada kematian, tetapi pada Tahun 2017 terjadi kematian sebanyak 1 orang atau 1,4 %.

Grafik 2.69  
Tingkat Kematian Akibat Malaria Tahun 2013-2017



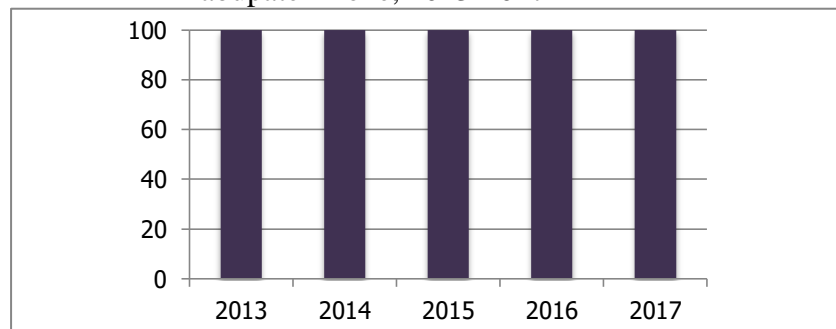
Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

#### 2.4.1.2.24. Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Malaria adalah penyakit yang menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi parasit. Infeksi malaria bisa terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk. Jika tidak ditangani dengan benar, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Malaria jarang sekali menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini bisa menular jika terjadi kontak langsung dengan darah penderita. Janin di dalam kandungan juga bisa terinfeksi malaria karena tertular dari darah sang ibu. Angka kematian akibat malaria di Kabupaten Bone dari tahun 2013 sampai dengan 2016 tidak ada kematian, tetapi pada tahun 2017 terjadi kematian sebanyak 1 orang atau 1,4 persen.

Grafik 2.70

Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria Di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

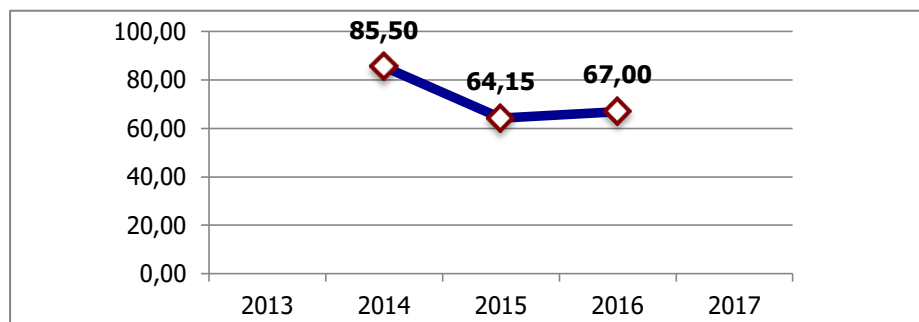
Malaria adalah penyakit yang menakutkan sejak dahulu kala. Meskipun di negara berkembang sudah hampir dimusnahkan, tetapi malaria terus mengancam kehidupan manusia di belahan dunia lainnya. Hampir setengah populasi dunia hidup di negaranegara penyakit ini masih dianggap endemik. Anak-anak yang terkena dampak terburuk, khususnya anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Di bagian dunia lainnya malaria merupakan penyakit endemik, dapat menyebabkan sebanyak 10 persen dari semua kematian pada anak. Penanganan Malaria pada anak balita di Kabupaten Bone selama 5 tahun 100 persen tertangani.

#### 2.4.1.2.25. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100 persen. Namun pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan 100 persen semuanya tertangani.

Grafik 2.71

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 (dalam %)



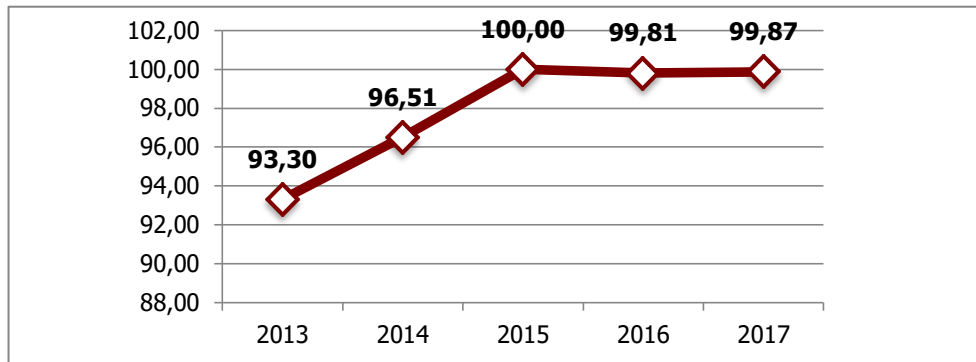
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.26. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi umur 1-12 bulan di sarana pelayanan kesehatan. Kunjungan pelayanan termasuk ke rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya, melalui kunjungan petugas (Umur 1-12 bulan yang dimaksud adalah 12 bulan kurang 1 hari). Pada tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan cakupan kunjungan bayi di sarana pelayanan kesehatan maupun melalui kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan menunjukkan peningkatan dan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 99,81 dan kemudian naik lagi sebesar 99,87 pada tahun 2017.



Grafik 2.72  
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Bone, 2013 – 2017

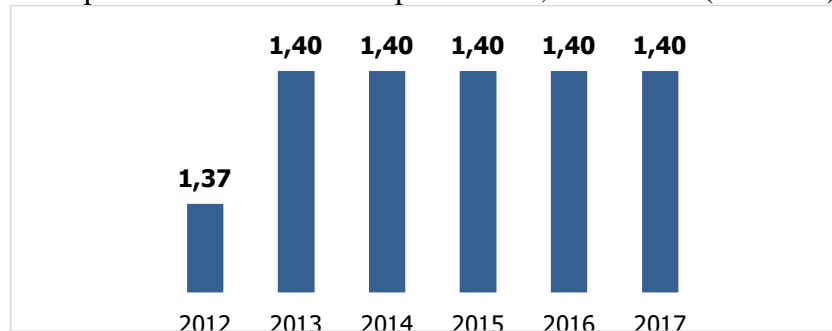


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.27. Cakupan Puskesmas

Rasio sarana kesehatan Puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014 jumlah Puskesmas di Kabupaten Bone bertambah menjadi 38 dari 37 Puskesmas di tahun 2013 karena peningkatan Pustu menjadi Puskesmas. Untuk mendapatkan cakupan Puskesmas adalah jumlah Puskesmas dibagi jumlah seluruh Kecamatan x 100, di Kabupaten Bone jumlah cakupan Puskesmas Tahun 2017 adalah 1,40 persen. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bone adalah 38 dan jumlah kecamatan adalah 27 sehingga rasio Puskesmas di Kabupaten Bone adalah 1 : 1,4 (1 Kecamatan terdapat 1,4 Puskesmas).

Grafik 2.73  
Cakupan Puskesmas Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)



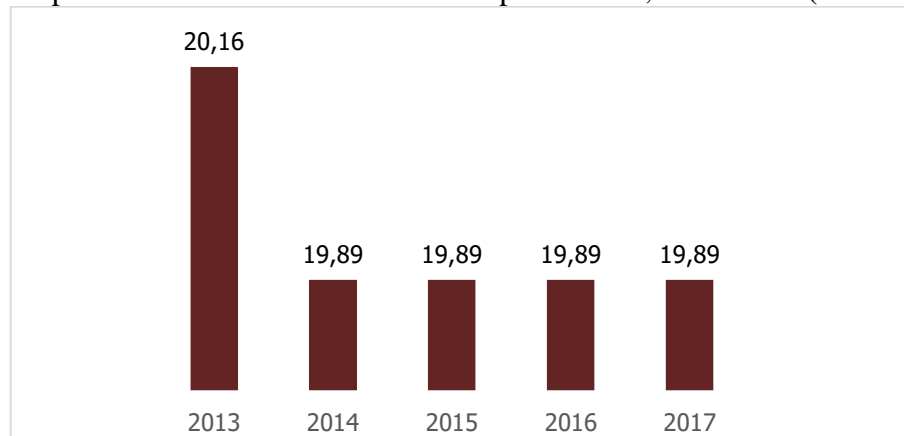
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.2.28. Cakupan Pembantu Puskesmas

Rasio sarana kesehatan Puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014 jumlah Pustu di Kabupaten Bone berkurang menjadi 74 dari 75 Pustu di tahun 2013 karena peningkatan Pustu menjadi Puskesmas. Untuk mendapatkan cakupan Pustu adalah jumlah Pustu dibagi jumlah seluruh desa x 100, di Kabupaten Bone jumlah cakupan Pustu Tahun 2017 adalah 19,89 persen dengan perolehan Jumlah Pustu adalah 74 dibagi 372 dan dikali 100 persen, jadi rasio Pustu di Kabupaten Bone 1 : 19,89 (1 Pustu melayani 19 Desa).

Grafik 2.74

Cakupan Pembantu Puskesmas Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)



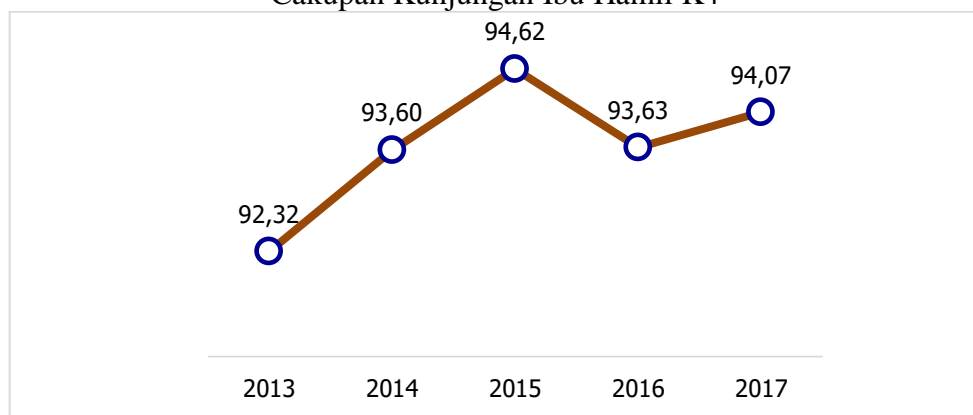
Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

#### 2.4.1.2.29. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Kunjungan ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Standar pelayanan paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan dan mendapat 90 tablet *Fe* selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kunjungan ibu hamil

sesuai standar adalah 7T pelayanan yang mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) Tekanan darah diukur (3) Tetanus Toxoid yaitu Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toxoid), (4) Tinggi fundus uteri diukur, (5) Tablet besi (diberikan 90 tablet selama kehamilan), (6) Temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), (7) Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC). Cakupan kunjungan ibu hamil di pelayanan kesehatan mencapai angka 94,07 persen tahun 2017, naik dibandingkan empat tahun sebelumnya 92,32 persen. Capaian tahun 2017 sudah sesuai dengan target RPJMD yaitu 94 persen.

Grafik 2.75  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4



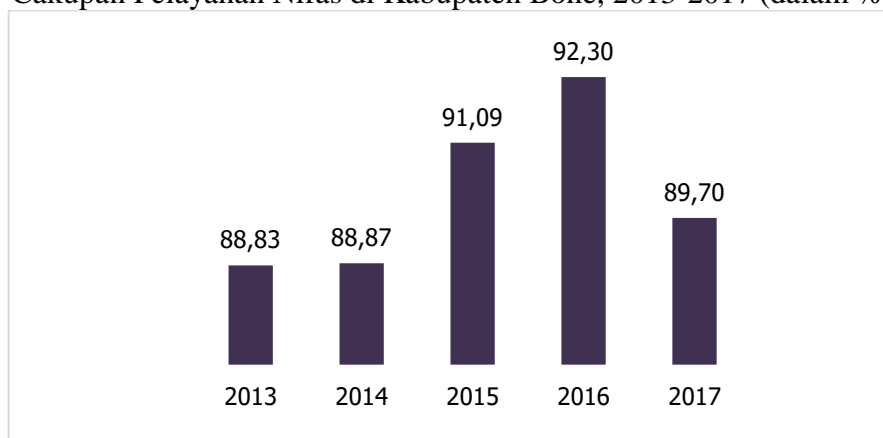
Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

#### 2.4.1.2.30. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, diharapkan dapat mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan tersebut adalah pelayanan kesehatan ibu nifas (Kemenkes RI, 2009). Perawatan nifas adalah perawatan terhadap ibu yang telah selesai melahirkan, salah satunya adalah perawatan payudara (Siregar, 2009) Perawatan nifas mencakup pemeriksaan tanda vital, keadaan umum untuk melihat tanda tanda anemia, pemeriksaan abdomen dan luka, pemeriksaan genitalia, melihat

komplikasi persalinan, dan perawatan payudara. Cakupan pelayanan bagi ibu nifas dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2013 dan 2014 pelayanan ibu nifas di Kabupaten Bone hanya 88,83 persen dan 88,87 persen, kemudian mengalami perluasan cakupan tahun 2015 dan 2016 menjadi 91,09 persen dan 92,30 persen. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan tajam ke angka 89,70 persen.

Grafik 2.76  
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)



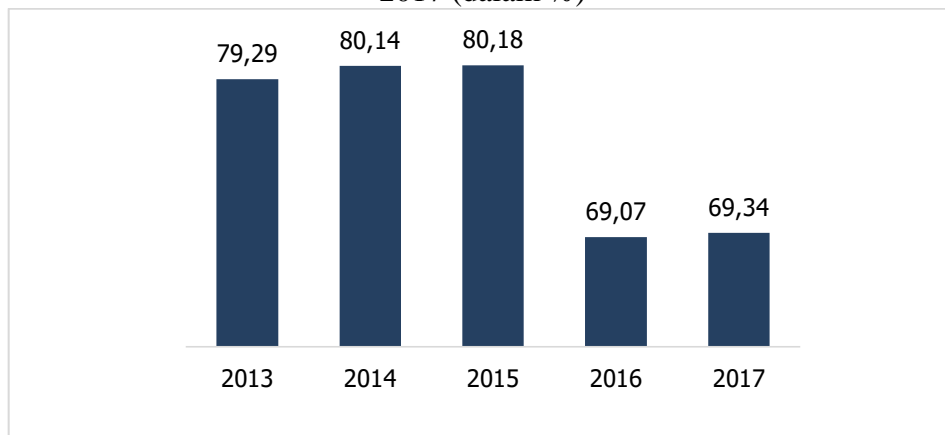
Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

#### 2.4.1.2.31. Cakupan Neonates dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus yang pelaporannya dihitung 1 kali pada masa neonatal. Kasus komplikasi yang ditangani adalah seluruh kasus yang ditangani tanpa melihat hasilnya hidup atau mati. Indikator ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus–kasus kegawat daruratan neonatal, yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, atau dapat dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Data menunjukkan adanya perubahan cakupan yang lebih baik disetiap tahunnya mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Tahun 2017 jumlah penanganan neonatal

dengan komplikasi sudah berkurang menjadi 69,34 persen, yang pada awalnya sempat mencapai 80,18 persen tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa keadaan kesehatan neonatal di Kabupaten Bone relatif lebih baik dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2.77  
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Bone, 2013  
2017 (dalam %)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

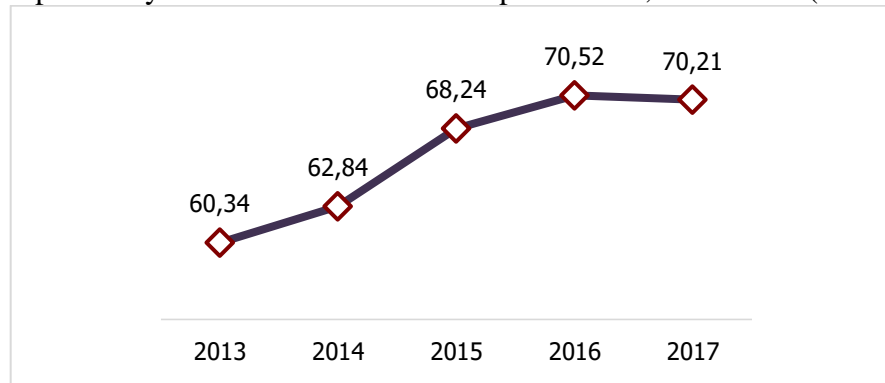
#### 2.4.1.2.32. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Puskesmas berperan sebagai promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam menurunkan angka kematian balita. Upaya Promotif dan Preventif sangat diperlukan dan diutamakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan balita. Salah satu upaya Puskesmas dalam mencapai tujuan tersebut tercakup didalam suatu indikator Puskesmas yang ditetapkan Pemerintah.

Indikator-indikator ini disebut sebagai standar Pelayanan minimal (SPM). Salah satu SPM dengan tujuan meningkatkan Pertumbuhan dan perkembangan balita adalah indikator cakupan pelayanan anak balita. Cakupan pelayanan balita di Kabupaten Bone di setiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2013 cakupan pelayanan anak balita baru 60,34 persen, kemudian perlahan mengalami kenaikan dari 62,84 persen ke 68,24 persen dan akhirnya mencapai 70,52 persen masing-masing di tahun 2014, 2015, dan 2016. Hanya saja di tahun 2017 cakupan pelayanan anak balita di Bone sedikit

menurun menjadi 70,21 persen. Data yang cenderung meningkat tersebut menunjukkan bahwa kerja Puskesmas dalam pelayanan terhadap balita membaik dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2.78  
Cakupan Pelayanan Anak Balita Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)

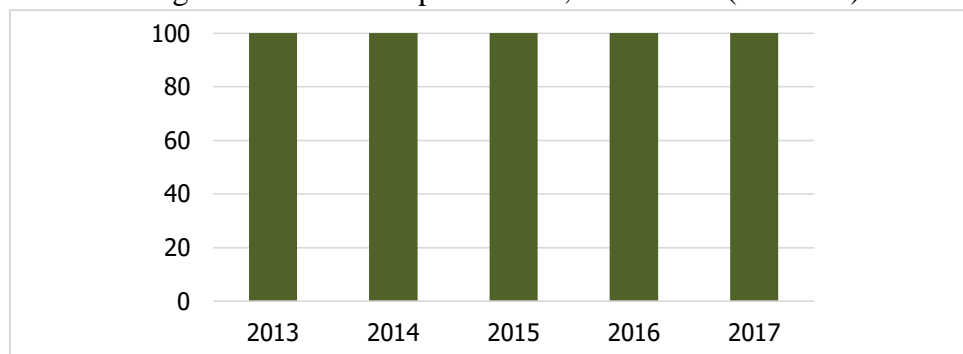


Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

#### 2.4.1.2.33. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin

MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, Makanan ini diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Sebaliknya apabila bayi dan anak pada masa ini tidak memperoleh makanan sesuai kebutuhan gizinya, maka periode emas akan berubah menjadi periode kritis yang akan mengganggu tumbuh kembang bayi dan anak, baik pada saat ini maupun masa selanjutnya. Kegiatan pemberian makanan pendamping bagi anak usia 6 – 24 bulan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bone sudah baik. Data memperlihatkan bahwa capaian selama 5 tahun mulai dari 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan angka 100 persen, hal ini sudah sesuai dengan target RPJMD Tahun 2017.

**Grafik 2.79**  
**Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan**  
**Keluarga Miskin Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)**

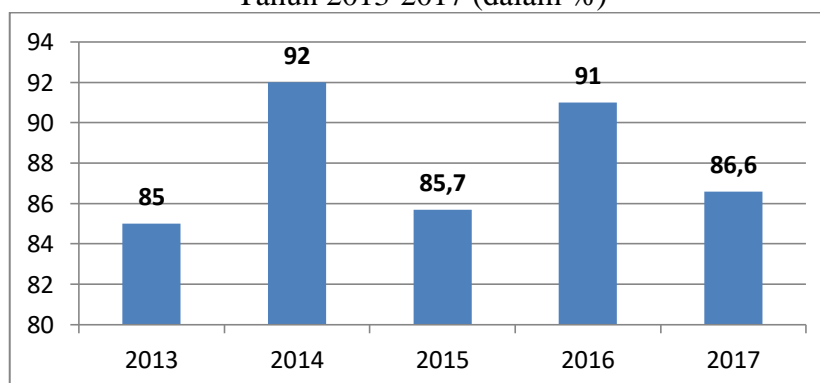


*Sumber: Dinas Kesehatan, 2018*

#### **2.4.1.2.34. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat**

Penjaringan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa yang memiliki masalah kesehatan agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.

**Grafik 2.80**  
**Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Bone**  
**Tahun 2013-2017 (dalam %)**



*Sumber: Dinas Kesehatan, 2018*

Penjaringan kesehatan dilakukan pada peserta didik kelas 1 SD, di beberapa Sekolah yang ada di Kabupaten Bone yang meliputi pemeriksaan kebersihan perorangan, pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran), pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut,



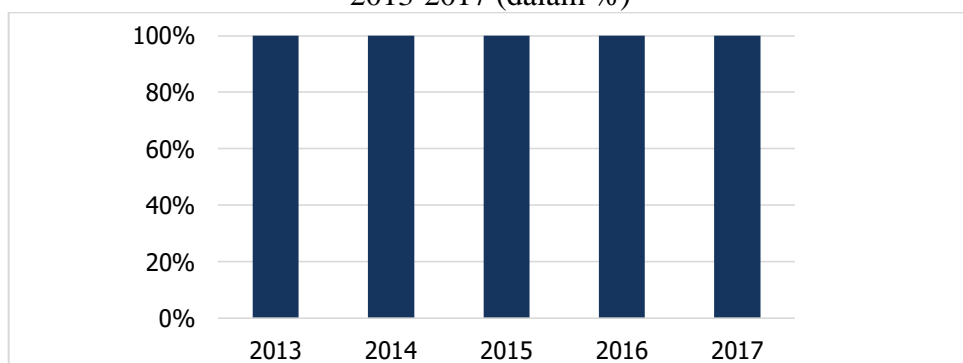
pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan, dan pengukuran kebugaran jasmani.

Target capaian penjangkaran kesehatan anak sekolah ini ditetapkan sebesar 100 persen selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Hal ini sudah dikatakan berhasil dan sesuai target RPJMD tahun 2017. Tahun 2014 angka cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat mengalami kenaikan signifikan mencapai 92 persen. Pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan menjadi 86,6 persen di tahun 2017.

#### **2.4.1.2.35. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin**

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di Kabupaten Bone menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dalam lima tahun terakhir, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bone konsisten menyentuh angka 100 persen, menunjukkan bahwa tidak satupun masyarakat miskin yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dasar. Salah satu faktornya adalah semakin tersosialisasinya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga membuat banyak masyarakat sadar akan pentingnya mendapat pelayanan kesehatan, baik dasar maupun rujukan.

Grafik 2.81  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)

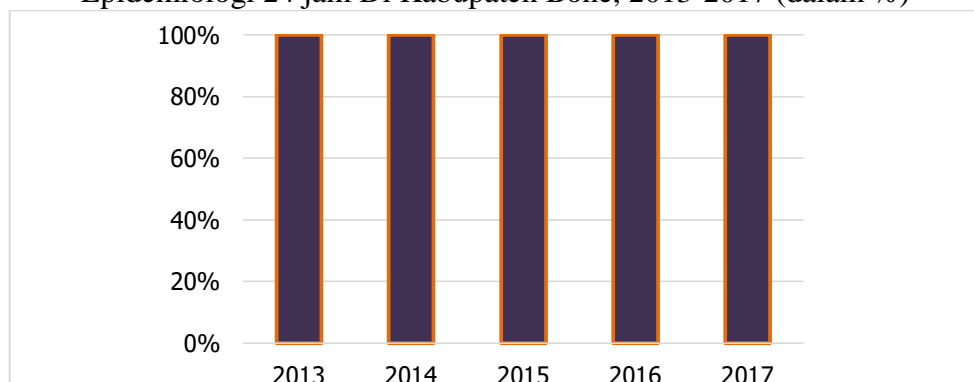


Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

#### **2.4.1.2.36. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam**

Begitupun dengan penanganan desa/kelurahan yang menghadapi kondisi luar biasa terkait dengan aspek kesehatan. Nampaknya dalam lima tahun terakhir desa/Kelurahan yang mengalami KLB di Kabupaten Bone telah ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah. Desa/Kelurahan yang mengalami KLB (Kejadian Luar Biasa) di Kabupaten Bone dari tahun 2013– 2017 di tangani kurang dari 24 jam dan telah mencakup 100 persen Desa/Kelurahan yang mengalami KLB. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan Desa/Kelurahan telah mencapai 100 persen sesuai dengan target RPJMD.

Grafik 2.82  
Cakupan Desa/kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi 24 jam Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

#### **2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **2.4.1.3.1. Pekerjaan Umum**

##### **2.4.1.3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**

Panjang jalan disuatu wilayah memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten Bone dari tahun ke tahun bertambah lebih dari separuh (67,06 %) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yakni sepanjang 1559,514 Km. Yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang

316,72 Km, dan jalan Propinsi 99,15 Km. Ini menggambarkan bahwa jalan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone hanya sepanjang 1143,644 Km saja.

Tabel. 2.52  
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kabupaten Bone, 2013-2017

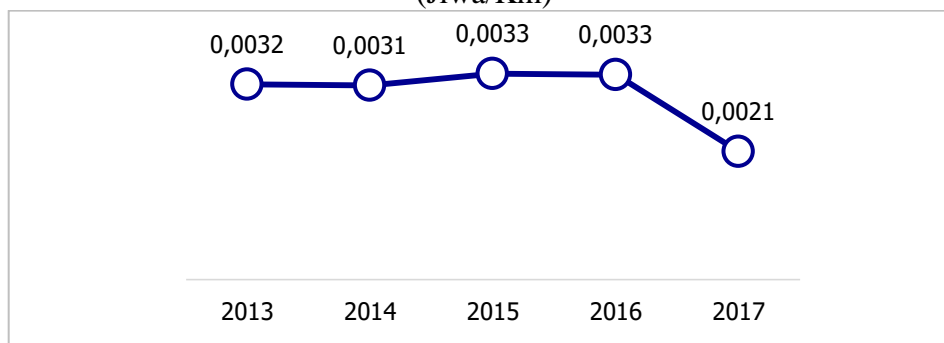
No	Kondisi	Panjang Jalan (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Baik	36,67	40,87	41,04	43,21	45,24
2	Kondisi Sedang	14,64	17,51	16,42	18,47	26,01
3	Kondisi Rusak Ringan	17,95	23,90	22,55	23,34	15,24
4	Kondisi Rusak Berat	30,75	17,72	19,99	14,98	13,51
5	Mantap	51,31	58,38	57,46	61,68	71,25

Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2018

#### 2.4.1.3.1.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Grafik 2.83  
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bone, 2013-2017  
(Jiwa/Km)



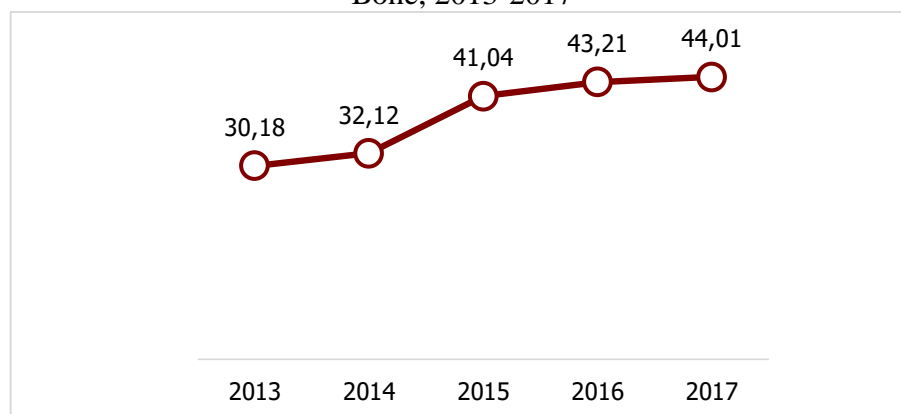
Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2018

Dalam lima tahun terakhir, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bone tidak banyak mengalami perubahan. Tahun 2014, rasio panjang jalan Kabupaten sedikit menurun dari 0,0032 jiwa/Km menjadi 0,0031 per/Km, menunjukkan bahwa jumlah penduduk mengalami kenaikan sementara panjang jalan konstan. Kabupaten Bone menambah panjang jalan di tahun 2015 dan 2016 sehingga rasio panjang jalan naik menjadi 0,0033 jiwa/Km, sebelum akhirnya menurun menjadi 0,0021 karena terjadi pengurangan panjang jalan di tahun 2017. Masih rendahnya angka rasio panjang jalan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan/penggunaan jalan di Kabupaten Bone masih sangat rendah.

#### **2.4.1.3.1.3. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)**

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Bone terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2013, Kabupaten Bone hanya memiliki panjang jalan dalam kondisi baik sebanyak 30,18 persen, dan kemudian bertambah menjadi 32,12 persen tahun 2014.

Grafik 2.84  
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Kabupaten Bone, 2013-2017



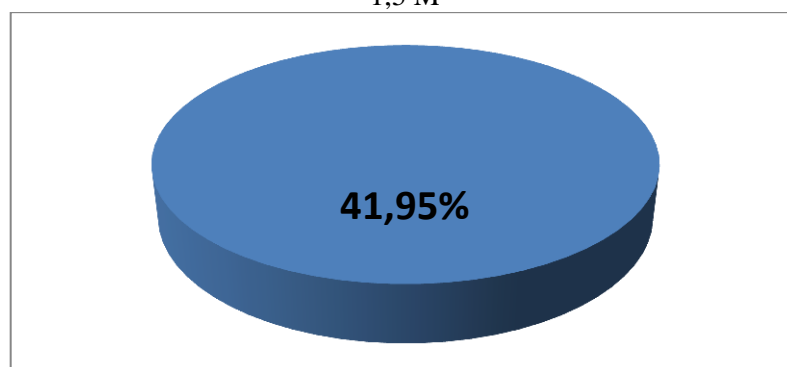
Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2018

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik naik signifikan tahun 2015 mencapai 41,04 persen, kemudian meningkat lagi sebesar 43,21 persen dan 44,01 persen masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Angka tahun 2017 merupakan persentase tertinggi sepanjang tahun 2013 sampai 2017 dan menunjukkan bahwa 44,01 persen panjang jalan kabupaten di Kabupaten Bone masih dalam kondisi baik dan 55,99 persen berada dalam kondisi kondisi sedang, kondisi rusak ringan, kondisi rusak berat

#### **2.4.1.3.1.4. Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5m)**

Grafik 2.85

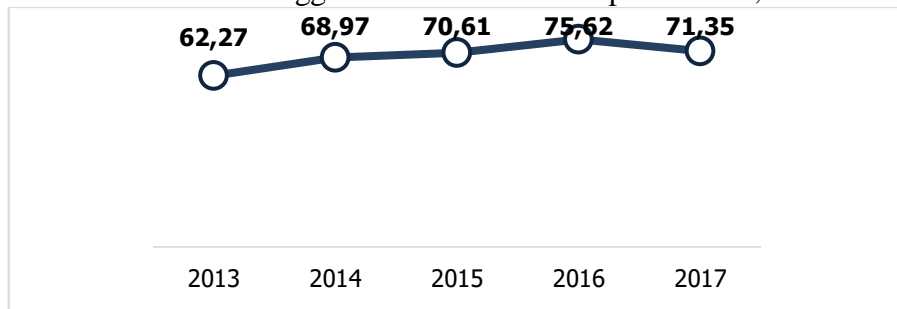
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air 1,5 M



#### **2.4.1.3.1.5. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi juga dapat berarti cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Pengertian ini benar tetapi belum memberikan gambaran yang konkrit tentang apa itu sanitasi. Sanitasi pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia yang dihubungkan dengan tiga komponen untuk dikelola yaitu persampahan, air limbah dan drainase. Sanitasi tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tetapi memiliki manfaat yang luas.

Grafik 2.86  
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2018

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Bone mampu menaikkan persentase rumah tinggal bersanitasi. Tahun 2013, hanya 62,27 persen rumah tinggal di Kabupaten Bone yang memiliki akses terhadap sanitasi, artinya 37,73 persen rumah tinggal tahun tersebut belum bersanitasi. Persentasenya kemudian terus meningkat dari 68,97 persen tahun 2014 ke 70,61 persen tahun 2015, dan mencapai angka tertinggi 75,62 persen tahun 2016. Setelah capaian tertinggi tahun 2016, angka persentase rumah tinggal bersanitasi sedikit menurun menjadi 71,35 persen tahun 2017, namun setidaknya di tahun ini hanya tersisa 28,65 persen rumah tinggal di Kabupaten Bone yang belum bersanitasi.

Tabel 2.53  
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Bontocani	3.144	2.049	65,16
2	Kahu	7.752	5.741	74,06
3	Kajuara	7.287	4.914	67,43
4	Salomekko	3.108	1.918	61,72
5	Tonra	2.730	1.691	61,93
6	Patimpeng	3.315	1.862	56,15
7	Libureng	5.982	5.155	86,18
8	Mare	5.347	3.603	67,39
9	Sibulue	6.841	3.977	58,13
10	Cina	5.290	3.829	72,39
11	Barebbo	5.516	3.908	70,85
12	Ponre	2.775	1.956	70,49
13	Lappariaja	4.765	3.266	68,54

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
14	Lamuru	4.994	4.727	94,65
15	TelluLimpoe	2.819	1.711	60,67
16	Bengo	5.096	4.296	84,30
17	Ulaweng	4.946	3.398	68,69
18	Palakka	4.528	2.862	63,20
19	Awangpone	5.877	4.442	75,58
20	TelluSiattinge	8.017	4.749	59,23
21	Amali	4.146	3.201	77,20
22	Ajangale	5.488	4.482	81,66
23	DuaBoccoe	6.041	4.937	81,72
24	Cenrana	4.831	2.914	60,31
25	TR Barat	9.688	9.299	95,99
26	TaneteRiattang	10.434	10.110	96,89
27	TR Timur	8.637	5.546	64,21
	<b>Jumlah</b>	<b>149.395</b>	<b>5.546</b>	<b>71,35</b>

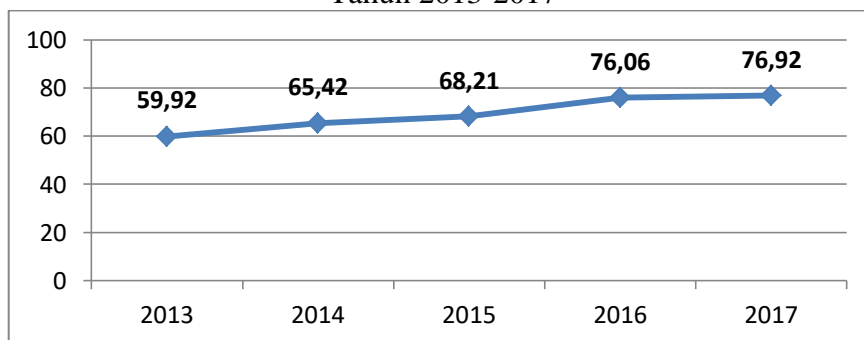
Sumber: Data Olahan, 2018

Lima Kecamatan dengan angka persentase rumah tinggal bersanitasi paling tinggi adalah Tanete Riattang sebesar 96,89 persen, Tanete Riattang Barat 95,99 persen, Lamuru 94,65 persen, Libureng 86,18 persen, dan Bengo sebesar 84,30. Sedangkan lima Kecamatan paling rendah persentase rumah tinggal bersanitasi adalah Tellu Siattinge dengan 59,23 persen, Patimpeng 56,15 persen, Sibulue 58,13 persen, Cenrana 60,31 persen, dan Tellu Limpoe 60,67 persen.

#### 2.4.1.3.1.6. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Grafik 2.87

Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas PSDA Kab. Bone, 2018



Tingkat capaian kinerja dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melalui pelaksanaan program prioritas hingga 2017 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini terlihat dari capaian kondisi mantap (Kondisi Baik + Kondisi Sedang) pada keseluruhan kondisi jaringan irigasi Kabupaten di tahun 2017 terbesar 76,92 persen dengan luas irigasi Kabupaten 34.379 Ha dan mengalami peningkatan capaian kondisi mantap di tahun 2016 sebesar 76,06 persen yang merupakan kewenangan Kabupaten.

Dari gambar tersebut diatas terlihat adanya peningkatan kondisi baik dari tahun ke tahun, untuk tahun 2013 sebesar 59,92% meningkat menjadi 76,92% pada tahun 2017, artinya dalam 5 (lima) terakhir terjadi peningkatan kondisi baik sebesar 17%. Hal ini disebabkan karena prioritas penanganan pada kondisi rusak berat yang ditingkatkan menjadi kondisi baik.

#### **2.4.1.3.1.7. Rasio Jaringan Irigasi**

Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Atau dalam pengertian lain irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi terdiri dari tiga jenis yaitu jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier.

Jaringan Irigasi Utama / Primer meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuang. Bangunan ini mutlak diperlukan bagi eksploitasi, meliputi bangunan pembendung, bangunan pembagi dan bangunan pengukur. Bangunan bendung berfungsi agar permukaan air sungai dapat naik dengan demikian memungkinkan untuk disalurkan melalui pintu pemasukan ke saluran pembawa. Bangunan pembagi berfungsi agar air pengairan dapat didistribusikan di sepanjang saluran pembawa (saluran

primer) ke lahan-lahan pertanaman melalui saluran sekunder dan saluran tersier.

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi tersier berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

Untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, ketersediaan jaringan irigasi menjadi sangat penting, terutama bagi daerah seperti Kabupaten Bone yang perekonomiannya digerakkan oleh sektor pertanian. Sepanjang tahun 2013 sampai 2017 rasio jaringan irigasi Kabupaten Bone terus bertambah. Tahun 2013 Kabupaten Bone memiliki rasio jaringan irigasi 3,60 Meter jaringan irigasi kewenangan kabupaten per Hektar total luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Bone, kemudian bertambah menjadi 3,15 M/Ha tahun 2014 yang bertahan hingga tahun 2015. Pemerintah daerah menambah jaringan irigasi, sehingga tahun 2016 rasio jaringan irigasinya naik menjadi 3,15 M/Ha. Tahun 2017, rasio jaringan irigasi Kabupaten Bone mencapai nilai tertinggi yaitu 3,71 M/Ha. Penentuan rasio jaringan irigasi dari tahun 2013 – 2017 secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2.54.

Tabel 2.54  
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jaringan Primer (meter)	266.682	227.272	288.812	297.772	336.222
2	Jaringan Sekunder (meter)	55.791	58.728	60.545	71.230	74.979
3	Jaringan Tersier (meter)	-	-	-	-	-
4	Luas Lahan Budidaya (Ha)	89.700	90.819	110.760	110.760	110.761
5	Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)	3,60	3,15	3,15	3,33	3,71

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, 2018

Hingga tahun 2017 jika ditinjau dari capaian rasio jaringan irigasi di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone maka rasio jaringan irigasi terbesar berada di Kecamatan Ulaweng, Lamuru, dan Lappariaja. Rasio jaringan irigasi masing-masing kecamatan tersebut secara berurut adalah 38,71 M/Ha, 22,11 M/Ha dan 10,28 M/Ha. Selengkapnya nilai rasio jaringan irigasi masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam Tabel 2.55.

Tabel 2.55  
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone, 2017

NO.	Nama Daerah Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi (m)			Total Panjang Jaringan Irigasi (m)	Luas Lahan Budidaya (Ha)	Rasio (m/ha)
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	2	3	4	5	(6=3+4+5)	7	(8=6/7)
1	Bonto Cani	22.976	2.010	-	24.986	2.695	9,27
2	Kahu	3.370	-	-	3.370	8.120	0,42
3	Kajuara	881	-	-	881	3.585	0,25
4	Salomekko	341	-	-	341	3.963	0,09
5	Tonra	2.070	3.620	-	5.690	2.426	2,35
6	Patimpeng	2.306	-	-	2.306	4.082	0,56
7	Libureng	19.364	1.877	-	21.241	10.016	2,12
8	Mare	2.231	1.171	-	3.402	4.877	0,70
9	Sibulue	369	752	-	1.121	5.541	0,20
10	Cina	24.573	9.695	-	34.268	3.672	9,33
11	Barebbo	12.619	5.720	-	18.339	5.248	3,49
12	Ponre	11.861	4.036	-	15.897	2.701	5,89
13	Lappariaja	49.451	8.458	-	57.909	5.634	10,28
14	Lamuru	48.031	3.744	-	51.775	2.342	22,11
15	Tellu Limpoe	16.047	-	-	16.047	2.105	7,62
16	Bengo	26.722	11.842	-	38.564	7.148	5,40
17	Ulaweng	31.089	3.598	-	34.687	896	38,71
18	Palakka	14.388	4.981	-	19.369	2.654	7,30
19	Awangpone	2.490	-	-	2.490	5.622	0,44
20	Tellu Siattiengge	18.762	2.729	-	21.491	4.856	4,43
21	Amali	3.474	5.038	-	8.512	1.138	7,48
22	Ajangale	-	-	-	-	6.134	-
23	Dua Boccoe	17.978	1.720	-	19.698	6.492	3,03
24	Cenrana	4.162	-	-	4.162	3.814	1,09
25	Tr Barat	-	-	-	-	1.640	-
26	Tanete Riattang	667	3.988	-	4.655	1.210	3,85
27	Tr Timur	-	-	-	-	2.150	-
	<b>Jumlah</b>	<b>336.222</b>	<b>74.979</b>	<b>-</b>	<b>411.201</b>	<b>110.761</b>	<b>3,71</b>

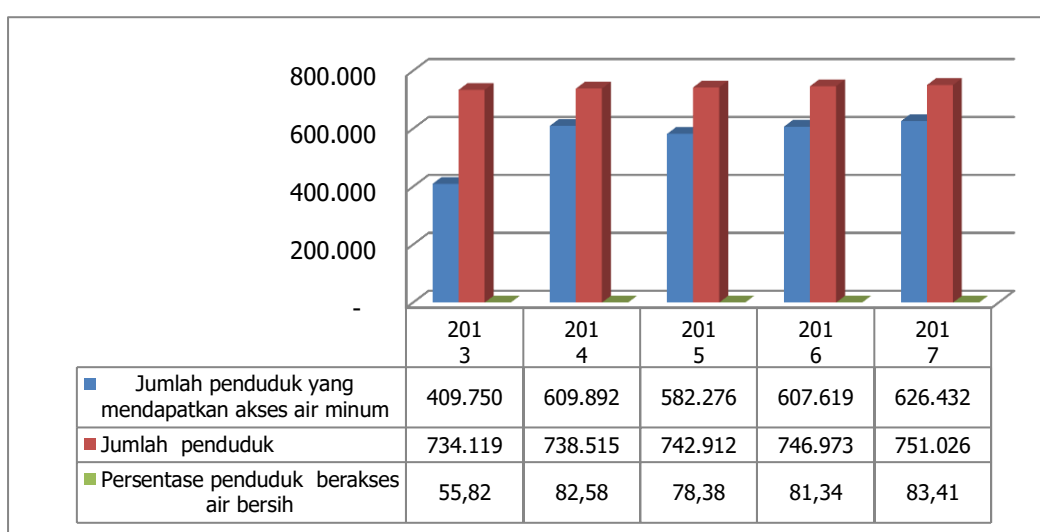
Sumber: Dinas PSDA Kab. Bone, 2018

#### 2.4.1.3.1.8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang memiliki kemampuan mengakses air minum di Kabupaten Bone cenderung fluktuatif. Sejak tahun 2013 persentase penduduk yang mampu mengakses air bersih/minum

hanya 55,82 persen, tetapi meningkat menjadi 82,58 persen pada tahun 2014. Kondisi ini tidak bertahan lama sehingga pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 78,38 persen. Meskipun demikian pada tahun 2016, jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum terus meningkat sampai tahun 2017.

**Grafik 2.88**  
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

Kemampuan akses air minum di wilayah perkotaan termasuk baik karena persentase jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum diatas (90%). Penduduk di wilayah perkotaan termasuk Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang. Beberapa kecamatan lainnya yang masih rendah kemampuan mengakses air bersih (<70%) adalah Kecamatan Cina, Libureng, Tonra dan Bontocani. Kecamatan ini sering mengalami kesulitan mengakses air minum terutama pada musim kemarau.

**Tabel. 2.56**  
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Bontocani	15.719	10.661	67,82
2	Kahu	38.761	29.086	75,04

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persentase
3	Kajuara	36.435	26.357	72,34
4	Salomekko	15.539	11.418	73,48
5	Tonra	13.651	8.464	62,00
6	Patimpeng	16.577	14.843	89,54
7	Libureng	29.908	20.819	69,61
8	Mare	26.733	22.493	84,14
9	Sibulue	34.206	24.002	70,17
10	Cina	26.449	18.178	68,73
11	Barebbo	27.580	25.332	91,85
12	Ponre	13.873	13.532	97,54
13	Lappariaja	23.824	18.163	76,24
14	Lamuru	24.969	18.832	75,42
15	TelluLimpoe	14.097	12.653	89,76
16	Bengo	25.481	22.872	89,76
17	Ulaweng	24.731	22.344	90,35
18	Palakka	22.639	20.712	91,49
19	Awangpone	29.386	22.183	75,49
20	TelluSiattinge	40.087	39.790	99,26
21	Amali	20.731	19.338	93,28
22	Ajangale	27.441	21.440	78,13
23	DuaBoccoe	30.207	23.000	76,14
24	Cenrana	24.155	22.517	93,22
25	TR Barat	48.438	45.411	93,75
26	TaneteRiattang	52.171	50.209	96,24
27	TR Timur	43.185	41.781	96,75
	<b>Jumlah</b>	<b>751.026</b>	<b>626.432</b>	<b>83,41</b>

Sumber: Data Olahan, 2018

#### 2.4.1.3.1.9. Persentase Areal Kawasan Kumuh

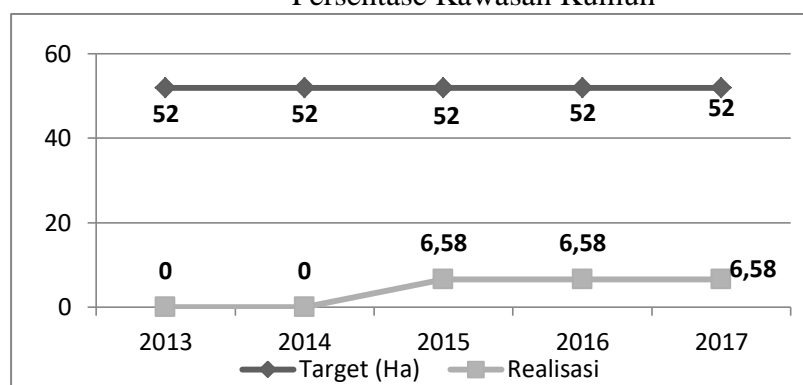
Kondisi awal tahun 2013 data tentang luas kawasan kumuh hasil identifikasi dan profil kekumuhan Kabupaten Bone yang disusun dan disajikan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bone dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman mencapai 260,46 Ha yang tertuang dalam “*Slim Improvement Action Plant*” atau “Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh” kota watampone sesuai SK Bupati Bone Nomor : 373 Tahun 2014 Tanggal 07 juli 2014.

Data tentang luas kawasan umum sebanyak 260,46 Ha dapat terurai dalam capaian penanganan, berkurangnya luas tingkat kekumuhan, melalui penanganan rencana aksi tahun 2014 rencana sebesar 52 Ha namun yang dapat direalisasikan sebanyak 0 Ha,

tahun 2015 rencana penanganan sebesar 52 Ha, namun realisasi sebanyak 6,58 Ha tahun 2016 rencana capaian sebanyak 52 Ha realisasi 6,58 Ha dan 2017 rencana capaian sebanyak 52 Ha namun yang terealisasi hanya seluas 6,58 Ha.

Realisasi atau capaian rencana pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Bone, disajikan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.89  
Persentase Kawasan Kumuh



Sumber : Data Diolah, 2018

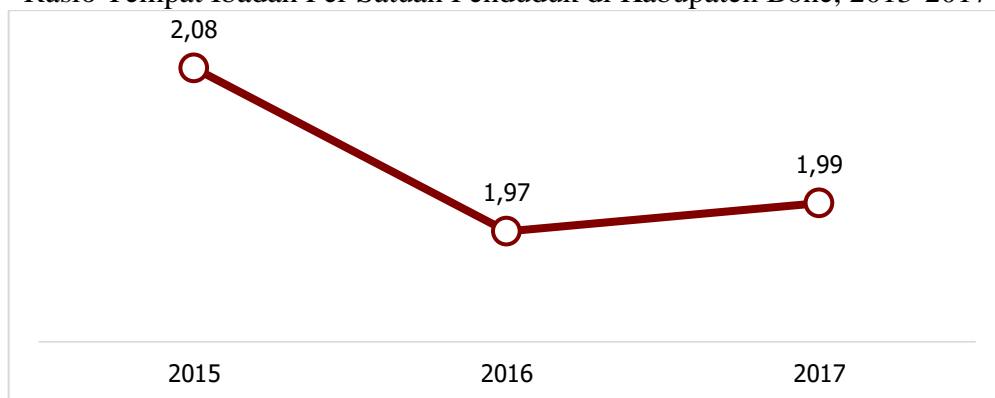
Meskipun capaian realisasi belum sesuai dengan rencana namun penanganan aksi pengurangan kekumuhan secara perlahan dan bertahap dari tahun ke tahun telah menunjukkan hasil yang positif mengingat bahwa penanganan aksi pengurangan kekumuhan tidak terlepas dari peran serta masyarakat, keterlibatan seluruh pengangkuh-pengangkuh kepentingan, Budaya, Sosial Ekonomi Masyarakat, Tingkat Pendidikan dan Kesejahteraan, Permasalahan Lahan-lahan, Fungsi Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Ruang, serta Luas Satuan Ha penanganan sehingga tidak menimbulkan kekumuhan baru.

#### 2.4.1.3.1.10. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam beragama dan beribadah. Bentuk jaminan tersebut salah satunya dilihat dari kemampuan daerah dalam menyediakan rumah ibadah untuk semua agama. Di Kabupaten Bone, mayoritas penduduknya

memeluk agama Islam sehingga rumah peribadatan paling banyak adalah mesjid dan mushollah, sementara gereja, pura, dan vihara jumlah sangat terbatas. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bone, rasio tempat ibadah per satuan penduduk tiga tahun terakhir cenderung turun. Pada tahun 2015, rasio tempat ibadah sempat mencapai 2,08 per 1.000 penduduk, sebelum menurun ke 1,97. Meskipun mengalami kenaikan tahun 2017 sebesar 1,99, tapi angkanya jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini disebabkan karena tempat ibadah jumlah cenderung berkurang di tiga tahun terakhir, tapi jumlah penduduk terus bertambah.

Grafik 2.90  
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka, diolah 2018

#### 2.4.1.3.2. Penataan Ruang

##### 2.4.1.3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas

##### Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai macam fungsi yang menentukan keberhasilan pembangunan. Ruang terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. RTH dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut:



1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bone menyebar pada berbagai kecamatan dengan luas yang bervariasi antar kecamatan. Total RTH di Kabupaten Bone seluas 911,26 Ha dimana luasan paling banyak di Kecamatan Bontocani dan Tonra masing-masing 92,67 Ha dan 40,064 Ha. Ruang terbuka hijau paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang dengan luasan masing-masing 9,776 Ha dan 4,758 Ha.

Tabel 2.56  
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone, 2017

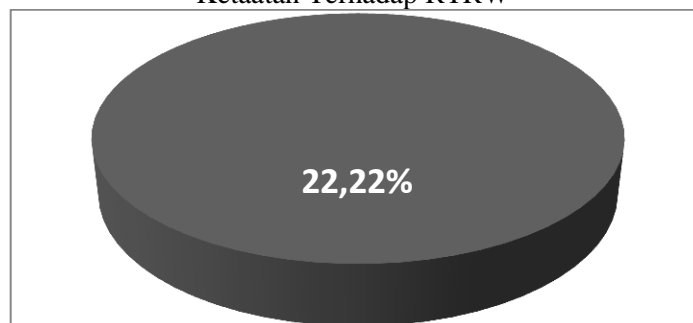
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Luas wilayah ber HPL/HGB (Km <sup>2</sup> )	Luas Ruang Terbuka Hijau (Km <sup>2</sup> )	Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Bontocani	463,35	46,21	92,670	2,00
2	Kahu	189,50	23,43	37,900	1,61
3	Kajuara	124,13	20,37	24,826	1,21
4	Salomekko	84,91	11,45	16,982	1,48
5	Tonra	200,32	21,13	40,064	1,89
6	Patimpeng	130,47	18,61	26,094	1,40
7	Libureng	344,25	24,21	68,850	2,84
8	Mare	263,50	17,48	52,700	3,01
9	Sibulue	155,80	20,32	31,160	1,53

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Luas wilayah ber HPL/HGB (Km <sup>2</sup> )	Luas Ruang Terbuka Hijau (Km <sup>2</sup> )	Rasio Ruang Terbuka Hijau
10	Cina	147,50	19,74	29,500	1,49
11	Barebbo	114,20	18,62	22,840	1,22
12	Ponre	293,00	20,54	58,060	2,82
13	Lappariaja	138,00	21,36	27,600	1,29
14	Lamuru	208,00	20,63	41,600	2,01
15	TelluLimpoe	318,10	22,41	63,620	2,83
16	Bengo	164,00	21,14	32,800	1,55
17	Ulaweng	161,67	28,55	32,334	1,13
18	Palakka	115,32	19,60	23,064	1,17
19	Awangpone	110,70	14,38	22,140	1,53
20	TelluSiattinge	159,30	24,84	31,860	1,28
21	Amali	119,13	16,63	23,826	1,43
22	Ajangale	139,00	13,28	27,800	2,09
23	DuaBoccoe	144,90	15,67	28,980	,84
24	Cenrana	143,60	12,36	28,720	2,32
25	TR Barat	53,68	8,44	10,736	1,27
26	TaneteRiattang	23,79	3,26	4,758	1,45
27	TR Timur	48,88	7,71	9,776	1,26
	<b>Jumlah</b>	<b>4,559</b>	<b>512,37</b>	<b>911,260</b>	<b>1,77</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2018.

#### 2.4.1.3.2.2. Ketaatan Terhadap RTRW

Grafik 2.91  
Ketaatan Terhadap RTRW



Sumber : Dokumen RTRW dan KDTR, 2018

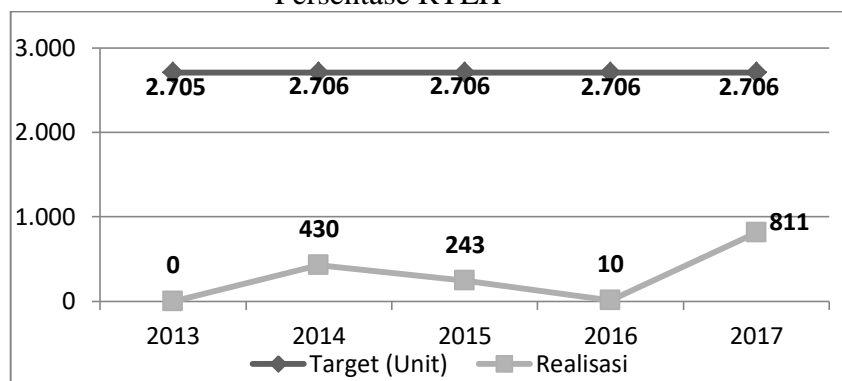
Jumlah pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone selama 5 tahun terakhir cenderung menurun. Meskipun persentase ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran ketaatan terhadap RTRW yang masih sangat rendah yaitu sekitar 22,22 persen. Tantangan kedepan diharapkan pemerintah daerah mampu melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan peanataan ruang yang lebih ketat.

#### 2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kondisi awal tahun 2013 data tentang rumah tidak layak huni sebanyak 13.529 unit dan terurai dalam capaian tahun 2014 rencana sebesar 2705 unit namun yang dapat di realisasikan sebanyak 430 unit rumah tahun 2015 rencana capaian sebesar 2706 unit realisasi sebanyak 243 unit rumah tahun 2016 rencana capaian sebanyak 2706 unit realisasi 10 unit dan 2017 rencana capaian sebanyak 2706 unit namun realisasi sebanyak 81 unit.

Berikut lampiran capaian rencana realisasi rumah tidal layak huni

Grafik 2.92  
Persentase RTLH



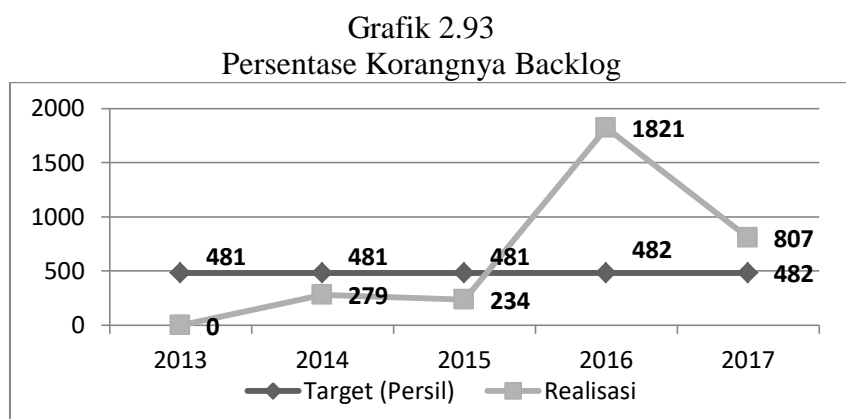
Sumber : Data Diolah, 2018

Capaian perbaikan rumah tidak layak huni secara grafik menunjukkan fluktuasi capaian mengingat kegiatan ini di pengaruhi oleh pembiayaan baik melalui APBN, DAK dan DAU. Tahun 2016 terjadi penurunan akibat pembiayaan hanya melalui APBD sementara tahun 2013,2014 dan 2017 menunjukkan peningkatan capaian meskipun belum optimal mengingat kendala/hambatan yang mempengaruhi realisasi.

Kondisi awal tahun 2013 data tentang data rumah formal (*Backlog*) sebanyak 923 unit dan terurai dalam capaian tahun 2014 rencana sebesar 481 unit namun yang dapat di realisasikan sebanyak 279 unit rumah, tahun 2015 rencana capaian sebesar 481 unit dan terealisasi sebanyak 234 unit rumah. Tahun 2016 rencana capaian sebanyak 481 unit dan realisasinya mengalami peningkatan sebanyak 1821 unit dan tahun 2017 rencana

capaian sebanyak 482 unit dan telah realisasinya sebanyak 807 unit tetap melampaui target.

Capaian rencana dan realisasi berkurangnya backlog rumah formal di sajikan dalam grafik di bawah ini



Sumber : Data Diolah, 2018

Dengan capaian tersebut dan terlihat pada grafik menunjukkan peningkatan capaian target kurang waktu tahun 2014 hingga 2017 yang secara perlahan melampaui rencana pencapaian.

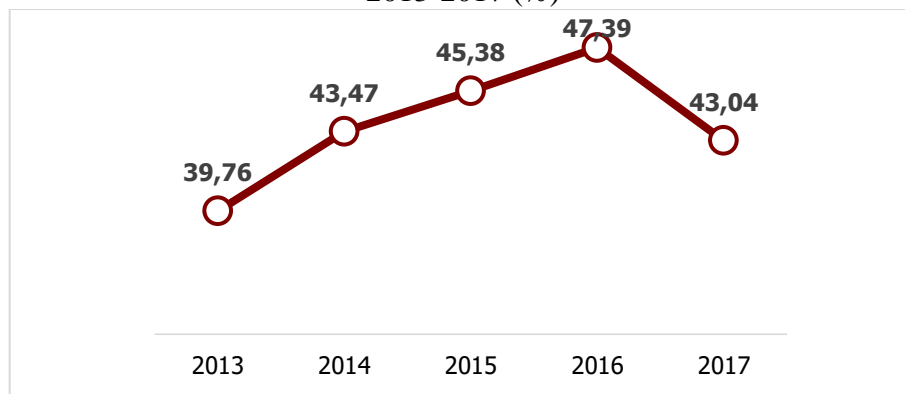
#### **2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

##### **2.4.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dan menjamin terwujudnya ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan petugas perlindungan masyarakat dan memperluas cakupan perlindungan yang diberikan. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Bone nampaknya mampu menaikkan angka

cakupan petugas perlindungan masyarakat, kecuali pada tahun 2017. Pada tahun 2013, cakupan petugas perlindungan masyarakat hanya 39,76 persen, sebelum akhirnya secara perlahan mengalami kenaikan menjadi 43,47 persen tahun 2014 dan 45,38 persen tahun 2015. Angka cakupan petugas perlindungan masyarakat di kabupaten Bone mencapai angka tertinggi yaitu 47,39 persen tahun 2016 sebelum menurun tahun 2017 sebesar 43,04 persen. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun, pemerintah daerah menambah jumlah petugas perlindungan masyarakat untuk memastikan kehidupan sosial berjalan aman dan tertib.

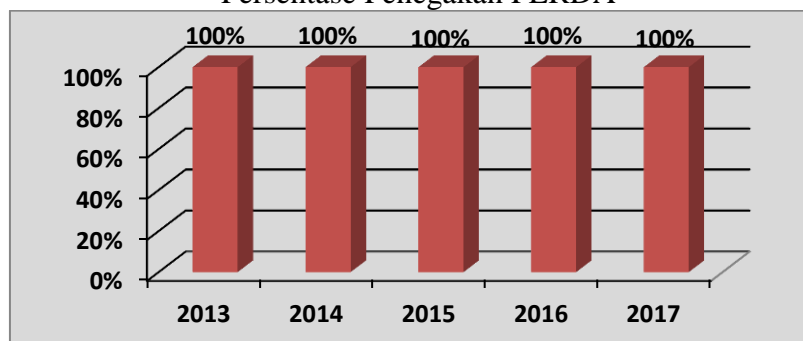
Grafik 2.94  
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)



Sumber: Data Olahan, 2018

#### 2.4.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Grafik 2.95  
Persentase Penegakan PERDA



Sumber : Data Diolah, 2018

Jumlah penduduk yang semakin besar, memicu banyaknya masalah lingkungan. Indikatornya adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3. Keadaan tertib adalah suatu keadaan dimana semua keadaan berjalan seperti apa yang diharapkan oleh semua masyarakat. Agar tercapai perlu adanya peraturan yang erat hubungannya dengan hukum.

Yang dimaksud dengan K3 adalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

- Beberapa kasus yang berkaitan dengan ketertiban :
  - ✓ Meningkatnya gangguan keamanan dan kriminalitas
  - ✓ Maraknya perkeltahan pelajar
  - ✓ Maraknya peredaran penyalahgunaan Narkoba
  - ✓ Seringnya melanggar rambu-rambu lalu lintas
  - ✓ Parker kendaraan tidak teratur
  - ✓ Budaya antri yang belum terbiasa
- Masalah ketertiban yang sering terjadi :
  - ✓ Rumah kotor
  - ✓ Toilet umum yang tidak bersih
  - ✓ Saluran air yang tidak lancar
  - ✓ Tidak tersedianya air bersih
  - ✓ Kurangnya udarah bersih
  - ✓ Kurangnya fasilitas WC umum

Keindahan lingkungan adalah lingkungan yang nyaman, estetik dan professional.

Permasalahan keindahan dikota adalah kurangnya ruang terbuka hijau (RPH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan.

Mari kita data permasalahan K3 di Kabupaten Bone

- ✓ Macet semakin sering
- ✓ PKL yang tidak tertib
- ✓ Banyak sampah berserakan

- ✓ Para pengguna jalan yang tidak tertib
- ✓ Lahan hijau yang makin sempit
- ✓ Banjir di beberapa tempat
- ✓ Jalan tanpa trotoar dan jembatan penyebrangan

#### 2.4.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Tabel 2.96

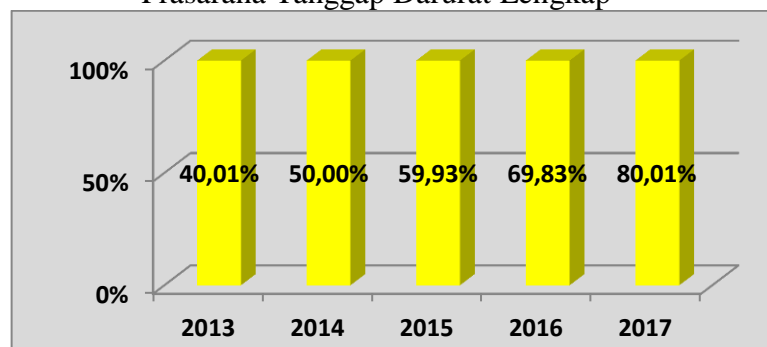
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

No.	Tahun	Jumlah Korban Dievakuasi	Jumlah Korban (KK)	Persentase
1	2013	2.454	6.134	40,01
2	2014	3.067	6.134	50,00
3	2015	184	307	59,93
4	2016	125	179	69,83
5	2017	3.185	3.981	80,01

Sumber : Data Diolah, 2018

Grafik 2.98

Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap



Sumber : Data Diolah, 2018

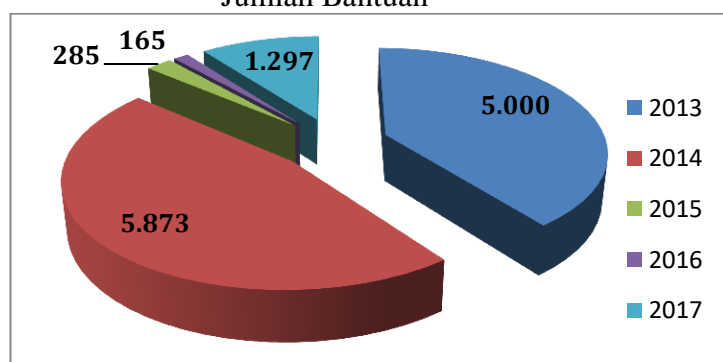


Tabel 2.58  
 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa  
 Tanggap Darurat.

No.	Tahun	Jumlah Bantuan	Jumlah Korban (KK)	Persentase
1	2013	5.000	6.134	81,51
2	2014	5.873	6.170	95,19
3	2015	285	307	92,83
4	2016	165	179	92,18
5	2017	1.297	1.456	89,08

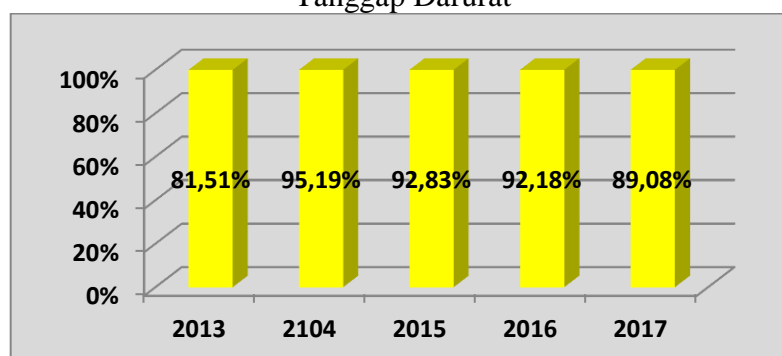
Sumber : Data Diolah, 2018

Grafik 2.97  
 Jumlah Bantuan



Sumber : Data Diolah, 2018

Grafik 2.99  
 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa  
 Tanggap Darurat



Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone, korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa

tanggap darurat mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah korban bencana tiap tahun. Dilihat dari tabel persentase dimana pada tahun 2013 jumlah korban sebanyak 6.134 dengan persentase sebesar 81,51%, tahun 2014 jumlah korban sebanyak 6.170 dengan persentase 95,9%, tahun 2015 jumlah korban sebanyak 307 dengan persentase sebesar 92,83%, tahun 2016 jumlah korban sebanyak 179 dengan persentase sebesar 92,18%, tahun 2017 jumlah korban sebanyak 1.456 dengan persentase sebesar 89,08%. Berdasarkan hasil persentase diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah korban penerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

#### **2.4.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

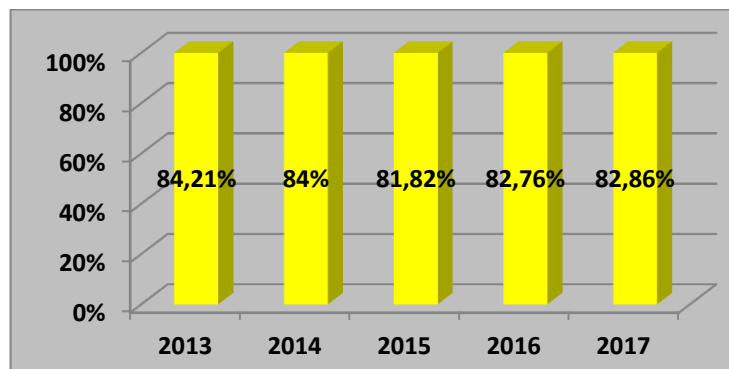
Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry.

Tabel 2.59  
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah manajemen Kebakaran

NO	TAHUN	JUMLAH WMK	JUMLAH LUAS WMK
1.	2013	16	19
2.	2014	21	25
3.	2015	27	33
4.	2016	24	29
5.	2017	29	35

*Sumber : Data Diolah, 2018*

Grafik 2.100  
Persentase Capaian Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rat) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran



Sumber : Data Diolah, 2018

Pada tahun 2013 terjadi kebakaran sebanyak 53 kali kebakaran yang terdiri dari 19 kali di dalam WMK dan 34 kali di luar jangkauan WMK. Dan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 16 kejadian kebakaran.

Pada Tahun 2014 terjadi kebakaran sebanyak 64 kali kebakaran yang terdiri dari 25 kali di dalam WMK dan 39 kali di luar jangkauan WMK. Dan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 21 kejadian kebakaran. Persentase capaian tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK pada tahun 2013 dan 2014 di atas 80 % karena hanya ada 1 WMK yaitu WMK pada pemukiman perkotaan.

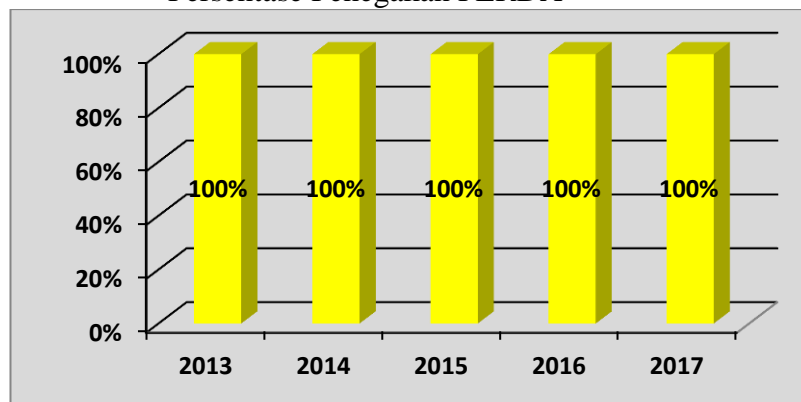
Pada Tahun 2015 terjadi kebakaran sebanyak 64 kali kebakaran yang terdiri dari 33 kali di dalam WMK dan 31 kali di luar jangkauan WMK. Dan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 27 kejadian kebakaran.

Pada Tahun 2016 terjadi kebakaran sebanyak 42 kali kebakaran yang terdiri dari 29 kali di dalam WMK dan 13 kali di luar jangkauan WMK. Dan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 24 kejadian kebakaran.

Pada Tahun 2017 terjadi kebakaran sebanyak 63 kali kebakaran yang terdiri dari 35 kali didalam WMK dan 28 kali diluar jangkauan WMK. Sedangkan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 29 kejadian kebakaran.

#### **2.4.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA**

Grafik 2.101  
Persentase Penegakan PERDA



Sumber : Data Diolah, 2018

**Peraturan Daerah** adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Wali kota).

Materi Muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

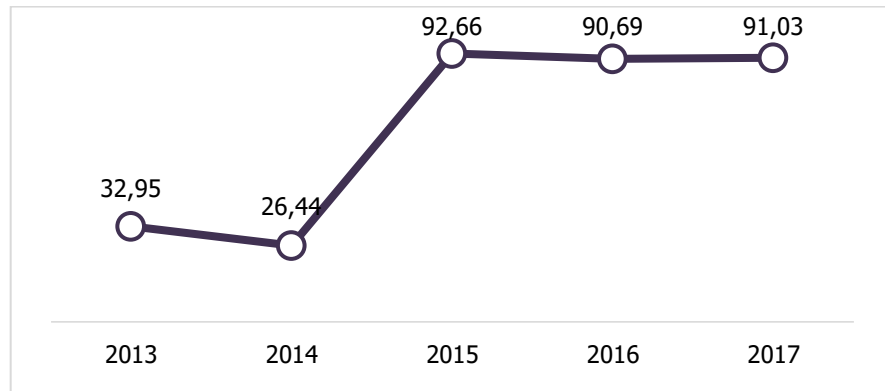
#### 2.4.1.6. Sosial

##### 2.4.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Keterlibatan negara dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kepedulian pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam Permensos No.8 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karenasuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Grafik 2.102  
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bone,  
2013-2017

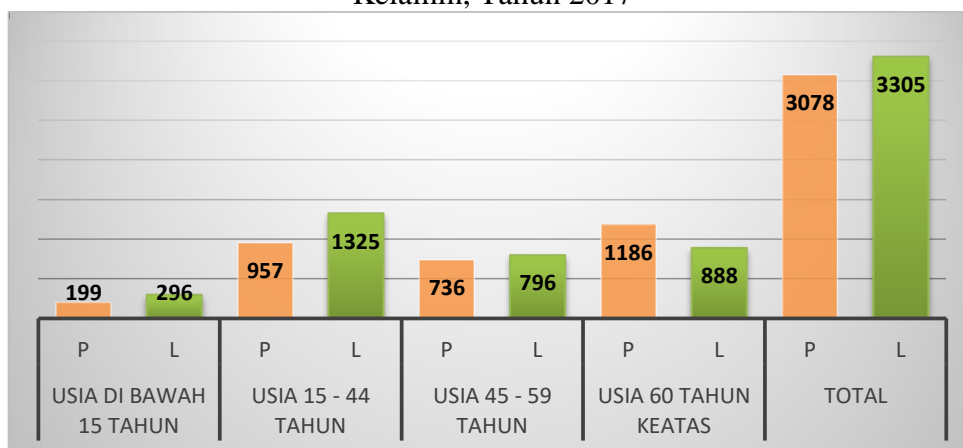


Sumber: Data Olahan, 2018

Sepanjang tahun 2013 hingga 2017, pemerintah daerah Kabupaten Bone memperluas cakupan pemberian bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori PMKS. Tahun 2013, proporsi PMKS yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah hanya 32,95 persen, sehingga masih ada 67,05 persen masyarakat PMKS belum mendapatkan bantuan pemerintah. Angkanya semakin memburuk pada tahun 2014, ketika persentase PMKS yang mendapat bantuan pemerintah daerah turun ke 26,44 persen. Pemerintah Kabupaten Bone berhasil memperluas cakupan bantuan mereka terhadap masyarakat PMKS secara signifikan tahun 2015 hingga mencapai 92,66 persen atau hanya tersisa 7,34 persen penduduk PMKS belum mendapat bantuan pemerintah daerah, namun sempat sedikit menurun di tahun 2016 sebesar 90,69 persen. Akhirnya pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Bone mencatat persentase penduduk PMKS yang dibantu sebesar 91,03 persen. Meski angkanya lebih rendah dari capaian tahun 2015, namun pemerintah daerah sudah menunjukkan keseriusannya untuk membantu masyarakat PMKS di Kabupaten Bone.

Salah satu kelompok masyarakat yang termasuk PMKS adalah penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bone, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2017 sebanyak 6.383 orang yang terdiri dari 3.078 (48 persen) perempuan dan 3.305 (52 persen) laki-laki.

Grafik 2.103  
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone Menurut Usia dan Jenis Kelamin, Tahun 2017



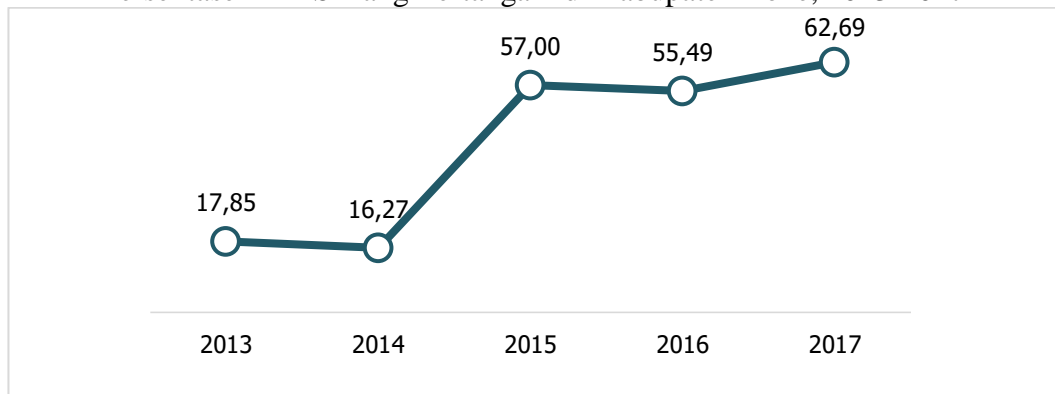
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.1.6.2. Persentase PMKS Yang Tertangani

Semakin meluasnya cakupan pemberian bantuan kepada penduduk PMKS di Kabupaten Bone berpengaruh terhadap angka persentase PMKS yang tertangani. Jika angka Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan proporsi antara jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan total PMKS yang seharusnya

mendapatkan bantuan, angka persentase PMKS tertanganimerupakan proporsi dari jumlah PMKS tertangani dibandingkan dengan total PMKS.

Grafik 2.104  
Persentase PMKS Yang Tertangani di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

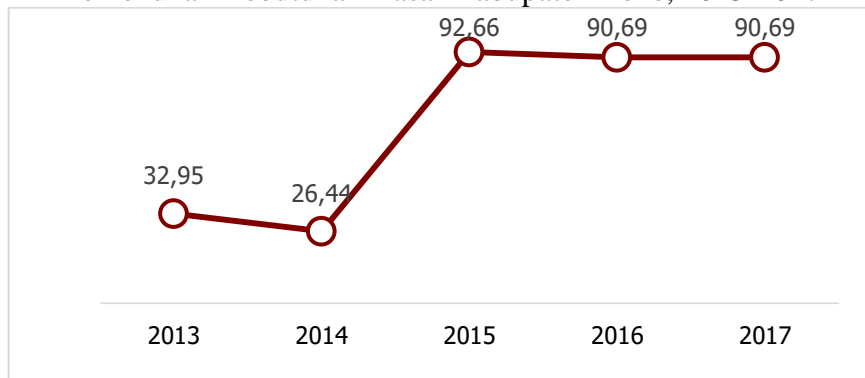
Tren angka persentase persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Bone selama lima tahun terakhir mengikuti perubahan persentase pemberian bantuan kepada PMKS. Awalnya, hanya 17,85 persen PMKS di Kabupaten Bone yang sudah mendapat penanganan dari pemerintah daerah, sehingga masih ada 82,15 persen PMKS belum ditangani, namun semakin menurun di tahun 2014 sebesar 16,27 persen. Kenaikan signifikan persentase PMKS tertangani di Kabupaten Bone terjadi di tahun di tahun 2015 mencapai 57 persen. Pada tahun ini lebih dari 1/2 penduduk PMKS di Kabupaten Bone berhasil mendapat penanganan dari pemerintah daerah, sebelum sedikit menurun di tahun 2016 sebesar 55,49 persen. Kabupaten Bone berhasil memperluas cakupan PMKS tertangani di tahun 2017 dengan mencatat angka sebesar 62,69 persen, sekaligus menjadi caaian tertinggi sepanjang tahun 2013 hingga 2017. Artinya hanya tersisa lebih dari 1/3 penduduk PMKS yang belum ditangani oleh pemerintah daerah.

#### **2.4.1.6.3. Persentase PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**



Sebagian besar bantuan pemerintah daerah terhadap penduduk PMKS di Kabupaten Bone adalah bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kementerian Sosial RI mendefinisikan bantuan sosial sebagai semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Grafik 2.105  
Persentase PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah daerah terus meningkatkan alokasi bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada penduduk PMKS. Meski sempat mengalami penurunan angka persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari 32,95 persen tahun 2013 ke 26,44 persen tahun 2014, namun keseriusan pemerintah Kabupaten Bone membantu masyarakat PMKS skala kabupaten berhasil menaikkan angka tersebut hingga mencapai 92,66 persen, tertinggi

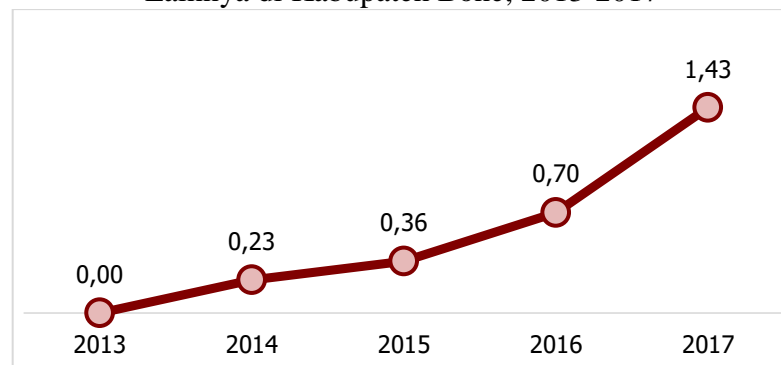
dalam rentan waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, angka persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Bone turun 90,69 persen dan tetap bertahan hingga tahun 2017.

#### **2.4.1.6.4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.**

Tidak hanya menyasar individu PMKS, pemerintah daerah juga menargetkan pemberian bantuan kepada panti sosial atau kelompok sosial ekonomi yang layak mendapat bantuan bantuan pemberdayaan sosial. Dalam lima terakhir, angka persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Bone konsisten meningkat, meski angkanya masih relatif rendah.

Grafik 2.106

Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

Tiga tahun selanjutnya angkanya terus naik dari 0,36 persen menjadi 0,70 persen, dan akhirnya menyentuh 1,43 persen masing-masing di tahun 2015, 2016, dan 2017. Meskipun begitu, masih ada sekitar 98,57 persen panti sosial di Kabupaten Bone yang belum

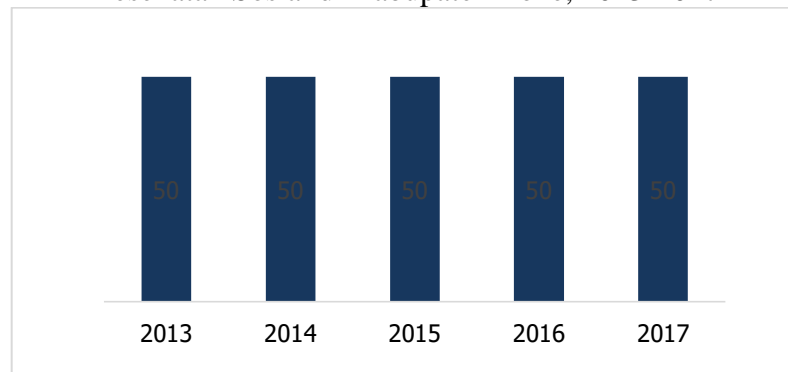
menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya.

#### **2.4.1.6.5. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial**

Salah satu instansi yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat PMKS adalah panti sosial. Berdasarkan Kepmensos No.50/HUK/2004, panti sosial diartikan sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Karena pentingnya peran panti sosial, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial menjadi salah satu indikator menilai kemampuan pemberian layanan.

Grafik 2.107

Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Bone, 2013-2017



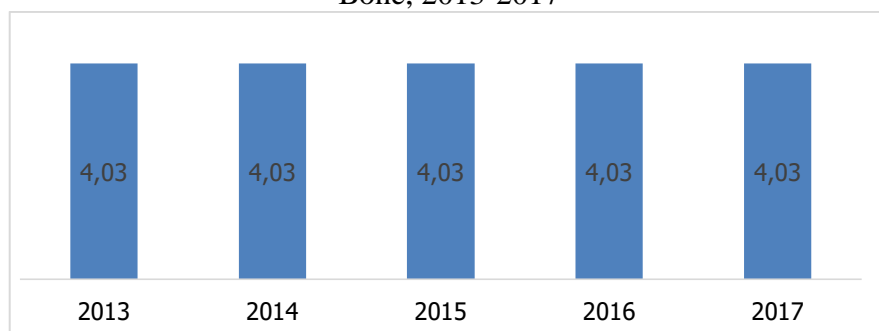
Sumber: Data Olahan, 2018

Di Kabupaten Bone, tidak semua panti sosial memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial. Sejak tahun 2013 hingga 2015 hanya 50 persen dari total panti sosial yang memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial. Jika jumlah masyarakat PMKS bertambah, maka proporsi panti sosial yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sosial seharusnya juga mengalami kenaikan.

#### **2.4.1.6.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Selain panti sosial, ketersediaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial juga penting bagi PMKS. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat merupakan sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Menurut Kemensos RI, wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas local, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat local, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi local dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Grafik 2.108  
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

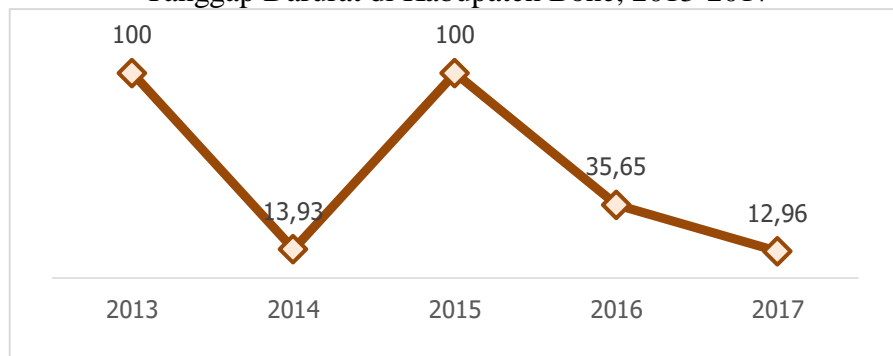
Sama halnya dengan angka persentase panti yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sosial, persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone tidak mengalami perubahan setidaknya dari 2013 hingga 2017. Angka 4,03 persen menunjukkan bahwa dari sekian

banyak WKBSM di Kabupaten Bone hanya 4,03 persen yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

#### **2.4.1.6.7. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**

Kabupaten Bone meruakan salah satu daerah yang mengalami beberapa bencana alam tahun 2017. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone, terdapat empat jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Bone yaitu kebakaran, puing beliung, banjir, dan longsor dengan masing-masing jumlah kejadian sebanyak 52, 10, 8, 1 kejadian. Menurut BPS, jumlah korban paling banyak mencapai 3.825 karena bencana alam banjir. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam membantu penduduk yang menjadi korban bencana dapat dilihat dari angka persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Grafik 2.109  
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

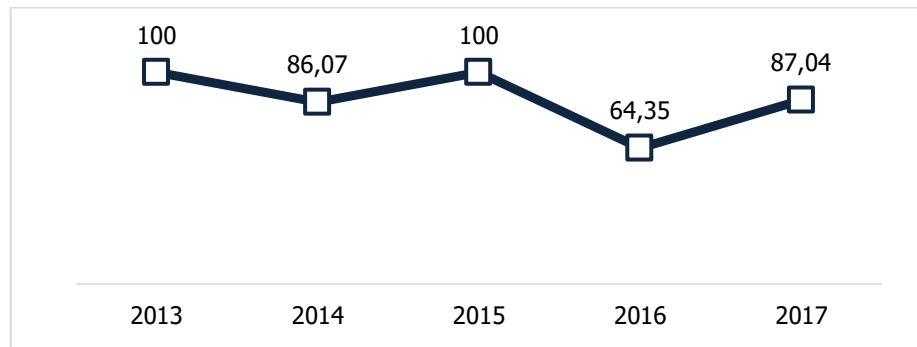
Dalam rentan waktu 2013 sampai 2017, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bone berfluktuasi. Setelah mencapai angka 100 persen tahun 2013, satu tahun kemudian angkanya menurun signifikan menjadi 13,93 persen. Ini menunjukkan bahwa di tahun tersebut ada sekitar 86,07 persen masyarakat yang menjadi korban bencana dan

seharusnya mendapat bantuan sosial tapi tidak memperoleh bantuan. Tahun 2017, angkanya kembali mencapai 100 persen, sebelum akhirnya di dua tahun terakhir konsisten mengalami penurunan dari 35,65 persen menjadi 12,96 persen.

#### **2.4.1.6.8. Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**

Banjir merupakan salah satu bencana paling besar yang seringkali terjadi di Kabupaten Bone dan membutuhkan kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk mengevakuasi penduduk yang terdampak. Upaya pemerintah daerah dalam mengevakuasi korban bencana nampaknya mengalami perubahan setiap tahun sepanjang tahun 2013 hingga 2017. Hanya di tahun 2013 dan 2015 persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di kabupaten bone mencapai 100 persen, artinya semua korban berhasil di evakuasi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Namun di tahun 2014 jumlahnya turun ke 86,07 persen, dan kemudian menurun lagi di tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 64,35 persen dan 87,04 persen. Ada dua factor penting penyebab menurunnya angka persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Bone yaitu jangkauan lokasi bencana dan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia.

Grafik 2. 110  
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kabupaten Bone, 2013-2017

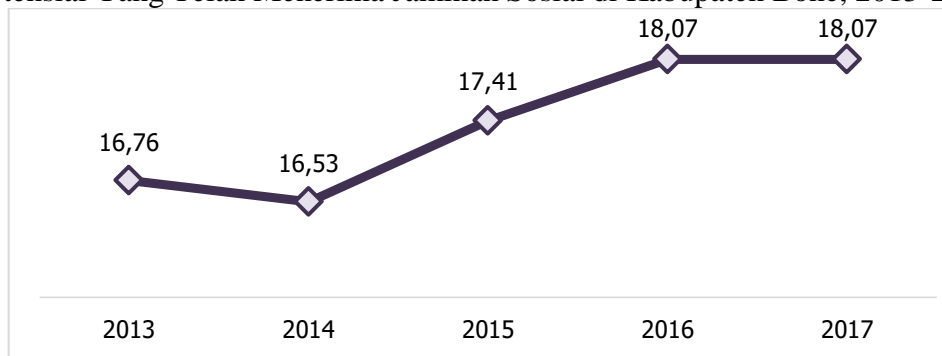


Sumber: Data Olahan, 2018

#### 2.4.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Tidak semua penduduk dalam satu daerah memiliki kemandirian untuk menjalankan fungsi sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sebagian penduduk harus mendapatkan bantuan pemerintah agar memudahkan mereka menjalankan kehidupan sosial secara lebih baik. Kelompok masyarakat tersebut sering disebut dengan kelompok rentan, diantaranya adalah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia. Untuk melaksanakan kehidupan normal ditengah masyarakat, mereka harus mendapat bantuan dari pemerintah daerah, salah satunya adalah jaminan sosial.

Grafik 2.111  
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018



Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pemerintah Kabupaten Bone, dalam lima tahun terakhir, mampu menaikkan angka persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk membantu masyarakat rentan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak mereka dan terus memperluas cakupannya. Meskipun persentasenya sempat menurun dari 16,76 persen tahun 2013 ke 16,53 persen tahun 2014 namun di tiga tahun terakhir konsisten menaik. Pada tahun 2015 sebanyak 17,41 persen penduduk penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial telah mendapatkan bantuan jaminan sosial, dan jumlahnya terus bertambah menjadi 18,07 persen tahun 2016 dan 2017. Meskipun trennya cenderung naik, namun persentasenya masih relatif rendah, karena masih terdapat 81,93 persen penduduk rentan belum mendapatkan bantuan jaminan sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Bone.

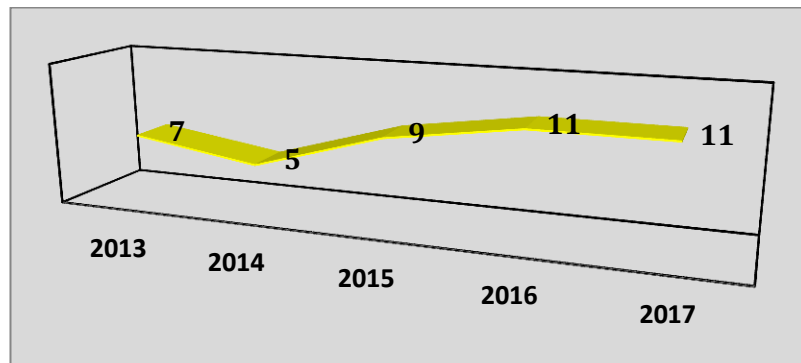
## **2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

### **2.4.2.1. Tenaga Kerja**

#### **2.4.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun**

Grafik 2.112

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun



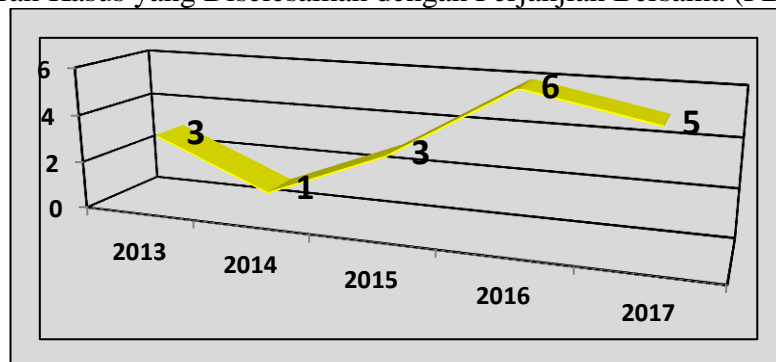
Sumber : Bid. HI Disnaker Bone, 2018

Besaran angka sengketa diperusahaan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kesepahaman antara perusahaan dan pekerja mengenai, aturan, hak, kewajiban, kesejahteraan dan hak maupun kewajiban pekerja lainnya.

#### 2.4.2.1.2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Grafik 2.113

Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)



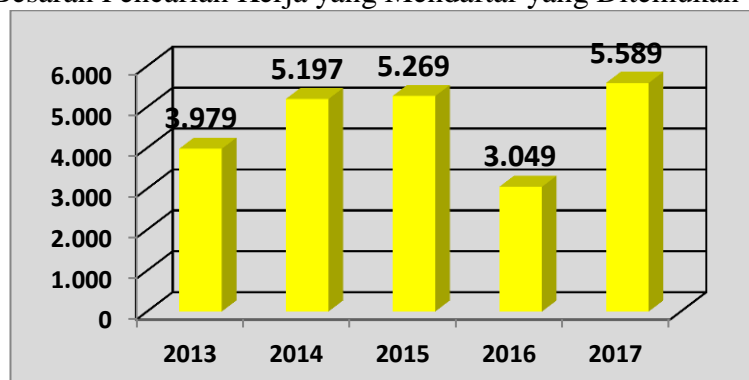
Sumber : Bid. HI Disnaker Bone

Besaran sengketa yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tidak dinamis dikarenakan jumlah sengketa pada perusahaan, dan tergantung dari bagaimana perusahaan maupun pekerja memiliki jalur apa dalam penyelesaian perselisihan.

#### 2.4.2.1.3. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Grafik 2.114

#### Besaran Pencarian Kerja yang Mendaftar yang Ditemukan



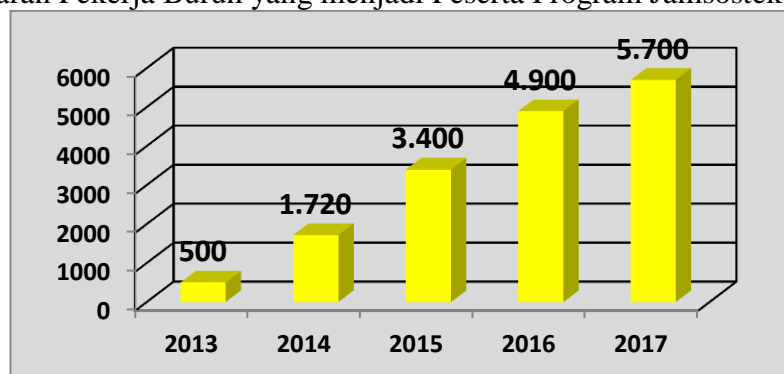
Sumber : Bid. Penempatan Disnaker Bone, 2018

Besaran pencari kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dari 2013-2017 meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena kurang perusahaan atau lapangan kerja yang terbuka.

#### 2.4.2.1.4. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Grafik 2.115

Besaran Pekerja Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek



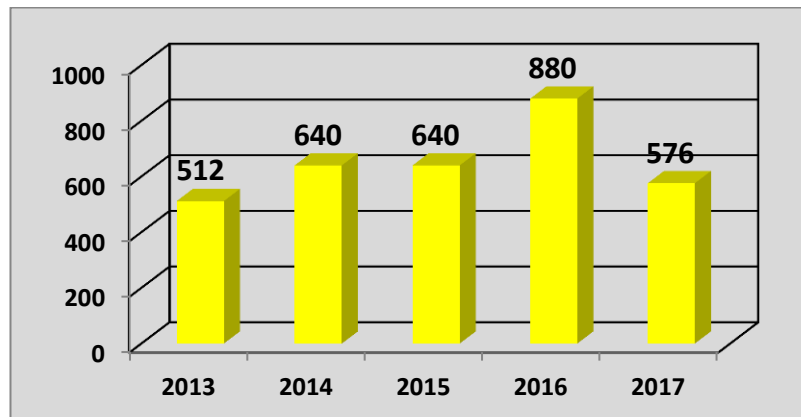
Sumber : Bid. HI Disnaker Bone, 2018

Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek dari tahun ketahun selalu meningkat.

#### 2.4.2.1.5. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Grafik 2.116

Besaran Tenaga Kerj yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi



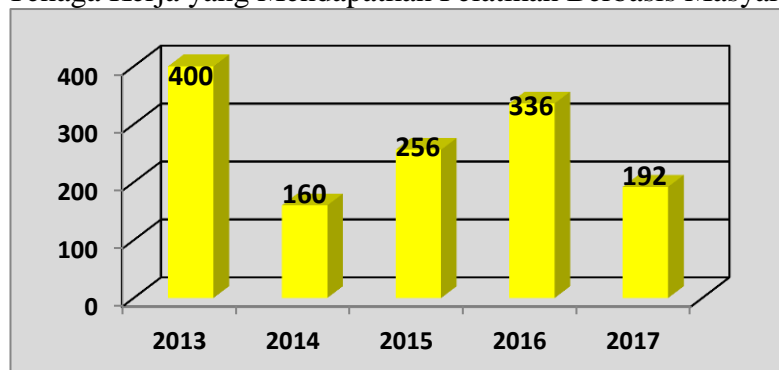
Sumber : BLK BONE, 2018

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ini jumlahnya tidak dinamis, hal ini disebabkan oleh jumlah paket pelatihan yang tersedia mengikuti dengan anggaran yang ada.

#### 2.4.2.1.6. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Grafik 2.117

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat



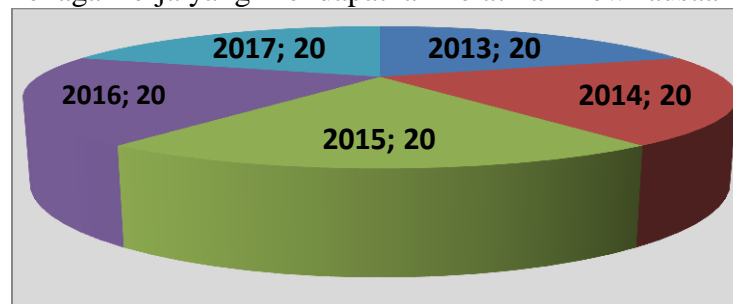
Sumber : BLK BONE, 2018

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ini jumlahnya tidak dinamis, hal ini disebabkan oleh jumlah paket pelatihan yang tersedia mengikuti dengan anggaran yang ada.

#### 2.4.2.1.7. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Grafik 2.118

#### Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan (Orang)



Sumber : Bid. Penempatan Disnaker Bone, 2018

Besaran tenagakerja yang mendapatkan pelatih kewirausahaan. Pelatihan ini di programkan untuk 4 kelompok wirausaha setiap tahunnya dimana setiap kelompok terdiri dari 5 orang peserta.

#### 2.4.2.1.8. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan suatu daerah. Oleh karena itu, rasio perimbangan jumlah lulusan Kesarjanaan untuk strata satu, strata dua, dan strata tiga memberikan indikasi kemajuan suatu daerah. Keterbatasan data dan informasi terkait kebutuhan analisis ini menjadi penting untuk diperhatikan dan diadakan. Jumlah lulusan sarjana terhadap jumlah penduduk masih sangat rendah yaitu berkisar 2.89% – 3.08% ( $\pm 723,745$  jiwa).

Tabel 2.60  
.Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlahlulusan S1					
2.	Jumlahlulusan S2					
3.	Jumlahlulusan S3					
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	20,940	23,586	20,940	22,768	22,313
5	Jumlah penduduk	724,905	728,737	724,905	738,515	723,745
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	2.89	3.24	2.89	3.08	3.08

Sumber : BPS Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### 2.4.2.2.1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Partisipasi tersebut diperlukan karena perempuan diyakini besar peranannya terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Peningkatan partisipasi perempuan dapat dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan. Pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar agar menghasilkan persamaan derajat yang setara antara perempuan dan kaum laki-laki. Selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, sehingga peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan. Salah satu indikator peran perempuan dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan disemua bidang lapangan kerja. Partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah dapat dilihat pada seberapa banyak perempuan bekerja sebagai PNS atau menempati jabatan pada berbagai eselon.

Tabel. 2.61  
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kabupaten Bone,  
2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II	3	8	4	3	9
2	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon III	41	46	45	37	63
3	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon IV	442	455	466	468	515
4	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	6.513	6.597	6.330	6.378	5.728
5	Jumlah Pekerja Perempuan					
6	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	1,663	1,69	1,621	1,634	1,464

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone, 2018

Jumlah pekerja perempuan di Pemerintah Kabupaten Bone cenderung berkurang sejak lima tahun terakhir. Pekerja perempuan yang bekerja di pemerintahan tahun 2013 sebanyak 6.513 pegawai

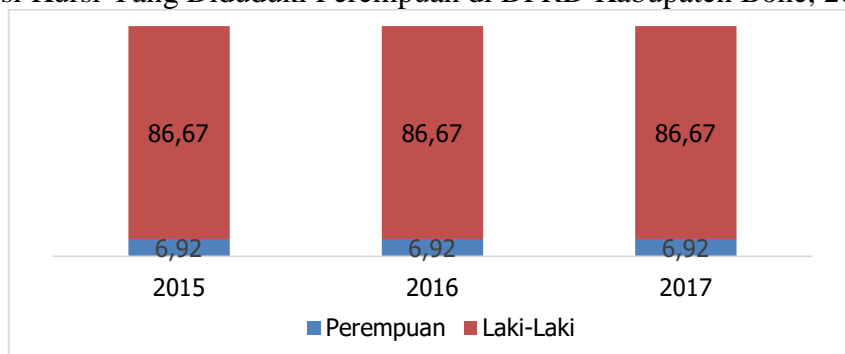
kemudian turun menjadi 5.728 pegawai pada tahun 2017. Sedangkan pegawai perempuan yang menempati jabatan eselon IV sampai eselon II cenderung mengalami peningkatan.

#### 2.4.2.2.2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Arah pembangunan saat tidak semata fokus pada permasalahan ekonomi, namun semua aspek yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dijadikan arah pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan yang dianggap penting saat ini adalah kesetaraan gender, khususnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik. Beberapa peraturan yang mengharuskan keterwakilan 40 persen perempuan di parlemen diantaranya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Grafik 2.119

Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Bone, 2015-2017



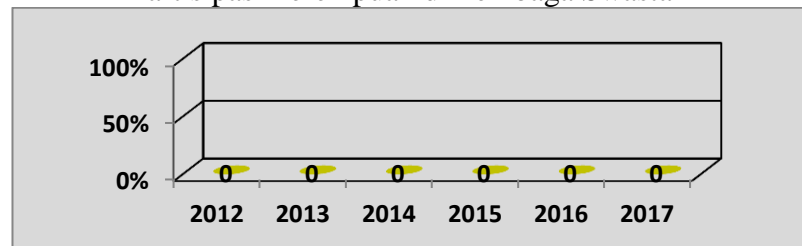
Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka, 2018

Parlemen Kabupaten Bone nampaknya masih jauh dari apa yang disyaratkan dalam regulasi atau komposisinya masih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan data yang tersedia di BPS Kabupaten Bone, proporsi perempuan dalam parlemen Kabupaten Bone dari tahun 2015 sampai 2017 masih 6,92 persen, sementara anggota DPRD laki-laki 86,67 persen. Butuh upaya lebih keras dari semua stakeholder,

terutama pemerintah dan daerah dan partai politik untuk mendorong perempuan terlibat lebih aktif dalam bidang politik.

#### 2.4.2.2.3. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Grafik 2.120  
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

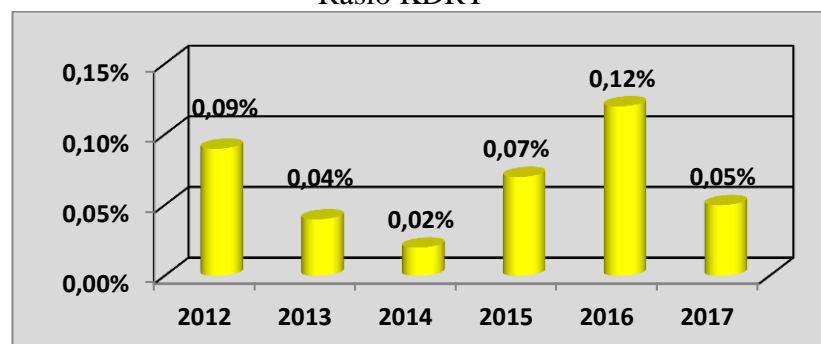


Sumber : Data Diolah, 2018

Data Sektor dalam hal ini belum terdata secara maksimal (belum ada). Sehingga masih sulit diukur partisipasi perempuan dilembaga swasta dari Tahun 2012 sampai sekarang ini.

#### 2.4.2.2.4. Rasio KDRT

Grafik 2.121  
Rasio KDRT



Sumber : Data Diolah, 2018

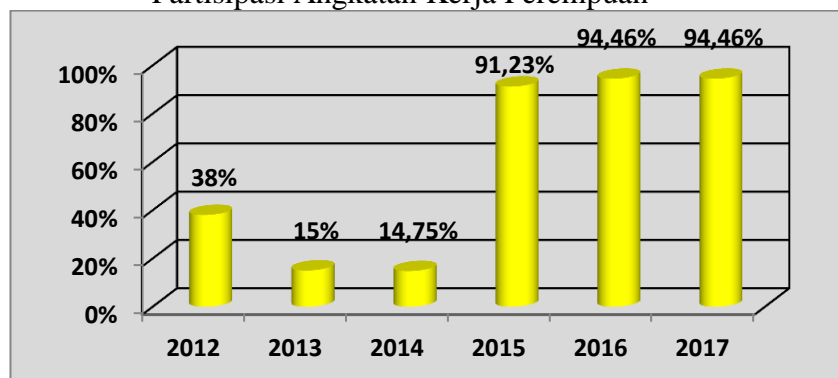
Berdasarkan data dalam Tabel diatas perlu dijelaskan bahwa jumlah KDRT pada Tahun 2014 cenderung menurun yaitu hanya 41 kasus yang tercatat dibandingkan pada Tahun 2012 dan 2013 yang mencapai 59 kasus dimana jumlah rumah tangga pada tahun 2013 sebanyak 166.136 dan pada Tahun 2014 sebanyak 230.721 rumah tangga. Pada Tahun 2013 rasio KDRT adalah sebesar 0,04 % sedangkan pada Tahun 2014 rasio KDRT kekerasan sebanyak 125 kasus dan jumlah rumah tangga sebanyak 162.568, dan di Tahun 2016



rasio KDRT mengalami peningkatan yaitu mencapai 0,12 % dimana jumlah kekerasan tercatat 204 kasus dengan jumlah rumah tangga sebanyak 158.202. dan selanjutnya di Tahun 2017 tercatat 87 kasus atau 0,05 % dengan penurunan angka KDRT yang cukup signifikan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 2.4.2.2.5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Grafik 2.122  
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan



Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 dimana pada posisi 94,46 % dimana peningkatan signifikan dilihat dari capaian dan angka perempuan yang ada di kabupaten Bone. Artinya bahwa angkatan kerja perempuan lebih banyak dibandingkan angkatan kerja laki-laki.

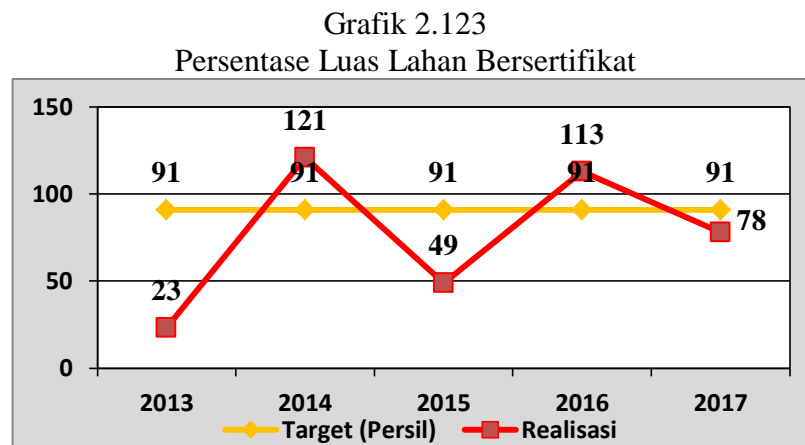
#### 2.4.2.3. Pertanian

##### 2.4.2.3.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Kondisi awal tahun 2013 data tentang tersertifikasinya persil-persil tanah milik pemerintah kabupaten sebanyak 456 persil untuk kurang waktu tahun 2013-2016 dan terurai dalam capaian tahun 2014 rencana sebesar 91 persil dan realisasi sebanyak 121 persil, tahun 2015 rencana capaian sebesar 91 persil realisasi sebanyak 49 persil, tahun 2016 rencana capaian sebanyak 91 persil realisasi sebanyak 113

dan 2017 rencana capaian sebanyak 91 persil namun yang terealisasi sebanyak 78 persil dalam proses sertifikasi.

Berikut capaian rencana dan realisasi sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Bone, yang disajikan dari grafik di bawah ini.



Sumber : Data Diolah, 2018

Capaian sertifikasi tanah menunjukkan peningkatan pencapaian peningkatan meskipun pariatif capaian dari tahun ketahun diatas rencana mengingat masalah lahan banyak dipengaruhi oleh factor-faktor eksternal seperti lahan dan sejarah tanah.

Sementara untuk fasilitasi sengketa tanah telah diupayakan dan terselesaikan tahun 2013 total sengketa tanah yang terjadi sebanyak 7 persil dan realisasi capaian penyelesaian masalah sengketa selesai sebanyak 7 persil. Tahun 2014 total sengketa tanah yang terjadi sebanyak 5 persil dan ralisasi capaian penyelesaian masalahi sengketa selesai sebanyak 5 persil. Tahun 2015 total sengketa tanah yang terjadi sebanyak 2 persil dan realisasi capaian penyelesaian masalah sengketa selesai sebanyak 2 persil. Tahun 2016 total sengketa tanah yang terrjadi sebanyak 0 persi dan realisasi capaian penyelesaian masalah sengketa selesai sebanyak 0 persil. Tahun 2017 total sengketa tanah yang terjadi sebanyak 1 persi dan realisasi capaian penyelesaian masalah sengketa selesai sebanyak 1 persil.

#### 2.4.2.4. Lingkungan Hidup

##### 2.4.2.4.1. Peningkatan Indeks Kualitas Air

Pengukuran air sungai dilakukan dengan mengambil sample air di bagian Hulu, bagian tengah dan bagian hilir kemudian hasil pengujiannya diambil nilai rata-rata sehingga diperoleh data indeks kualitas air.

Tabel 2.62  
Peningkatan Indeks Kualitas Air

NO	LOKASI	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Air Sunga Walanae	B	CR	CR	CR	CR
2.	Air Sunag Teko	CS	CS	CS	CS	CS
3.	Air Sungai Salokae	CR	CR	CR	CR	CR
4.	Air Sungai Palakka	B	CR	CR	CR	CR
5.	Air PDAM	CR	CS	CS	CS	CS
6.	Air Laut Bajoe	CR	CR	CR	CR	CR

Sumber : Analisis Laboratorium Lingkungan DLH, 2018

Keterangan :

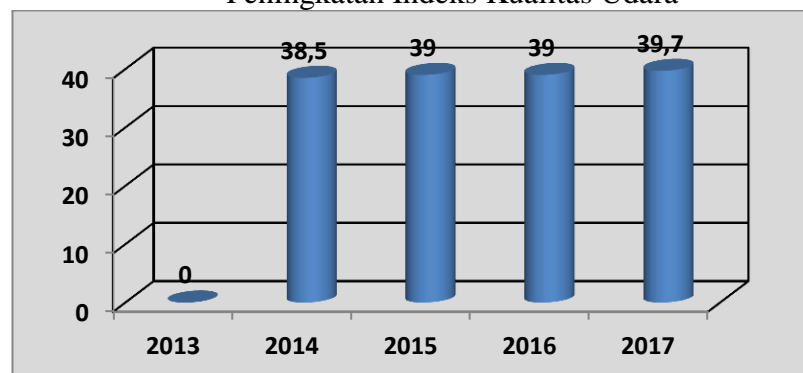
- B : Baik
- CR : Cemar Ringan
- CS : Cemar Sedang
- 

#### 2.4.2.4.2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

Pengukuran kualitas udara dilakukan di beberapa titik yang menggambarkan wilayah pemukiman, wilayah industry, wilayah padat transportasi dan wilayah komersil.

Grafik 2.124  
Peningkatan Indeks Kualitas Udara



Sumber : Analisis Laboratorium Lingkungan DLH, 2018

Kategori :

0 – 50 : Baik

51 – 100 : Sedang

101 – 199 : Tidak Sehat

200 – 299 : Sangat Tidak Sehat

300 ≤ : Berbahaya

#### **2.4.2.4.3. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota**

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh Pemerintah di tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menyusun RPPLH sesuai dengan UU No. 32/2009 disyaratkan ada instrument KLHS dan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal).

Dalam kurun waktu 2013 – 2017 Dinas Lingkungan Hidup belum menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **2.4.2.4.4. Timbulan Sampah yang Ditangani**

Tabel 2.63  
Timbulan Sampah yang Ditangani

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah timbulan sampah yang ditangani (ton)	-	-	-	-	80.970
2.	Total timbulan sampah di 27 Kecamatan (ton)	-	-	-	-	134.950

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2018

Jumlah Timbulan Sampah di 3 Kecamatan Kota yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 sebesar 98 %.

#### **2.4.2.4.5. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R**

Pada tahun 2017 sampah- sampah yang dikurangi melalui 3R yakni sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah,

pusat daur ulang, pengkomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

- Komposting	: 6 Ton
- Daur Ulang Bahan Baku	: 0,5 Ton
- Daur Ulang Produk Kreatif	: 0,5 Ton
- Biogas	: 5 Ton
- Bank sampah	: 1,5 Ton
- Lain-lain (Pengepul/Pencacah)	: 4 ton
<b>Total</b>	<b>: 17,5 Ton</b>

#### **2.4.2.4.6. Persentase Cakupan Area Pelayanan**

Sejak tahun 2013 hingga Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup melayani pengelolaan persampahan di 3 wilayah kecamatan kota yakni Kec. Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan tanete Riattang Timur dengan luas area 121.650 Km<sup>2</sup>.

#### **2.4.2.4.7. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**

Pola konsumsi, pertambahan jumlah penduduk, dan kemajuan ekonomi menyebabkan produksi sampah di daerah terus bertambah. Jika tidak ditangani dengan baik, maka sampah bisa menjadi masalah kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana dalam bab tentang tugas dan kewenangan, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan data tahun 2017 yang tersedia terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone, tercatat jumlah volume sampah tahun tersebut mencapai 134.950 ton, namun yang berhasil ditangani oleh pemerintah daerah hanya 80.970 atau 60 persen dari total volume sampah. Volume sampah yang jumlahnya terus bertambah, paling besar berasal dari lima kecamatan yaitu Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, dan Kahu. Tercatat, tahun 2017 sebanyak 9.847 ton sampah diproduksi oleh kecamatan Tanete Riattang, 8.949 ton berasal dari Tanete Riattang Barat, 7.420 ton bersumber dari TR Timur, sebanyak

6.821 ton dan 8.365 ton datang dari Tellu Siattinge, dan Kahu. Total volume sampah yang dihasilkan di lima kecamatan tersebut mencapai 1/3 dari seluruh sampah Kabupaten Bone.

Banyaknya sampah yang diproduksi Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, dan Kahu membuat pemerintah setempat mengalami kesulitan dalam menangani. Hanya Kecamatan Tanete Riattang, Taete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur yang angka persentase penanganan sampahnya masing-masing mencapai 98,98 persen, 99,59 persen, dan 98,38 persen atau hanya sekitar kurang lebih 1 persen volume sampah tahun 2017 yang belum tertangani. Sementara di Kecamatan Tellu Siattinge dan Kahu hanya mampu menangani 1,89 persen dan 2,57 persen dari sampah yang mereka produksi.

Tabel 2.64  
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bone  
Berdasarkan Kecamatan, 2017

No	Kecamatan	Jumlah Sampah Yang ditangani (ton)	Jumlah Volume Produksi Sampah (ton)	Persentase Yang Ditangani
1	Bontocani	300	2.715,6	4,74
2	Kahu	400	8.365,8	2,57
3	Kajuara	400	5.515,15	3,11
4	Salomekko	300	2.469,6	5,16
5	Tonra	300	3.438,3	6,00
6	Patimpeng	300	5.420,25	4,68
7	Libureng	300	5.161,1	2,38
8	Mare	300	5.318,05	3,12
9	Sibulue	400	4.438,4	3,23
10	Cina	400	4.376,35	3,87
11	Barebbo	400	2.792,25	3,92
12	Ponre	100	4.234	1,54
13	Lappariaja	200	2.792,25	2,03
14	Lamuru	300	4.234	2,90
15	Tellu Limpoe	100	4.445,7	1,85
16	Bengo	300	2325,05	2,89
17	Ulaweng	200	4.4449,35	2,15
18	Palakka	300	4.989,55	2,66
19	Awangpone	300	6.007,9	2,68
20	Tellu Siattinge	300	6.821,85	1,89
21	Amali	300	3.821,55	3,37
22	Ajangale	400	4.737,7	3,63
23	Dua Boccoe	400	5.347,25	3,30
24	Cenrana	300	3.971	3,30

No	Kecamatan	Jumlah Sampah Yang ditangani (ton)	Jumlah Volume Produksi Sampah (ton)	Persentase Yang Ditangani
25	TR Barat	24.420	8.949,8	99,59
26	TR Timur	20.000	7.420,45	98,38
27	Tanete Riattang	26.700	9.847,7	98,98
Total		80.970	134.950	60,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2018

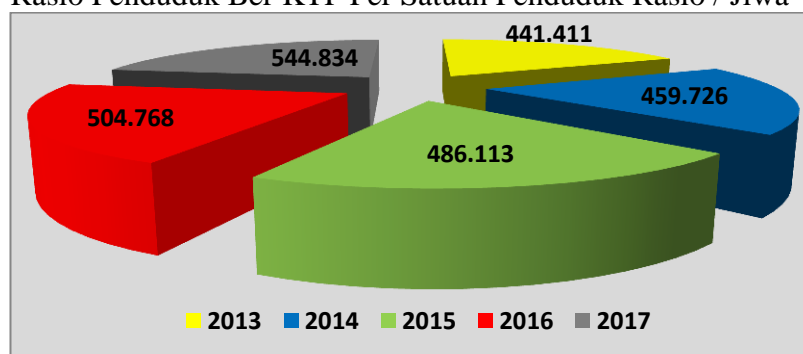
#### 2.4.2.4.8. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/kota

Penilaian Program Adipura Tahun 2017, Nilai TPA Passippo 71,60 Point. Izin pengelolaan sampah oleh pihak swasta yang diterbitkan tahun 2017.

#### 2.4.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

##### 2.4.2.5.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

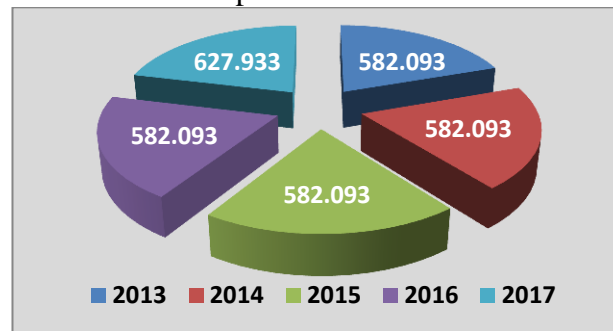
Grafik 2.125  
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Rasio / Jiwa



Berdasarkan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Rasio Penduduk ber-KTP-el pada Tahun 2013 sebanyak 441.411 Jiwa, Tahun 2014, 459,726 Jiwa, Tahun 2015 sebanyak 486.113 Jiwa, Tahun 2016 504.768 Jiwa dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 88 %. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pelayanan keliling pendaftaran penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Periode 2013 – 2017. Di samping itu peningkatan ini dipengaruhi oleh faktor kebutuhan masyarakat terhadap Dokumen Kependudukan untuk identitas diri sebagai warga Negara.

#### 2.4.2.5.2. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Grafik 2.126  
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

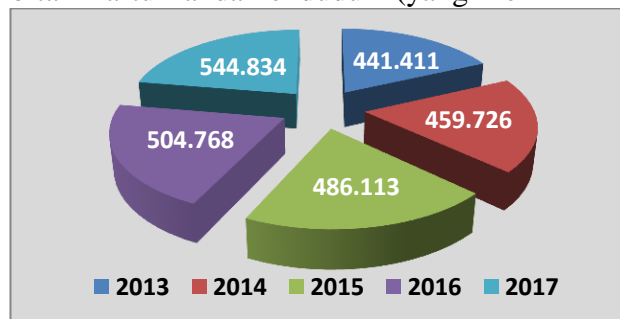


Sumber : Data Diolah, 2018

Dari Tabel tersebut di atas dalam Kurung Waktu 5 Tahun (2013 – 2017) Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el mengalami peningkatan setiap Tahun sejak adanya Penerapan KTP-el berbasis NIK.

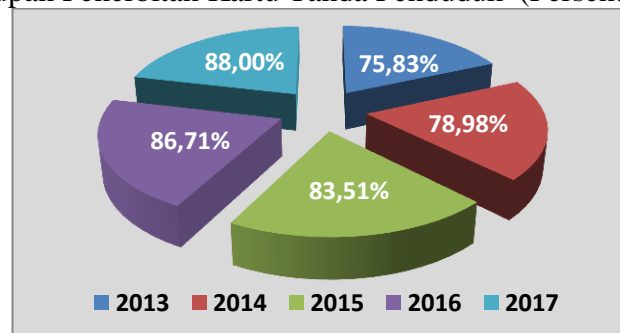
#### 2.4.2.5.3. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Grafik 2.127  
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (yang Memiliki KTP-EL /Jiwa)



Sumber : Data Diolah, 2018

Grafik 2.128  
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (Persentase)



Sumber : Data Diolah, 2018



Dari Tabel tersebut di atas, Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan setiap Tahunnya .

#### 2.4.2.5.4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel 2.64  
Akta Catatan Sipil

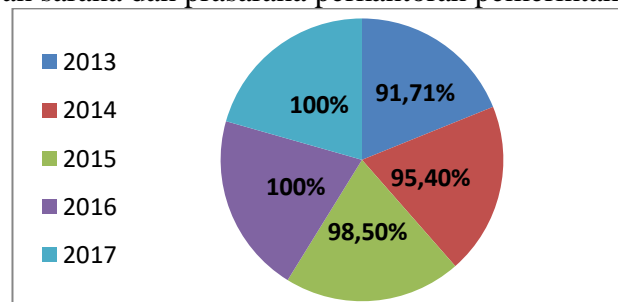
No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Yang Memiliki Akta (Jiwa)	Persentase	Ket.
1.	2013	893.859	511.759	57,25 %	SIAK
2.	2014	859.377	543.930	63,29 %	SIAK
3.	2015	860.789	563.044	65,41 %	SIAK
4.	2016	863.654	607.512	70,34 %	SIAK
5.	2017	866.245	822.109	94,90 %	SIAK

Sumber : Data Diolah, 2018

Dari Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan kepemilikan Akta Catatan Sipil dengan asumsi bahwa persentase kepemilikan Akta Catatan Sipil mengalami peningkatan. Hal ini didasari tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Dokumen Kependudukan sebagai identitas diri sebagai warga Negara pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

#### 2.4.2.5.5. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Grafik 2.129  
Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik



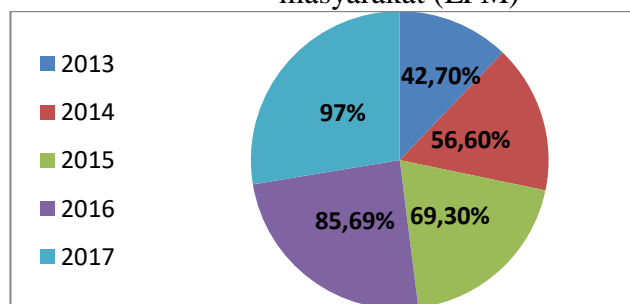
Sumber : Data Diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik cukup meningkat karena dengan adanya bantuan Desa dari Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) perdesa pada Tahun 2014.

Selanjutnya pada Tahun 2015 dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 pihak Pemerintah Desa banyak yang memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur dengan kegiatan perbaikansarana dan prasarana kantor Desa melalui Dana APBD Desa sampai dengan sekarang.

#### **2.4.2.5.6. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Grafik 2.130  
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

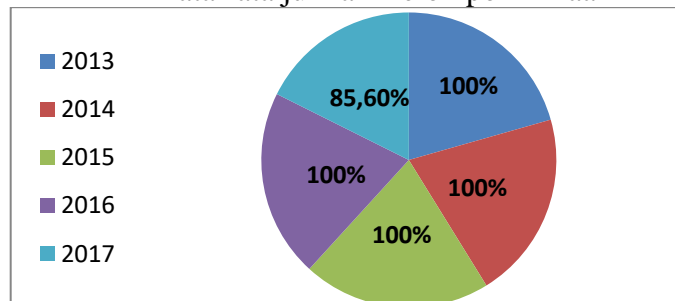


Sumber : Data Diolah, 2018

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan cukup meningkat dengan adanya presentase jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada setiap Desa di 24 Kecamatan, mulai Tahun 2013 masih kondisi 42,70 % namun terjadi peningkatan setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2017. Hal ini juga sebagai dampak positif dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2013 dan tahun 2014 dan di lanjutkan dengan adanya Bantuan Dana Desa untuk itu dengan adanya berbagai macam program kegiatan yang dilaksanakan di Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat hal ini berdampak pada peningkatan edukasi yang memberikan pembelajaran kepada LPM tentang mekanisme pengelolaan kegiatan. Sebagai capai dari kegiatan ini tergambar pada kemajuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

#### 2.4.2.5.7. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

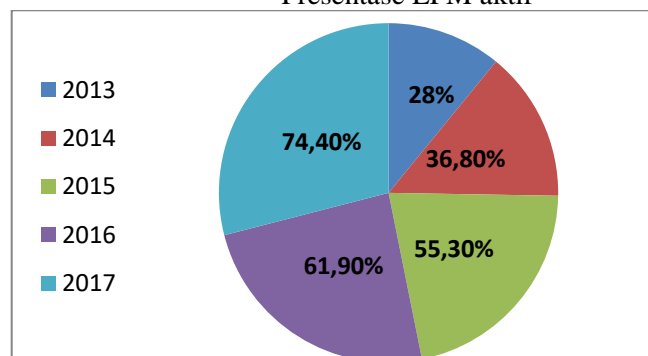
Grafik 2.131  
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK



Sumber : Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.5.8. Persentase LSM Aktif

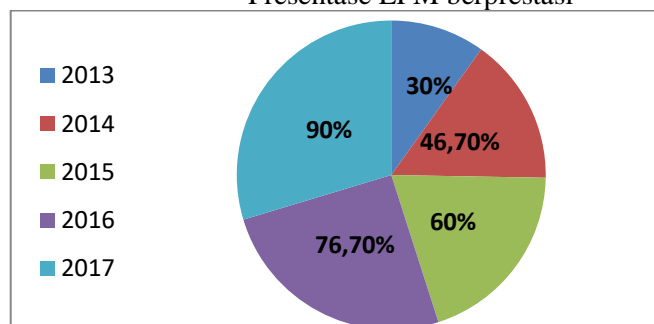
Grafik 2.131  
Presentase LPM aktif



Sumber : Data Diolah, 2018

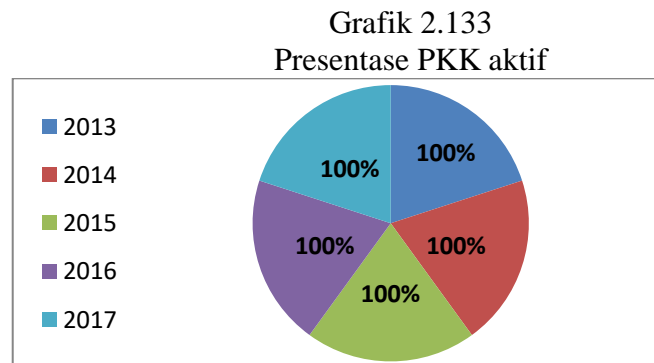
#### 2.4.2.5.9. Persentase LPM Berprestasi

Grafik 2.132  
Presentase LPM berprestasi



Sumber : Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.5.10. Persentase PKK aktif



Sumber : Data Diolah, 2018

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten baik berupa kegiatan yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah mengakibatkan motivasi dan partisipasi daripada seluruh kader PKK semakin aktif. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah Kelompok Binaan PKK yang semakin berkembang.

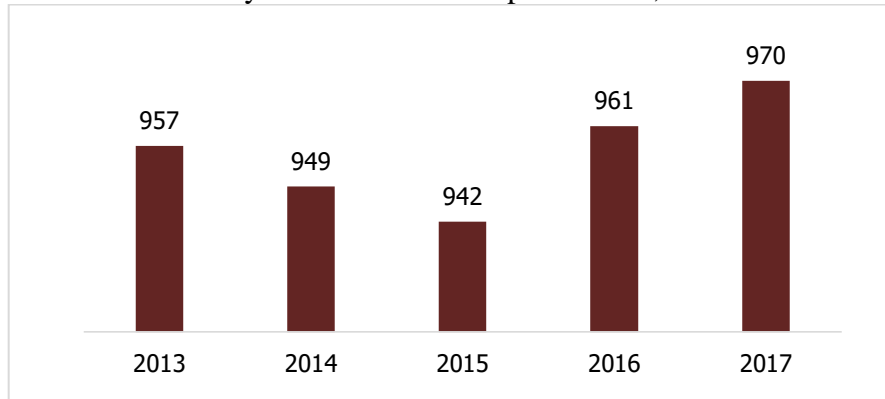
#### 2.4.2.5.11. Jumlah Posyandu Aktif

Posyandu berperan penting dalam memperbaiki kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Oleh karena itu keaktifan posyandu di setiap daerah sangat penting untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan untuk ibu dan anak.

Selama tahun 2013 sampai 2017, jumlah posyandu aktif di Kabupaten Bone mengalami kenaikan, walaupun di tiga tahun pertama menurun. Pada tahun 2013, Kabupaten Bone memiliki 957 posyandu aktif, dan terus menurun menjadi 949 hingga hanya 942 posyandu aktif. Upaya pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan membuat jumlah posyandu aktif meningkat dan penambahannya jauh lebih banyak daripada penurunan di tiga tahun

awal yaitu 961 tahun 2016 dan akhirnya mencapai 970 posyandu aktif tahun 2017.

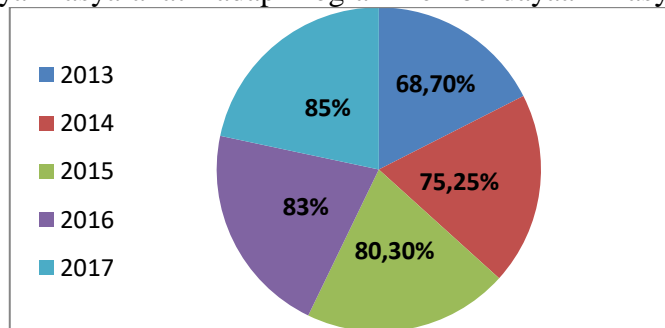
Grafik 2.134  
Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber : Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.5.12.Swadaya Masyarakat Terhadap Program pemberdayaan Masyarakat

Grafik 2.135  
Swadaya Masyarakat Hadap Program Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

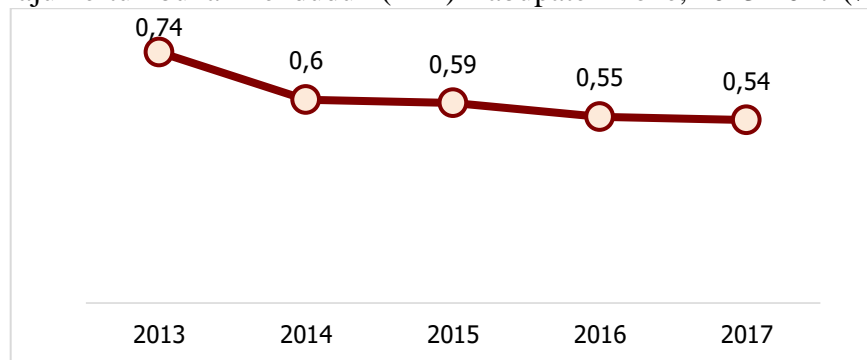
##### 2.4.2.6.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang banyak dan berkualitas membuat daerah tersebut memiliki modal manusia. Namun, tidak selalu banyaknya penduduk sejalan dengan kualitas pembangunan daerah, dan justru berpotensi mendatangkan masalah baru ketika jumlah penduduk yang banyak diikuti dengan tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Oleh

karena itu laju pertumbuhan penduduk harus bias dikendalikan untuk mengantisipasi masalah social di masa depan.

Sepanjang tahun 2013 sampai 2017, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Bone. Pada tahun 2013, penduduk Kabupaten Bone naik 0,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara konsisten menurun meski cenderung lambat menjadi 0,6 persen dan 0,59 persen masing-masing di tahu 2014 dan 2015. Karena cukup luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Bone, tahun 2016 dan 2017 laju penduduk kembali melambat dari 0,55 persen ke 0,54 persen.

Grafik 2.136  
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)

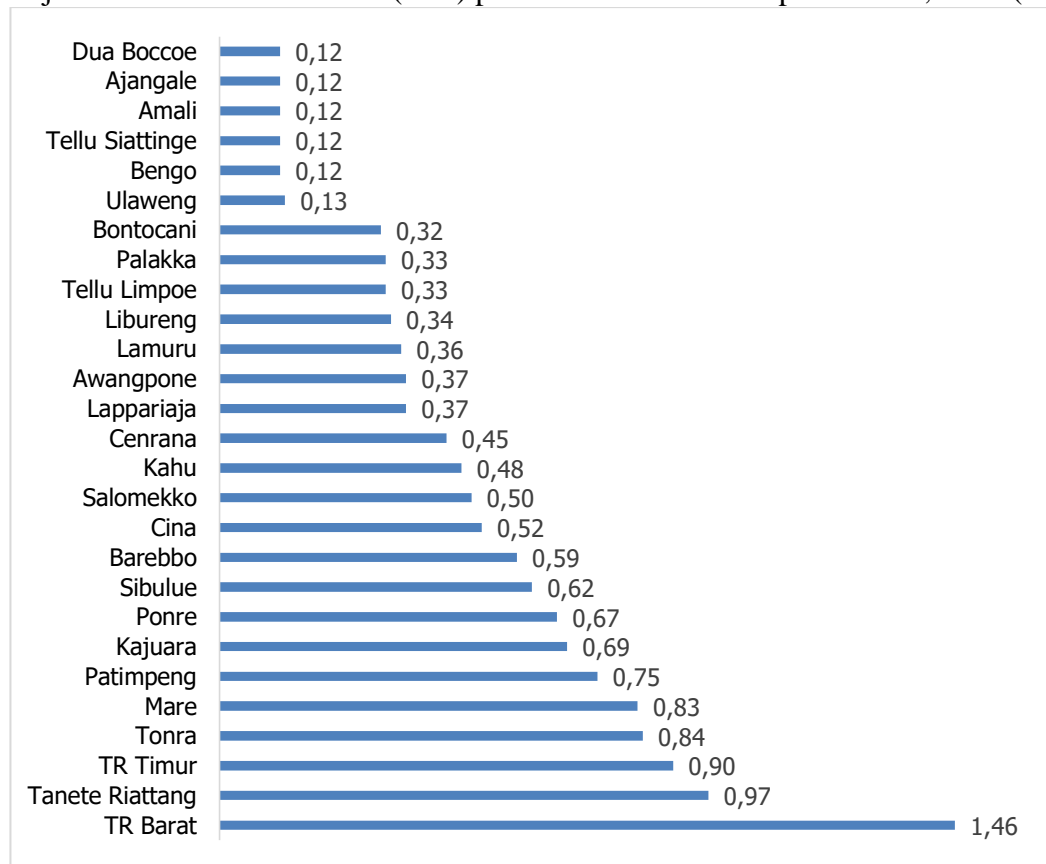


Sumber: Data Diolah, 2018

Lima kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi tahun 2016-2017 adalah Tanete Riattang Barat sebesar 1,46 persen, Tanete Riattang 0,97 persen, Tanete Riattang Timur 0,90 persen, Tonra 0,84 persen, dan Mare 0,83 persen. Sementara lima kecamatan di Kabupaten Bone dengan laju pertumbuhan paling rendah berada di Bengo, Tellu Siattinge, Amali, Ajangale, dan Dua Boccoe masing-masing sebesar 0,12 persen.

Grafik 2.137

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017 (%)



Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka, 2018

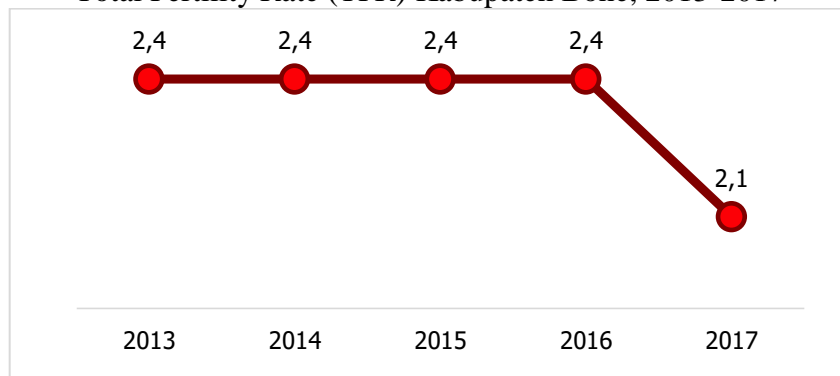
#### 2.4.2.6.2. Total Fertility Rate (TFR)

Salah satu sebab melambatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Bone adalah angka *Total Fertility Rate* yang cenderung konstan dalam lima tahun terakhir. TFR merupakan ukuran untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Konsep Definisi *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh

seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

Sejak tahun 2013 hingga 2016 angka TFR Kabupaten Bone konstan di 2,4, menunjukkan bahwa selama empat tahun tersebut wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai dua anak selama masa usia suburnya. Namun tahun 2017, TFR Kabupaten Bone mengalami penurunan sampai 2,1.

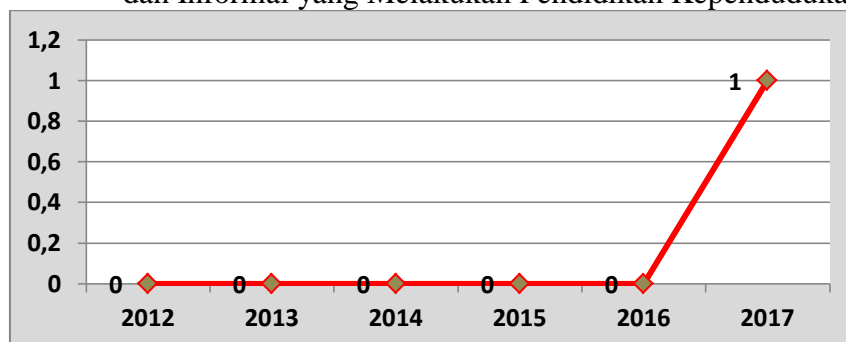
Grafik 2.138  
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.2.6.3. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Grafik 2.139  
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan



Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa kerjasama tentang pendidikan kependudukan baru di laksanakan pada tahun 2017

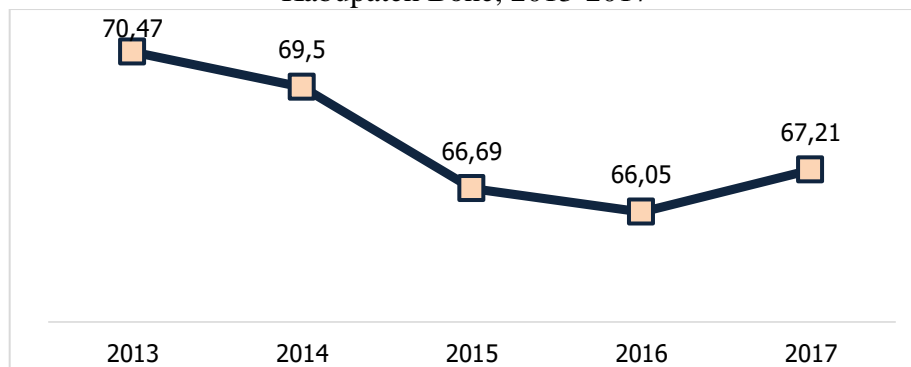


berupa Kesepahaman Bersama antar Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

#### **2.4.2.6.4. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49**

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi CPR maka semakin banyak perempuan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi, begitupun sebaliknya.

Grafik 2.140  
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15– 49  
Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

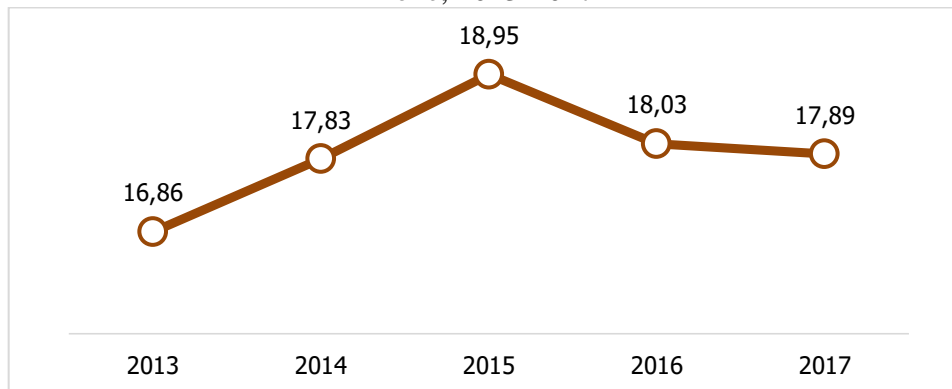
Angka CPR Kabupaten Bone nampaknya cenderung turun. Pada tahun 2013, dari semua pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Bone, sebanyak 70,47 persen menggunakan alat kontrasepsi, sementara 29,53 persen dari mereka belum menggunakan. Angkanya terus turun dari 69,5 persen ke 66,69 persen masing-masing pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016, angka CPR kembali turun menjadi 66,05 persen, sebelum akhir mengalami kenaikan 67,21 persen tahun 2017.

#### 2.4.2.6.5. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

*Unmet need* KB merupakan kebutuhan pasangan usia subur (PUS) untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut (tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi. Dalam lima tahun terakhir, khususnya di taiga tahun awal, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di Kabupaten Bone meningkat, dari 16,86 persen ke 17,83 persen, dan akhirnya mencapai angka tertinggi 18,95 persen. Memasuki tahun 2016 dan 2017 pemerintah daerah berhasil menurunkan proporsi PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi (*unmet need*) menjadi 18,03 persen dan kemudian hanya 17,89 persen.

Grafik 2.141

Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmet need*) di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone , 2018

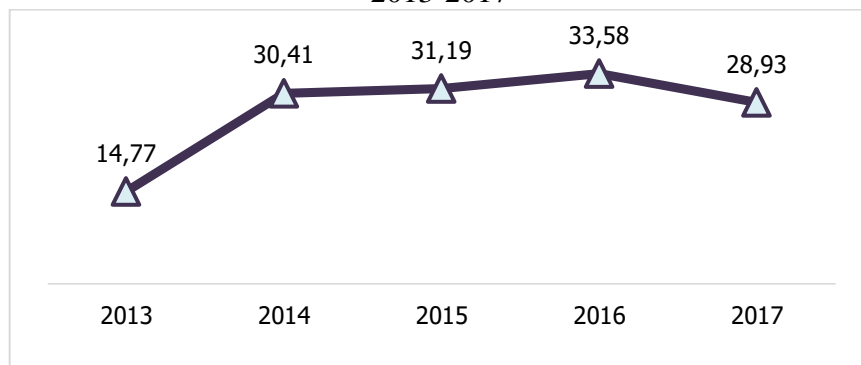
#### 2.4.2.6.6. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Penduduk merupakan sumberdaya penting dalam pembangunan sebuah negara atau daerah. Namun jika pertumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan, maka justru berpotensi menyebabkan masalah pembangunan, ditambah lagi ketika penduduk yang dimiliki berkualitas rendah. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengendalikan jumlah penduduk,

mengingat Indonesia sudah menjadi negara berpenduduk paling tinggi keempat di dunia.

Untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah melalui BKKBN menghimbau masyarakat agar menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Dalam lima tahun terakhir, persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Bone terus bertambah, meskipun di tahun 2016 sedikit mengalami penurunan. Kenaikan persentase paling tinggi terjadi di tahun 2014 mencapai 30,41 persen sementara tahun sebelumnya hanya 14,77 persen. Kenaikan angka persentase pengguna MKJP di tahun 2015 dan 2016 melambat, hanya 31,19 persen dan 33,58 persen. Tahun 2017 angkanya justru mengalami penurunan menjadi 28,93 persen, menunjukkan bahwa dari seluruh Jumlah akseptor KB di Kabupaen Bone, masih terdapat 71,07 persen yang belum menggunakan MKJP.

Grafik 2.142  
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

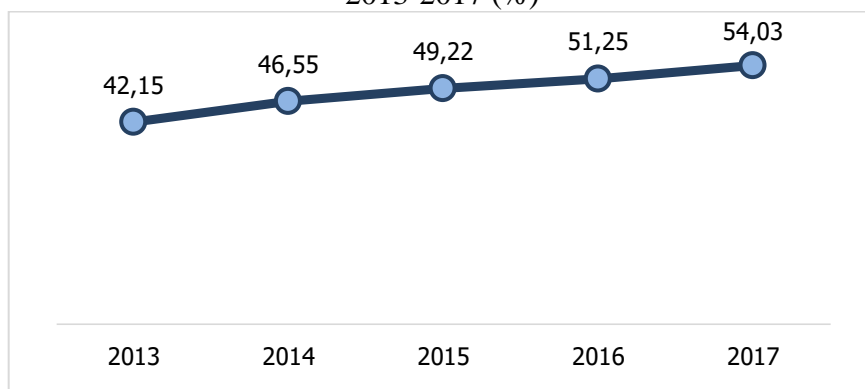
#### 2.4.2.6.7. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur. Salah satu caranya

adalah membentuk Bina Keluarga Balita (BKB). BKB merupakan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial dan emosional yang berlangsung antara ibu atau anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Tidak hanya itu, BKB juga dapat menjadi sarana pemerintah daerah untuk mengkampanyekan pentingnya mengendalikan kelahiran melalui penggunaan KB.

Dalam kurun waktu 2013-2017, angka cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Bone konsisten mengalami kenaikan. Awalnya, hanya 42,15 persen anggota BKB yang mengikuti program KB, namun perlahan mengalami kenaikan dari 46,55 persen tahun 2014 kemudian 49,22 persen tahun 2015. Pada tahun 2016 sebanyak 51,25 persen anggota BKB sudah mengikuti program KB dan 2017 angkanya bertambah sebesar 54,03 persen. Artinya, lebih dari 1/2 dari anggota BKB di Kabupaten Bone sudah menjalankan program KB.

Grafik 2.143  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)

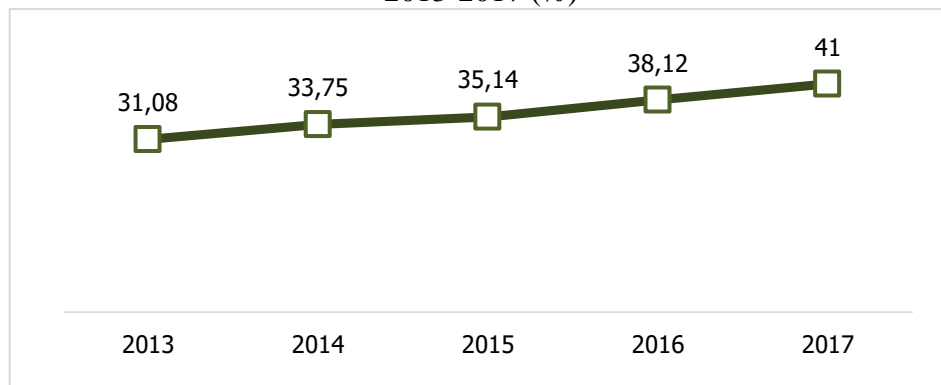


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.2.6.8. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Kondisi yang sama juga terjadi pada anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Bone, dimana pemerintah daerah berhasil menjaga momentum kenaikan cakupan anggota BKR yang mengikuti program KB. Sebanyak 33,75 persen anggota BKR tahun 2014 sudah mengikuti program KB, angkanya naik dari 31,08 persen di tahun sebelumnya. Pemerintah daerah terus berupaya untuk menambah cakupan anggota BKR di Kabupten Bone untuk terlibat dalam program pengendalian pertumbuhan penduduk sehingga persentasenya kembali naik di tahun 2015 sebesar 35,14 persen dan mencapai 38,12 persen tahun 2016. Pada tahun 2017, angka cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Bone sudahya mencapai 41 persen dan mencakup 2/5 dari total anggota BKR.

Grafik 2.144  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone , 2018

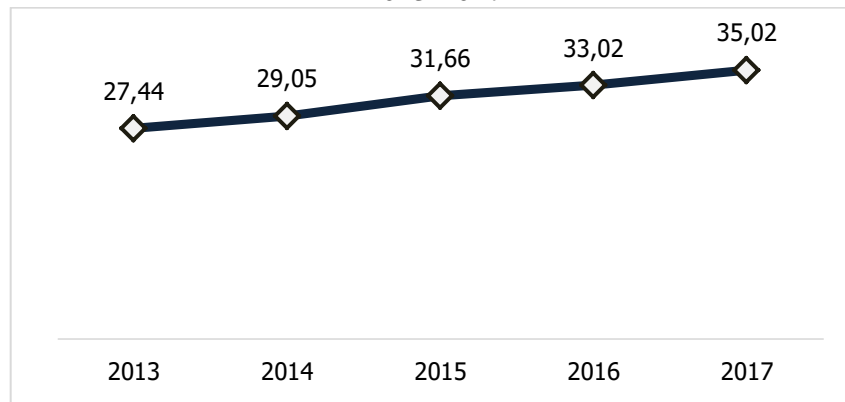
#### 2.4.2.6.9. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan,

pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya.

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Bone yang mengikuti program KB juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, hanya 27,44 persen anggota BKL mengikuti program KB, artinya masih terdapat 72,56 persen anggota yang belum ikut. Pemerintah daerah terus berupaya agar semua anggota BKL terlibat dalam program pengendalian jumlah penduduk, sehingga tahun 2014 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Bone naik 29,05 persen dan 2015 mencapai 31,66 persen. Di dua tahun terakhir, proporsi anggota BKL yang terlibat menggunakan KB kembali bertambah, masing-masing 33,02 persen tahun 2016 dan 35,02 persen tahun 2017.

Grafik 2.145  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

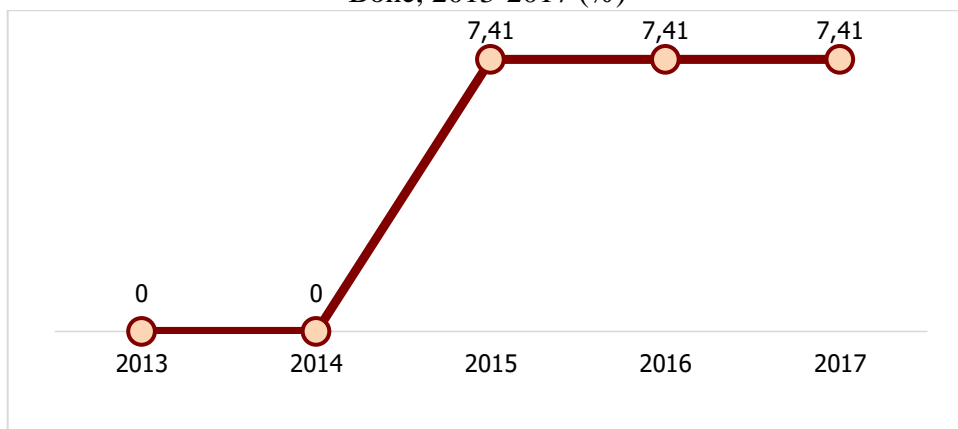
#### **2.4.2.6.10. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Disetiap Kecamatan**

Pusat pelayanan keluarga sejahtera dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 19 Tahun 2017 diartikan sebagai wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat dengan kegiatan dan atau rangkaian pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling,

pembinaan serta rujukan. Dalam regulasi ini, PPKS penting keberadaanya untuk mewujudkan sebuah keluarga harmonis.

Dalam lima tahun terakhir, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Bone tidak banyak mengalami perubahan. Kenaikan paling signifikan terjadi tahun 2005, dimana tahun sebelumnya angka Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Bone masih 0 persen namun di tahun 2005 mencapai 7,41 persen. Tahun 2016 dan 2017 angka persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupaten Bone tidak mengalami perubahan, menunjukkan bahwa tidak ada pembangunan PPKS baru setelah tahun 2015.

Grafik 2.146  
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bone, 2018

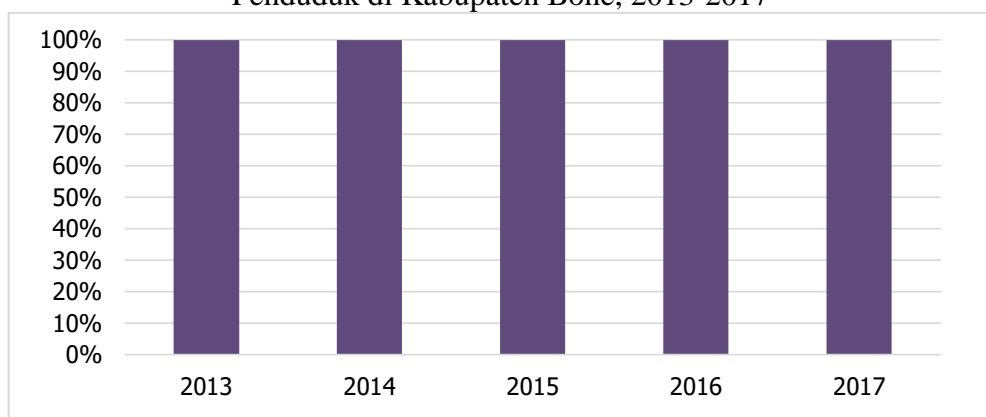
#### **2.4.2.6.11. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk**

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. Karena peranya yang

penting, maka pelibatan PKB/PLKB dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan berkaitan dengan pengendalian penduduk menjadi penting.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Bone sudah mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena PKB/PLKB adalah pegawai negeri sipil yang tentu saja terlibat langsung dalam semua proses perencanaan dan pelaksanaan bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Bone.

Grafik 2.147  
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone , 2018

#### **2.4.2.6.12.Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri**

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kegiatan yang akan mendorong keluarga dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Tujuan UPPKS mencakup kegiatan yang mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan mewujudkan

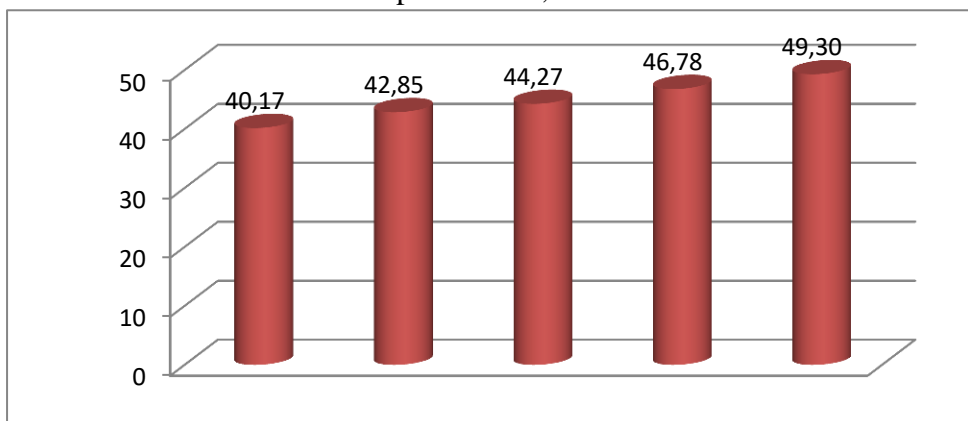


keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Keluarga yang sejahtera diharapkan akan menjadi peserta KB mandiri.

Anggota UPPKS di Kabupaten Bone yang ber-KB mandiri cenderung mengalami peningkatan. Persentase PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri pada tahun 2013 hanya 40,17 %. Cakupan PUS yang ber-KB terus meningkat setiap tahun sampai pada tahun 2017 menjadi 49,30%. Meskipun anggota UPPKS yang ber-KB mandiri mengalami peningkatan setiap tahun, namun sampai pada tahun 2017, cakupannya belum mencapai 50 %.

Grafik 2.148

Persentase PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri di Kabupaten Bone, 2017



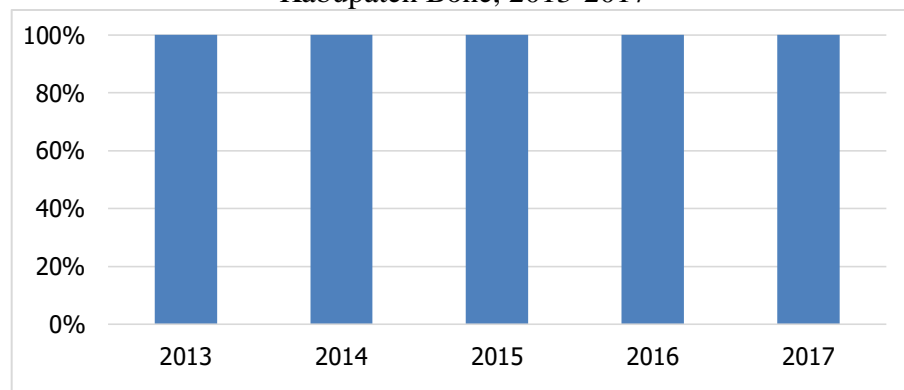
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, 2018.

#### **2.4.2.6.13.Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan**

Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan seseorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional ditingkat dusun RT/RW yang setara. Peran petugas pembantu dalam mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi pada tingkat desa dan kelurahan dapat secara langsung mempengaruhi perilaku penduduk dalam mengikuti program KB. Oleh karena itu keberadaan petugas pembantu harus disebar di semua desa.

Di Kabupaten Bone, rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Bone sudah mencapai angka 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa/kelurahan di Kabupaten Bone yang tidak memiliki petugas pembantu Pembina KB.

Grafik 2.149  
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bone, 2013-2017

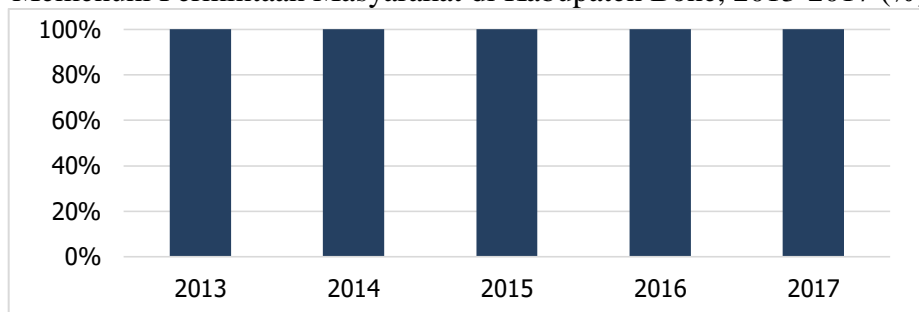


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

#### **2.4.2.6.14. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat**

Usaha pemerintah daerah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pengendalian penduduk harus dibarengi dengan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan keduanya merupakan salah satu faktor penentu konsistensi masyarakat dalam mengikuti program KB. Salah satu daerah yang memiliki angka cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 100 persen adalah Kabupaten Bone. Capaian 100 persen menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyediakan stok alat dan obat kontrasepsi untuk mengantisipasi tingginya permintaan seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang ingin terlibat dalam program pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bone.

Grafik 2.150  
Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)

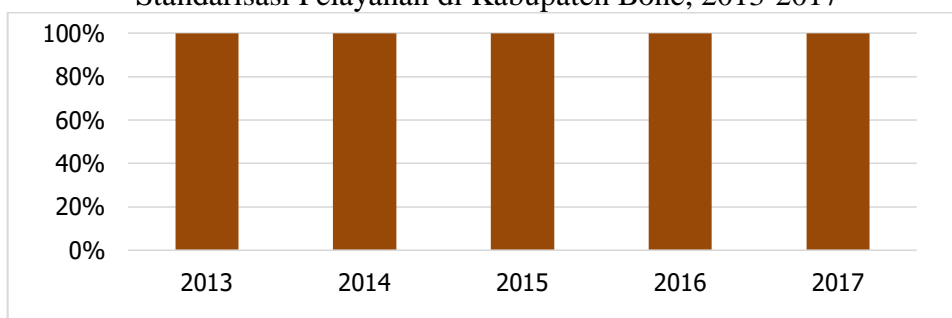


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone

#### **2.4.2.6.15.Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan**

Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) melalui kerjasama antara Faskes dan BPJS Kesehatan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Bone telah memastikan bahwa semua Faskes dan jejaringnya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilihat dari angka Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan yang mencapai 100 persen.

Grafik 2.151  
Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kabupaten Bone, 2013-2017



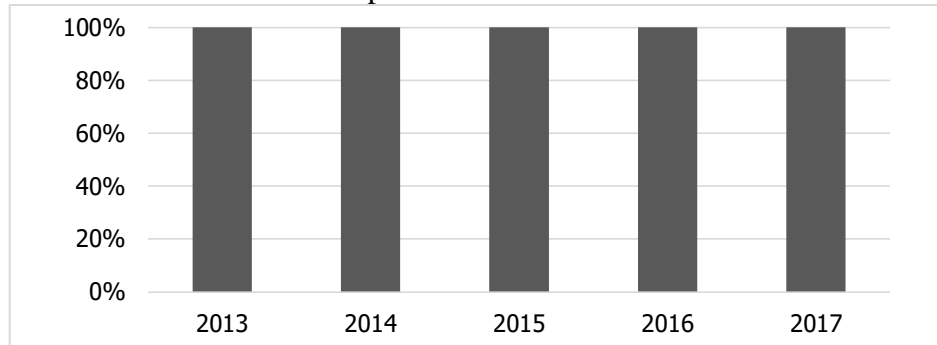
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

#### **2.4.2.6.16. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa**

Data merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk memulai proses perencanaan dan menghasilkan dokumen rencana, termasuk program pengendalian jumlah penduduk. Oleh karena itu, dalam PP Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga, pemerintah mengharuskan adanya pendataan keluarga. Pendataan keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu jenis data keluarga yang mesti dikumpulkan adalah data mikro keluarga. Yang dimaksud "data mikro keluarga" adalah data yang memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data keluarga berencana, dan data tahapan keluarga sejahtera untuk menunjang kegiatan operasional program keluarga berencana. Pemerintah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah menyediakan informasi data mikro keluarga dilihat dari angka cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa yang sudah mencapai 100 persen.

Grafik 2.152  
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa di  
Kabupaten Bone 2013-2017



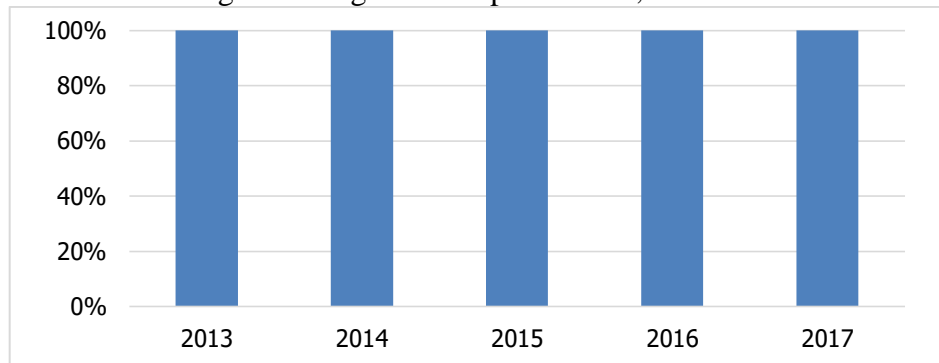
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone , 2018

#### **2.4.2.6.17.Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga**

Dalam membangun keluarga, ada delapan fungsi keluarga yang seharusnya menjadi perhatian semua keluarga di Indonesia karena dianggap sebagai acuan dan fondasi kehidupan oleh setiap keluarga. BKKBN menyebut bahwa kedelapan fungsi tersebut adalah Fungsi Agama, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi sosial dan budaya, fungsi perlindungan, fungsi kesehatan reproduksi, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosialisasi pendidikan.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Bone sudah mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tak ada satupun kelompok kegiatan di Kabupaten Bone yang tidak melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga.

Grafik 2.153  
Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Bone, 2013-2017

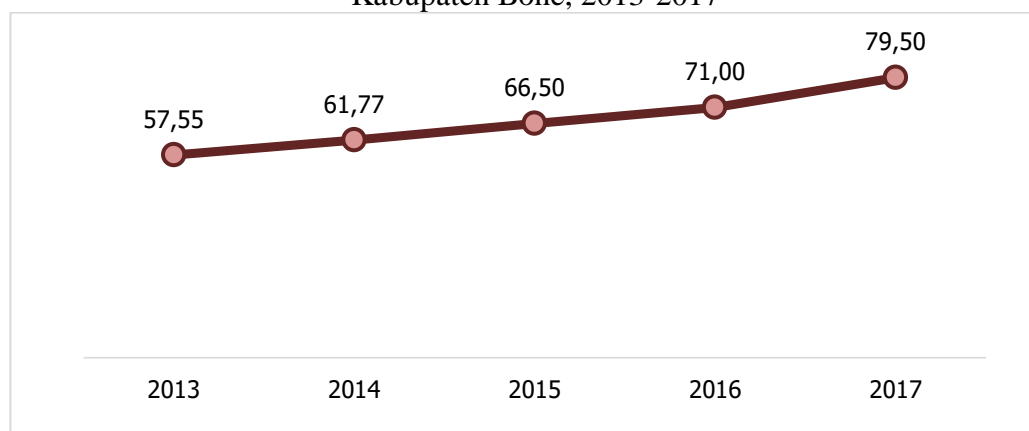


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone , 2018

#### 2.4.2.6.18.Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Bagi keluarga yang memiliki balita, pemahaman dan pelaksanaan pola pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak merupakan faktor penentu baik tidak perkembangan anak. Jika orang tuanya paham bagaimana cara mengasuh dan membina anak sejak balita, maka anak akan tumbuh menjadi seseorang yang berakrakter dan berperan dalam lingkungan dan masyarakatnya.

Grafik 2.154  
Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

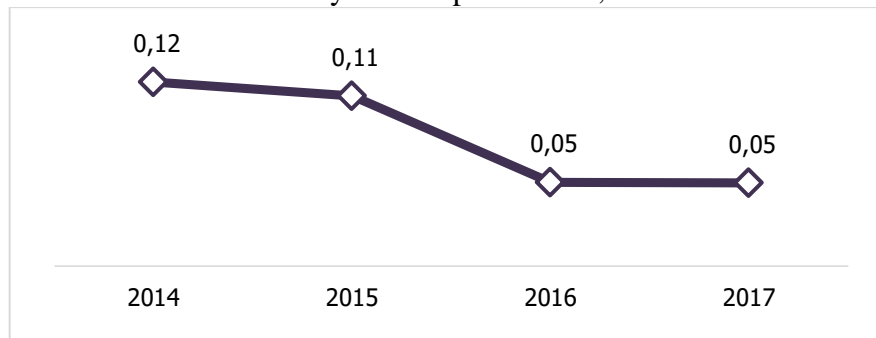
Meski belum mencapai 100 persen, angka cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Bone mengalami kenaikan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2013, sebanyak 57,55 persen keluarga yang memiliki balita dan anak sudah memahami dalam mempraktikkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak secara baik. Cakupannya terus bertambah, hingga tahun 2014 dan 2015 masing-masing mencapai 61,77 persen dan 66,50 persen. Di dua tahun terakhir, proporsi keluarga yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sudah lebih 2/3 dari jumlah keluarga yang memiliki anak balita di Kabupaten Bone atau menyentuh 79,50 persen. Capaian ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Bone hanya tersisa 20,50 persen keluarga yang punya balita namun masih belum paham dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

#### **2.4.2.7. Perhubungan**

##### **2.4.2.7.1. Rasio Izin Trayek**

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Oleh karena itu, kendaraan yang diperbolehkan mengangkut penumpang adalah kendaraan yang telah memiliki izin trayek. Dalam empat tahun terakhir, rasio izin trayek di Kabupaten Bone terus menurun disebabkan karena jumlah angkutan yang memiliki izin lebih rendah daripada pertumbuhan jumlah penduduk. Angka rasio tertinggi mencapai 0,12 tahun 2013, setelah itu mengalami penurunan ke 0,11 dan berlanjut di dua tahun terakhir masing-masing hanya tersisa 0,05

Grafik 2.155  
Rasio Izin Trayek Kabupaten Bone, 2014-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

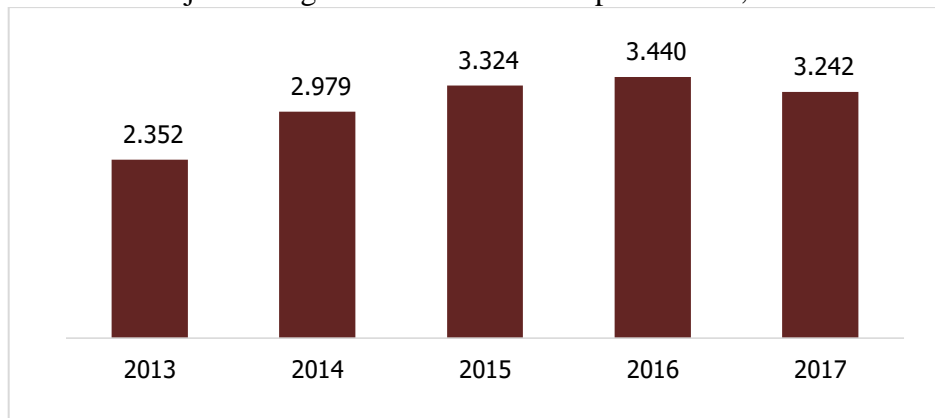
#### 2.4.2.7.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara, terutama pada kendaraan umum (transportasi publik), pemerintah melakukan pengawasan pada setiap armada transportasi publik melalui uji kir atau uji berkala. Dalam Permenhub No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang dimaksud dengan uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, keretagandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Namun uji kir yang dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2018 adalah pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Sepanjang tahun 2013 hingga 2017, angkutan umum yang melakukan uji kir cenderung bertambah, kecuali di tahun 2017 sedikit menurun. Pada tahun 2013, hanya 2.352 kendaraan umum di Kabupaten Bone yang melakukan uji kir, sebelum akhirnya konsisten bertambah menjadi 2.979 kendaraan tahun 2014 dan mencapai 3.324 kendaraan tahun 2015. Jumlah kendaraan umum yang melakukan uji kir paling banyak sebesar 3.440 kendaraan tahun 2016, namun setelah mencapai angka tertinggi, terjadi penurunan ke 3.242 kendaraan tahun 2017.



Grafik 2.156  
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bone, 2013-2017



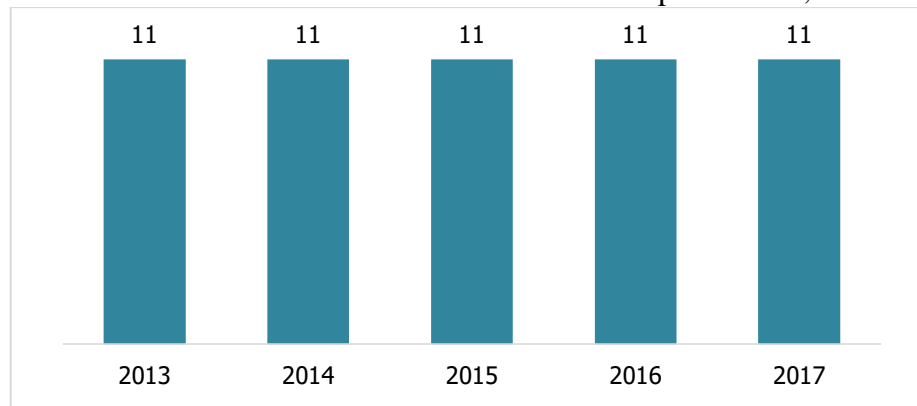
Sumber: Data Diolah, 2018

#### **2.4.2.7.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini, sebab infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, daerah yang maju perekonomiannya tentu didukung oleh ketersediaan infrastruktur laut, udara dan darat yang mampu memfalisasi mobilitas barang dan jasa serta penduduk dalam suatu daerah.

Berdasarkan data yang tersedia, Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan dalam jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis. Sejak tahun 2013 hingga 2017, Kabupaten Bone total hanya memiliki 11 pelabuhan laut, udara, dan terminal bis. Jika ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi, kedepan pemerintah daerah nampaknya perlu memperhatikan ketersediaan infrastuktur ini mengingat pertumbuhan ekonomi barkaitan erat dengan perpindahan arus barang dan jasa, sehingga perlu mendapat dukungan infrastruktur.

Grafik 2.157  
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Bone, 2013-2017

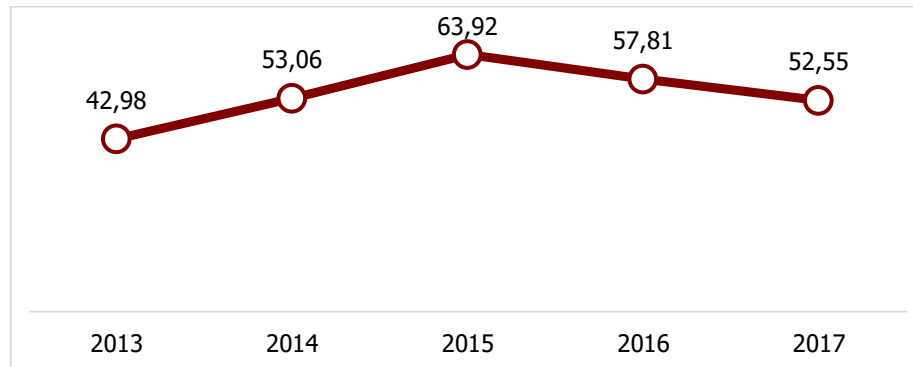


Sumber: Data Diolah, 2018

#### **2.4.2.7.4. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Pengendara angkutan umum di Kabupaten Bone sebagian besar sudah melakukan uji kir terhadap kendaraan mereka. Awalnya, persentase kepemilikan kir angkutan umum di Kabupaten Bone masih 42,98 persen tahun 2013, namun terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian di tahun 2014 dan 2015 sehingga persentasenya naik 53,06 persen dan mencapai angka tertinggi sebesar 63,92 persen. Jumlah angkutan yang melakukan uji kir menurun sementara total angkutan umum terus bertambah sehingga angka persentase kepemilikan kir angkutan umum di Kabupaten Bone berkurang masing-masing hanya 57,81 persen dan 52,55 persen tahun 2016 dan 2017. Angka tahun 2017 sekaligus juga menunjukkan bahwa dari sekian banyak angkutan umum di Kabupaten Bone, masih ada 47,45 persen kendaraan yang belum memiliki kir.

Grafik 2.158  
Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.7.5. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel. 2.65  
Perkembangan Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bone  
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan	2.468.17	2.475.15	2.444.96	2.481.60	2.481.60
2	Jumlah Kendaraan	134.666	146.694	157.022	149.675	164.642
3	Rasio	1:83	1:68	1:55	1:65	1:50

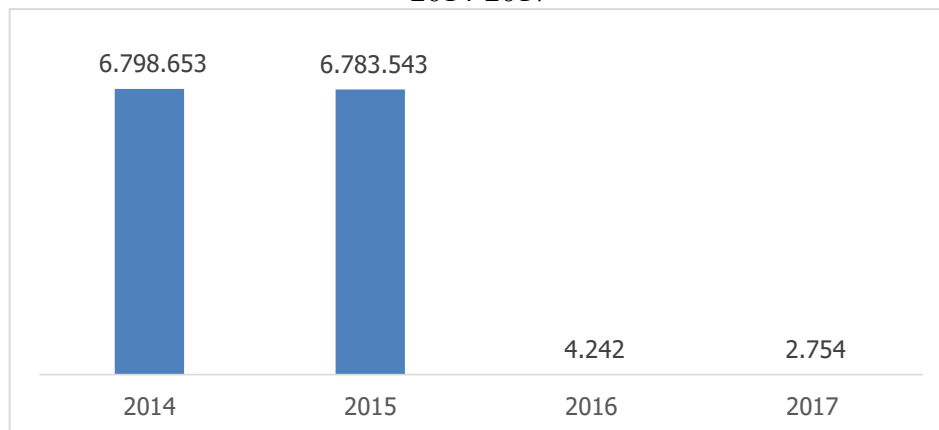
Sumber: Data Diolah, 2018

Data perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan semakin berkurang. Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana jalan setiap kendaraan mengalami penurunan dari 83 Km per kendaraan pada tahun 2013 menjadi 50 Km per kendaraan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah kendaraan meningkat lebih besar dibanding dengan peningkatan panjang jalan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kemacetan dan jumlah kendaraan di jalan.

#### 2.4.2.7.6. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Besarnya volume angkutan umum dapat dilihat dari jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum setiap tahunnya. Di Kabupaen Bone, dalam empat tahun terakhir terjadi penurunan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. Tahun 2014, sebanyak 6.798.653 orang/barang terangkut angkutan umum, menunjukkan bahwa volume perpidahan barang dan penduduk dengan moda transportasi umum di Kabupaten Bone cukup besar, namun di tahun 2015 angkanya turun ke 6.783.543 orang/barang. Penurunan sangat signifikan dalam jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Bone terjadi di tahun 2016 dan 2017, karena di tahun ini hanya 4.242 orang/barang yang terangkut menggunakan angkutan umum, kemudian sedikit bertambah menjadi 2.754 orang/barang.

Grafik 2.159  
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Bone, 2014-2017



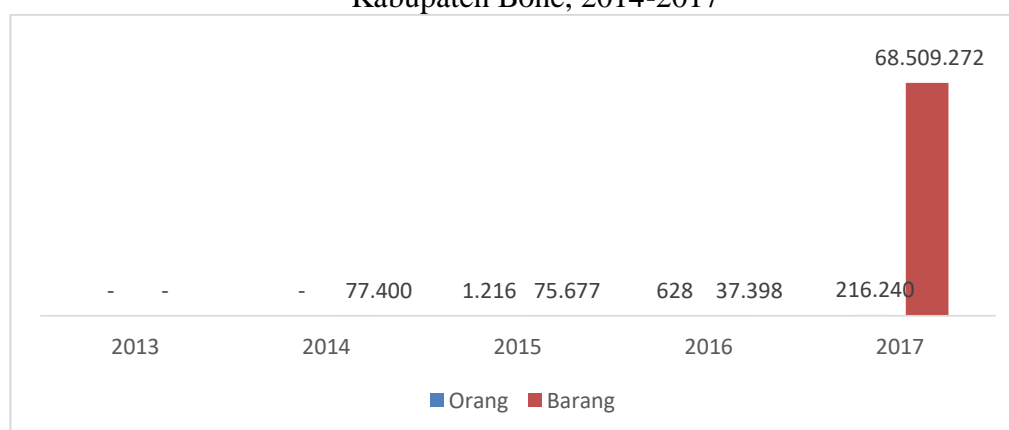
Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.7.7. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun

Perekonomian suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh perpindahan orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal. Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2014 sampai 2017, jumlah

barang yang diangkut melalui dermaga/bandara/ terminal setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tercatat sebanyak 77.400 barang yang diangkut melalui dermaga/bandara/ terminal tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah barang terangkut bertambah sebanyak 75.677 sementara jumlah orang mencapai 1.216, sebelum di tahun 2016 jumlah orang dan barang melalui dermaga/bandara/ terminal menurun menjadi 628 dan 37.398. Jumlah orang dan barang berpindah melalui dermaga/bandara/ terminal di Kabupaten Bone mencapai angka tertinggi yaitu 216.240 orang dan 68.509.272 barang.

Grafik 2.160  
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun di Kabupaten Bone, 2014-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.8. Komunikasi dan Informatika

##### 2.4.2.8.1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Tabel 2.66  
Cakupan Layanan Telekomunikasi

Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Capaian					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	<b>100</b> <b>%</b>

Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.8.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Jumlah penduduk yang menggunakan alat komunikasi cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jumlah pengguna telepon PSTN terus mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sampai tahun 2017. Peningkatan pengguna HP juga terjadi sampai tahun 2016, namun turun kembali pada tahun 2017.

Tabel 2.67  
Perkembangan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon di  
Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk yang memiliki HP	704.579	658.055	667.902	671.163	768.335
2	Penduduk yang memiliki telpon PSTN	9.678	9.675	9.680	9.876	9.913
3	Total jumlah penduduk yang memiliki HP/ Telpon (1) + (2)	714.257	667.730	677.580	681.039	778.248
4	Jumlah Penduduk	794.119	738.515	742.912	746.273	856.861
5	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telpon (3) / (4)	89%	90%	91%	91%	91%

Sumber: Data Diolah, 2018

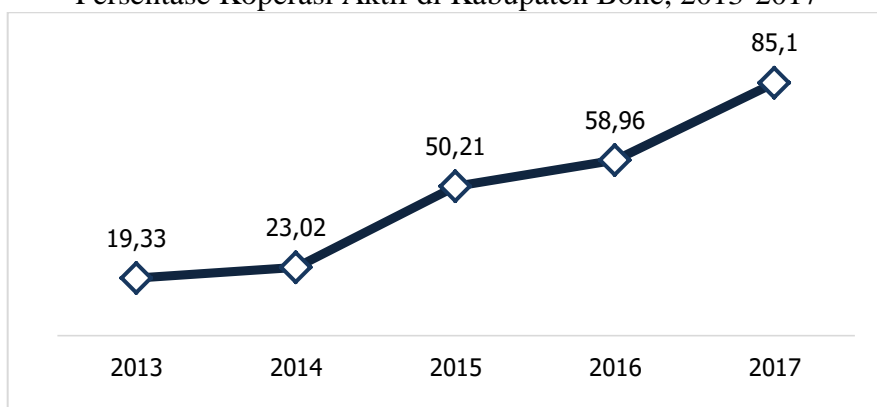
#### 2.4.2.9. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

##### 2.4.2.9.1. Persentase Koperasi Aktif

Pemerintah sedang berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat miskin atau mereka yang memiliki usaha mikro dan kecil melalui institusi koperasi. Dalam UU No. 17 tahun 2012 Tentang Koperasi, disebutkan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotapada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligussebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatananperekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, semakin banyak koperasi aktif, maka peluang untuk memperbaiki perekonomian daerah, terutama kesejahteraan masyarakat akan semakin besar.

Setidaknya dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Bone mencatat angka persentase koperasi aktif yang terus meningkat. Pada tahun 2014, persentase koperasi aktif di Kabupaten Bone hanya 23,02 persen, naik dari 19,33 persen di tahun sebelumnya. Artinya di tahun tersebut, sebagian besar koperasi di Kabupaten Bone tidak aktif atau tidak menjalankan aktivitasnya. Karena dianggap berperan penting sebagai soko guru perekonomian, maka pemerintah dan pemerintah daerah berupaya untuk menaikkan angka persentase koperasi aktif, sehingga tahun 2015 mencapai 50,21 persen atau 1/2 dari total koperasi di Kabupaten Bone. Di dua tahun terakhir, tercatat terjadi kenaikan angka persentase koperasi aktif, masing-masing sebesar 58,96 persen tahun 2016 dan 85,10 persen tahun 2017. Angka tahun 2017 sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang lima tahun terakhir dan menginformasikan bahwa di tahun tersebut hanya tersisa 14,9 persen koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Bone.

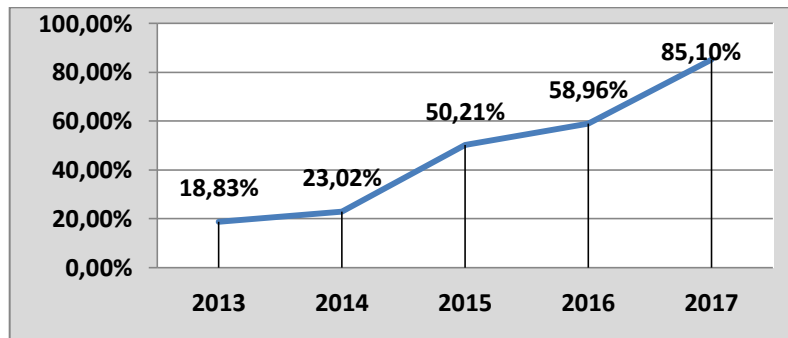
Grafik 2.161  
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.9.2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Grafik 2.162  
Presentase Usaha Mikro dan Kecil

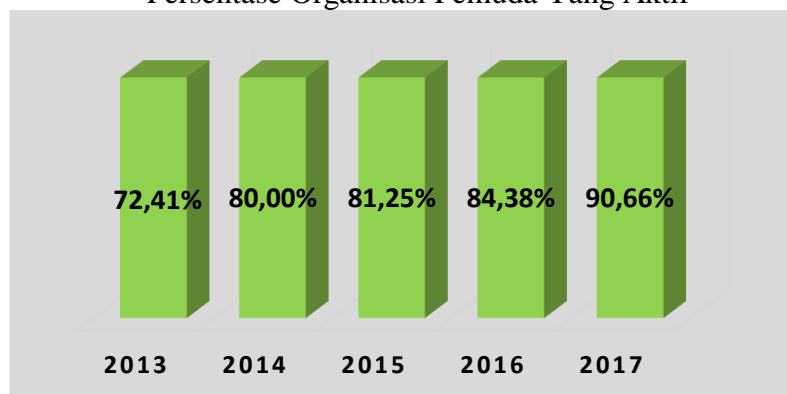


Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.10. Kepemudaan dan Olah Raga

##### 2.4.2.10.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Grafik 2.163  
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

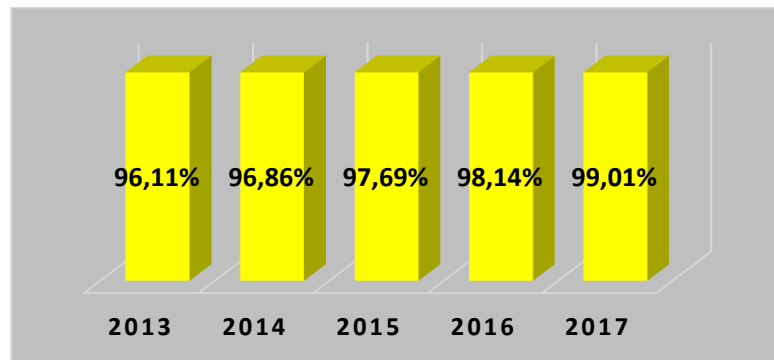


Berdasarkan diagram tersebut di atas, maka persentase organisasi pemuda yang aktif dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnyaperan pemerintah daerah dalam pembinaan organisasi kepemudaan diseluru kecamatan se Kabupaten Bone.



#### 2.4.2.10.2.Persentase wirausaha muda

Grafik 2.164  
Persentase Wirausaha Muda

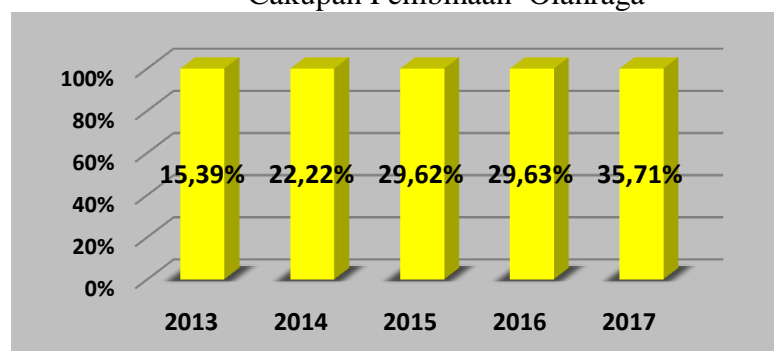


Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, tergambar bahwa persentase wirausaha muda dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya partisipasi pemuda dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan dibidang kewirausahaan diseluruh kecamatan se Kabupaten Bone.

#### 2.4.2.10.3.Cakupan Pembinaan Olahraga

Tabel 2.165  
Cakupan Pembinaan Olahraga



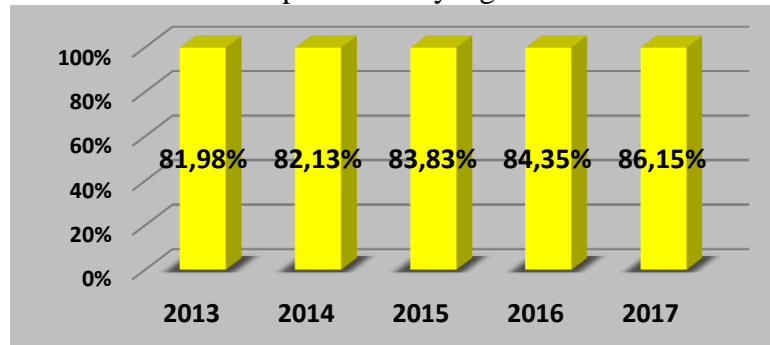
Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, makacakupan pembinaan olahraga dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Dalam hal ini di pengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya partisipasi pengurus cabang

olahraga dalam hal pembinaan atlet disetiap cabang olahraga serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di Kabupaten Bone.

#### 2.4.2.10.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Tabel 2.166  
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

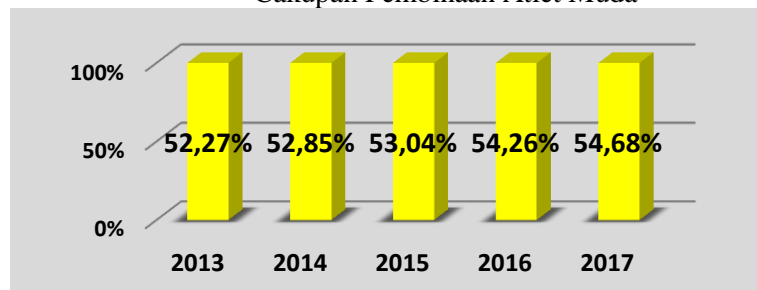


Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka dapat digambarkan bahwa cakupan pelatih yang bersertifikat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain meningkatnya kerja sama antar pengurus cabang olahraga dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dilaksanakan serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di Kabupaten Bone.

#### 2.4.2.10.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Tabel 2.167  
Cakupan Pembinaan Atlet Muda



Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, cakupan pembinaan atlet muda dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya pembinaan atlit usia muda (Pelajar) pada setiap cabang olahraga serta peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di setiap cabang olahraga di Kabupaten Bone.

#### 2.4.2.10.6.Jumlah Atlet Berprestasi

Tabel 2.68  
Jumlah Atlet Berprestasi

No	Cabang Olahraga	Tahun					Ket.
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	FORKI	4	4	6	6	8	
2.	PASI	4	5	5	8	8	
3.	PJSI	8	8	7	9	10	
4.	PRSI	3	5	5	7	8	
5.	PBSI	2	2	3	4	4	
6.	TAEKWONDOIN	2	3	1	3	4	
7.	PSTI	3	4	4	6	7	
8.	PBVS	4	4	6	7	9	
9.	PTMSI	3	4	3	5	5	
10.	PERBAKING	4	5	5	7	6	

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah atlit yang berprestasi dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya pembinaan atlit disetiap cabang olahraga serta peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan disetiap cabang di Kabupaten Bone.

#### 2.4.2.10.7.Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.69  
Jumlah Prestasi Olahraga

No.	TAHUN	Cabang olahraga	KET.
1.	2013	4 Cabor	
2.	2014	6 Cabor	
3.	2015	8 Cabor	
4.	2016	8 Cabor	
5.	2017	10 Cabor	

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah berprestasi cabang olahraga yang dimenangkan dari Tahun 2013 sampai dengan 2017

mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya pembinaan atlit disetiap cabang olahraga serta peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan disetiap cabang olahraga di Kabupaten.

#### 2.4.2.11. Statistik

##### 2.4.2.11.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Tabel 2.70  
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

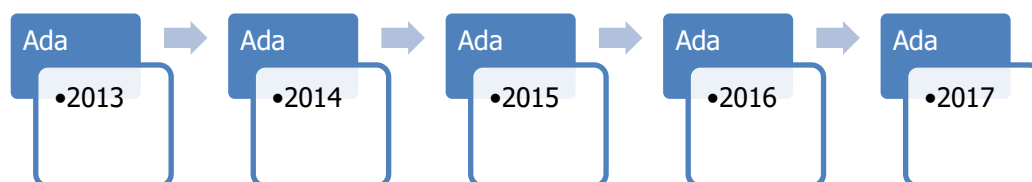
Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Capaian					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Sistem data Statistik yang Terintegrasi	-	-	-	-	-	27 Kec.

##### 2.4.2.11.2. Buku "Kabupaten dalam Angka"

Dalam membuat perencanaan, pemerintah daerah bergantung pada ketersediaan data baik pada level makro maupun mikro. Data-data makro misalnya pertumbuhan ekonomi, PDRB Penggunaan dan Lapangan Usaha, Kemiskinan, Pengangguran, Inflasi, dll. Untuk itu, ketersediaan data-data tersebut menjadi salah satu indikasi penilaian kualitas dokumen perencanaan daerah. Institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan data-data tersebut adalah Badan Pusat Statistik dan secara berkala telah menerbitkan buku Kabupaten Bone Dalam Angka. Semua series publikasi Kabupaten Bone Dalam Angka dapat diakses langsung di website <https://bonekab.bps.go.id>

Grafik 2.168

Ketersediaan Buku "Kabupaten Dalam Angka" Kabupaten Bone, 2013-2017

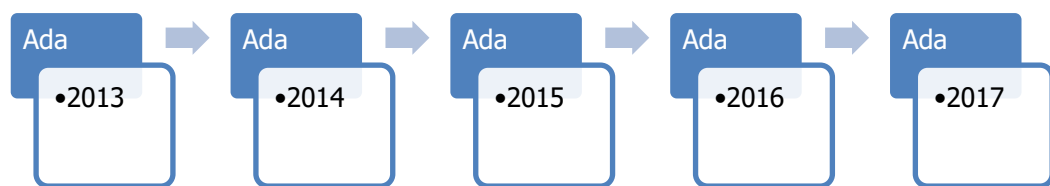


Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.11.3. Buku "PDRB"

Selain menerbitkan setiap tahun buku Kabupaten Bone Dalam Angka, Badan Pusat Statistik juga menyediakan publikasi spesifik tentang kondisi produk domestik regional bruto. Buku ini mengulas secara lengkap dan rinci tentang PDRB Kabupaten Bone dari sisi penggunaan dan lapangan usaha. PDRB sektoral dijelaskan hingga level sub sector lapangan usaha sehingga pemerintah daerah relatif lebih mudah mengetahui motor penggerak perekonomian Kabupaten Bone. Dalam lima tahun terakhir, BPS Kabupaten Bone konsisten menerbitkan buku PDRB dari sisi penggunaan dan lapangan usaha.

Grafik 2.169  
Ketersediaan Buku "PDRB" Kabupaten Bone, 2013-2017

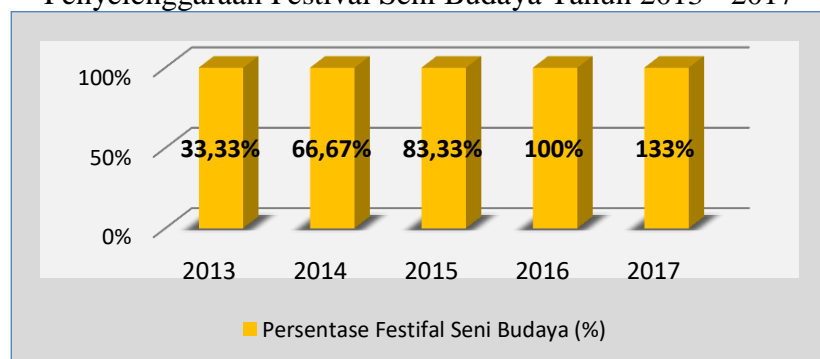


Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.12. Kebudayaan

##### 2.4.2.12.1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Grafik 2.170  
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Tahun 2013 - 2017



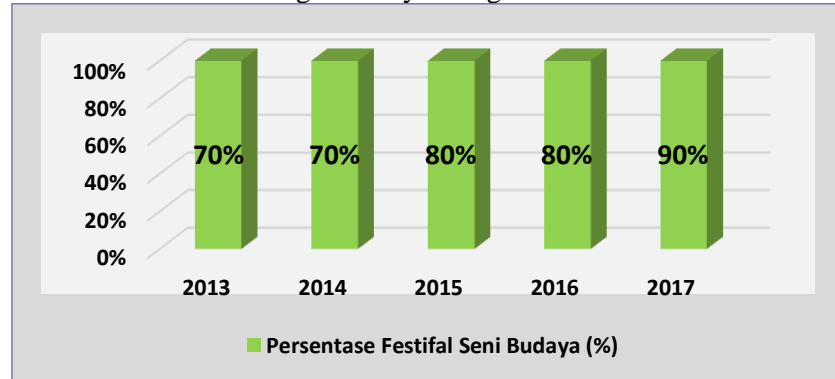
Berdasarkan Tabel di atas maka persentase penyelenggaraan Festival Seni Budaya dari Tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan

hal ini dipengaruhi oleh banyaknya Event-event baik tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional yang merupakan Promosi Budaya Daerah.

#### 2.4.2.12.2. Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Grafik 2.171

Benda Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2013 - 2017



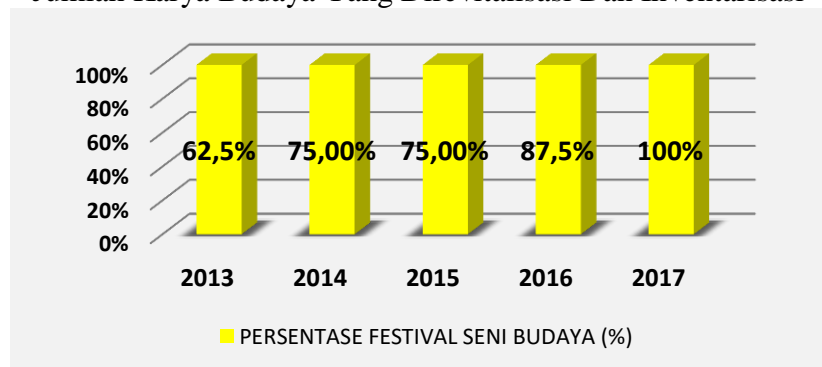
Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka persentase situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2013–2017 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi jumlah situs dan kawasan Cagar Budaya telah di inventarisir namun masih perlu kerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pengkajian dalam penetapan situs.

#### 2.4.2.12.3. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Grafik 2.172

Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

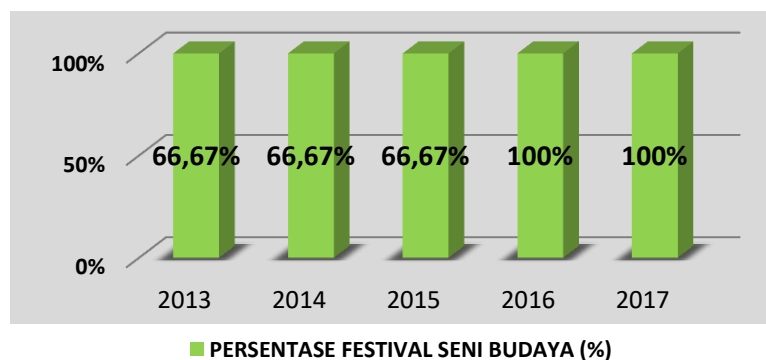


Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka persentase jumlah Karya Budaya Tahun 2013 sampai 2017 yang dilestarikan dan di Inventarisasi mengingat hal ini di pengaruhi oleh banyak partisipasi masyarakat yang peduli tentang kearifan local budaya daerah untuk pelestarian nilai-nilai Seni Budaya Daerah.

#### **2.4.2.12.4.Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu**

Grafik 2.173  
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi



Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan table tersebut diatas maka, persentase jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu tahun 2013 sampai 2017 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Cagar Budaya yang telah dikaji dan dapat dijadikan dan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya untuk dikelola sebagai Aset Sejarah dan Situs Perpustakaan Daerah.

#### **2.4.2.13. Perpustakaan**

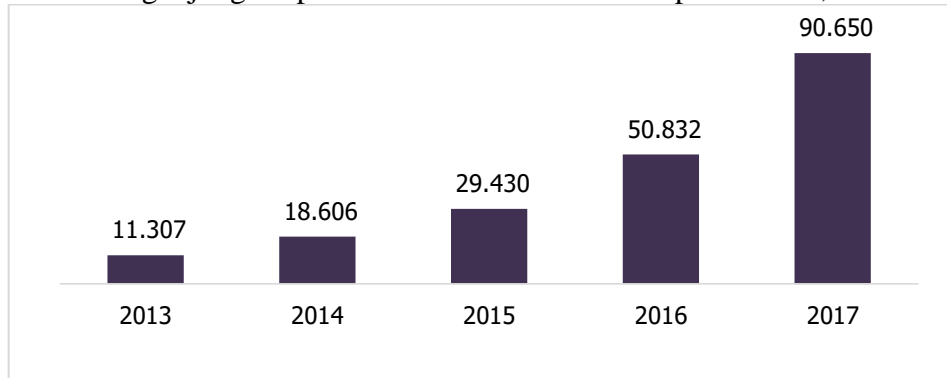
##### **2.4.2.13.1.Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa berdasrakan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dalam regulasi ini, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Oleh karena itu, tidak keliru ketika Perpustakaan dianggap sebagai wahana

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Grafik 2.174

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Bone, 2013-2017



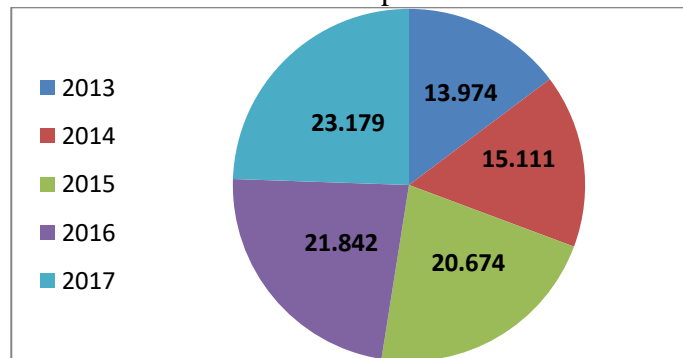
Sumber: Data Diolah, 2018

Setidaknya dalam lima tahun terakhir, jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bone terus bertambah. Awalnya hanya sebanyak 11.307 orang pengunjung yang mendatangi perpustakaan setiap tahun di Kabupaten Bone, kemudian angkanya bertambah menjadi 18.606 orang tahun 2014 dan mencapai 29.430 tahun 2015. Kenaikan tertinggi jumlah kunjungan ke perpustakaan terjadi di tahun 2016, dimana jumlah pengujungnya mencapai 50.832 orang atau bertambah sebanyak 21.402 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak berhenti di tahun 2016, pada tahun 2017 jumlah orang yang berkunjung ke perpustakaan naik lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yaitu mencapai 90.650 orang pengunjung atau bertambah 78,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



#### 2.4.2.13.2. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Grafik 2.175  
Koleksi Buku Perpustakaan Daerah



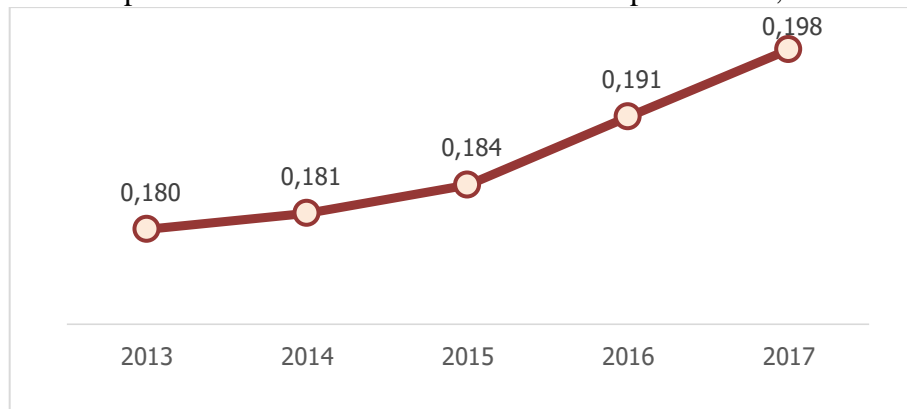
Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Diagram di atas, maka koleksi buku perpustakaan daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya peran pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi peningkatan bahan pustaka perpustakaan umum daerah dan peran serta Perpustakaan Nasional dalam memberikan bantuan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone.

#### 2.4.2.13.3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Perpustakaan sebagai salah satu media memperoleh pengetahuan, penting untuk diperluas aksesnya dengan cara memperbanyak jumlah perpustakaan sesuai dengan tren pertumbuhan jumlah penduduk. Lima tahun terakhir, Kabupaten Bone mampu menaikkan tren rasio perpustakaan persatuan penduduk. Angka ini menggambarkan akses terhadap perpustakaan untuk setiap penduduk di Kabupaten Bone. Di tahun 2013, rasio perpustakaan masih 0,180, paling rendah selama periode lima tahun terakhir. Tapi karena pemerintah daerah terus menambah jumlah perpustakaan, maka rasionya perlahan menaik dari 0,181 ke 0,184 per 1.000 penduduk. Kenaikan rasio perpustakaan tertinggi terjadi di tahun 2016 dan 2017, dengan angka 0,191 dan 0,198 disebabkan karena terjadi penambahan jumlah perpustakaan sebanyak 143 tahun 2016 dan 149 tahun 2017.

Grafik 2.176  
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Bone, 2013-2017



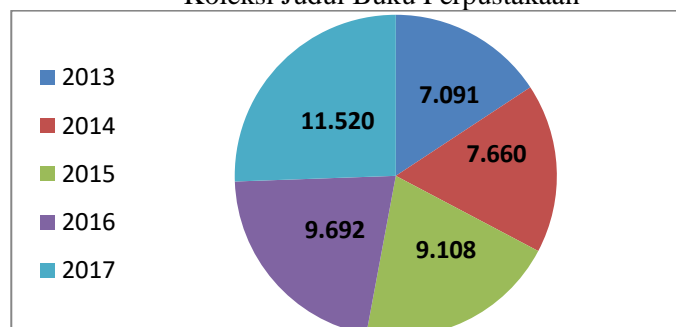
Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.13.4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Setidaknya dari tahun 2013 hingga 2017, rata-rata pengunjung perpustakaan sudah mencapai 40.165 orang yang terdiri dari 22.857 orang pengunjung untuk perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda) dan 17.308 jumlah pengunjung perpustakaan milik non Pemda.

#### 2.4.2.13.5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Grafik 2.177  
Koleksi Judul Buku Perpustakaan



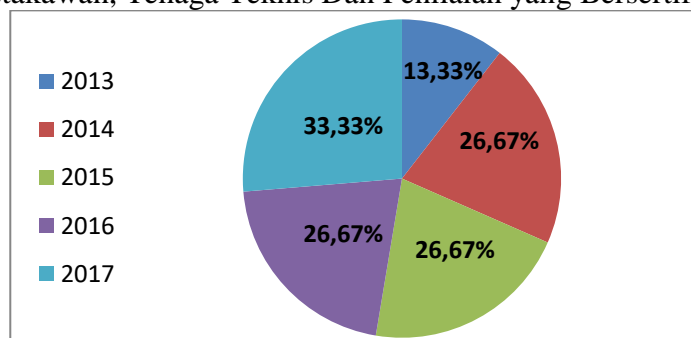
Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan diagram tersebut di atas, maka jumlah koleksi judul buku perpustakaan pada perpustakaan umum daerah Kabupaten Bone berdasarkan Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya, peran pemerintah Kabupaten Bone dalam memberikan sarana berupa bahan pustaka baik perpustakaan umum daerah maupun perpustakaan desa/kelurahan atau komunitas baca, sehingga dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kunjungan keperpustakaan sebagaimana tujuan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone yaitu dapat meningkatkan minat dan budaya baca bagi masyarakat.

#### 2.4.2.13.6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Grafik 2.178  
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilaian yang Bersertifikat (%)



Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan diagram tersebut di atas, maka jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya meningkatnya kerjasama antar pengelola perpustakaan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pendidikan dan pelatihan pengelola perpustakaan dapat dilaksanakan, serta peran Pemerintah Daerah Khususnya Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan Pembinaan Pengelola Perpustakaan ditingkat Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Komunitas Baca yang ada di Kabupten Bone.

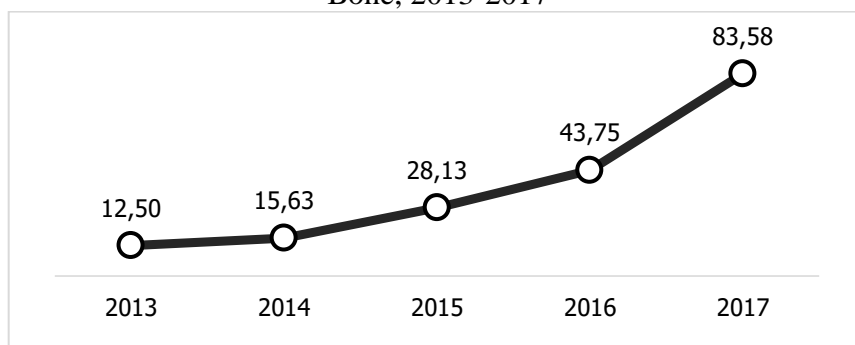
#### 2.4.2.14. Kearsipan

##### 2.4.2.14.1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari pengertian ini, arsip merupakan dokumen penting karena berisi rekaman aktivitas lembaga negara. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara baku atau terstandarisasi.

Dalam lima tahun terakhir, belum semua perangkat daerah di Kabupaten Bone melakukan pengelolaan arsip secara baku, meski angkanya terus bertambah. Tahun 2017, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Bone sudah mencapai 83,58 persen, padahal empat tahun sebelumnya masih 12,50 persen. Data ini menunjukkan bahwa masih tersisa 16,42 persen perangkat daerah di Kabupaten Bone yang belum melakukan pengelolaan arsip secara baku.

Grafik 2.179  
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Bone, 2013-2017

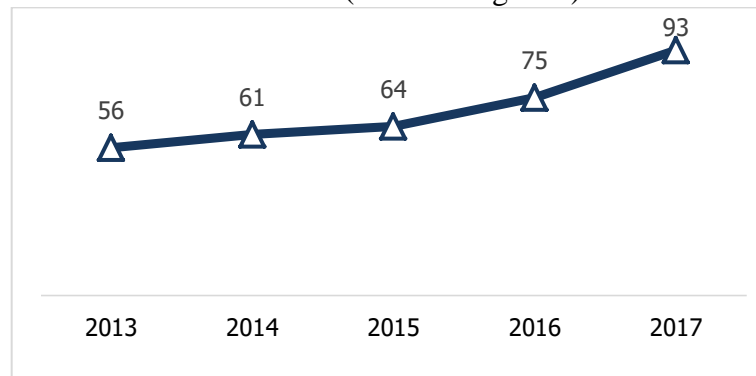


Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.2.14.2.Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pemerintah daerah Kabupaten Bone terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan arsip agar semua dokumen penting terkait dengan kegiatan pemerintah realiable dan akurat untuk digunakan. Untuk itu, pemerintah daerah, dalam lima tahun terakhir terus menambah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bone.

Grafik 2.180  
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Bone,  
2013-2017 (Jumlah Kegiatan)



Sumber: Data Diolah, 2018

Pada tahun 2015, pemerintah daerah memuat 64 kegiatan pengelolaan kearsipan, bertambah dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya 56 kegiatan tahun 2013 dan 61 kegiatan tahun 2014. Pemerintah daerah kembali menambah jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip menjadi 75 kegiatan dan 93 kegiatan masing-masing di tahun 2016 dan 2017. Jumlah kegiatan yang terus bertambah dalam lima tahun terakhir diharapkan sebanding dengan kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah Kabupaten Bone.

### 2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

#### 2.4.3.1. Pariwisata

##### 2.4.3.1.1. Kunjungan wisata

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bone terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Secara rata-rata jumlah kunjungan wisata meningkat sekitar 9,85% per tahun. Peningkatan ini dikontribusi oleh jumlah kunjungan wisatawan lokal yang meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara menunjukkan tren menurun. Proporsi wisatawan mancanegara juga masih relatif kecil, yaitu hanya sekitar 0,36% pada tahun 2017.

Tabel 2.71  
Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bone, 2013-2017

Tahun	Lokal	Domestik	Mancanegara	Jumlah
2013	54.181	36.069	871	91.121
2014	85.246	35.672	475	121.393
2015	80.382	30.116	584	111.082
2016	91.800	31.200	500	123.500
2017	96.140	31.200	460	127.800

Sumber: BPS. Kabupaten Bone Dalam Angka, 2018

##### 2.4.3.1.2. Lama kunjungan Wisata

Tabel 2.172  
Lama Kunjungan Wisata

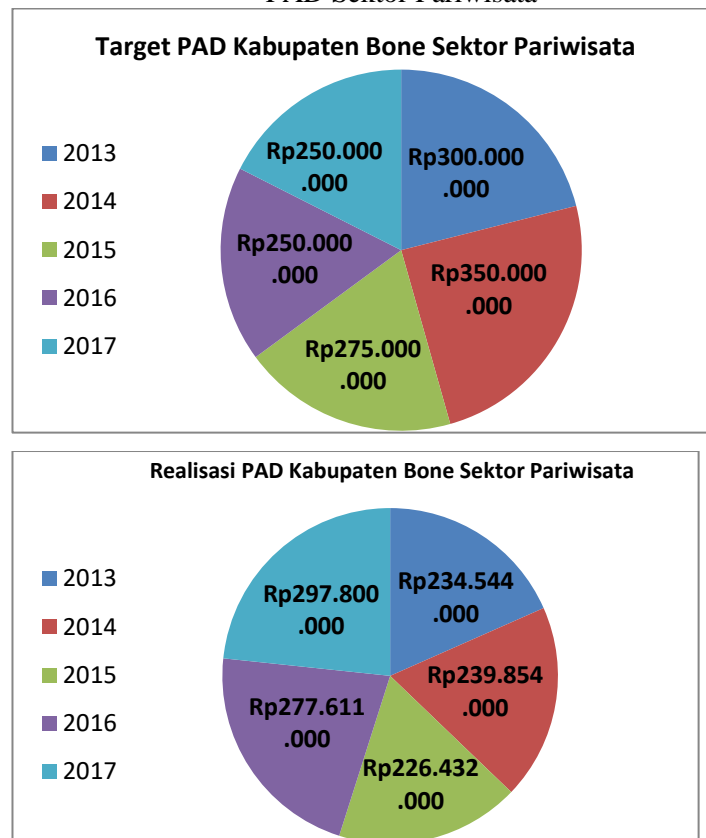
Indikator	Capaian Kinerja				
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
♦ <b><u>Lama Kunjunagn Wisatawan</u></b>					
- Wisatawan Nusantara (Wisnus)	3 Hari	3 Hari	4 Hari	5 Hari	5 Hari
- Wisatawan mancanegara (Wisma)	2 Hari	2 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari

Adapun lama kunjungan wisatawan nusantara rata-rata berlangsung selama 3 hari dan wisatawan mancanegara paling lama 2 hari. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan pariwisata di Kabupaten Bone

belum banyak diminati oleh para wisatawan sehingga lama kunjungan wisatawan dipersingkat.

#### 2.4.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata

Grafik 2.181  
PAD Sektor Pariwisata



Sumber: Data Diolah, 2018

Kabupaten Bone Sektor Pariwisata : kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Sektor Pariwisata yang dicapai dari target berbanding realisasi hanya mencapai 78,18%. Hal ini berti target yang ditetapkan tidak tercapai sebagaimana yang diinginkan, disebabkan oleh kunjungan wisatawan terbatas dan berlangsung singkat termasuk didalamnya pengelolaan obyek-obyek wisata yang ditangani oleh Pemerintah kabupaten Bone belum Optimal.

### **2.4.3.2. Pertanian**

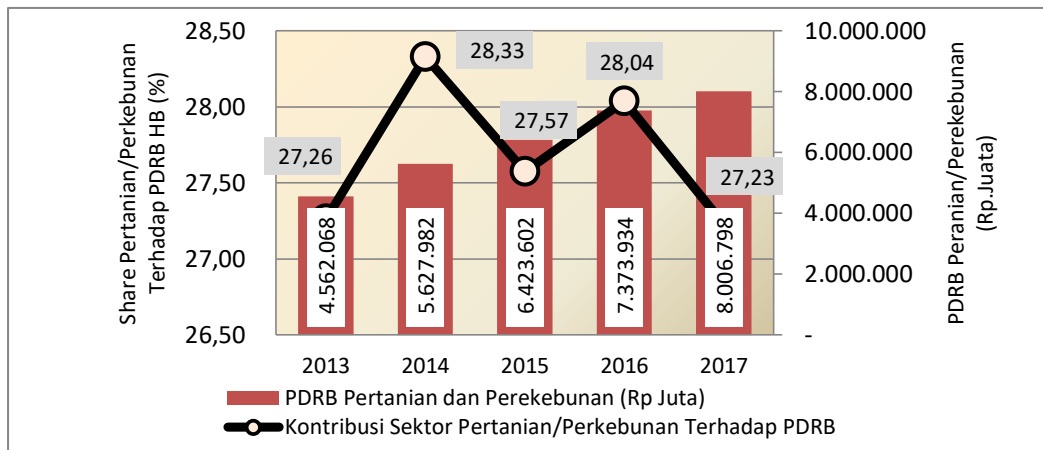
#### **2.4.3.2.1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB merupakan ukuran untuk melihat peranan sektor pertanian/perkebunan dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai ukuran untuk melihat kinerja pembangunan sektor pertanian/perkebunan itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian/perkebunan dengan total PDRB menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan mencakup nilai tambah dari sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor jasa pertanian.

Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan yang didasarkan pada nilai PDRB harga berlaku selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian/perkebunan sebesar Rp. 4,56 Trillion meningkat menjadi Rp. 8,01 trillion pada tahun 2017. Selanjutnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan dalam PDRB harga berlaku Kabupaten Bone menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2013-2014 kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB meningkat yakni dari 27,26 persen tahun 2013 meningkat menjadi 28,33 persen tahun 2014. Akan tetapi pada periode berikutnya cenderung menurun bahkan pada tahun 2017 kontribusi sektor ini mengalami penurunan secara tajam yakni hanya sekitar 27,23 persen. Penurunan tajam kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada tahun 2017, terkait berbagai kondisi sepanjang tahun 2017, seperti terjadinya anomali cuaca El Nino di awal tahun dan berlanjut El Nina di pertengahan hingga akhir tahun, yang berdampak kurang baik bagi produktivitas pertanian karena banyak tanaman pertanian yang terserang hama penyakit dan bencana alam berupa banjir di daerah Bone bagian utara.



Grafik 2.182  
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

#### 2.4.3.2.2. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

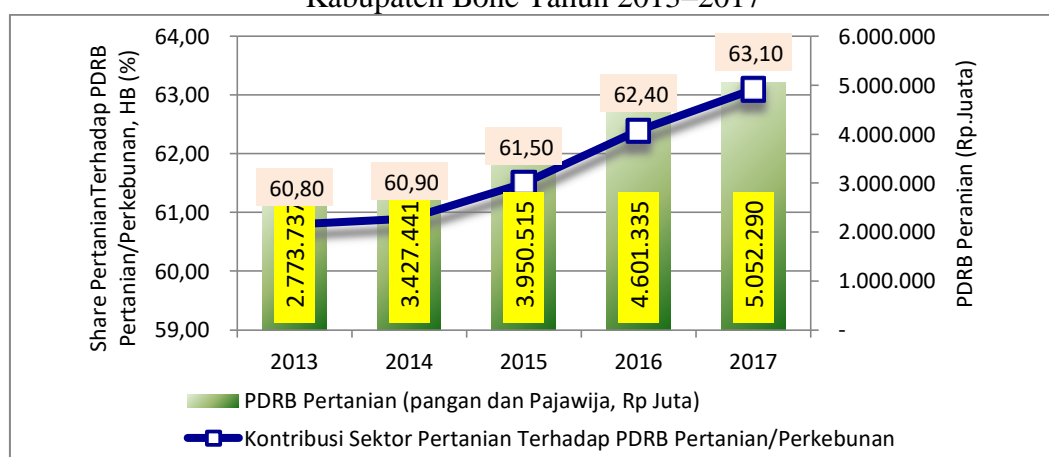
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui porsi nilai tambah pertanian (palawija) terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan, sekaligus mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian (palawija) itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya), serta tanaman serelia lainnya.

Nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian (pangan dan pawija) sebesar Rp. 2,77 Trillium meningkat menjadi Rp. 5,05 trillium pada tahun 2017. Sektor

pertanian pangan dan palawija di Kabupaten Bone tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, tetapi kecenderungan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian (pangan dan palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 60,80 persen meningkat yakni dari 63,10 persen tahun 2017. Uraian tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) yang merupakan basis utama pertanian Kabupaten Bone memiliki kinerja perkembangan yang cukup baik.

Grafik 2.183

Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



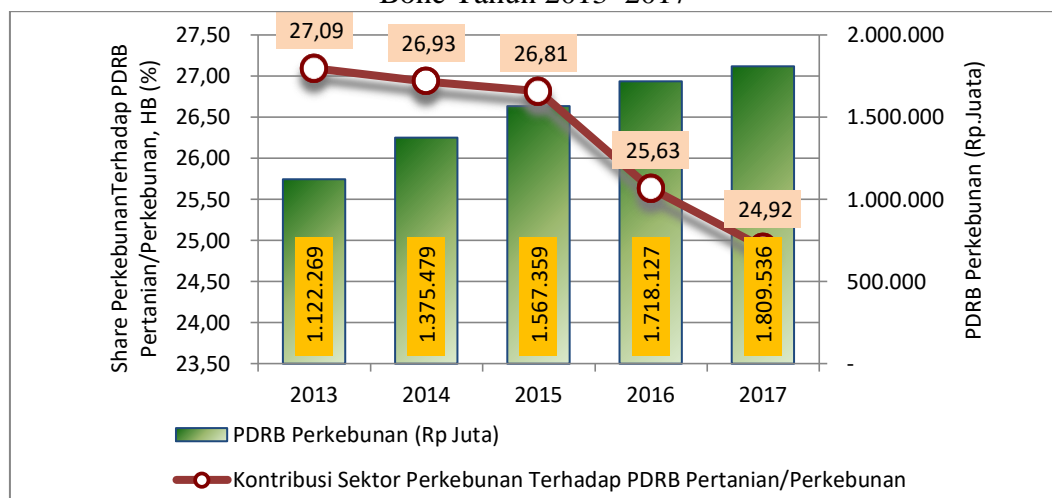
Sumber: PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

#### 2.4.3.2.3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Pertanian/perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan sektor perkebunan, yang sekaligus menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas dari tanaman Perkebunan yang terdiri

dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Grafik 2.184  
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



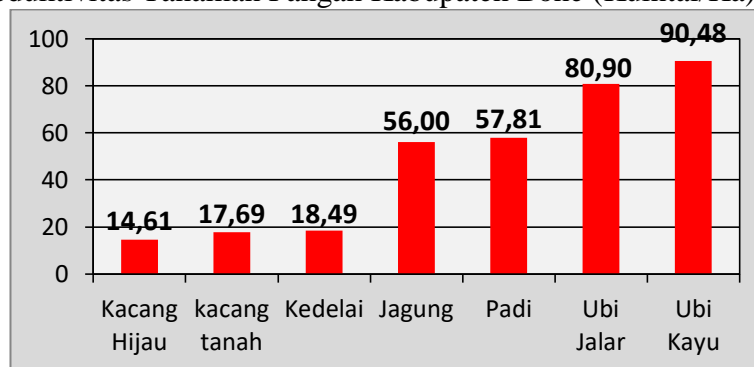
Sumber: PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2013-2017 memiliki kecenderungan meningkat, meski dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian pangan dan palawija. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp. 1,12 Trillion meningkat menjadi Rp. 1,81 triliun pada tahun 2017. Meskipun demikian sektor perkebunan merupakan sektor pertanian yang masih cukup penting di daerah ini karena merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor tanaman pangan dan palwija. Kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Bone mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan yang terus mengalami kemerosotan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013

kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 27,09 persen sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 24,92 persen. Turunnya kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan mengisyaratkan bahwa kinerja pertumbuhan sektor perkebunan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani.

#### 2.4.3.2.4. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Grafik 2.185  
Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bone (Kuintal/Ha), 2016



Sumber : Kabupaten Bone dalam Angka, 2018

Analisis mengenai data pangan akan lebih bermakna apabila ditinjau nilai produktivitas tanaman pangan. Besarnya produktivitas tanaman padi berada pada posisi ketiga yaitu 57,81 kuintal/ha. Produktivitas tertinggi dihasilkan oleh tanaman ubi kayu (90,48 kuintal/ha). Produktivitas tertinggi berikutnya dihasilkan oleh ubi jalar dengan rata-rata produksi 80,90 kuintal/ha.

Produksi tanaman pangan terbesar kedua adalah jagung dengan volume produksi 379.789 ton. Produksi tersebut dihasilkan dari lahan seluas 67.824 ha.

### 2.4.3.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

#### 2.4.3.3.1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Total jumlah rumah tangga mengalami perkembangan sejak tahun 2013 sampai tahun 2017. Perkembangan ini juga diikuti oleh perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bervariasi berdasarkan daya listrik yang disediakan PLN. Pengguna listrik terbanyak menggunakan daya 900 Watt dan turun secara konsisten sejalan dengan meningkatnya daya listrik. Persentase jumlah pengguna listrik meningkat dari 71,52 % pada tahun 2013 menjadi 93,62 % pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah rumah tangga pengguna listrik dari tahun ke tahun.

Tabel 2.73  
Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di  
Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	RT dengan daya 450 watt	39.064	37.332	38.214	37.169	35.796
2.	RT dengan daya 900 watt	96.421	109.324	117.140	122.338	135.800
3.	RT dengan daya 1.300 watt	16.006	17.320	18.911	25.042	26.733
4.	RT dengan daya 2.200 watt	2.390	2.331	3.093	3.413	3.936
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	504	620	674	771	941
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	151.995	166.927	178.032	188.733	203.206
7.	Jumlah Rumah Tangga	212.510	213.644,5	214.779	215.913,5	217.048
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	71.52%	78.13%	82.89%	87.41%	93.62%

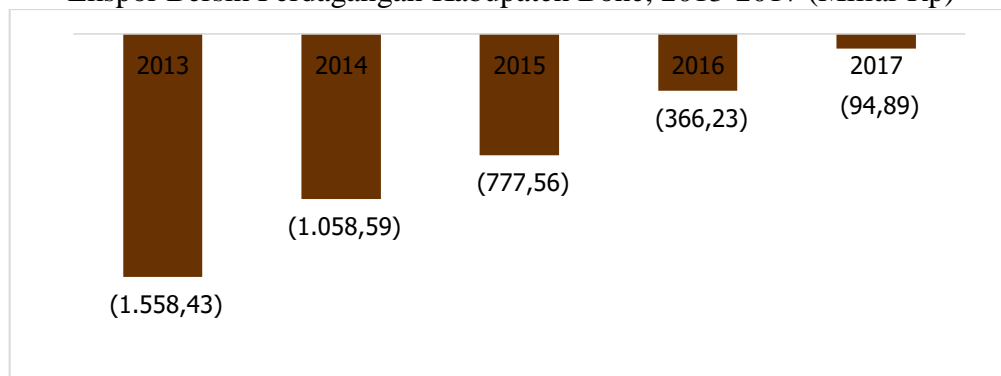
Sumber: Dinas Perindustrian, 2018

### 2.4.3.4. Perdagangan

#### 2.4.3.4.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong perekonomian daerah, sebab produksi barang dan jasa seringkali juga tergantung dari output antara yang didatangkan dari luar daerah atau sektor perdagangan memperjual-belikan barang dan jasa dari luar daerah. Jika arus barang keluar (net ekspor) terus meningkat akan mendorong PDRB, begitupun sebaliknya.

Grafik 2.186  
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bone, 2013-2017 (Miliar Rp)



Sumber: Data Diolah, 2018

Sepanjang lima tahun terakhir, ekspor bersih Kabupaten Bone terus deficit, menggambarkan bahwa arus barang keluar (ekspor) nilainya lebih kecil daripada arus masuk output. Tahun 2013 merupakan defisit perdagangan paling tinggi yang dialami Kabupaten Bone karena angkanya mencapai Rp. -1.058,59 miliar, namun empat tahun selanjutnya konsisten defisitnya terus berkurang. Pada Tahun 2014, ekspor bersih Kabupaten Bone masih mencapai Rp. -1.058,59 miliar, kemudian menurun menjadi Rp. -777,56 miliar dan Rp. -366,23 miliar masing-masing tahun 2015 dan 2016. Karena terus memperbesar volume ekspornya, defisit perdagangan Kabupaten Bone hanya terisisa Rp. -94,89 miliar, paling rendah dalam lima tahun terakhir.

#### 2.4.3.4.2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

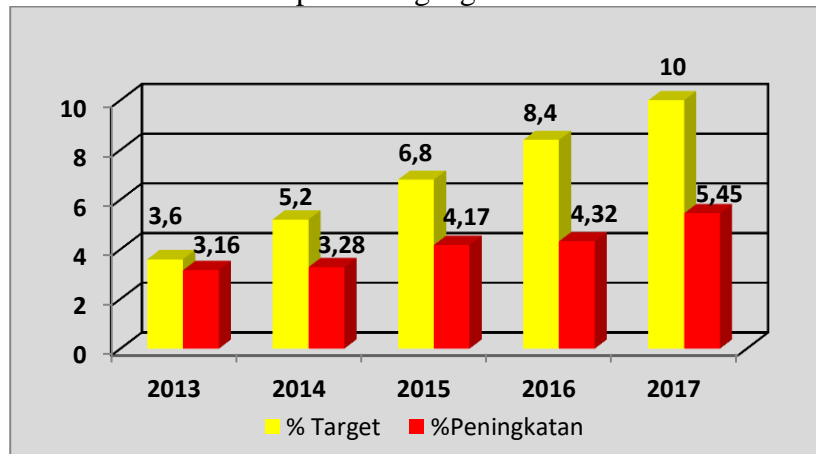
Tabel 2.74  
Cakupan Bin Kelompok Pedagang/Usaha Informasi (%)

No	Kelompok Pedagang	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)	2017 (Unit)
1	Jumlah Perusahaan	316	366	1800	1807	1835
2	Jumlah Binaan	10	12	75	78	100
3.	% Bina Kelompok Pedagang	3,16	3,28	4,17	4,32	5,45

Sumber : Data Diolah, 2018

Perbandingan Pencapaian Target dan Realisasi adalah sebagai berikut:

Grafik 2.187  
Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa :

- Tahun 2013 persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 3,16% sedangkan Target sebesar 3,6% maka dapat disimpulkan capaian tahun 2013 masih kurang sekitar 4,4%
- Tahun 2014 persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 3,28% sedangkan Target sebesar 5,2% maka dapat disimpulkan capaian tahun 2014 masih kurang sekitar 1,92%
- Tahun 2015 persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 4,17% sedangkan Target sebesar 6,8% maka dapat disimpulkan capaian tahun 2015 masih kurang sekitar 2,63%
- Tahun 2016 persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 4,32% sedangkan Target sebesar 8,4% maka dapat disimpulkan capaian tahun 2016 masih kurang sekitar 4,08%
- Tahun 2017 Triwulan III Persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 5,45% sedangkan Target sebesar 10%

Beberapa Bantuan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informasi yang dilakukan oleh Dinas Pedagang Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan mengenai Pengurusan Izin Usaha Pedagang (SIUP/TDP,HO)
2. Pembinaan mengenai Permohonan pinjaman modal di Bank
3. Pembinaan mengenai manajemen dasar pengelolaan usaha
4. Pembinaan mengenai Penyederhanaan Dokumen Ekspor Impor

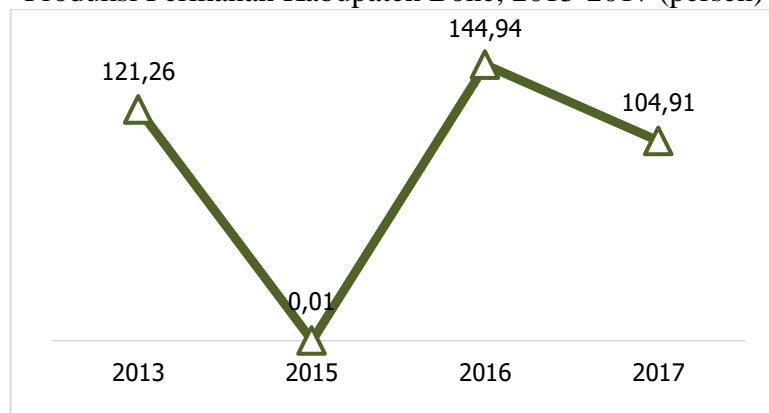
#### **2.4.3.5. Kelautan dan Perikanan**

##### **2.4.3.5.1. Produksi Perikanan**

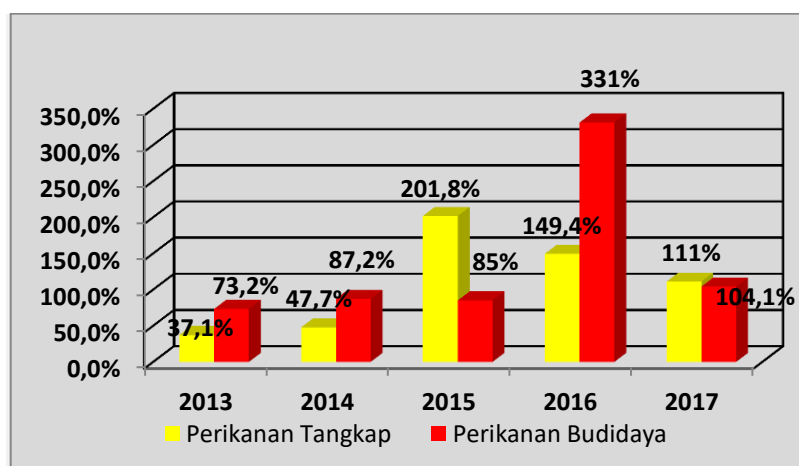
Perekonomian Kabupaten Bone sebagian besar berkontribusi oleh sektor pertanian dan penggerak sektor pertanian salah satunya adalah lapangan usaha perikanan. Produksi perikanan yang dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2018 diperoleh dari jumlah produksi ikan (ton) dibagi dengan target daerah (ton) dikali 100 persen. Dalam lima tahun terakhir, produksi perikanan Kabupaten Bone terus meningkat, kecuali tahun 2015 angkanya mengalami penurunan tajam. Capaian produksi perikanan tahun 2013 angkanya sudah mencapai 121,26 persen atau melampaui target, kemudian semakin besar di tahun 2014 hingga mencapai 133,50 persen. Persentase capaian kinerja produksi perikanan Kabupaten Bone tiba-tiba menurun signifikan hingga hanya tersisa 0,01 persen disebabkan karena target produksi yang ditentukan jauh lebih tinggi daripada realisasi produksi. Kinerja lapangan usaha perikanan kemudian mencapai angka tertingginya di tahun 2016 sebesar 144,94 persen, sebelum menurun ke 104,91 persen tahun 2017



Grafik 2.188  
Produksi Perikanan Kabupaten Bone, 2013-2017 (persen)



Sumber: Data Diolah, 2018



- a. Produksi perikanan untuk perikanan tangkap seperti pada tabel tersebut menggambarkan bahwa presentase nilai capaian Indikator pada tahun 2013 sebesar 26.178,3 (ton) atau (37,1%, tahun 2014 sebesar 34.628,7 ton) atau (47,4%), tahun 2015 sebesar 150.933,2 (ton) (201,8%), tahun 2016 sebesar 115.000 (ton) (149,37%) dan 2017 sebesar 44.359,6 (ton) atau (111%).

Pembangunan kelautan dan perikanan bidang penangkapan ikan menunjukkan adanya fluktuasi produksi. Kondisi ini sangat di pengaruhi oleh iklim atau cuaca yang tidak stabil dimana nelayan enggan melaut pada kondisi tersebut.

- b. Produksi prikanan budidaya ikan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Untuk tahun 2013 produksi budidaya sebesar diproduksi

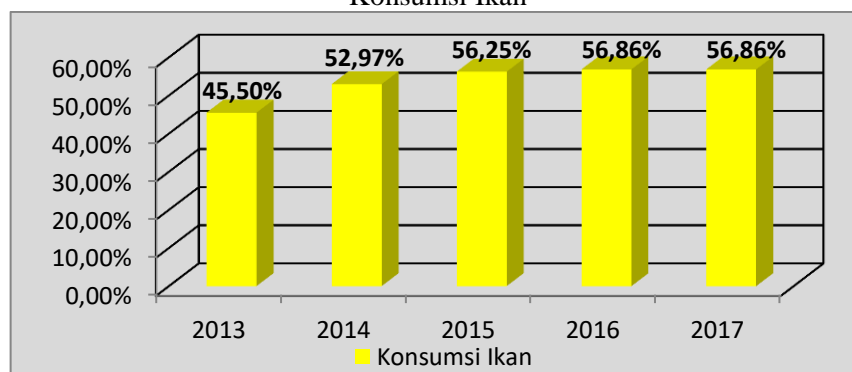
94.648,7 atau (73%), tahun 2014 sebesar 116.283,7 (87,2%), tahun 2015 produksinya mencapai 116.85,4 (85%) tahun 2016 sebesar 469.164 (331) dan tahun 2017 sebesar 322.999 ton (104,1%).

Berdasarkan tabel tersebut menggambarkan bahwa capaian indikator dinas kelautan dan perikanan dari tahun 2013-2017 secara umum mengalami peningkatan. Keberhasilan ini di dukung karena adanya beberapa bantuan sarana dan prasarana kepada pembudidaya.

Pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan di maksudkan untuk mendukung indikator sasaran strategis yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya dan jumlah kelompok pembudidaya untuk mendapat sarana prasarana produksi budidaya (pokdakan).

#### 2.4.3.5.2. Konsumsi Ikan

Grafik 2.189  
Konsumsi Ikan

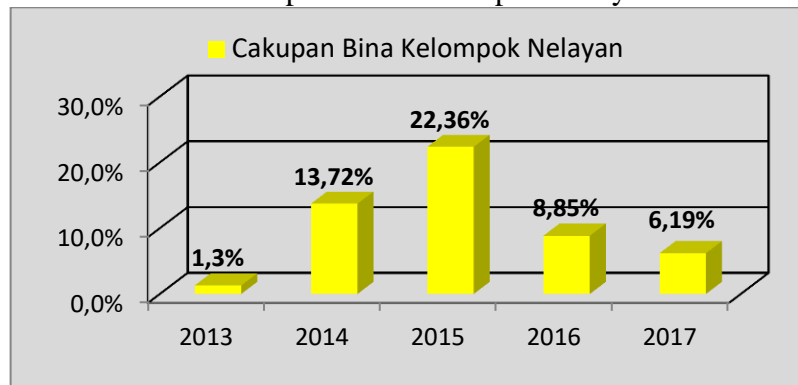


Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan hasil konsumsi ikan dari tahun 2013-2017 presentase konsumsi ikan masih berada pada kisaran 45-56 persen. Ikan sebagai sumber protein sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, oleh Karena itu konsumsi ikan merupakan salah satu memasyarakatnkan gemar makan ikan.

#### 2.4.3.5.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Grafik 2.190  
Cakupan Bina Kelompok Nelayan



Sumber: Data Diolah, 2018

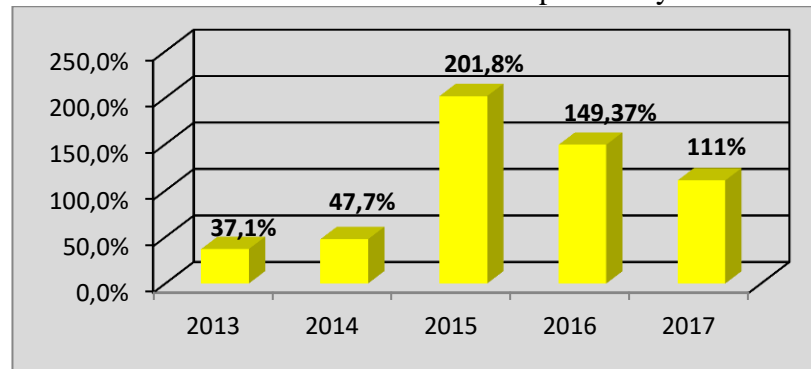
Kegiatan pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap dengan capaian meningkatnya fasilitas pendukung perikanan tangkap melalui pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan yaitu alat bantu penangkapan ikan (kapal perikanan) dan beberapa alat tangkap yang diharapkan dapat meningkatkan produksi penangkapan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan untuk tahun 2013 sebanyak 3 kelompok, tahun 2014 sebanyak 31 kelompok, tahun 2015 sebanyak 53 kelompok, dan tahun 2016 sebanyak 20 kelompok dan tahun 2017 sebanyak 14 kelompok. Pemberian bantuan ini juga bervariasi dimana tahun 2015 cukup tinggi dan di tahun 2017 malah lebih kecil, hal ini tentu tidak terlepas dari salah satu pengalokasian anggaran atau didasarkan atas usulan kelompok.

#### 2.4.3.5.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Grafik 2.191

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan



Sumber: Data Diolah, 2018

#### 2.4.4. Penunjang Urusan

##### 2.4.4.1. Keuangan

##### 2.4.4.1.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Rumus : Opini BPK Terhadap Hasil Audite Laporan Keuangan Daerah

Tabel 2.75

Indikator Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini BPK	Keterangan
1	2013	WDP	Hasil Audit LKPD Tahun 2012
2	2014	WDP	Hasil Audit LKPD Tahun 2013
3	1015	WDP	Hasil Audit LKPD Tahun 2014
4	2016	WTP	Hasil Audit LKPD Tahun 2015
5	2017	WTP	Hasil Audit LKPD Tahun 2016

Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil audite atas laporan keuangan daerah tahun 2017, dimana opini BPK –RI sebagai hasil audit yang dilakukan pada tahun 2017 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kab. Bone T.A 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bila dibandingkan dengan hasil audit BKP-RI Terhadap LKPD Pemerintah Kab. Bone selama tiga tahun sebelumnya sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas menunjukkan bahwa Opini WTP yang telah diperoleh di tahun 2016, telah dapat dipertahankan pada tahun 2017. Perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis ini selama tahun 2014-2017, dimana capaian ini merupakan capaian tertinggi yang di raih pertama kalinya dan dapat di pertahankan dua tahun berturut-turut dalam sepuluh tahun terakhir terkait pencapaian kinerja pengelolaan keuangan pemerinta kab.Bone.

Begitupun Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Bone juga terus mengalami perbaikan yang signifikan berdasarkan perbandingan jumlah temuan dan rekomendasi beserta nilai rupiah dari hasil audit BPK-RI atas LKPD T.A.2016. Selain itu, pengendalian dan pengawasan yang intensif oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah Kab.Bone khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, beberapa catatan temuan dan rekomendasi BPK-RI yang perlu di perhatikan kedepanya agar tidk berulang sebagai temuan, yang secara garis besar meliputi 2 aspek pemeriksaan, yaitu :

a. Sistem pengendalian internal :

- Penata usahaan keuangan pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran belum tertib sepenuhnya;
- Penata usahaan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) tidak tertib;
- Penata usahaan persiapan pada beberapa SKPD belum tertib sepenuhnya;
- Tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios, dan lods Pasar Sentral Palakka watampone belum didukung dengan

bukti perikatan dan pembelian yang telah lunas belum di proses bukti kepemilikanya;

- Potensi penerimaan daerah dari retribusi pengendalian Menara telekomunikasi dan sewa atas bangunan tanah untuk bangunan mesin ATM pada pemerintah kabupaten bone belum dipungut;
- Penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja bantuan hibah;
- Penerimaan dan penggunaan dana BOS SD, SMP Dan SMA/SMK T.A 2016 dari pemerintah provinsi Sulawesi selatan kepada pemerintah kabupaten bone tidak dianggarkan dalam APBD.

b. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ;

c. Terhadap kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah pensiun. Secara umum hal ini tersebut terjadi karena masih cukup lemahnya pengendalian internal dan tindak lanjut terkait hal-hal tersebut diatas dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.

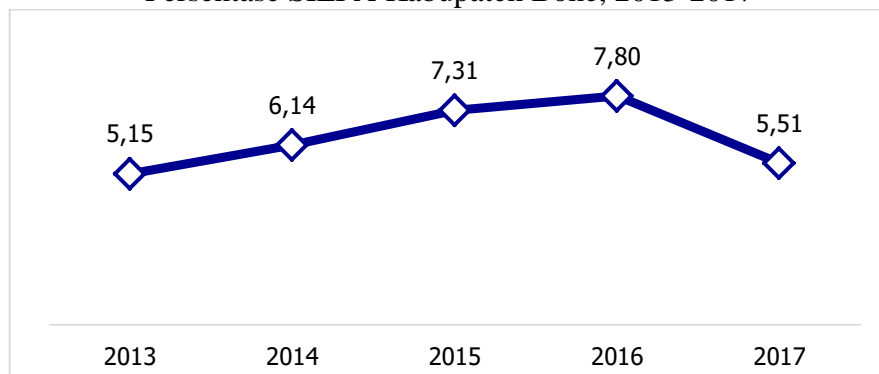
#### **2.4.4.1.2. Persentase SILPA**

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan

Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

Proporsi SILPA dalam APBD Kabupaten Bone cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2017. Tahun 2014, Kabupaten Bone mencatat proporsi SILPA terhadap APBD sebesar 6,14 persen, naik dari 5,15 persen tahun 2013. Karena terjadi kenaikan SILPA yang cukup besar pada tahun 2015, proporsinya terhadap APBD juga meningkat menjadi 7,31 persen dan mencapai angka tertinggi tahun 2016 sebesar 7,80 persen. Namun pada tahun 2017, SILPA Kabupaten Bone berkurang sehingga menyebabkan proporsinya menurun ke 5,51 persen.

Grafik 2.192  
Persentase SILPA Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

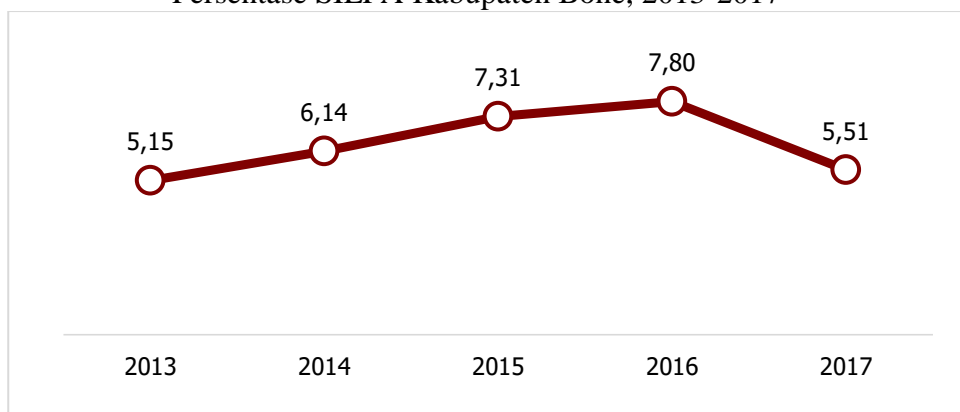
#### 2.4.4.1.3. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA

Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

Proporsi SILPA dalam APBD Kabupaten Bone cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2017. Tahun 2014, Kabupaten Bone mencatat proporsi SILPA terhadap APBD sebesar 6,14 persen, naik dari 5,15 persen tahun 2013. Karena terjadi kenaikan SILPA yang cukup besar pada tahun 2015, proporsinya terhadap APBD juga meningkat menjadi 7,31 persen dan mencapai angka tertinggi tahun 2016 sebesar 7,80 persen. Namun pada tahun 2017, SILPA Kabupaten Bone berkurang sehingga menyebabkan proporsinya menurun ke 5,51 persen.

Grafik 2.193  
Persentase SILPA Kabupaten Bone, 2013-2017

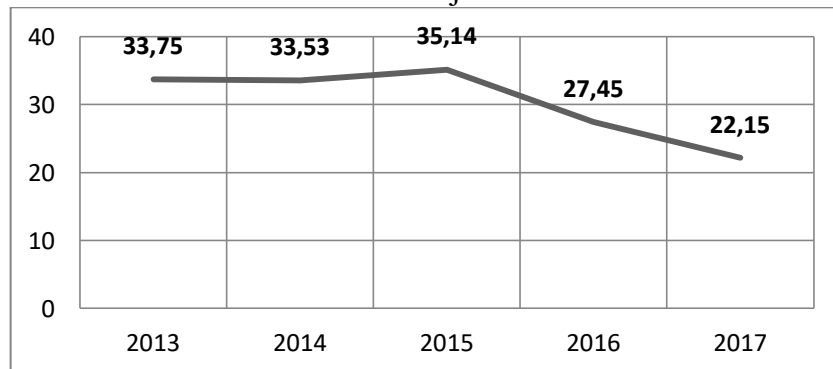


Sumber: Data Diolah, 2018



#### 2.4.4.1.4. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Grafik 2.194  
Persentase Belanjak Pendidikan



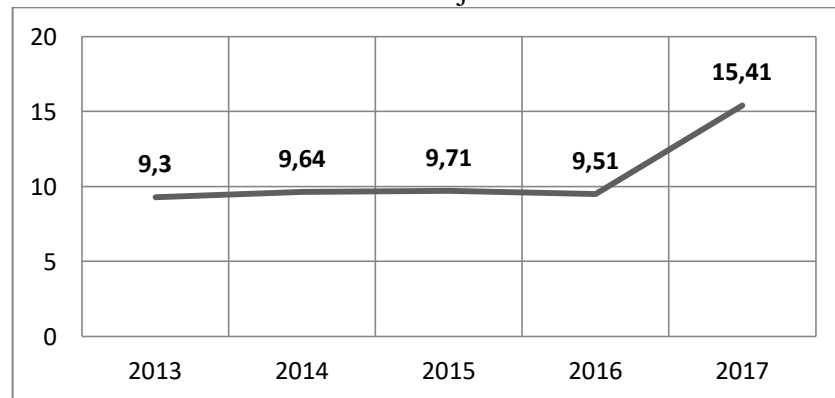
Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas persentase belanja pendidikan terhadap total APBD pruktatif sejak tahun 2013 sampai 2017 dikarenakan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 alokasi anggaran dari pemerintah pusat cukup besar yang disebar di Dana Alokasi Khusus Pendidikan, BOS dan belanja Sertifikasi sehingga meningkatka persentase belanja pendidikan sebesar rata-rata 35% dari total APBD. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan hingga 22.15% dikarenakan anggaran DAK pendidikan yang mengalami penurunan, namun secara Nasional anggaran tersebut masih di atas persentase yang dialmanahkan dalam belanja pendidikan dan prioritas Kabupaten Bone akan terus berupaya untuk meningkatkan anggaran Pendidikan sesuai Visi Kabupaten Bone yang Cerdas.

#### 2.4.4.1.5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Grafik 2.195  
Persentase Belanjak Kesehatan



Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja Kesehatan dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 persentase Belanja Kesehatan terhadap APBD masih 9.30% dikarenakan anggaran belanja yang terdapat di APBD tahun 2013 masih dinamis oleh belanja Pegawai sehingga Pengalokasian anggaran sektor kesehatan belum memenuhi standar minimum yang diisyaratkan sebesar 10%. Pada tahun 2014 masih berada di posisi 9.64% , sama yang terjadi pada tahun sebelumnya belum memenuhi standar minimum dikarenakan keterbatasan anggaran. Pada tahun 2015 posisi anggaran sektor kesehatan sebesar 9.71% lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp.40.254.277.405, walaupun mpersentase dari total APBD mengalami penurunan 0.20% dikarenakan meningkatnya alokasi Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2017 pengalokasian pada sektor kesehatan sebesar 15.41% menebihi standar minimum 10%, hal ini disebabkan karena konsistensi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, ters ditingkatkan serta terintegrasi Program

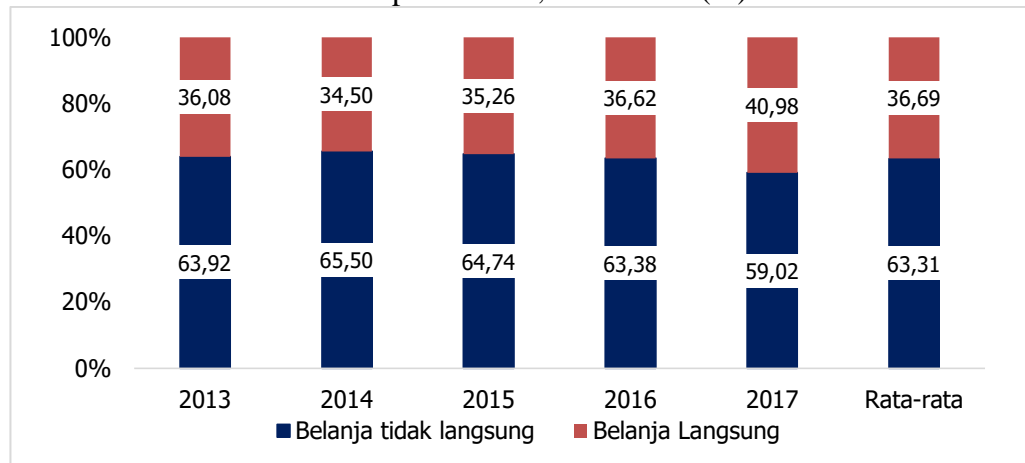
Nasioanal proritas Daerah sehingga anggaran kesehatan melebihi target Nasional.

#### **2.4.4.1.6. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Alokasi APBD yang besar untuk belanja langsung akan berdampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya ketika komponen belanja langsung paling dominan adalah belanja modal.

Namun, sepanjang tahun 2013 sampai 2017, Kabupaten Bone mengalokasi sebagian besar APBD untuk membiayai belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Secara rerata hamper 2/3 APBD Kabupaten Bone digunakan untuk belanja tidak langsung, sementara untuk belanja langsung hanya 1/3. Tahun 2013 misalnya, proporsi belanja tidak langsung dalam struktur APBD Kabupaten Bone mencapai 62,71 persen, sementara belanja langsung hanya 35,40 persen. Proporsi belanja tidak langsung semakin membesar pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing 63,47 persen dan 63,76 persen dan proporsi belanja langsung menurun ke 33,43 persen, sebelum sedikit penambahan menjadi 34,72 persen. Penurunan alokasi APBD untuk belanja tidak langsung berlangsung di tahun 2016 sebesar 63,46 persen dan berlanjut ke 2017 menjadi 60,08 persen, dan pemerintah daerah menambah alokasi untuk belanja langsung sebesar 36,67 persen dan 41,71 persen per tahun 2016 dan 2017. Meskipun proporsi belanja tidak langsung menurun di dua tahun terakhir, namun angkanya masih relatif tinggi.

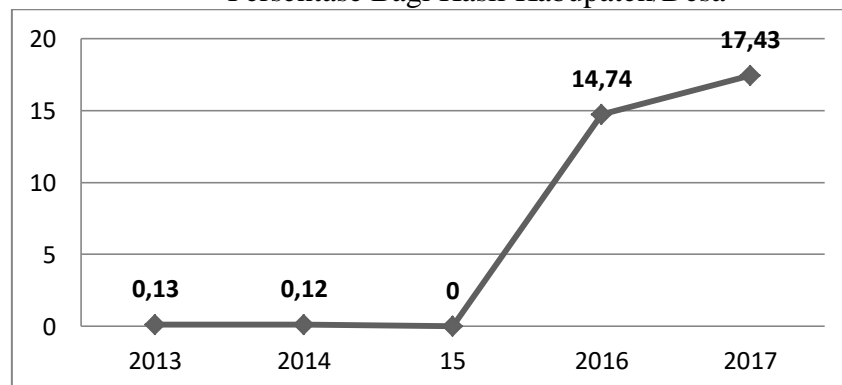
**Grafik 2.196**  
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung  
Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)



Sumber: Perda APBD Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2013-2018

#### 2.4.4.1.7. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

**Grafik 2.197**  
Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Desa



Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas, persentase Bagi Hasil Kabupaten Bone Kepemerintah Desa masih sangat minim, dimana angka tersebut masih dibawah 1% hal ini disebabkan karena masih terbatasnya anggaran khusus yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sehingga berdampak terhadap besaran yang diberikan kepada pemerintah Desa. Pada tahun 2016 dan 2017 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka

pemerintah Kabupaten wajib memberikan anggaran sebesar 10% dari Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi di daerah.

#### 2.4.4.1.8. Penetapan APBD

Tabel 2.78  
Penetapan APBD

No	Tahun	Waktu Penetapan APBD	Ket.
1	2013	20/02/2013 Tidak Tepat Waktu	
2	2014	24/12/2013 Tepat Waktu	
3	2015	24/12/2014 Tepat Waktu	
4	2016	22/12/2015 Tepat Waktu	
5	2017	30/11/2016 Tepat Waktu	

Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan penetapan APBD Kabupaten Bone tahun 2013 mengalami keterlambatan hal ini disebabkan karena penyusunan anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Pagu Indikatif dari pemerintah pusat mengalami keterlambatan dan dinamika pembahasan anggaran Pendapatan Belanja Daerah cukup panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga tidak dapat dilaksanakan penetapan APBD sesuai ketentuan yang ada. Pada tahun 2014 sampai 2017 pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Bone dilaksanakan dengan sinergitas baik eksklusi maupun legislative sehingga penetapan anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tepat waktu sebelum 31 Desember.

#### **2.4.4.2. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan**

##### **2.4.4.2.1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan**

Tabel 2.79

Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

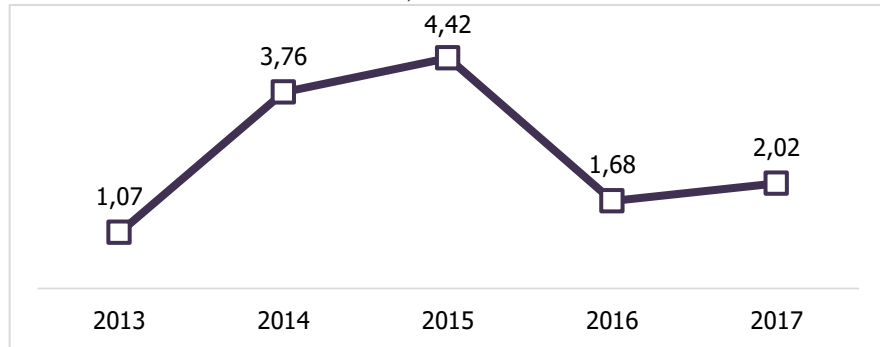
Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Capaian					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 JP	6 JP	5 JP	5 JP	7 JP	7 JP

Sumber: Data Diolah, 2018

##### **2.4.4.2.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal**

Pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Sipil Negara (ASN) merupakan dua instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, sebab melalui pendidikan dan pelatihan ASN dapat meningkatkan kapasitas pelayanan mereka kepada masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Bone fluktuatif. Pada tahun 2013, tercatat hanya 1,07 persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Bone, yang berarti masih ada 98,93 persen ASN belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di tahun tahun tersebut. Angka persentasenya perlahan naik dari 3,76 persen tahun 2014 menjadi 4,42 persen tahun 2015, sebelum akhirnya menurun ke 1,68 persen dan 2,02 persen. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN di Kabupaten Bone belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Grafik 2.198  
 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Bone, 2013-2017

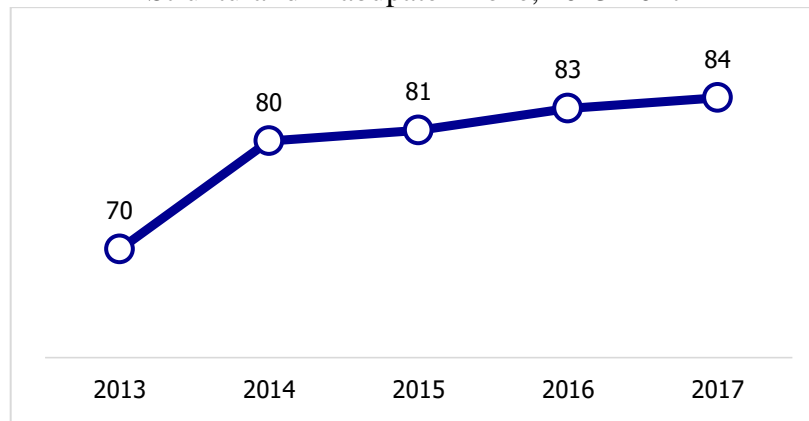


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.4.2.3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Berbeda dengan persentase ASN, angka persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Bone sepanjang tahun 2013 sampai 2017 terus meningkat. Kenaikan signifikan terjadi tahun 2014, dimana persentase naik dari 70 tahun 2013 persen menjadi 80 persen. Setelah tahun 2014, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Bone konsisten menaik meski cenderung lebih lambat, masing-masing hanya mencapai 81 persen tahun 2015, 83 persen tahun 2016, dan 84 persen tahun 2017.

Grafik 2.199  
 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Bone, 2013-2017

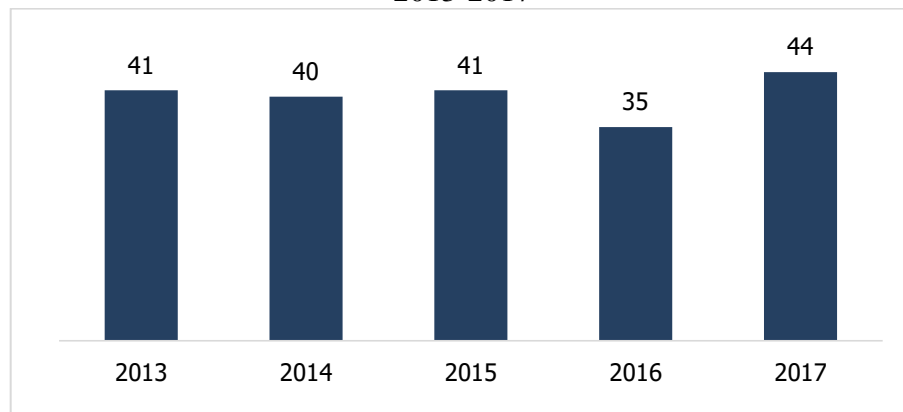


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

#### **2.4.4.2.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah**

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Hanya di tahun 2016 sempat mengalami penurunan signifikan dalam jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dari 41 jabatan menjadi 35 jabatan, sebelum akhirnya pada tahun 2017 kembali bertambah menjadi 44 jabatan.

Grafik 2.200  
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone, 2013-2017



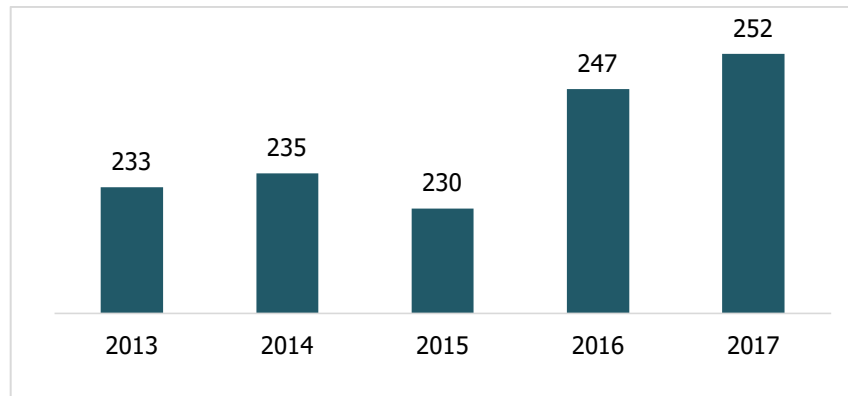
Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

#### **2.4.4.2.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah**

Berbeda dengan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang tidak banyak mengalami perubahan, jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone justru cenderung bertambah. Pada tahun 2014, jumlah orang yang menjabat jabatan administrasi bertambah, dari 233 orang menjadi 235 orang, sebelum menurun di tahun 2015 sebanyak 230 orang. Pada tahun 2016, terjadi penambahan cukup banyak ASN yang menjabat jabatan administrasi di Kabupaten Bone hingga mencapai 247 orang, kemudian meningkat lagi di tahun 2017 sebanyak 252 orang sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang tahun 2013 hingga 2017.



Grafik 2.201  
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone,  
2013-2017

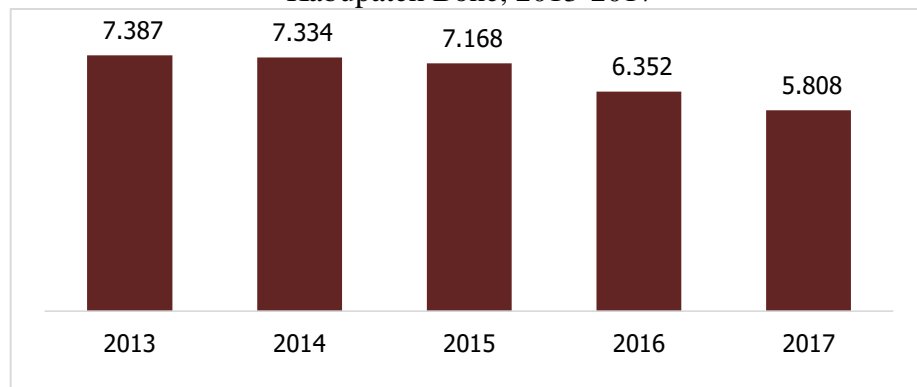


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

#### 2.4.4.2.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berkurang. Jumlah pemagku jabatan fngsional paling banyak mencapai 7.387 orang tahun 2013, kemudian perlahan turun ke 7.334 orang tahun 2014 dan 7.168 orang tahun 2015. Penurunan paling banyak terjadi di tahun 2016, ketika jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone hanya 6.352 orang dan terus berlanjut di tahun 2017 sebanyak 5.808 orang.

Grafik 2.202  
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di  
Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

**2.4.4.2.7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone, 2017**

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	39	-	39
SLTP/Sederajat	54	6	60
SMA/Sederajat	1.107	1.014	2.121
Diploma I, II	262	578	840
Diploma III/Sarjana Muda	88	548	636
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d	2.223	3.582	5.805
<b>Jumlah</b>	<b>3.773</b>	<b>5.728</b>	<b>9.501</b>

Sumber : BPS Kab. Bone, 2018

**2.4.4.3. Penelitian dan Pengembangan**

**2.4.4.3.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.**

Tabel 2.80  
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

No	Tahun	Jumlah Kelitbangan Dalam Rkpd	Jumlah Kelitbangan Dalam Rpjmd	%
1	2013	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
2	2014	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
3	2015	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
4	2016	8 Kegiatan Kelitbangan	8 Kegiatan Kelitbangan	100 %
5	2017	9 Kegiatan Kelitbangan	9 Kegiatan Kelitbangan	100 %

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Kelitbangan Dalam RPKD pada Tahun 2013, 2014 dan 2015 jumlah kegiatan Kelitbangan masing-masing sebanyak 2 kegiatan sedangkan di Tahun 2016 kegiatan Kelitbangan meningkat menjadi 8 kegiatan Kelitbangan dan di Tahun 2017 sebanyak 9 kegiatan Kelitbangan

yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone. Dan Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD pada Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sama dengan jumlah Kelitbangan dalam RKPD sehingga Presentase Implementasi Rencana Kelitbangan dapat terlaksana 100 %.

#### 2.4.4.3.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.81  
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

No	Tahun	Jumlah Kelitbangan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kelitbangan Dalam Renja Perangkat Daerah	%
1	2013	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
2	2014	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
3	2015	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
4	2016	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
5	2017	4 Kegiatan Kelitbangan	4 Kegiatan Kelitbangan	100 %

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bone menjadi 100 % dimana Jumlah Kelitbangan yang ditindak lanjuti mulai Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebanyak 2 Kegiatan Kelitbangan, dan di tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 4 kegiatan Kelitbangan. Demikian

pula dengan Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah dari tahun 2013,214,2015,2016 masing-masing sebanyak 2 kegiatan Kelitbangan dan di Tahun 2017 sebanyak 4 Kegiatan Kelitbangan.

#### **2.4.4.3.3. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.**

Tabel 2.82

Persentase Unit Kerja yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

No	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah Yang Difasilitasi	Jumlah Total Perangkat Daerah	%
1	2013	-	-	-
2	2014	-	-	-
3	2015	-	-	-
4	2016	-	-	-
5	2017	75 OPD	82 OPD	2,97

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Presentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah dapat terlaksana pada tahun 2017 dengan Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi sebanyak 75 terdiri dari OPD, sedangkan Jumlah Total Perangkat Daerah di Kabupaten Bone sebanyak 82 OPD. Sehingga masih ada sekitar 7 OPD yang belum difasilitasi.

#### **2.4.4.3.4. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah.**

Tabel 2.83

Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah

No	Tahun	Jumlah Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan	Jumlah Inovasi Yang Diusulkan	%
1	2013	2	-	-
2	2014	1	-	-
3	2015	-	-	-
4	2016	-	-	-
5	2017	-	122	-

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel diatas Presentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah pada Tahun 2013 Kantor Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bone telah melakukan proses penjabaran SK 2 (dua) yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menristek

Dikti dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan pada Tahun 2014 Bupati Bone menindak lanjuti SK Menteri Dalam Negeri dan Menristek Dikti untuk melaksanakan sosialisasi tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa), di tahun 2015 Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) mengacu pada gambaran umum pelaksanaan Kegiatan Sistem Inovasi daerah (SIDa), sedangkan di Tahun 2016 dilaksanakan Pengumpulan data-data terkait Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan di Tahun 2017 melakukan implementasi kegiatan Sistem Inovasi daerah (SIDa). Inovasi yang diusulkan di Tahun 2013 sampai dengan 2016 belum ada karena Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone nanti di tahun 2017 menjadi Laboratorium Inovasi Administrasi Negara setelah menandatangani MOU Program Kegiatan Akselerasi. Pengembangan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara dengan LAN RI. Dengan adanya penandatanganan MOU dengan LAN RI, berbagai OPD memasukkan usulan inovasinya ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten dengan jumlah usulan sebanyak 122.

#### 2.4.4.4. Pengawasan

##### 2.4.4.4.1. Persentase tindak lanjut temuan

Tabel 2.84

Jumlah Temuan Bpk-Ri Dan Tindak Lanjutnya

Data Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI beserta Tindak Lanjut Temuannya Tahun 2006-2017

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Telah Selesai Ditindak Lanjuti		% Tindak Lanjut	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai
2017	10	-	23	31.174.700,00	18	31.174.700,00	78,26%	100%
2016	9	223.447.905.068,14	30	216.041.919.432,11	18	213.160.610.266,83	60,00%	98,67%
2015	21	489.670.425,99	52	489.670.425,99	33	489.670.425,99	63,46%	100%
2014	36	1.735.280.595,00	91	1.735.280.595,00	62	1.109.095.265,00	68,13%	63,91%
2013	34	530.328.176,29	87	530.328.176,29	48	509.254.352,29	55,17%	96,03%
2012	24	64.452.865.379,77	61	2.065.688.966,00	50	1.773.509.789,65	81,97%	85,86%
2011	16	561.250.997,30	33	511.420.958,30	29	476.987.313,00	87,88%	93,27%
2010	30	952.088.450,65	100	313.914.450,65	47	313.914.450,65	47,00%	100%
2009	17	553.708.522,50	37	553.708.522,50	34	553.708.522,50	91,89%	100%
2008	39	9.612.606.800,00	66	2.475.358.600,00	59	2.310.449.398,00	89,39%	93,34%
2007	21	11.092.520,00	44	11.092.520,00	42	11.092.520,00	95,45%	100%
2006	17	2.220.503.777,48	33	1.914.616.377,48	32	1.703.776.377,48	96,97%	88,99%
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>304.567.300.713,12</b>	<b>657</b>	<b>226.674.173.724,32</b>	<b>472</b>	<b>222.443.243.373,39</b>	<b>71,84%</b>	<b>98,13%</b>

Sumber: data rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Per Desember 2017

Data yang terjadi pada table di atas, mengacu pada Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Pengelolaan Keuangan dan Asset Lingkup Pemerintah Kab. Bone selama kurung waktu Tahun 2006-2017 yang masing tersisa proses penyelesaian tindak lanjutnya.

Berdasarkan Tabel di atas , jumlah temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK – RI dari Tahun 2006-2017 sebanyak 274 Temuan dengan 657 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Nilai temuan keuangan sebesar Rp. 304.567.300.713,12 dengan Nilai yang direkomendasikan untuk ditindak lanjuti sebesar Rp. 226.674.173.724,32.

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan nilai keuangannya secara umum merupakan temuan yang terkait dengan Pertanggung Jawaban Dana Desa, Pengelolaan Asset, Sertifikasi Guru, dan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan serta Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Nilai Keuangan sesuai rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, Pertanggungjawaban dana Desa merupakan aspek temuan yang harus mendapat perhatian lebih bahkan menjadi isu strategis hingga tingkat Nasional. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa kedepannya menjadi salah satu prioritas utama dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kab. Bone tanpa mengabaikan aspek temuan lainnya, sehingga jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dapat berkurang secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya

Dari hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI hingga Tahun 2017, sesuai Tabel di atas diketahui bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut berdasarkan jumlah rekomendasi temuan sebesar 71,84 % dan persentase penyelesaian tindak lanjut

berdasarkan nilai rekomendasi temuan sebesar 98,13 %. Tersisa 185 Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut, yang terdiri dari 173 Temuan Administratif dan 12 Temuan Keuangan dengan nilai keuangan sebesar Rp. 4.230.934.221,35.

Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK-RI sebesar 71,84 % masih kurang dari target capaian kinerja sebesar 90 % hingga Tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja utama dalam RPJMD Kab. Bone Tahun 2013-2018. Hal ini disebabkan masih lemahnya komitmen Perangkat Daerah termasuk Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, sehingga kedepannya kinerja penyelesaian tindak lanjut ini akan ditingkatkan melalui pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik oleh Inspektorat Daerah maupun Tim Tindak Lanjut Kabupaten.

## **2.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDG's yang merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDG's) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterahkan masyarakat mencakup tujuh belas tujuan yaitu :



Tabel 2.85  
Capaian Target Indikator TPB/SDG's  
Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

No	Tujuan/Indikator	Capaian TPB/SDG's				OPD Penanggung Jawab
		2014	2015	2016	2017	
Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDTLH						
1	Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun					
1.1	Jumlah Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	1,2	0,7	1,5	0,2	BPBD
1.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	14.930.075.000	12.540.050.000	8.951.050.000	7.262.730.000	BPBD
2	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan					
2.1	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita	3,82	4,55	8,09	6,29	Dinas Kesehatan
3	Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk Semua					
3.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	74,23	76,96	78,92	79,39	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
3.2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	64,63	73,89	77,64	84,44	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
3.3	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	109	203	221	312	Dinas Kesehatan

4	Tujuan : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan					
4.1	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	14.930.075.000	12.540.050.000	8.951.050.000	7.262.730.000	BPBD
5	Tujuan : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya					
5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	1,2	0,7	1,5	0,20	BPBD
<b>Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDTLH</b>						
6	Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun					
6.1	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan Inklusivitas	0,16	0,17	0,18	0,18	Dinas Sosial
6.2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bermasyarakat/program keluarga harapan	9.110	8.955	19.522	19.417	Dinas Sosial
6.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	74,23	76,96	78,92	79,39	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
6.4	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	15,05	17,63	36,98	66,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.5	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan	72,90	73,76	105,3	99,86	Dinas Sosial

	utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN					
7.6	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	0,14	0,15	0,36	0,13	Dinas Sosial
7	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapaian Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertaian Bekelanjutan					
7.1	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	1,99	2,60	4,26	3,63	Dinas Kesehatan
7.2	Prevalensi anemia pada ibu hamil	30,02	33,06	19,59	33,82	Dinas Kesehatan
8	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
8.1	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	92,49	94,45	93,14	92,28	Dinas Kesehatan
8.2	Kejadian malaria per 1000 orang	0,05	0,05	0,06	0,09	Dinas Kesehatan
8.3	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	199	172	176	209	Dinas Kesehatan
8.4	Jumlah desa dengan eliminasi kusta	9	11	12	14	Dinas Kesehatan
8.5	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	-	2	3	3	Dinas Kesehatan
9	Tujuan : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan					
9.1	Proporsi kursi yang diduduki	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas

	perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah					Pemberdayaan Perempuan dan PA
10	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua					
10.1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	290	330	400	460	Dinas Pariwisata
10.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	121,39	111,08	123,50	127,80	Dinas Pariwisata
11	Tujuan : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara					
11.1	Jumlah Desa tertinggal	-	238	224	195	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Tujuan : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
12.1	Persentase keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat (DPR) dan dewan perwakilan rayat daerah (DPRD)	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
12.2	Proporsi atnak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	40.012	43.039	45.307	43.645	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### **BAB III**

## **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Terkait dengan batasan tersebut ada dua kata kunci utama yaitu hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak adalah hak daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan meliputi pungutan pajak, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Sementara kewajiban adalah kewajiban daerah untuk membelanjakan uang untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengertian tersebut, maka dalam setiap periode pemerintahan, analisis keuangan daerah penting untuk dilakukan. Keuangan daerah merupakan motor penggerak percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan fiskal pemerintah daerah meliputi aspek pendapatan daerah, aspek belanja daerah, dan aspek pembiayaan daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah dalam suatu periode tertentu, maka penting untuk menganalisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan Neraca Daerah. Dengan demikian, APBD merupakan cerminan dari analisis keuangan daerah. Untuk itu, substansi mendasar yang dibahas dalam bab ini adalah: (i) Analisis kinerja keuangan daerah lima tahun sebelumnya, (ii) Analisis kebijakan keuangan daerah masa lalu. Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kemampuan fiskal riil dalam mendanai program-program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan akan diuraikan pada bab berikutnya.

### 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi analisis kinerja pelaksanaan APBD yang mencakup analisis tentang pendapatan daerah beserta rinciannya, analisis belanja daerah beserta rinciannya, dan analisis pembiayaan daerah. Selanjutnya juga dianalisis Neraca Daerah untuk memperoleh gambaran mengenai posisi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar atau memenuhi segala kewajibannya. Analisis tentang Neraca Daerah antara lain menggunakan alat analisis rasio seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

#### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

##### 3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan baik yang bersumber dari dalam daerah sendiri, dana transfer, maupun bersumber dari pendapatan daerah lain yang sah. Semakin tinggi pendapatan daerah mengindikasikan semakin tinggi kemampuan fiskal daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 3.1  
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone,  
2013-2017 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun (Rp Juta)					Rata-rata Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>85.875</b>	<b>155.427</b>	<b>159.866</b>	<b>180.157</b>	<b>279.960</b>	<b>37,98</b>
1	Pendapatan Pajak Daerah	14.573	36.277	35.126	37.606	44.726	42,94
2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.058	15.379	15.221	11.336	12.795	(1,07)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	1.990	2.332	2.954	4.180	6.728	36,59
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.254	101.440	106.566	127.035	215.711	44,41
<b>B</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.022.607</b>	<b>1.083.625</b>	<b>1.242.614</b>	<b>1.540.621</b>	<b>1.512.634</b>	<b>10,70</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	66.548	46.907	34.897	52.115	31.407	(11,38)

No	Uraian	Tahun (Rp Juta)					
		2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dana Alokasi Umum	867.814	950.402	977.807	1.088.618	1.069.495	5,49
3	Dana Alokasi Khusus	88.244	86.316	229.910	399.888	411.732	60,27
C	<b>Lain Lain Pendaptan yang Sah</b>	<b>284.258</b>	<b>295.596</b>	<b>467.753</b>	<b>321.752</b>	<b>408.588</b>	<b>14,50</b>
1	Pendapatan Hibah				11.038		-
2	Pendaptan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya	35.530	50.762	53.872	75.918	76.881	22,80
3	Dana Penyesuaian	209.323	217.768	385.474	202.773	306.700	21,23
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	39.405	27.066	28.407	32.023	25.006	(8,89)
	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>1.392.739</b>	<b>1.534.648</b>	<b>1.870.233</b>	<b>2.04.2529</b>	<b>2.201.182</b>	<b>12,26</b>

Sumber : Perda Pertanggungjawaban APBD, DPKAD Kabupaten Bone, 2013-2017

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) sebagai periode pemerintahan sebelumnya, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bone meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 1,39 triliun menjadi Rp 2,20 triliun pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode tersebut tercatat sebesar 12,26 persen per tahun. Peningkatan pendapatan daerah setiap tahun sebagai dampak dari sejumlah kebijakan pemerintah pada aspek pendapatan yang meliputi tiga sumber pendapatan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian, peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut berimplikasi terhadap peningkatan total pendapatan daerah.

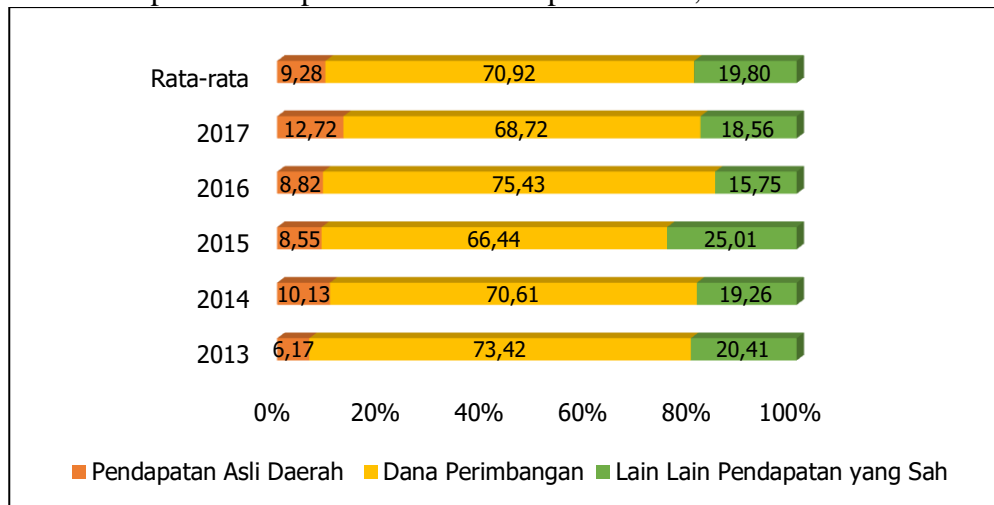
Realisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan mempunyai nilai nominal paling besar dibandingkan dengan realisasi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumbangan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah setiap tahun berfluktuasi namun nilainya

berada pada range 66,44 persen hingga 75,43 persen atau secara rata-rata 71,03 persen per tahun. Meskipun terdapat kecenderungan proporsi dana perimbangan mengalami penurunan hingga tahun 2017, namun angkanya masih jauh lebih tinggi dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Tingginya proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah menunjukkan peran pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kabupaten Bone tergolong tinggi. Hal itu berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terkait dengan sumber pendanaan pembangunan masih cukup besar.

Namun hal menarik dari adanya penurunan proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah khususnya dari 75,43 persen pada tahun 2016 menjadi 68,72 persen pada tahun 2017. Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah lainnya mengalami peningkatan yaitu PAD dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Untuk PAD, selama periode 2013-2017 sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 6,17 persen menjadi 12,72 persen pada tahun 2017. Bahkan angka 12,72 persen merupakan proporsi PAD tertinggi dan jauh melampaui angka proporsi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu berarti terdapat indikasi tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Bone secara perlahan-lahan semakin menurun, sehingga terdapat tanda-tanda tingkat kemandirian fiskal daerah dimasa mendatang. Dengan kata lain bahwa dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah Kabupaten Bone telah memperlihatkan keberhasilan upaya menggali sumber-sumber PAD. Peningkatan proporsi PAD khususnya pada tahun 2017 tidak terlepas dari sejumlah kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber PAD secara optimal. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam periode 2013-2017 sebesar 9,28 persen per tahun.



Diagram 3.1  
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2013-2018

Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah relatif lebih tinggi dibanding proporsi PAD, namun angkanya cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun. Besaran nilai lain-lain pendapatan daerah yang sah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama periode 2013-2017, rata-rata sumbangan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah 19,80 persen dan angka ini jauh diatas dari nilai sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah sehingga posisi Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap total pendapatan daerah menempati urutan kedua terbesar dan PAD menempati urutan ke tiga.

Besaran nilai nominal masing-masing sumber pendapatan daerah beserta rinciannya yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah diuraikan secara lebih detail satu per satu pada sub bab berikut ini.

- **Pendapatan Asli Daerah**

Dalam kebijakan Desentralisasi fiskal terdapat empat pilar yaitu kewenangan penerimaan, kewenangan belanja, *intergovernmental transfer*, dan pinjaman. Salah satu pilar desentralisasi fiskal yang memegang peran besar adalah kewenangan pendapatan. Ini berarti pemerintah daerah

diberikan kewenangan yang besar dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan salah satu indikator tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah yang berasal dari PAD mengindikasikan semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah yang berarti pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Oleh karena itu, dalam setiap periode pemerintahan analisis terhadap kinerja PAD perlu dilakukan.

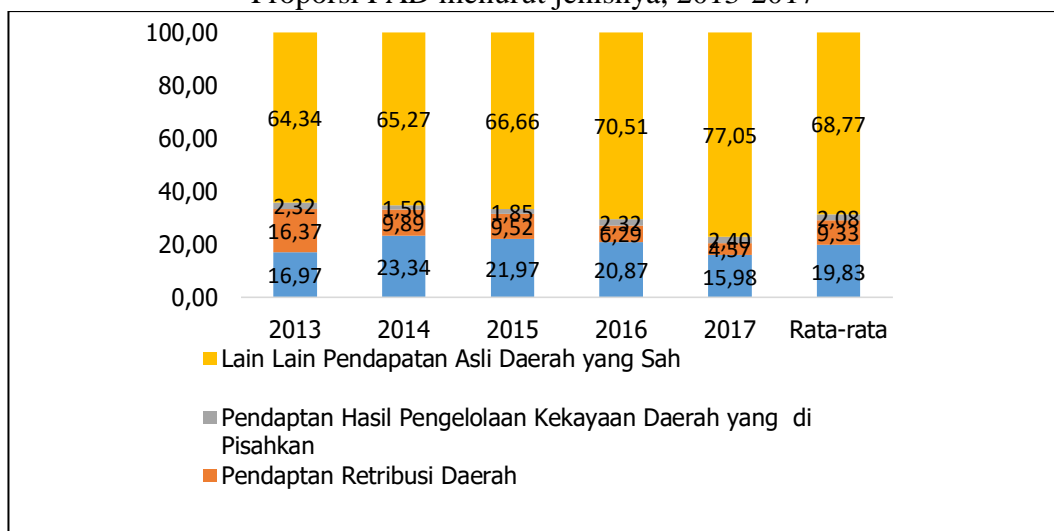
Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 terdiri atas empat komponen besar yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam UU ini juga dijelaskan tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta pengenaan tariff untuk jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD diatur sendiri oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

Hasil analisis data PAD menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2013-2017), realisasi PAD pada tahun 2013 sebesar Rp85,87 milyar meningkat signifikan setiap tahun menjadi Rp279,96 milyar pada tahun 2017. Meskipun secara nominal PAD mengalami peningkatan akan tetapi pertumbuhannya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata per tahun 37,98 persen. Lonjakan tertinggi realisasi PAD terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 55,40 persen dari tahun sebelumnya sebesar 12,69 persen pada tahun 2016. Peningkatan yang cukup tajam ini disebabkan oleh peningkatan sumber-sumber pembentuk PAD baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun dari lain-lain PAD yang sah. Yang paling besar nilai nominal dari keempat komponen PAD

tersebut adalah lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2013, secara nominal lain-lain PAD yang sah sebesar Rp55,25 milyar meningkat beberapa kali lipat menjadi Rp 215,71 milyar pada tahun 2017 atau bertumbuh dengan rata-rata 44,41 persen per tahun dalam periode 2013-2017. Sumbangan lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD secara rata-rata 68,77 persen per tahun. Namun perlu dicatat bahwa objek-objek pendapatan lain-lain PAD yang sah seringkali tidak stabil karena dapat dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah pada level yang lebih tinggi (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat).

Komponen PAD yang diharapkan mengalami pertumbuhan cukup cepat setiap tahunnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Di Kabupaten Bone, penerimaan pajak daerah menempati urutan kedua terbesar dengan nilai nominal pada tahun 2013 sebesar Rp 14,57 milyar kemudian meningkat tajam menjadi Rp 44,73 milyar pada tahun 2017 atau secara rata-rata bertumbuh 42,94 persen per tahun. Pertumbuhan yang cepat ini terutama dikontibusi pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014, akan tetapi pertumbuhan tahun-tahun berikutnya cukup lambat. Sumbangan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah menurun terus dari 16,97 persen menjadi 15,98 persen atau secara rata-rata 19,83 persen per tahun selama periode 2013-2017. Meskipun kontribusi pajak daerah cenderung menurun namun secara nominal telah mengalami peningkatan nilai. Peningkatan penerimaan pajak daerah yang cukup tajam adalah seiring dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Bone dan sekaligus sebagai wujud dari kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone. Adanya peningkatan yang terjadi pada tahun-tahun terakhir memberikan sinyal positif dimasa yang akan datang.

Diagram 3.2  
Proporsi PAD menurut jenisnya, 2013-2017



Sumber: Perda APBD Pertanggungjawaban Kabupaten Bone, 2013-2018

Selanjutnya, penerimaan retribusi daerah selama periode 2013-2017 relatif stabil dari kisaran antara Rp 11,34 milyar dan Rp 15,38milyar. Pendapatan retribusi terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 15,38 milyar namun kinerja ini tidak dapat dipertahankan sehingga pada tahun 2017 hanya memperoleh nilai sebesar Rp 12,79 milyar. Realisasi retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang cukup tidak stabil sehingga secara rata-rata pertumbuhannya mencapai angka negative 1,07 persen per tahun. Penurunan nilai nominal untuk retribusi daerah turut mempengaruhi sharenya terhadap total PAD. Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 16,37 persen selanjutnya setiap tahun menurun hingga mencapai 4,57 persen pada tahun 2017. Penurunan nilai dan sumbangan retribusi daerah di Kabupaten Bone dapat disebabkan oleh banyak faktor sehingga kedepan perlu mendapat perhatian penuh. Komponen PAD yang lain adalah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan daerah nampaknya masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya akan tetapi pada tahun 2017, pendapatan hasil pengelolaan daerah mengalami peningkatan dari Rp 1,99 milyar menjadi Rp 6,73milyar atau bertumbuh secara rata-rata 36,59 persen per tahun.

- **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat menjadikan sumber penerimaan bagi pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas tiga jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus untuk Aceh dan Papua.

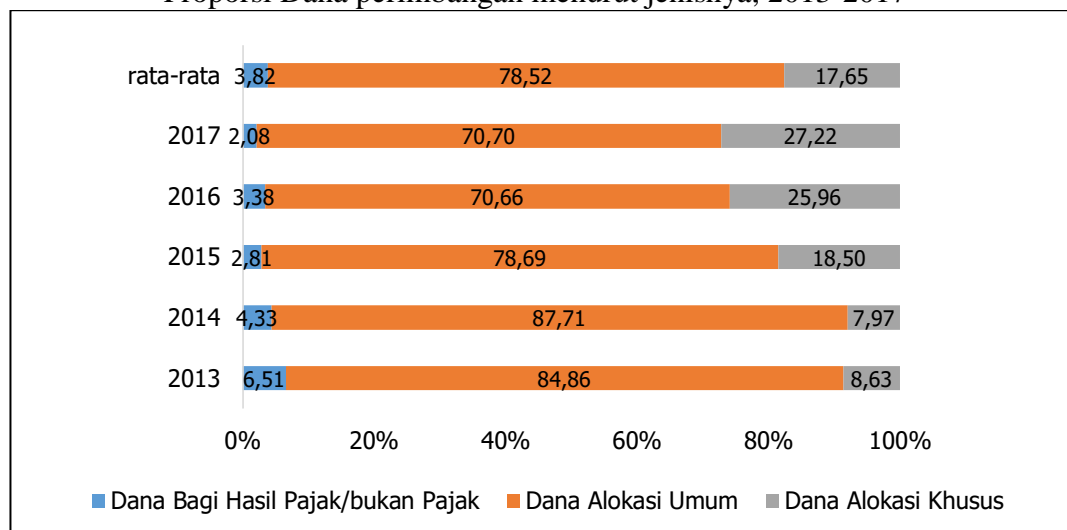
Posisi dana perimbangan pemerintah Kabupaten Bone menempati urutan tertinggi dalam struktur pendapatan daerah. Berdasarkan tiga jenis dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi penyumbang terbesar terdapa total dana perimbangan. Pada tahun 2013, nilai nominal DAU sebesar Rp 867,81milyar dan meningkat menjadi Rp1,07 triliun pada tahun 2017, atau bertumbuh dengan rata-rata 5,49 persen per tahun.

Meskipun secara nominal pendapatan dari DAU mengalami peningkatan tetapi proporsinya terhadap total dana perimbangan mengalami penurunan setiap tahun dari 84,86 persen menjadi 70,70 persen. Selama periode 2013-2017, rata-rata sumbangan DAU terhadap total dana perimbangan sebesar 78,52 persen dan rata-rata sumbangannya terhadap total pendapatan daerah rata-rata 55,80 persen. Peruntukan DAU sebagian besar untuk membelanjai belanja pegawai sehingga penurunan nilai DAU menandakan semakin kecil porsi DAU yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan.

Penurunan sumbangan DAU berarti terdapat sumbangan jenis-jenis transfer lainnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat secara spesifik diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan prioritas nasional. Pada tahun 2013, pendapatan dari DAK Rp 88,24 milyar meningkat tajam hingga tahun 2017 mencapai Rp 411,73 milyar atau bertumbuh 60,27 persen rata-rata per tahun. Peningkatan nilai nominal DAK yang cukup signifikan menjelaskan bahwa peran DAK terhadap pendapatan semakin besar pula. Hal ini dapat

dilihat dari proporsi DAK setiap tahun meningkat dari 8,63 persen pada tahun 2013 menjadi Rp 27,22 persen pada tahun 2017. Peningkatan pendapatan DAK berdampak positif terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Bone. Pada saat yang sama, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone sebesar Rp 66,55milyar dan cenderung berkurang menjadi Rp 31,41milyar pada tahun 2017. Penyebab penurunan nilai bagi hasil disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perubahan kebijakan pemerintah pusat terutama pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB ke pemerintah kabupaten.

Diagram 3.3  
Proporsi Dana perimbangan menurut jenisnya, 2013-2017



Sumber : Perda APBD Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2013-2018

- **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Perkembangan pendapatan yang diperoleh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp 284,26milyar menjadi Rp 408,59milyar. Dari lima sumber pendapatan untuk lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus merupakan penyumbang terbesar dengan rata-rata 73,56 persen per tahun. Kemudian disusul oleh pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 16,72 persen per setiap tahun dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan

pemerintah daerah lainnya rata-rata 9,03 persen. Meskipun nilainya masih relatif kecil namun masih mempunyai peluang untuk berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD.

#### **3.1.1.2. Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut Permendagri 13 tahun 2006 terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Besarnya total belanja daerah turut dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan sumber-sumber pendapatan daerahnya baik dari PAD, Dana Perimbangan, dan maupun dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Seiring dengan peningkatan total pendapatan daerah Kabupaten Bone, maka perkembangan realisasi belanja daerah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, total belanja daerah sebesar Rp 1,37 triliun dan kemudian meningkat mendekati dua kali lipat menjadi Rp 2,24 triliun pada tahun 2017. Tingkat pertumbuhan per tahun cukup fluktuatif namun secara rata-rata 13,32 persen. Pertumbuhan belanja daerah jauh lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan daerah. Hal ini berarti pemerintah Kabupaten Bone cukup akseleratif untuk menggerakkan pembangunan.

Dari total belanja pemerintah daerah, realisasi belanja terbesar adalah belanja tidak langsung. Pada tahun 2013, realisasi nilai belanja tidak langsung sebesar Rp 873,43 milyar meningkat setiap tahun menjadi Rp 1,32 triliun. Selama periode 2013-2017, realisasi belanja tidak langsung bertumbuh dengan rata-rata 11,17 persen per tahun. Realisasi belanja tidak langsung menurut jenis belanja, terbesar adalah belanja pegawai. Perkembangan realisasi belanja pegawai meningkat setiap tahun dalam kurung waktu 2013-2017 dengan rata-rata 2,87 persen. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung rata-rata mencapai 77,80 persen per tahun dan proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah rata-rata 49,42 persen per tahun. Meskipun proporsi belanja pegawai masih relatif besar namun pergerakan setiap tahun cenderung menurun. Pada tahun 2013, proporsi belanja pegawai terhadap belanja

tidak langsung 88,89 persen menurun drastic menjadi 65,24 persen pada tahun 2017 atau dari 56,82 persen terhadap total belanja menurun menjadi 38,51 persen terhadap total belanja pada tahun 2017. Penurunan proporsi belanja pegawai mengindikasikan bahwa ada perubahan kebijakan pemerintah daerah untuk menambah proporsi jenis belanja lainnya seperti belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Tabel 3.2  
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bone, 2013-2017

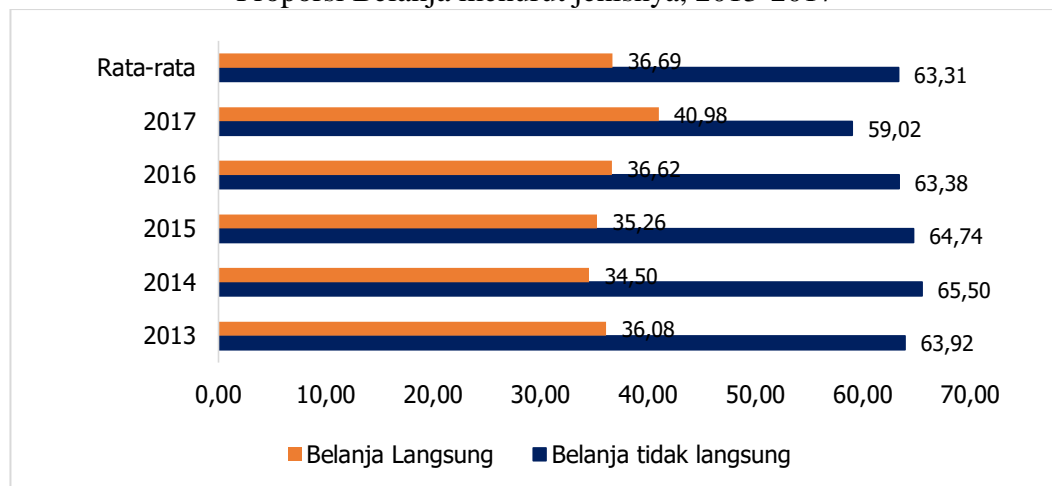
No	Jenis Belanja Daerah	Tahun (Rp juta)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>873.430</b>	<b>974.021</b>	<b>1.192.435</b>	<b>1.296.195</b>	<b>1.322.409</b>	<b>11,16</b>
1.1	Belanja Pegawai	776.378	863.435	894.671	922.893	862.728	2,87
1.2	Belanja Bunga	1.942	1.601	1.265	929	590	(25,39)
1.3	Belanja Subsidi	28.917	31.909	28.631	7.298		(43,61)
1.4	Belanja Hibah	15.638	6.483	2.158	11.263	33.521	122,85
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.054	3.350	50.960	35.109	49.762	373,99
1.6	Belanja bagi Hasil Kepada Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	1.743	1.754				(19,86)
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	46.177	65.492	214.508	317.969	375.795	83,94
1.8	Belanja Tidak Terduga	581		242	734	13	2.378,78
2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>493.021</b>	<b>512.976</b>	<b>649.340</b>	<b>748.917</b>	<b>918.022</b>	<b>17,14</b>
2.1	Belanja Pegawai	15.739					-
2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.812	303.397	345.143	418.173	525.319	20,99
2.3	Belanja Modal	231.470	209.579	304.198	330.744	392.703	15,79
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.366.451</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.841.775</b>	<b>2.045.112</b>	<b>2.240.431</b>	<b>13,32</b>

Sumber: Perda APBD Pertanggungjawaban Kabupaten Bone, 2013-2018



Perkembangan belanja langsung juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dari Rp 493,02 milyar meningkat dua kali lipat menjadi Rp 918,02 milyar pada tahun 2017. Tingkat pertumbuhan belanja langsung rata-rata 17,14 persen per tahun selama 2013-2017. Angka pertumbuhan ini lebih cepat dari pertumbuhan belanja tidak langsung. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bone telah memberikan prioritas yang lebih tinggi untuk pengalokasian belanja langsung. Namun berdasarkan komponen belanja langsung, tergambar realisasi belanja barang dan jasa masih mendominasi struktur belanja langsung. Nilai realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan setiap tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 20,99 persen. Pada periode yang sama, realisasi belanja modal juga memperlihatkan peningkatan akan tetapi nilai nominal dan tingkat pertumbuhannya relatif lebih lambat dari belanja barang dan jasa.

Diagram 3.4  
Proporsi Belanja menurut jenisnya, 2013-2017



Sumber : Perda APBD Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2013-2018

Dengan membandingkan proporsi alokasi belanja daerah di Kabupaten Bone, disimpulkan bahwa proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja jauh lebih besar daripada proporsi belanja langsung pada periode 2013-2017. Jika rata-rata proporsi belanja tidak langsung rata-rata 63,31 persen, maka selebihnya 36,69 persen untuk belanja langsung. Akan tetapi dalam perkembangan setiap tahun terdapat

pergeseran proporsi dari belanja tidak langsung ke belanja langsung meskipun dengan nilai yang relatif kecil.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas atau pemerintah daerah pada tanggal tertentu pada tanggal pelaporan yang biasanya menggunakan tanggal 31 Desember tahun bersangkutan. Informasi yang tercantum pada neraca berisi besarnya nilai dan komponen yang termasuk dalam asset (asset lancar, asset tetap dan asset lainnya), kewajiban (kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang); dan nilai ekuitas.

Tabel 3.3  
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bone, 2014-2017

Uraian	2014 (Rp juta)	2015 (Rp juta)	2016 (Rp juta)	2017 (Rp juta)	Rata Rata Pertumb uhan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas di Kas Daerah	127.442	123.874	46,868	8,941	-48.63
Kas di Bendahara Pengeluaran	724	156	271	65	-26.92
Kas di Bendahara Penerimaan	-	1	24	118	
Kas dibadan Layanan Umum Daerah	5.276	5.707	5,752	4,304	-5.41
Kas Dana JKN	3.808	4.926	8,025	4,932	17.91
Kas Bendahara BOS		830	1,277	2,749	
Kas Lainnya	-	25.000	30,000	28,254	
Setara Kas				-	
Investasi Jangka Pendek	-	-	30,000	10,000	
Piutang	-	-	-	-	
Piutang Pajak	5.650	3.884	8,145	9,284	30.81
Penyisihan Piutang Pajak		(414)	(23,956)	(3,021)	
Piutang Retribusi	6.035	10.894	5,085	7,852	27.20
Penyisihan Piutang Retribusi		(29)	(2,447)	(91)	
Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	
Piutang Lainnya	-	-	-	638	
Penyisihan Piutang	(282)		-	-	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	89	32.889	34,430	34,682	12286.45
Bagian Lancar TGR		329	127	127	
Persediaan	12.170	13.332	12,827	14,352	5.88
Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-	
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>160.915</b>	<b>221.384</b>	<b>180,388</b>	<b>123,189</b>	<b>-4.22</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
<b>Investasi Non permanen</b>	-	-	-	-	

Uraian	2014 (Rp juta)	2015 (Rp juta)	2016 (Rp juta)	2017 (Rp juta)	Rata Rata Pertumb uhan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Investasi NP-Dana Bergulir	-	-	-	-	-
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-
Investasi Permanen	-	-	-	-	-
Penyerahan Modal Pemerintahan Daerah	20.436	20.307	30,109	32,078	18.06
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>20.436</b>	<b>20.307</b>	<b>30,109</b>	<b>32,078</b>	<b>18.06</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>20.436</b>	<b>20.307</b>	<b>30,109</b>	<b>32,078</b>	<b>18.06</b>
<b>ASET TETAP</b>	-	-	-	-	-
Tanah	174.883	243.840	618.565	609.730	63,89
Peralatan dan Mesin	250.989	308.948	360.526	396.561	16,59
Gedung dan Bangunan	829.844	981.680	1.055.033	942.561	5,04
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.288.571	1.416.432	1.703.774	1.710.769	10,21
Aset Tetap Lainnya	47.229	55.733	43.439	50.904	4,38
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.939	44.410	954	21.324	760,20
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	(1.654.443)	(1.706.518)	(1.625.179)	-
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.604.458</b>	<b>1.396.603</b>	<b>2.075.774</b>	<b>2.106.672</b>	<b>1,25</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	15.003	30.000	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.003</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	-	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	41.369	8.850	6.838	6.354	-36,14
Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	1.915	2.090	2.084	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	1.447	1.447	-
Aset Tak Berwujud	-	467	973	1.095	-
Aset Lain Lain	3.072	16.382	14.630	265.542	712,54
Akumulasi Amortasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>44.442</b>	<b>27.615</b>	<b>25.979</b>	<b>276.524</b>	<b>306,88</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.830.252</b>	<b>1.665.912</b>	<b>2.327.256</b>	<b>2.568.465</b>	<b>2,97</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	-	-	-	-	-
<b>KEWAJIBAN Jk PENDEK</b>	-	-	-	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	577	128	195	5	-40,97
Utang Bunga	628	481	321	160	-35,61
Utang Pajak	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	2.889	2.889	2.889	2.889	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	-	2.902.778	116	149	-
Utang Belanja	24.104	26.496	43.196	21.061	7,24
Utang Jangka Pendek Lainnya	17.800	2.296	2.139	3.634	-8,02
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>45.999</b>	<b>32.295</b>	<b>48.859</b>	<b>27.900</b>	<b>-7,13</b>

Uraian	2014 (Rp juta)	2015 (Rp juta)	2016 (Rp juta)	2017 (Rp juta)	Rata Rata Pertumb uhan
1	2	3	4	5	6
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang Negri Sektor Perbankan	8.667		2.889	-	-
Utang Dalam Negeri Pemerintahan Pusat	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri Obligasi	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	5.778	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jk Panjang</b>	<b>8.667</b>	<b>5.778</b>	<b>2.889</b>	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>54.667</b>	<b>38.074</b>	<b>51.748</b>	27.900	-13,51
<b>EKUITAS</b>					
EKUITAS	2.775.585	1.627.837	2.275.507	2.540.564	3,36
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>2.775.585</b>	<b>1.627.837</b>	<b>2.275.507</b>	<b>2.540.564</b>	<b>3,36</b>

Sumber : DPKAD Kabupaten Bone, 2018

Asset/aktiva pemerintah daerah Kabupaten Bone selama periode 2014 sampai 2017 menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, walaupun dengan prosentase yang tidak terlalu tinggi. Angka asset tahun 2014 terlihat lebih tinggi dari tahun setelahnya hanya disebabkan karena pada tahun tersebut nilai asset tersebut belum diperkurangkan dengan akumulasi penyusutan asset tetapnya. Pada sisi lain terlihat bahwa nilai kewajiban/hutang cenderung mengalami penurunan dari Rp 54,67 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp 27,90 milyar pada tahun 2017, namun untuk ekuitas milik pemerintah Kabupaten Bone menunjukkan kecenderungan yang meningkat pula dari Rp 1,63 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp 2,54 milyar atau bertumbuh rata-rata 3,36 persen per tahun.

Analisis neraca bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam hal: a) memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau yang segera jatuh tempo dengan menggunakan asset lancarnya (analisis likuiditas); b) memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan modal atau keseluruhan asset yang dimilikinya (analisis solvabilitas); dan c) seberapa baik pengelolaan piutang dan persediaannya (analisis aktivitas). Rasio likuiditas terdiri atas rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas. Rasio solvabilitas terdiri atas rasio total utang/kewajiban terhadap total modal dan rasio total utang terhadap total asset. Rasio aktivitas terdiri atas rasio rata-rata

umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

Rasio lancar dihitung dengan membagi total aktiva lancar dengan total hutang lancar, rasio cepat dihitung dengan membagi aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar dan rasio kas dihitung dengan membagi nilai kas dan setara kas dengan aktiva lancar. Rasio solvabilitas yang diukur dengan melihat rasio total hutang terhadap total modal dimana dapat dihitung dengan membagi antara total hutang dengan modal dan rasio total hutang terhadap asset dihitung dengan membagi antara total hutang dengan total aktiva. Rata-rata umur piutang dihitung dengan membagi jumlah hari dalam setahun dengan tingkat perputaran piutang demikian pula untuk rata-rata umur persediaan dihitung dengan membagi angka hari dalam setahun dengan rata-rata perputaran persediaan.

Tabel 3.4  
Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas Periode 2014-2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Likuiditas				
	- Rasio Lancar	3,5	6,8	3,7	4,4
	- Rasio Cepat	3,2	6,4	3,4	3,9
	- Rasio Kas	2,9	4,9	1,8	1,7
2	Rasio Solvabilitas				
	- Rasio total utang terhadap modal	0,019	0,023	0,227	0,018
	- Rasio total utang terhadap asset	0,019	0,022	0,022	0,01
3	Rasio Aktivitas				
	- Rata-rata umur piutang	2,7	5,8	8,1	7,6
	- Rata-rata umur persediaan	hari	hari	hari	hari

Sumber: DPKAD Kabupaten Bone, 2018

Dari data yang tersedia, tampak bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Bone dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat baik dan cenderung meningkat namun dengan peningkatan yang berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio likuiditas yang diperoleh yaitu di atas angka 1(satu) kali atau 100 persen. Rasio yang ideal untuk rasio lancar ada pada kisaran angka 2 kali (200%) saja, untuk rasio cepat pada kisaran angka 1 kali (100%) dan rasio kas pada kisaran angka setengah (50%). Angka yang melebihi angka ideal tersebut pada sisi likuiditas baik, namun pada sisi yang lain menunjukkan ada kelemahan pada manajemen keuangan, khususnya

yang terkait dengan pemanfaatan dana karena juga mengindikasikan semakin tinggi dana yang menganggur semakin tidak baik namun apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih baik pula.

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya termasuk seluruh kewajibannya juga dikategorikan sangat baik. Hal ini terlihat dari angka rasio solvabilitas yang diperoleh yaitu lebih kecil dari satu kali (100%), bahkan sangat kecil karena angkanya hanya dikisaran 1% sampai 2% saja. Akan tetapi kalau angkanya sangat kecil juga menunjukkan kelemahan karena pemerintah Kabupaten Bone terindikasi belum berani memanfaatkan pendanaan dari pinjaman jangka panjang dalam jumlah dana yang relatif besar untuk menopang aktivitas yang mungkin cukup strategis. Penggunaan modal pinjaman pada dasarnya juga penting karena dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan akselerasi pembangunan asal didukung oleh kemampuan mengelola modal pinjaman tersebut dengan baik pula.

Kemampuan pemerintah Bone dalam mengelola piutang dan persediaannya tampak cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio aktivitas. Angka hari yang dibutuhkan untuk mengkonversi piutang menjadi kas berada pada kisaran 2,7 hari sampai 8 hari dari periode 2014 sampai 2017. Kondisi ini menunjukkan kemampuan pengelolaan piutang dan persediaan pemerintah daerah Kabupaten Bone cukup baik karena masih dibawah dari 1 bulan. Akan tetapi angka hari yang cenderung meningkat justru menunjukkan kemampuan pengelolaan piutang dan persediaan semakin menurun, karena kemampuan mengkonversi piutang dan persediaan menjadi kas semakin lama atau jumlah harinya semakin meningkat.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kebijakan keuangan daerah masa lalu hanya berfokus pada kebijakan belanja terkait dengan pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah kebijakan pada aspek pembiayaan pembangunan. Pada dasarnya analisis kebijakan keuangan masa lalu

mencakup analisis keuangan pada aspek pendapatan, aspek belanja daerah, dan aspek pembiayaan pembangunan. Karena analisis keuangan daerah masa lalu dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan-kebijakan keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada periode sebelumnya meliputi kebijakan aspek pendapatan, kebijakan keuangan pada aspek belanja, dan kebijakan keuangan pada aspek pembiayaan daerah. Pada aspek pendapatan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah terutama kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Kebijakan aspek belanja daerah yaitu kebijakan pemerintah daerah terkait dengan proporsi alokasi belanja daerah untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah. Kebijakan pada aspek pembiayaan daerah yaitu kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan penggunaan surplus atau kebijakan sumber-sumber pembiayaan untuk anggaran defisit.

Atas dasar itu, maka pada sub bab ini, analisis kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya, analisis belanja daerah fokus pada proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, dan analisis pembiayaan pembangunan terkait dengan analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, komponen SiLPA, dan komponen penutup defisit anggaran.

### **3.2.1. Analisis Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya meliputi kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah, kebijakan yang terkait dengan dana perimbangan, dan kebijakan terkait dengan Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah. Secara umum analisis Kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya antara lain kebijakan terkait dengan upaya peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, dan kebijakan terkait dengan dana perimbangan, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

#### **3.2.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Berdasarkan analisis perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Bone diperoleh gambaran bahwa proporsi belanja tidak langsung diatas dari 60 persen dari total belanja daerah, selebihnya adalah proporsi belanja langsung. Realisasi ini memberikan makna secara implisit bahwa arah kebijakan keuangan daerah khususnya pada aspek belanja daerah pada periode sebelumnya masih terkonsentrasi pada kepentingan belanja tidak langsung termasuk didalamnya belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung rata-rata mendekati 80 persen (77,80 persen) dan terhadap total belanja daerah sekitar 49,42 persen.

Secara keseluruhan, perkembangan total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah Kabupaten Bone mengalami peningkatan cukup tajam dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp 885,963 milyar setiap tahun menjadi Rp 1,46 trilyun pada tahun 2017. Meskipun tingkat pertumbuhan per tahun berfluktuasi namun secara rata-rata selama periode 2013-2017 bertumbuh 14,37 persen per tahun.

Secara garis besarnya, alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dianalisis kedalam dua jenis yaitu alokasi belanja untuk kebutuhan aparatur pemerintah daerah yang tergolong pada belanja tidak langsung dan alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada golongan belanja langsung. Hasil analisis data menunjukkan bahwa alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di belanja tidak langsung mendekati dua kali lipat dari belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di belanja langsung.

Belanja tidak langsung untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat dari Rp 601,00 milyar menjadi Rp 859,44 milyar pada tahun 2017. Rincian secara detail, jenis belanja yang terbesar untuk dibelanja tidak langsung adalah belanja gaji dan tunjangan. Proporsi belanja gaji dan



tunjangan terhadap total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja tidak langsung sekitar 61,99 persen rata-rata per tahun meskipun demikian, terdapat perubahan kebijakan penggunaan anggaran dimana pada beberapa tahun terakhir proporsi belanja gaji dan tunjangan mengalami penurunan dari 99 persen terhadap total belanja tidak langsung pemenuhan kebutuhan aparat menjadi 71,72 persen pada tahun 2017.

Pada periode yang sama, penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja langsung secara nominal juga memperlihatkan peningkatan dari Rp 284,97 milyar menjadi Rp 595,92 milyar atau meningkat sebesar Rp 310,95 milyar atau rata-rata 21,62 persen selama periode RPJMD tahun sebelumnya. Jenis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk di belanja langsung antara lain belanja honorarium PNS, belanja uang lembur, belanja kursus, pelatihan, belanja premi asuransi, dan belanja pakaian khusus hari raya tertentu, dan belanja perjalanan dinas, dan beberapa lainnya. Dari seluruh jenis belanja tersebut, belanja modal seperti perlengkapan kebutuhan kantor, mobil dinas, peralatan, dll menempati porsi terbesar dalam penggunaan anggaran dan meningkat tajam dari Rp 231,47 milyar menjadi Rp 392,70 milyar. Selanjutnya belanja perjalanan dinas menempati urutan kedua terbesar porsi penggunaan anggaran dengan nilai nominal Rp 27,42 milyar dan meningkat tiap tahun hingga mencapai Rp 68,52 milyar pada tahun 2017.

Tabel 3.5  
Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone, 2013-2017

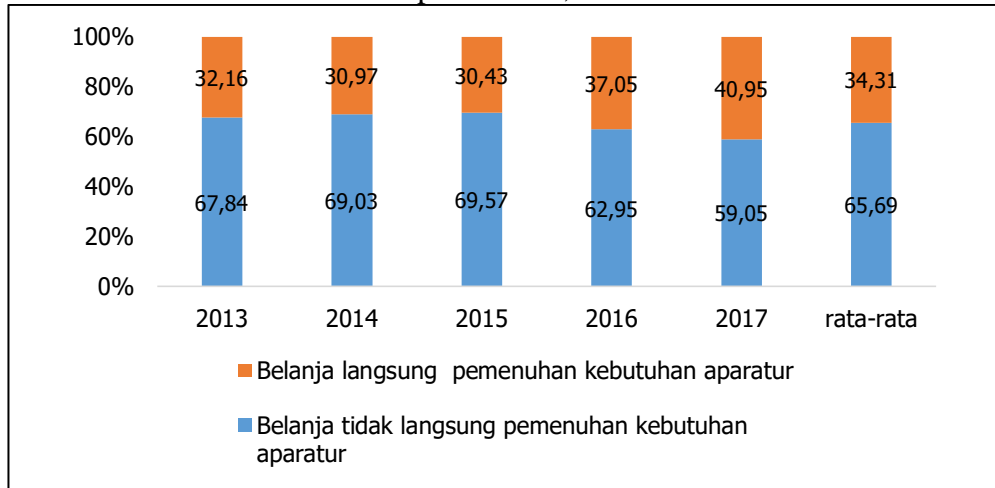
NO	URAIAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>600.997</b>	<b>623.330</b>	<b>891.874</b>	<b>920.024</b>	<b>859.442</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	595.460	618.695	664.535	702.059	616.414
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	1.384	1.466	224.230	214.925	235.565
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.559	2.638	2.667	2.667	7.145
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah**)	1.594	531	442	373	318
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>284.966</b>	<b>279.697</b>	<b>390.166</b>	<b>541.512</b>	<b>595.919</b>

NO	URAIAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Belanja Honorarium PNS**)	10.549	14.327	18.675	17.988	32.741
2	Belanja Uang Lembur**)	250	263	480	566	938
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	50	-	-
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS**)	2.016	2.043	3.896	4.391	3.354
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	369	728	31	50.694	65.046
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai***)	12.688	15.963	20.088	24.491	31.202
7	Belanja Pakaian dan Minuman Pegawai***)	149	390	231	202	765
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	57	1.739	271	223	651
9	Belanja Perjalanan Dinas**)	27.419	34.665	42.247	50.254	68.519
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, mobil dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll)	231.469	209.579	304.197	392.703	392.703
<b>TOTAL</b>		<b>885.963</b>	<b>903.027</b>	<b>1.282.040</b>	<b>1.461.536</b>	<b>1.455.361</b>

Sumber : Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2013-2018

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja tidak langsung terhadap total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir, namun secara rata-rata masih memperlihatkan proporsi cukup besar yaitu 65,69 persen. Hal ini berarti sekitar 65,69 persen. Sementara rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja langsung 34,31 persen dan cenderung mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.

Diagram 3.5  
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur menurut Jenis belanja,  
Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Perda APBD Pertanggungjawaban Kabupaten Bone, 2013-2018

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan belanja pemerintah daerah pada periode sebelumnya menempatkan penggunaan porsi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur rata-rata 66,31 persen terhadap total belanja daerah Kabupaten Bone. Dari dua jenis belanja, sebesar 43,53 persen dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja tidak langsung dan 22,78 persen pada belanja langsung.

Pada periode yang sama, proporsi alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah yakni penjumlahan total belanja daerah dengan pembiayaan pengeluaran berada pada range antara 50 persen sampai dengan 68,38 persen selama periode 2013-2017. Selama periode tersebut, proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran mengalami penurunan setiap tahun dari 68,38 persen pada tahun 2014 menjadi 50,03 persen pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Bone melakukan kebijakan yang dapat menghemat alokasi belanja untuk kepentingan aparatur pemerintah.

Meskipun proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah meningkat, namun jika dibandingkan terhadap total

pengeluaran daerah termasuk pengeluaran pembiayaan justru mengalami penurunan setiap tahun dari 61,39 persen pada tahun 2013 menjadi 42,75 persen pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan kebijakan yang menggeser proporsi belanja untuk kepentingan aparatur pemerintah ke jenis belanja lainnya.

Tabel 3.6  
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun 2013	885.963	1.370.418	61,39
2	Tahun 2014	903.027	1.492.467	61,92
3	Tahun 2015	1.282.040	1.847.371	52,17
4	Tahun 2016	1.461.536	2.081.764	48,35
5	Tahun 2017	1.455.361	2.263.676	42,75

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2013-2018

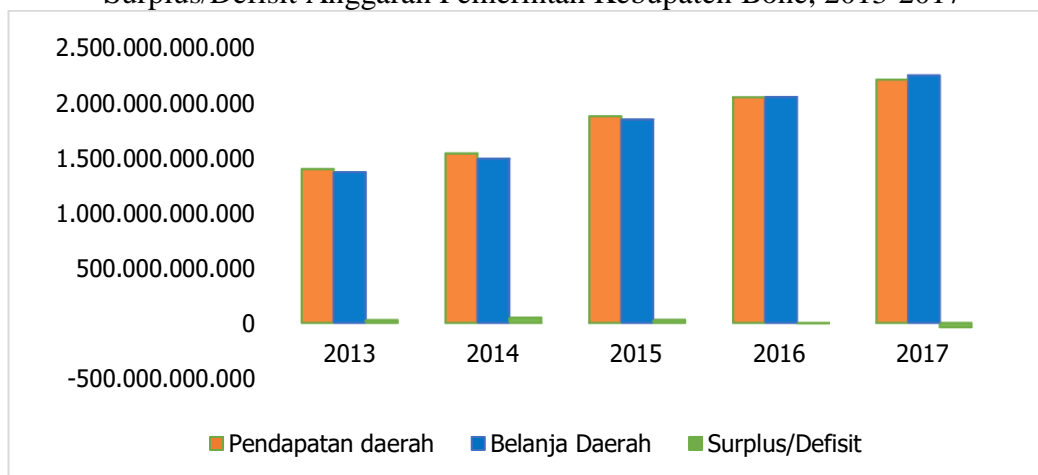
### 3.2.3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan pembangunan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pemanfaatan anggaran bilamana pemerintah daerah mengalami surplus anggaran dan komponen-komponen penutup defisit. Terkait dengan itu, maka sub bab ini diuraikan perkembangan realisasi pembiayaan daerah meliputi pembiayaan pengeluaran dan pembiayaan penerimaan. Sebelum menganalisis lebih jauh tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan maka yang pertama dianalisis adalah perkembangan surplus/defisit anggaran dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya analisis deficit riil dan komposit pembentukan defisit sebagai wujud dari kebijakan pemerintah pada tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan data realisasi APBD pemerintah Kabupaten Bone tercatat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bone menempuh kebijakan anggaran surplus dalam tiga tahun pertama periode 2013-2015, selanjutnya dua tahun berikutnya 2016 sampai 2017 pemerintah daerah menempuh kebijakan defisit anggaran. Bahkan defisit yang terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp

39,25milyar meningkat drastis dari Rp 2,58 milyar pada tahun 2016. Peningkatan angka defisit ini menandakan bahwa realisasi belanja daerah jauh lebih cepat daripada realisasi pendapatan daerah.

Diagram 3.5  
Surplus/Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2013-2018

Defisit yang terjadi dalam dua tahun terakhir semakin bertambah jumlahnya disebabkan oleh adanya pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dalam dua tahun terakhir mengalami lonjakan dari Rp 5,60 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp 36,65 milyar pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi Rp 23,25 milyar. Meskipun angka pada tahun 2017 menurun dari tahun 2016 namun masih jauh lebih tinggi dari tiga tahun sebelumnya. Peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut terutama penyertaan modal pemerintah, pengembalian dana bos, serta pemberian pinjaman daerah. Dengan demikian defisit riil pada dua tahun terakhir menjadi Rp 39,25 milyar dan Rp 62,49 milyar.

Tabel 3.7  
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan daerah	1.392.739	1.534.648	1.870.233	2.042.529	2.201.182
Dikurangi:					
Belanja Daerah	1.366.451	1.487.000	1.841.775	2.045.112	2.240.431
Pengeluaran Pembiayaan	3.968	5.468	5.596	36.652	23.246
Surplus/Defisit riil	22.320	42.180	22.862	-39.235	-62.495

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone series 2013-2018

Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, pemerintah daerah Kabupaten Bone mengalami surplus riil. Surplus tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada daerah lainnya, pembayaran pokok utang, dan beberapa lainnya. Sementara untuk defisit riil dapat ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA), memperoleh pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Tabel 3.8  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone,  
2013-2017 (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	71.794	94.159	136.675	159.387	121.203
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
Penerimaan Piutang Daerah	45	336		570	581
Penerimaan Pembayaran ASKES					
Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga					
Penerimaan Piutang Pihak Ketiga					

Sumber : Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2013-2017

Terdapat 9 (sembilan) komponen penutup defisit riil, dua diantaranya ditetapkan oleh pemerintah sebagai penutup defisit riil yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan SiLPA setiap tahun anggaran mengalami peningkatan dari Rp 71,79 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp 121,20 milyar pada tahun 2017 atau bertumbuh secara rata-rata 17,24 persen. Sementara penerimaan piutang daerah sebesar Rp 45 juta meningkat Rp 581 juta pada tahun 2017.

Tabel 3.9  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone, 2015-2017

Uraian	Proporsi terhadap total defisit riil		
	2015	2016	2017
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)		406,24	193,94
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman Daerah			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
Penerimaan Piutang Daerah		1,45	0,93
Penerimaan Pembayaran ASKES			
Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga			
Penerimaan Piutang Pihak Ketiga			

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone series 2015-2017

Proporsi pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya terhadap defisit riil pada tahun 2016 mencapai 406,24 persen dan 1,45 persen dari penerimaan piutang daerah. Pada tahun 2017, penutup defisit riil dari SiLPA sebesar 193,94 persen dan 0,93 persen dari penerimaan kembali piutang daerah. Ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk menutup defisit masih mengandalkan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sementara masih banyak komponen lainnya yang dapat menjadi alternative sumber penutup defisit namun belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone seperti pinjaman daerah, pencairan dana cadangan, dan beberapa yang lainnya.

Tabel 3.10  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2013-2017

No	URAIAN	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	94.159		136.675		159.537		120.722		59.295	
2	Pelampauan penerimaan PAD			6.222	5	3.444	2	2.823	2	13.305	22
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan			9.488	7		-		-		-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.112	5		0		-	3.787	3		-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	99.932	106	134.565	98	178.246	112	139.654	116	95.569	161
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun tahun belum terselesaikan	38.128	40	54.660	40	38.074	24	51.749	43	27.901	47
7	Kegiatan lanjutan	2.758	3	3.785	3	15.376	10	2.803	2	21.107	36

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2014-2018



Perkembangan SiLPA dalam lima tahun terakhir cukup berfluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2017. Dari seluruh komponen pembentuk SiLPA, yang paling besar proporsinya adalah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada tahun 2013, proporsi sisa penghematan terhadap SiLPA 106 persen meningkat setiap tahun menjadi 161 persen pada tahun 2017. Peningkatan proporsi sisa penghematan belanja menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bone telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Untuk pelampuan penerimaan PAD berfluktuasi dan tertingga terjadi pada tahun 2017 sebesar 22 persen dari SiLPA. Urutan kedua terbesar pembentuk SiLPA adalah kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun berjalan yang belum terselesaikan. Sepanjang periode 2013-2017, proporsi kewajiban pihak ketiga terhadap SiLPA berkisar 40 persen dan pada tahun 2017 mencapai 47 persen. Demikian halnya dengan kegiatan lanjutan berkontribusi terhadap SiLPA sebesar 36 persen meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sekitar 2 persen.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Bone selama 5 (lima) tahun ke depan (2019-2023). Untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka terlebih dahulu akan dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah beserta rinciannya, belanja daerah baik langsung maupun tidak langsung beserta rinciannya, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta proyeksi asumsi makro ekonomi daerah.

#### **3.3.1. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah**

Secara umum, terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi penetapan target tingkat pertumbuhan pendapatan daerah termasuk pemerintah daerah di Kabupaten Bone yaitu: (1) Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Bone; (ii) Kebijakan di bidang Keuangan Negara; (iii) intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; dan (iv) rata-rata

pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah. Sebelum analisis proyeksi pendapatan daerah, maka yang pertama dilakukan adalah analisis beberapa target asumsi makro ekonomi yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi, (3) pengangguran, dan (4) kemiskinan.

Pada periode 2013-2017, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone berfluktuasi dan terendah sebesar 6,30 persen pada tahun 2013 dan tertinggi sebesar 9,53 persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 8,43 persen. Meskipun kinerja pertumbuhan ekonomi berfluktuasi namun dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi akan diprediksikan mengalami percepatan melalui berbagai upaya maksimal pemerintah daerah Kabupaten Bone bersama dengan seluruh stakeholder. Dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi diprediksikan berada pada range antara 9,02 persen pada tahun 2019 dan 9,90 persen pada tahun 2023. Dalam kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan ekonomi diprediksikan secara rata-rata 9,41 persen per tahun lebih cepat dari periode sebelumnya dengan rata-rata 8,39 persen per tahun. Prediksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone masih tetap diperkirakan didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, dan serta perkembangan sektor-sektor industri kecil dan menengah. Percepatan pertumbuhan ekonomi berimplikasi terhadap pendapatan daerah terutama pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup akseleratif diprediksikan akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan rata-rata masing-masing 3,95 persen per tahun dan 8,72 persen per tahun selama periode 2019-2023. Prediksi ini diperkuat oleh stabilitas tingkat harga pada kisaran plus minus 2,31 dan 4,11 persen. Target-target yang telah ditetapkan pada beberapa variabel makro ekonomi disertai dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi akan cukup signifikan mempengaruhi target rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dalam lima tahun ke depan.

Tabel 3.11  
Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Bone, 2019-2023

Variabel Makro Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	8,81	9,18	9,46	9,73	10,11
Persentase Penduduk Miskin	10,08	10,00	9,89	9,80	9,75
Tingkat Inflasi	4,66	4,38	4,01	3,75	3,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,30	4,10	3,90	3,80	3,75

Sumber: Proyeksi Tim RPJMD, 2018

Dengan mengacu pada prediksi asumsi-asumsi makro tersebut disertai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat khususnya di bidang keuangan, maka pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bone dalam periode RPJMD 2019-20123 diprediksikan akan mengalami peningkatan dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 3,9 triliun. Dalam kurun waktu tersebut pemerintah daerah diperkirakan mampu memperoleh pendapatan kurang lebih Rp1,4 triliun dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 12,13 persen per tahun. Angka pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan periode sebelumnya yang mencapai 12,26 persen per tahun.

Besaran proyeksi pendapatan daerah diperoleh dari besaran proyeksi masing-masing sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Bone. PAD dengan mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Bone, maka PAD diprediksikan akan mencapai angka pada kisaran Rp207,71 milyar pada tahun 2019 hingga Rp381,9 miliar pada akhir periode RPJMD atau meningkat sebesar Rp174 miliar selama lima tahun dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,41 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PAD pada periode sebelumnya terlihat proyeksi PAD bertumbuh relatif lebih lambat daripada 37,98 persen pada periode 2013-2017. Cepatnya pertumbuhan PAD pada periode sebelumnya dikontribusi oleh lonjakan pendapatan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah terutama terjadi pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 pada anggaran pokok mengalami penurunan drastis. Penurunan angka pada tahun 2018 cukup besar mempengaruhi prediksi pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan mencermati potensi-potensi sumber-sumber PAD, proyeksi peningkatan PAD masih tetap dikontribusi oleh lain-lain PAD yang sah sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Meskipun diakui bahwa nilai pendapatan yang diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sangat berpotensi tidak stabil karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Akan tetapi pendapatan yang bersumber dari PAD yang sah juga banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah sehingga selama periode 2019-2023, nilai pendapatan PAD yang sah tetap diprediksikan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhannya pada kisaran 17 persen.

Sumber-sumber PAD yang memegang peran besar untuk ditingkatkan setiap tahun adalah penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua jenis objek pajak ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di daerah dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang cukup akseleratif diiringi dengan prediksi inflasi yang terkendali maka penerimaan yang bersumber dari pajak daerah diperkirakan meningkat dari Rp 53,38 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp.76,45 miliar pada akhir periode RPJMD atau bertumbuh dengan rata-rata 15,90 persen per tahun dengan sumbangan terhadap PAD rata-rata sebesar 24,94 persen. Kondisi yang sama dengan penerimaan retribusi daerah yang juga diperkirakan bertumbuh secara rata-rata 12,76 persen per tahun atau secara nominal dari Rp 20,94 miliar menjadi Rp 32,59 miliar pada tahun 2023. Angka prediksi ini seiring dengan prediksi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang mengalami penurunan setiap tahun. Salah satu faktor yang diduga kuat mempengaruhi penetapan proyeksi asumsi makro ekonomi maupun prediksi pendapatan daerah adalah implementasi program-program strategis daerah yang diprediksikan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang sosial ekonomi. Secara keseluruhan, sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah diprediksikan mencapai rata-rata 8,67 persen per tahun.

Sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan masih tetap menjadi sumber pendapatan daerah terbesar di Kabupaten Bone dalam lima tahun ke depan sebagaimana pada periode RPJMD sebelumnya. Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana perimbangan tetap diprediksikan akan bertumbuh setiap tahun dengan rata-rata per tahun 10,77 persen per tahun dengan angka berkisar pada Rp 1.634,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 2.121,9 miliar di akhir tahun periode RPJMD. Sumbangan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah rata-rata 67,92 persen per tahun. Penyumbang terbesar untuk dana perimbangan diprediksikan tetap berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata 66,24 persen atau bertumbuh dengan rata-rata 9,88 persen. Selanjutnya dana bagi hasil dari pemerintah masih tetap diharapkan mengalami peningkatan setiap tahun, demikian pula dengan dana alokasi khusus. DAK diprediksikan bertumbuh dengan rata-rata 12,92 persen atau sumbangannya sebesar 32 persen rata-rata setiap tahunnya. Hal ini berarti alokasi belanja program-program strategis nasional termasuk program pengentasan kemiskinan diprediksikan akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.

Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah berdasarkan hasil perhitungan diprediksikan akan meningkat secara absolut dari tahun ke tahun selama periode 2019-2023 dari Rp 522,91 miliar menjadi Rp 955,12 miliar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,61 persen. Proyeksi ini diharapkan dapat dicapai dengan asumsi bahwa kebijakan dari pemerintah pusat tetap berlanjut sebagaimana kebijakan yang terjadi pada periode sebelumnya. Sumber pendapatan ini terutama diharapkan berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah lainnya, serta pendapatan lainnya.

Dengan mencermati proyeksi pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bone dalam periode 2019-2023 dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat namun dengan persentase yang menurun hingga pada akhir tahun 2019. Pada periode yang sama, pendapatan dari PAD meskipun secara nominal nilainya

lebih rendah daripada dana perimbangan, namun sumbangan pendapatan asli daerah cenderung mengalami peningkatan hingga akhir periode RPJMD. Hal ini berarti bahwa dalam lima tahun ke depan pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Bone diprediksikan semakin membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga berdampak positif terhadap penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.12  
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone 2019-2023  
(Rp Milyar)

No	Uraian	Pertum Buhan (%)	Tahun berjalan 2018	Proyeksi (RP)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>12,26</b>	<b>2.252.116.159.287</b>	<b>2.389.059.346.097</b>	<b>2.522.300.288.707</b>	<b>2.680.205.899.018</b>	<b>2.848.360.895.448</b>	<b>3.027.445.575.563</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>37,98</b>	<b>214.213.155.033</b>	<b>215.617.717.097</b>	<b>228.338.719.607</b>	<b>243.119.784.007</b>	<b>261.978.464.440</b>	<b>302.733.235.563</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	42,94	51.236.484.457	53.389.509.296	57.111.227.642	61.442.118.934	66.388.114.250	76.455.483.840
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	(1,07)	19.652.213.419	20.945.172.172	22.491.899.437	24.180.156.565	26.912.319.755	32.590.915.159
1.2.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36,59	7.055.937.640	7.408.772.322	8.079.210.938	8.868.171.485	9.876.580.059	12.505.409.062
1.2.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44,41	136.268.519.517	133.874.263.307	140.656.381.590	148.629.337.023	158.801.450.376	181.181.427.502
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>10,70</b>	<b>1.548.309.677.324</b>	<b>1.634.785.865.000</b>	<b>1.728.373.016.900</b>	<b>1.843.218.135.201</b>	<b>1.962.821.052.208</b>	<b>2.069.972.892.260</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	(11,38)	23.302.043.707	24.150.272.000	25.599.288.320	27.135.245.619	28.763.360.356	30.489.161.978
1.2.2	Dana Alokasi Umum	5,49	1.070.426.493.000	1.116.830.949.000	1.179.340.805.940	1.256.009.662.357	1.354.779.338.721	1.398.255.892.432
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	60,27	454.581.140.617	493.804.644.000	523.432.922.640	560.073.227.225	599.278.353.131	641.227.837.850
1.3	<b>Lain Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>14,50</b>	<b>489.593.326.930</b>	<b>538.655.764.000</b>	<b>565.588.552.200</b>	<b>593.867.979.810</b>	<b>623.561.378.801</b>	<b>654.739.447.741</b>

No	Uraian	Pertum Buhan (%)	Tahun berjalan 2018	Proyeksi (RP)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	85.040.830.500	100.809.486.000	105.849.960.300	111.142.458.315	116.699.581.231	122.534.560.292
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	22,80	72.110.586.785	65.083.000.000	68.337.150.000	71.754.007.500	75.341.707.875	79.108.793.269
1.3.3	Dana Penyesuaian	21,23	306.620.285.200	346.819.278.000	364.160.241.900	382.368.253.995	401.486.666.695	421.561.000.029
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	(8,89)	25.821.624.445	25.944.000.000	27.241.200.000	28.603.260.000	30.033.423.000	31.535.094.150
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13,32</b>	<b>2.235.998.362.700</b>	<b>2.403.916.076.987</b>	<b>2.536.647.085.527</b>	<b>2.691.841.645.620</b>	<b>2.859.840.461.273</b>	<b>3.038.518.077.618</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>11,16</b>	<b>1.359.314.685.231</b>	<b>1.502.315.992.410</b>	<b>1.577.731.152.314</b>	<b>1.664.422.514.086</b>	<b>1.759.293.882.577</b>	<b>1.864.408.442.241</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	2,87	849.608.038.076	1.017.075.897.140	1.067.929.691.997	1.128.801.684.441	1.196.529.785.507	1.273.107.691.780
2.1.2	Belanja Bunga	(25,39)	253.351.574	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	(43,61)	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	122,85	97.608.807.050	25.337.400.000	26.604.270.000	27.934.483.500	29.331.207.675	30.797.768.059
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	373,99	5.980.000.000	1.420.000.000	1.491.000.000	1.565.550.000	1.643.827.500	1.726.018.875
2.1.6	Belanja bagi Hasil Kepada Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	(19,86)	4.593.053.681	5.987.205.670	6.585.926.237	7.244.518.861	7.968.970.747	8.765.867.821
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan	83,94	401.261.210.850	450.995.489.600	473.545.264.080	497.222.527.284	522.083.653.648	548.187.836.331



No	Uraian	Pertum Buhan (%)	Tahun berjalan 2018	Proyeksi (RP)				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Desa							
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.378,78	10.224.000	1.500.000.000	1.575.000.000	1.653.750.000	1.736.437.500	1.823.259.375
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>17,14</b>	<b>876.683.677.469</b>	<b>901.600.084.577</b>	<b>958.915.933.213</b>	<b>1.027.419.131.535</b>	<b>1.100.546.578.696</b>	<b>1.174.109.635.377</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	17.338.211.400	13.870.569.120	11.096.455.296	8.877.164.237	7.101.731.389
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,99	611.425.016.275	592.647.589.186	628.206.444.537	665.898.831.209	705.852.761.082	748.203.926.747
2.2.3	Belanja Modal	15,79	265.258.661.194	291.614.283.991	316.838.919.556	350.423.845.029	385.816.653.377	418.803.977.241
	<b>SURPLUS/DEFISI T</b>		<b>16.117.796.587</b>	<b>(14.856.730.890)</b>	<b>(14.346.796.820)</b>	<b>(11.635.746.602)</b>	<b>(11.479.565.825)</b>	<b>(11.072.502.055)</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daaerah</b>							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	1,62	89.295.314.009	24.856.730.890	24.346.796.820	21.635.746.602	21.479.565.825	21.072.502.055
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	96,91	5.889.255.300	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

Sumber: Proyeksi Tim RPJMD, 2018

### **3.3.2. Analisis Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah**

Analisis proyeksi belanja daerah dimaksudkan untuk mengetahui arah kebijakan pengalokasian belanja pemerintah daerah termasuk belanja wajib mengikat dan prioritas utama. Belanja wajib mengikat dan prioritas utama tercermin pada proyeksi belanja tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa total nilai proyeksi belanja tidak langsung merupakan pengurang dari perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan analisis kondisi umum daerah dan permasalahan-permasalahan pembangunan pada periode sebelumnya, maka pada periode lima tahun ke depan diperlukan sejumlah strategi dan arah kebijakan serta dukungan program-program prioritas yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih belum tertuntaskan pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan pengalokasian belanja untuk implementasi program-program pembangunan strategis sangat dibutuhkan. Seiring dengan proyeksi pendapatan daerah yang meningkat maka belanja daerah diproyeksikan juga akan mengalami peningkatan setiap tahun.

Analisis proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu asumsi indikator makro ekonomi, analisis kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah daerah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja pendidikan. Dengan mengacu pada asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan kemiskinan, dan pengangguran akan mendorong peningkatan belanja daerah ke depan. Dengan tingkat pengangguran yang bergerak menurun pada range  $\pm 3$  persen pada tahun 2023 dan persentase penduduk miskin  $\pm 7$  persen pada akhir periode RPJMD maka total belanja daerah diprediksikan meningkat dari Rp 2511.66 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 3984.77 milyar pada tahun 2023. Selama periode tersebut, belanja daerah diprediksikan bertumbuh dengan rata-rata 11,91 persen, lebih lambat dari periode sebelumnya sebesar 13,32 persen per tahun. Meskipun demikian, alokasi belanja untuk program-program pembangunan yang diarahkan pencapaian tujuan dan sasaran tetap menjadi perhatian besar dari

pemerintah daerah. Beberapa faktor yang menyebabkan prediksi pertumbuhan belanja daerah yang relatif lebih lambat adalah upaya pemerintah untuk tetap menekan angka defisit dan upaya efisiensi belanja daerah pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak produktif.

Dilihat dari jenis belanja daerah, jenis belanja daerah yang paling besar adalah belanja tidak langsung dengan proporsinya rata-rata mencapai 61,38 persen selama periode 2019-2023. Besarnya proporsi belanja tidak langsung dikontribusi oleh alokasi belanja pegawai dengan rata-rata 65,05 persen per tahun dan belanja bantuan keuangan rata-rata 27,74 persen. Dengan demikian, selama periode 2019-2023, kebijakan belanja daerah masih menempatkan proporsi belanja tidak langsung. Meskipun proporsinya masih lebih besar, namun diprediksikan cenderung menurun dari 64,17 persen pada tahun 2019 menjadi 58,53 persen pada tahun 2023.

Hal ini berarti pemerintah daerah mengarahkan kebijakan peningkatan proporsi belanja program-program peningkatan pelayanan publik sehingga proporsi belanja langsung diprediksikan akan mengalami peningkatan menjadi 41,46 persen pada akhir periode RPJMD yang mana pada periode sebelumnya masih dibawah dari 40 persen. Peningkatan proporsi belanja langsung dikontribusi oleh belanja barang dan jasa namun dengan proporsi yang menurun setiap tahun atau rata-rata 57,58 persen dan proporsi belanja modal yang cenderung meningkat dengan rata-rata 42,42 persen.

Peningkatan proporsi belanja langsung khususnya proporsi belanja modal mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bone secara perlahan-lahan berupaya untuk meningkatkan belanja yang sifatnya lebih produktif yaitu belanja program-program strategis. Dengan demikian, selama periode 2019-2023, kebijakan belanja daerah masih menempatkan proporsi belanja tidak langsung lebih besar namun dengan proporsi yang menurun. Besarnya nilai proyeksi belanja tidak langsung akan menjadi pengurang dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Hampir seluruh belanja tidak langsung adalah belanja wajib mengikat yang tidak dapat ditunda pembayarannya setiap tahun seperti belanja pegawai negeri, belanja

tunjangan dan gaji kepala daerah dan anggota DPR, belanja subsidi, dan beberapa belanja wajib lainnya.

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan, penerimaan pembiayaan diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Peningkatan itu terutama berasal dari penerimaan SiLPA, penyertaan modal pemerintah, dan penerimaan piutang daerah. Hal yang sama dengan pengeluaran pembiayaan yang diprediksikan meningkat dan dikontribusi oleh penerimaan berupa penyertaan modal investasi pemerintah dan pemberian pinjaman daerah. Besarnya kecilnya pengeluaran pembiayaan akan memperkecil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

### 3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dihitung dari hasil pengurangan total penerimaan daerah dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, komponen belanja yang mempengaruhi besar kecilnya perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Kedua komponen ini merupakan pengurang dari total penerimaan daerah karena keduanya merupakan belanja priodik dan pengeluaran wajib dan mengikat yang harus dibayarkan setiap priodik oleh pemerintah daerah dan tidak dapat ditunda.

Tabel 3.13  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone,  
2019-2023 (Rp Milyar)

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	2.389,06	2.522,30	2.680,21	2.848,36	3.027,45
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)			20,00	25,00	30,00
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	-	-	-	-	-
	<b>Total penerimaan</b>	2.389,06	2.522,30	2.700,21	2.873,36	3.057,45
	Dikurangi:					
4	Belanja tidak langsung	1.502,32	1.577,73	1.664,42	1.759,29	1.864,41
5	Pengeluaran pembiayaan	6,65	7,32	8,05	8,85	9,74
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	880,09	937,25	1.027,74	1.105,22	1.183,30

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD, 2018

Total penerimaan daerah yang dimaksud adalah penjumlahan dari total pendapatan daerah (PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah), pencairan dana cadangan, dan Sisa Lebih riil perhitungan anggaran. Proyeksi pencairan dana cadangan dan Sisa lebih riil perhitungan anggaran merupakan penambah total penerimaan daerah yang berimplikasi terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil proyeksi dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Bone mengasumsikan bahwa sepanjang lima tahun ke depan, tidak terdapat sisa lebih riil perhitungan anggaran sehingga tidak menambah total penerimaan daerah. Komponen yang menambah total penerimaan adalah pencairan dana cadangan dan diprediksikan pada tiga tahun terakhir periode RPJMD.

Dengan demikian, total penerimaan daerah dalam kurung waktu 2019-2023 mengalami peningkatan dari Rp 2.509,12 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp3.981,97 milyar pada tahun 2023. Sementara total belanja tidak langsung diprediksikan sebesar Rp 1.611,96 milyar menjadi Rp meningkat dari Rp 2.332,48 milyar pada periode yang sama. Demikian halnya dengan pengeluaran pembiayaan yang juga diprediksikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil proyeksi komponen total penerimaan dan total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan maka diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bone selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tercatat Rp 890,50 milyar mengalami peningkatan setiap tahun menjadi Rp1.639,75 milyar pada tahun 2023.

Permendagri 86 tahun 2017, Pasal 157 menjelaskan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan dialokasikan ke dalam tiga prioritas daerah yaitu prioritas satu, prioritas dua, dan prioritas tiga. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, dan prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka dana pagu indikatif dialokasikan kepada prioritas pertama sebesar 50 persen, prioritas kedua sebesar 30 persen, dan prioritas ketiga sebesar 20 persen. Proporsi alokasi anggaran untuk masing-masing prioritas diasumsikan konstan selama lima tahun ke depan. Rincian alokasi pagu per setiap tahun selama periode 2019-2023 disajikan dalam Tabel 3.15.

Tabel 3.15  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah  
Kabupaten Bone, 2019-2023 (Rp Milyar)

URAIAN	PROYEKSI				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>880,09</b>	<b>937,25</b>	<b>1.027,74</b>	<b>1.105,22</b>	<b>1.183,30</b>
Prioritas I (50 %)	440,05	468,63	513,87	552,61	591,65
Prioritas II (30 %)	264,03	281,17	308,32	331,56	354,99
Prioritas III (20%)	176,02	187,45	205,55	221,04	236,66

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD, 2018

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).** Angka IPM Kabupaten Bone adalah salah satu yang terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada

tahun 2017, Kabupaten Bone menempati peringkat ke-23 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone hanya berada di atas Kabupaten Jeneponto. Semua capaian indikator komposit IPM Kabupaten Bone berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Namun indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Paritas Daya Beli menunjukkan capaian yang relatif paling rendah. Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menjadi penyebab rendahnya Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan kurang berkembangnya sentra-sentra aktifitas ekonomi, banyaknya angkatan kerja yang menganggur, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk, menjadi penyebab rendahnya Paritas Daya Beli.

2. **Masih tingginya angka kemiskinan.** Kabupaten Bone masih mencatat persentase penduduk miskin yang relatif tinggi (tahun 2017 sebesar 10,28%) dan masih berada di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone juga mencatat angka terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mencapai 77.130 jiwa. Target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level satu digit tampaknya juga belum berhasil. Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk sehingga balas jasa ekonomi yang diterima mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan berkorelasi terhadap meningkatnya angka stunting dan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone. Olehnya itu, penguatan intervensi 1000 HPK menjadi prioritas dimasing-masing perangkat daerah terkait.
3. **Rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk.** Pendapatan per kapita Kabupaten Bone masih relatif rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, pendapatan per kapita Kabupaten Bone sebesar Rp 39,15 juta, sekitar 18,79 persen lebih rendah dari pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan (Rp



48,21 juta). Rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Bone disebabkan oleh tidak terjadinya perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB, bukan hanya sangat besar (hampir mencapai 50%) tetapi juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Kurang berkembangnya industri pengolahan, terutama industri berskala besar, menjadi penyebab rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Bone.

4. **Kecilnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah (PDRB).** Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, bukan hanya relatif kecil, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pertumbuhan sektor industri pengolahan juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone. Kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperjual-belikan tanpa melalui proses pengolahan. Dengan kata lain, komoditas hasil sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dipasarkan dalam bentuk komoditas primer. Kurangnya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sentra-sentra industri pengolahan menjadi penyebab kurang berkembangnya industri pengolahan di Kabupaten Bone.
5. **Rendahnya tingkat produktivitas pekerja.** Ini setidaknya ditandai oleh rendahnya tingkat pengangguran terbuka di satu sisi (pada tahun 2017 sebesar 4,55%), tetapi tingginya angka kemiskinan di sisi lain (10,28%). Ini mengindikasikan bahwa mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, balas jasa ekonomi yang diterima dari bekerja belum sanggup mengangkat taraf hidupnya di atas garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 52 persen dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), dan metode produksi yang masih tradisional.

- 6. Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah.** Ketimpangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan tampak jelas. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Alokasi anggaran pemerintah yang cenderung bias ke wilayah perkotaan, juga menjadi penyebab lainnya terjadinya ketimpangan antar wilayah. Perbedaan kondisi dan karakteristik geografis dan demografis juga turut menyumbang terjadinya ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bone.
- 7. Rendahnya Angka Harapan Hidup.** Berdasarkan data BPS, Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone pada tahun 2017 sebesar 66,22 tahun, yang menempatkan Kabupaten Bone pada urutan ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Jeneponto dan Pangkajene Kepulauan. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone juga lebih rendah 3,62 tahun dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan (69,84 tahun). Rendahnya Angka harapan Hidup Kabupaten Bone dikontribusi oleh masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, kematian anak usia di bawah lima tahun (balita), dan kematian akibat berbagai jenis penyakit. Ini mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap layanan kesehatan masih terbatas akibat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang tidak mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 8. Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah.** Kabupaten Bone masih mencatat angka rata-rata lama sekolah bagi penduduk di atas 15 tahun yang relatif rendah. Pada tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bone hanya sebesar 6,77 tahun. Angka ini persis sama dengan capaian Kabupaten Takalar, dan hanya lebih tinggi dari Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan rendahnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan, tingginya angka putus sekolah (berhenti sekolah), dan rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semua masalah ini terjadi karena tidak tersedianya secara memadai sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah.

- 9. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah.** Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bone terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun. APS 7-12 tahun hanya sebesar 98,51 persen, yang menempatkannya pada posisi ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Wajo dan Bantaeng. Sedangkan APS 16-18 tahun hanya sebesar 56,52 tahun, yang menempatkannya pada posisi terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bone menunjukkan rendahnya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan, terutama untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMA di seluruh wilayah kecamatan menjadi penyebab rendahnya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan.
- 10. Rendahnya tingkat produktivitas pertanian.** Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah rendahnya tingkat produktivitas. Penyebab rendahnya tingkat produktivitas pertanian adalah tingginya proporsi lahan sawah yang masih tadah hujan. Serangan hama dan bencana kekeringan yang semakin sering terjadi, juga menyumbang terhadap rendahnya tingkat produktivitas pertanian. Selain itu, berkurangnya luas lahan sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan juga menjadi penyebab lainnya rendahnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Bone.
- 11. Rendahnya pengeluaran per kapita sebulan.** Secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Bone mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan non-makanan sebesar Rp 649.605 sebulan (Maret 2017). Angka ini bukan hanya lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Selatan (Rp 927.908), tetapi juga menempatkan Kabupaten Bone pada posisi kedua terendah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran per kapita sebulan Kabupaten Bone hanya berada di atas Kabupaten Soppeng. Rendahnya pengeluaran per kapita sebulan disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita, dan rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang bekerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang bekerja, menjadi

penyebab rendahnya balas jasa ekonomi yang diterima oleh setiap pekerja.

**12. Masih tingginya angka kriminalitas.** Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa kasus kriminalitas yang dilaporkan pada tahun 2017 mencapai 1.193 kasus, meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya (2016: 739 kasus). Dari seluruh kasus yang terjadi di tahun 2017, hanya 934 kasus yang diselesaikan atau 78,29 persen. Kasus penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan narkoba merupakan kasus-kasus yang dengan frekuensi yang cukup tinggi. Munculnya pelanggaran hukum tersebut karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

**13. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan.** Ini setidaknya diindikasikan oleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78 persen, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar C, dan masih adanya sejumlah temuan BPK yang berpotensi merugikan kerugian negara. Belum maksimalnya desain perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta pengendalian dan pengawasan menjadi sejumlah penyebab mengapa tata kelola pemerintahan belum optimal.

Sedangkan permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral), diidentifikasi sebagai berikut:

#### **A. Urusan Wajib :**

##### **1. Urusan Pendidikan**

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pendidikan, adalah:

- ♦ Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; Sarana dan Prasarana PAUD masih kurang dan tidak merata;
- ♦ Capaian APK dan APM masih di bawah standar Nasional dan Provinsi;
- ♦ Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
- ♦ Jauhnya jarak antara sekolah dengan tempat domisili siswa;
- ♦ Rasio Guru dan Siswa SD/SMP yang belum memenuhi SPM

Pendidikan;

- ♦ Kurangnya dorongan masyarakat untuk mengikuti Program Paket C;
- ♦ Masih kurangnya PKBM sebagai wadah penyebarluasan informasi pendidikan keaksaraan;
- ♦ Kurangnya dukungan untuk mendorong gerakan pemberantasan buta aksara;
- ♦ Belum optimalnya kegiatan yang mendukung peningkatan kecakapan hidup masyarakat.

## 2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kesehatan, adalah:

- ♦ Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya;
- ♦ Pelayanan Kesehatan Masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh baik dari aspek jenis pelayanan (Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas, Rujukan, Tradisional dll), aspek peralatan kesehatan maupun dari aspek lain;
- ♦ Masih kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam hal pemeliharaan, inventarisasi dan kalibrasi alat kesehatan;
- ♦ Masih sering terjadi bencana alam seperti banjir dll;
- ♦ Masih perlu pengawasan intensif terhadap pengedaran obat dan makanan terhadap masyarakat;
- ♦ Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kabupaten Bone;
- ♦ Masih tingginya angka kekurangan gizi pada Balita terutama Balita Stunting;
- ♦ Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi standar / belum mencapai target;
- ♦ Belum Semua Kecamatan, desa dan kelurahan melakukan Proses Kawasan Sehat secara Standar;
- ♦ Belum ada Desa/Kelurahan STBM, Belum mencapai Universal Akses Desa/Kelurahan ODF;

- ♦ Angka kejadian penyakit menular masih tinggi, penemuan kasus masih rendah dan pengobatan yang belum sesuai standar;
- ♦ Belum semua desa/kelurahan berstatus UCI;
- ♦ masih adanya bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap;
- ♦ Masih ada puskesmas dan rumah sakit yang belum terakreditasi;
- ♦ Masih tingginya angka penduduk miskin sehingga perlu intervensi terhadap faktor penyebab kemiskinan di bidang kesehatan;
- ♦ Masih ada beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang dalam kondisi rusak serta ketersediaan alat kesehatan yang masih sangat terbatas;
- ♦ Masih perlu pembangunan RS d beberapa wilayah;
- ♦ Perlunya Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana RS yang sudah ada;
- ♦ Masih ada masyarakat yang belum memiliki kartu JKN;
- ♦ Penurunan Angka Kematian Anak masih belum signifikan;
- ♦ Program Peningkatan Keselamatan Lansia;
- ♦ Perlunya pengawasan intensif terhadap pengolahan makanan dan minuman pada industri - industri rumah tangga;
- ♦ Penurunan Angka Kematian Ibu masih belum signifikan;
- ♦ Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM);
- ♦ Pergeseran pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM);
- ♦ Keterlambatan penemuan kasus kanker serviks dan payudara;
- ♦ Masih tingginya kebiasaan merokok yang merupakan faktor resiko penyakit tidak menular;
- ♦ Masih tingginya penderita katarak;
- ♦ Masih ada pasien ODGJ yang dipasung;
- ♦ Kasus Hipertensi semakin meningkat;
- ♦ Kasus DM semakin meningkat;
- ♦ Tuntutan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit (RS harus Reakreditasi setiap 3 tahun)

- ♦ Pembangunan dan penataan gedung disesuaikan dengan Master Plan dan Kebutuhan Alat kesehatan sesuai standar RS type B;
- ♦ Jumlah SDM belum memenuhi Standar RS type B;
- ♦ Indikator pelayanan rawat inap yang belum berada pada angka ideal;
- ♦ SIM RS belum terintegrasi optimal;
- ♦ Persiapan pelaksanaan Survey Verifikasi dan Visitasi Akreditasi RS Versi SNARS.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, adalah:

- ♦ Masih ada jalan yang rusak yang belum pernah ditangani dengan lapis permukaan aspal ataupun beton;
- ♦ Masih ada jembatan yang mengalami rusak berat;
- ♦ Masih ada jalan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;
- ♦ Masih ada jembatan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;
- ♦ Aksesibilitas daerah perbatasan, kawasan wisata dan industri belum memadai;
- ♦ Pembagian kewenangan jalan mengakibatkan penanganan jalan tidak efektif;
- ♦ Masih banyak bangunan tidak memiliki Izin kelayakan dan Rendahnya kepatuhan terhadap fungsi ruang;
- ♦ Masih terjadinya alih fungsi lahan;
- ♦ Belum terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan undang-undang penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- ♦ Masih adanya daerah irigasi baru (irigasi permukaan dan irigasi tambak) yang sudah didata namun belum terbangun jaringan irigasinya;
- ♦ Adanya kerusakan-kerusakan jaringan irigasi yang terjadi pada

daerah-daerah irigasi permukaan yang sudah terbangun (eksisting) yang berpotensi mengganggu fungsi dan kinerja jaringan irigasi di daerah irigasi tersebut;

- ♦ Masih adanya daerah-daerah irigasi yang sudah terdaftar tapi belum memiliki Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan belum pernah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan;
- ♦ Masih adanya jaringan sungai (termasuk di dalamnya saluran pembuang) yang butuh untuk direhabilitasi / dinormalisasi (pengerukan, pasangan talud dan bronjong) yang jika dilaksanakan akan berpotensi mengganggu kinerja dan fungsi aset-aset pengairan yang ada di sekitarnya;
- ♦ Adanya sumber-sumber air yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka menjaga kelangsungan ketersediaan sumber-sumber air (konservasi) untuk keperluan pertanian;
- ♦ Adanya kawasan-kawasan pemukiman di sekitar pantai di beberapa daerah pantai yang membutuhkan fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) untuk melindungi kawasan tersebut dari banjir yang diakibatkan kenaikan air laut (pasang).
- ♦ Kurangnya fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) dalam menanggulangi liapan dan banjir rob yang terjadi baik di daerah-daerah permukiman maupun di kawasan-kawasan produktif yang ada di daerah-daerah pantai tersebut akibat adanya fluktuasi pasang surut air laut di daerah-daerah pantai (kawasan pesisir) yang ada di Kabupaten Bone yang cenderung tidak menentu baik disebabkan pengaruh inkonsistensi iklim maupun pengaruh pemanasan global.
- ♦ Banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang rawan longsor akibat pengaruh erosi banjir dan ketidak stabilan lereng yang berpotensi mengganggu keseimbangan pengaliran sungai maupun dapat membahayakan fasilitas-fasilitas sumber daya air yang ada disekitarnya.
- ♦ Banyak sungai utama yang mengalami laju aggradasi (pendangkalan



dasar sungai oleh sedimen) yang mengurangi kapasitas pengaliran sungai yang berpotensi menyebabkan banjir.

- ♦ Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian banjir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- ♦ Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air untuk keperluan irigasi.
- ♦ Adanya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan.
- ♦ Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- ♦ Masih kurangnya bangunan/fasilitas penangkaran/konservasi air tanah yang terbangun.
- ♦ Banyak bangunan-bangunan utama (pengambilan, pembagi, penguras) yang belum dilengkapi dengan pintu air.
- ♦ Masih adanya jaringan irigasi yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
- ♦ Adanya bangunan pintu air yang mengalami kerusakan.
- ♦ Masih kurangnya pengalokasian anggaran Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi yang sudah terbangun.
- ♦ Masih kurangnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas petani pemakai air yang responsif gender.
- ♦ Masih kurangnya pengalokasian anggaran untuk pembenahan jaringan irigasi tambak yang sudah terbangun di Kabupaten Bone.
- ♦ Masih banyak potensi daerah irigasi baru yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bone yang belum dibangun dan atau butuh untuk dikembangkan.

- ♦ Belum memadainya tingkat pelayanan operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air yang baru terbentuk.
  - ♦ Belum memadainya database irigasi, tambak, sungai, bangunan konservasi da pantai.
  - ♦ Masih kurangnya sarana dan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku untuk masyarakat.
  - ♦ Masih kurangnya sumur-sumur air tanah yang terbangun dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku masyarakat.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, adalah:
- ♦ Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni;
  - ♦ Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) di kawasan permukiman;
  - ♦ Tidak memadainya sarana dan prasarana jalan di kawasan perumahan dan permukiman;
  - ♦ Masih adanya kawasan permukiman kumuh
  - ♦ Masih terdapatnya warga yang belum terlayani akses air bersih dan sanitasi air limbah.
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, adalah:
- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA;
  - ♦ Belum adanya wadah formal untuk pengembangan wawasan kebangsaan skala lokal;
  - ♦ Terbatasnya kemampuan SDM sehingga pendidikan politik tidak merata;
  - ♦ Masih terbatasnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Bela

Negara;

- ♦ Masih adanya pelanggaran K3 oleh masyarakat;
- ♦ Masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi, pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- ♦ Masih lambatnya respon aparat ketika terjadi pelanggaran Perda karena terkendala oleh masalah teknis seperti jarak tempuh ke lokasi;
- ♦ Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
- ♦ Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
- ♦ Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- ♦ Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas khusus di kecamatan;
- ♦ Masih kurangnya kontrol pemerintah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- ♦ Kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan;
- ♦ Belum memadainya sarana, prasarana dan SDA pendukung penanganan korban bencana;
- ♦ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kejadian bencana;
- ♦ Belum optimalnya penanganan pasca bencana;
- ♦ Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memadai baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan;
- ♦ Kualifikasi aparatur pemadam kebakaran belum memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah;
- ♦ Jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui oleh armada pemadam

kebakaran.

6. Urusan Sosial:

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sosial, adalah:

- ♦ Masih rendahnya penanganan Fakir miskin melalui bantuan usaha KUBE.
- ♦ Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- ♦ Belum adanya data base tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah.
- ♦ Belum adanya data base tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas;
- ♦ Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya;
- ♦ Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial.
- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Taman Makam Pahlawan (TMP).

7. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

- ♦ Rendahnya tingkat kesadaran pihak pengusaha untuk memberi hak pada karyawan seperti pesangon, insentif, upah yang layak, uang saku dll;
- ♦ Kurangnya komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja

dalam menyelesaikan permasalahan dan perselisihan;

- ♦ Rendahnya tingkat pengetahuan dari pengusaha tentang kepesertaan jamsostek;
- ♦ Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih dibidang peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- ♦ Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih dibidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- ♦ Tingginya Pertumbuhan Angkatan Kerja yang tidak seimbang dengan persediaan lapangan kerja;
- ♦ Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih dibidang kewirausahaan;

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah:

- ♦ Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG dan IDG;
- ♦ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ♦ Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah, perkawinan anak dan penelantaran;
- ♦ Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja;
- ♦ Keterlibatan perempuan dilembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;
- ♦ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak;
- ♦ Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan pengasuhan yang aman;
- ♦ Belum tersedia lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- ♦ Sangat sulit mendapatkan data terpilah gender dan anak dari OPD

dan instansi terkait.

#### 9. Urusan Pangan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan Pangan, adalah:

- ♦ Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang;
- ♦ Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
- ♦ Masih tingginya ketergantungan bahan pokok beras;
- ♦ Masih rendahnya ketersediaan protein hewani;
- ♦ Masih rendahnya penanganan daerah rawan pangan;
- ♦ Belum optimalnya pelaporan SKPG;
- ♦ Belum seimbangnya pola konsumsi masyarakat dimana masih didominasi oleh karbohidrat, ketimbang protein hewani maupun nabati;
- ♦ Informasi distribusi bahan pangan antar wilayah belum optimal;
- ♦ Harga pangan masih fluktuatif;
- ♦ Belum memadainya sarana dan pasarana distribusi pangan;
- ♦ Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan belum berjalan secara optimal;
- ♦ Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait tentang keamanan pangan;
- ♦ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- ♦ Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan;
- ♦ Masih rendahnya promosi pangan lokal;
- ♦ Belum optimalnya lembaga petani dalam menyediakan cadangan pangan;
- ♦ Masih rendahnya operasional dalam mengelola cadangan pangan.

#### 10. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan

Pertanahan, adalah:

- ♦ Masih banyaknya lahan/ aset pemerintah yang belum tersertifikasi;
- ♦ Masih banyaknya bangunan Negara yang membutuhkan penanganan;
- ♦ Masih banyaknya sarana dan prasarana daerah yang membutuhkan penanganan.

#### 11. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- ♦ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;
- ♦ Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDGs dalam lima tahun terakhir
- ♦ Rendahnya Pengawasan terkait ketaatan hukum lingkungan dikarenakan belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup (pejabat Fungsional);
- ♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional.
- ♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah);
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk memantau seluruh sungai di Kabupaten Bone;
- ♦ Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan;
- ♦ Dampak Perubahan Iklim (Pemanasan Global).

## 12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adalah:

- ♦ Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil karena jaringan koneksi internet yang lambat dan jumlah aparatur yang terbatas;
- ♦ Tidak adanya peraturan mengenai sanksi terhadap masyarakat yang tidak memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- ♦ Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan;
- ♦ Tidak memadainya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan;
- ♦ Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya mutasi penduduk;
- ♦ Belum maksimalnya kerja sama dengan lintas sektor untuk meningkatkan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah:

- ♦ Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
- ♦ Unit usaha tidak berfungsi optimal;
- ♦ Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- ♦ Pengelolaan sistem pemerintahan desa tidak dikelola secara profesional;
- ♦ Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam membangun desa;
- ♦ Rendahnya SDM pengelola keuangan desa;
- ♦ Pengelolaan keuangan desa masih banyak yang tidak memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan demokratisasi.



#### 14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adalah:

- ♦ Belum sinergisnya kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan program KB;
- ♦ Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB, masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB terutama laki-laki, dan masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- ♦ Masih kurangnya pembinaan terhadap kelompok bina ketahanan keluarga;
- ♦ Kurangnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

#### 15. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

- ♦ Belum terpenuhinya aksesibilitas jalan untuk semua wilayah, terutama pada wilayah pedesaan yang terisolir;
- ♦ Belum optimalnya fungsi dan kinerja sarana dan prasarana transportasi, seperti terminal, pelabuhan, dan bandara;
- ♦ Lemahnya sistem registrasi kepemilikan kendaraan.

#### 16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan komunikasi dan informatika, adalah:

- ♦ Belum tersedianya sarana yang memadai Khususnya Pelayanan Berbasis Online sehingga belum terkoneksi *Command Center*;
- ♦ Masih adanya beberapa area yang *blank-spot*. Belum terjangkau Jaringan Seluler;
- ♦ Infrastruktur Jaringan belum memadai.

#### 17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi, usaha kecil menengah, adalah:

- ♦ Masih kurangnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat;
- ♦ Rendahnya pemanfaatan fasilitas pembiayaan melalui BPR/LKM oleh koperasi dan UKM;
- ♦ Minimnya kualitas SDM dan kurangnya aparat pembina dan penyuluh koperasi yang tidak sebanding dengan luas wilayah kabupaten bone;
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan gerakan koperasi dan pelaku Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usaha;
- ♦ Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan promosi produk usaha mikro.

#### 18. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan penanaman modal, adalah:

- ♦ Belum tersedianya database investasi dan regulasi insentif penanaman modal;
- ♦ Ketepatan jangka waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP;
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun realisasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkaji/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Organisasi Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;

- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan.

#### 19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepemudaan dan olahraga, adalah:

- ♦ Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya legalisasi organisasi kepemudaan;
- ♦ Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
- ♦ Kurangnya keterlibatan berbagai instansi terkait dalam pembinaan pemuda;
- ♦ Masih Kurangnya festival kepemudaan;
- ♦ Rendahnya kompetensi pemuda usia produktif;
- ♦ Kurang pengetahuan pemuda tentang penyalagunaan narkoba;
- ♦ Kurang optimalnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK;
- ♦ Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan alat pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak lanjut hasil pengukuran;
- ♦ Rendahnya Frekuensi kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat luas;
- ♦ Kurang Optimalnya pengembangan sentra olahraga pelajar;
- ♦ Masih kurangnya kegiatan kompetisi Olahraga;
- ♦ Masih terbatasnya pembibitan atlet potensial;
- ♦ Kurangnya sarana dan Prasarana olahraga.

#### 20. Urusan Statistik

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik, adalah:

- ♦ Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant serta *up-to date* yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik.

#### 21. Urusan Persandian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan persandian, adalah:

- ♦ Belum memadainya peralatan dan anggaran persandian;
- ♦ Belum tersedianya tenaga pengelola persandian.

#### 22. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kebudayaan, adalah:

- ♦ Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestarikan;
- ♦ Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan kawasan cagar budaya karena belum adanya kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pengkajian andalan penetapan situs;
- ♦ Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi karya budaya;

#### 23. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

- ♦ Rendahnya minat baca masyarakat;
- ♦ Belum berkembangnya berbagai jenis perpustakaan yang ada;
- ♦ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang perpustakaan;
- ♦ Terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka;
- ♦ Kurangnya pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan perkembangan teknologi informasi;
- ♦ Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.

#### 24. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah:

- ♦ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan;
- ♦ Rendahnya kesadaran SKPD dalam pengelolaan arsip;
- ♦ Belum optimalnya sarana dan prasarana kearsipan.

### **B. Urusan Pilihan**

#### 1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kelautan dan perikanan, adalah:

- ♦ Lemahnya Kemampuan Pelaku Usaha di Bidang Kenelayanan, dalam Kemandirian Berusaha secara berkelanjutan;
- ♦ Masih Rendahnya Kemampuan berwirausaha Bagi Pembudidaya Ikan secara berkelanjutan;
- ♦ Rendahnya Legalitas Berusaha bagi Pelaku Usaha Perikanan.

## 2. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pariwisata, adalah:

- ♦ Terbatasnya Pelaksanaan Festival, Event/ PameranPariwisata;
- ♦ Belum Optimal Peran Kelompok Sadar Wisata;
- ♦ Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata;
- ♦ Belum memadainya Daerah Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bone.

## 3. Urusan Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian, adalah:

- ♦ Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani;
- ♦ Rendahnya akses petani terhadap permodalan;
- ♦ Belum maksimalnya pengelolaan usaha tani yang berbasis agribisnis;
- ♦ Masih terbatasnya kompetensi petani dalam hal peningkatan teknologi pertanian;
- ♦ Makin besarnya tuntutan standarisasi produk hasil pertanian;
- ♦ Terus berlangsungnya alih fungsi lahan;
- ♦ Masih adanya pertanaman hampur yang dilakukan oleh petani;
- ♦ Tidak adanya jaminan harga terutama untuk komoditi kedelai sehingga pada saat panen raya harga kedelai di tingkat petani sangat rendah;
- ♦ Belum optimalnya pengembangan teknologi spesifik lokasi dengan usaha tani yang ramah lingkungan;
- ♦ Penanganan pasca panen yang masih rendah;
- ♦ Masih rendahnya kualitas SDM aparat dan kemampuan petani sebagai pelaku agribisnis;

- ♦ Masih rendahnya produksi tanaman perkebunan;
- ♦ Kurangnya kelompok tani yang melakukan pengolahan limbah ternak;
- ♦ Jumlah Akseptor IB masih rendah;
- ♦ Ternak bibit sapi belum bersertifikat;
- ♦ Keterbatasan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (Kontainer);
- ♦ Kurangnya tempat pemasaran hewan;
- ♦ Perlunya penanggulangan penyakit ternak Antrax dan Rabies.

#### 4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan energi dan sumberdaya mineral, adalah:

- ♦ Terjadinya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada diluar wilayah yang disebutkan di dalam RT RW pertambangan;
- ♦ Masih lambatnya proses penerbitan rekomendasi usaha pertambangan sehingga menghambat penerbitan rekomendasi usaha pertambangan oleh Dinas Perindustrian Kab. Bone;
- ♦ Rendahnya Kesadaran para Pengusaha di Sektor Pertambangan dalam memenuhi kewajibanya;
- ♦ Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan penanganan pertambangan tanpa izin;
- ♦ Besarnya nilai konfensasi lahan untuk pengembangan sektor pertambangan;
- ♦ Belum Optimalnya pendataan rumah tangga yang belum menikmati jaringan listrik PLN;
- ♦ Masih Terbatasnya data Potensi pengembangan energi baru terbarukan;
- ♦ Belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis kepada para pelaku usaha disektor Migas;
- ♦ Masih terbatasnya tenaga teknis untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- ♦ Masih Terbatasnya data Potensi sumber daya mineral,air tanah dan

mata air

5. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perdagangan, adalah:

- ♦ Kurang memadainya sarana dan prasarana perdagangan;
- ♦ Masih banyaknya barang yang tidak aman yang beredar di masyarakat;
- ♦ Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ♦ Masih banyaknya timbangan/alat timbang yang belum memiliki sertifikat tera;
- ♦ Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha;
- ♦ Masih kurangnya pengetahuan UKM dalam mengembangkan usahanya;
- ♦ Masih Kurangnya Pengetahuan UKM untuk melakukan kegiatan ekspor;
- ♦ Kurangnya Promosi Produk Unggulan Daerah.

6. Urusan Perindustrian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

- ♦ Rendahnya Inovasi dan adopsi Teknologi, Pengembangan Desain/ Kemasan Produk Industri;
- ♦ Rendahnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Industri;
- ♦ Kurangnya Wawasan Pengusaha IKM dalam hal Manajemen, Kewirausahaan, Mempromosikan Produk IKM;
- ♦ Terbatasnya Modal Usaha dan Rendahnya Akses terhadap Sumber-Sumber Permodalan;
- ♦ Masih Rendahnya Penggunaan Teknologi dalam Proses Produksi;
- ♦ Masih Kurangnya Sentra-Sentra Pengembangan Industri.

**C. Penunjang Urusan**

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perencanaan pembangunan, adalah:

- ♦ Masih Rendahnya Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan;
- ♦ Belum Optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah sehingga perumusan kebijakan kurang berkualitas;
- ♦ Kurangnya Data yang Akurat, Valid, dan Relevan serta Up to Date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk Perencanaan yang Baik;
- ♦ Lemahnya Kapasitas Aparat Perencana dilihat dari kualifikasi Pendidikan dan Kemampuan Tektis Perencana khususnya ketersediaan tenaga teknis perencana;
- ♦ Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perencanaan.

## 2. Keuangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan keuangan, adalah:

- ♦ Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah;
- ♦ Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
- ♦ Kontribusi/ Rasio PAD terhadap APBD masih rendah;
- ♦ Tingkat pemahaman kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perpajakan daerah belum memadai;
- ♦ Belum tercapainya pengalokasian belanja modal minimal 30% terhadap APBD sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan APBD
- ♦ Pengelolaan kas daerah yang cepat dan akuntabel khususnya dalam implementasi Transaksi Non Tunai yang menjadi kebijakan baru dari Pemerintah.

## 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

- ♦ Masih rendahnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan ( Diklat PIM);
- ♦ Kurangnya pegawai yang dikirim mengikuti tugas belajar dan



mengajukan izin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan;

- ♦ Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan riil;
- ♦ Belum terlaksananya secara optimal pengembangan pegawai berdasarkan pola karier;
- ♦ Penerapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
- ♦ Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
- ♦ Belum obyektifnya sistem penilaian kinerja pegawai.

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

- ♦ Belum tersedia informasi tentang peningkatan kualitas hidup manusia berdasarkan hasil pengkajian;
- ♦ Belum optimalnya pengkajian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi wilayah serta inovasi teknologi;
- ♦ Masih rendahnya penelitian terhadap sektor-sektor unggulan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- ♦ Belum adanya penelitian dan pengembangan teknologi maritim dan budidaya perikanan sebagai ekspor yang mendukung peningkatan kesejahteraan;
- ♦ Belum berjalannya fungsi litbang sebagai motivator dan inisiator dalam pembangunan;
- ♦ Belum memadai sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung penelitian dan pengembangan;
- ♦ Belum terlaksananya pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah;
- ♦ Sinergitas (ABG-C) Academition, Business, Goverment and Comunity belum terlaksana secara optimal;
- ♦ Kesiapan teknologi yang menjadi bagian aspek penguat pada

ekosistem inovasi pada (IDSD) Indeks Daya Saing Daerah belum tersedia.

#### 5. Pengawasan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengawasn, adalah:

- ♦ Belum optimalnya dampak/hasil pelaksanaan tugas pembinaan & pengawasan internal Inspektorat Daerah dalam penjaminan mutu (quality assurance) dan pemberian jasa konsultasi (consulting) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ditinjau dari tingkat akuntabilitas kinerja dan keuangan/aset daerah, tingkat maturitas SPIP, capaian implementasi reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta aspek-aspek lainnya di lingkup Pemerintahan Kab. Bone;
- ♦ Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI berdasarkan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- ♦ Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ♦ Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus kepegawaian terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ♦ Tingkat Ketersediaan Aparatur Pengawasan Internal yang kompeten dan profesional pada Inspektorat Daerah yang belum memadai dibandingkan dengan beban kerja APIP dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- ♦ Tingkat Kapabilitas APIP-Inspektorat Daerah Kab. Bone yang masih kurang dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditinjau dari Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja dan Keuangan, Pengelolaan SDM, Ketersediaan Anggaran beserta Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran.

#### 6. Sekretariat Dewan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sekretariat dewan, adalah:

- ♦ Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- ♦ Terbatasnya tenaga terampil dan profesional baik dari kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan sekretariat DPRD;
- ♦ Belum optimalnya kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan;
- ♦ Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat segera ditindaklanjuti karena banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan dan jumlah sumberdaya manusia yang ada;
- ♦ Masih sangat minim Ranperda inisiatif DPRD karena komitmen DPRD yang masih kurang dalam penyusunan dan pembahasan Perda Inisiatif.

#### 7. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sekretariat daerah, adalah:

- ♦ Manajemen Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi belum memadai;
- ♦ Kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan masih terbatas;
- ♦ Belum Optimalnya pelaksanaan Reviuw terhadap dokumen perencanaan baik subtransi sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai;
- ♦ Belum Optimalnya pembiayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat;
- ♦ Kualitas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Sekretariat masih rendah;

- ♦ Penatausahaan Barang/Aset Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah belum tertib;
- ♦ Pembinaan generasi muda sebagai generasi penerus pembangunan perlu ditingkatkan;
- ♦ Manajemen Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi belum memadai;
- ♦ Luas Wilayah Kabupaten Bone tidak sebanding dengan kemampuan daerah yang sangat terbatas sehingga perlu dilakukan kerjasama;
- ♦ Belum optimalnya Sosialisasi Produk Hukum Daerah;
- ♦ Belum Optimalnya pelaksanaan Penataan Wilayah administrasi pemerintahan;
- ♦ Evaluasi Pembinaan ketertiban umum dan pembinaan kependudukan belum optimal;
- ♦ Pelayanan dan Pembinaan Kehidupan Beragama;
- ♦ Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah belum memadai;
- ♦ Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam masih kurang;
- ♦ Belum Optimalnya pelaksanaan pembinaan kelembagaan pada masing-masing SKPD;
- ♦ Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah masih rendah;
- ♦ Sarana dan Prasarana Pengadaan Barang dan Jasa belum memadai;
- ♦ Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Sekretariat daerah masih rendah;
- ♦ Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi beberapa bagian dengan dinas/ instansi/kantor;
- ♦ Penyusunan Kebijakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Kedinasan KDH/WKDH sangat penting;
- ♦ Informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sangat penting

## **4.2. Isu Strategis**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

### **A. Isu Strategis Global**

#### **1. Revolusi Industri 4.0**

Di pertemuan tahunan internasional yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) beberapa tahun lalu memperkenalkan sebuah konsep baru yang dapat merepresentasikan perubahan kehidupan umat manusia pada semua aspek. Konsep ini menggambarkan bagaimana cara manusia hidup, cara manusia bekerja, dan cara individu berinteraksi mengalami perubahan secara fundamental seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Istilah tersebut kemudian dikenal dengan Revolusi Industri 4.0 (Industrial Revolution 4.0).

Penggunaan terminologi revolusi dalam konsep ini merefleksikan terjadinya perubahan tiba-tiba dan radikal/mendasar pada semua aspek

kehidupan manusia sehingga membuat buram batasan antara lingkungan fisik, digital dan biologis. Jika tiga bentuk revolusi industri sebelumnya (1.0, 2.0, dan 3.0) manusia dan teknologi bekerjasama dalam meningkatkan produksi barang dan jasa, revolusi industri 4.0 justru membuat peran tenaga kerja dalam lini industri menjadi marginal (*disruption*). Berkembangnya *artificial intelligence* (AI), *robotics*, *the internet of things* (IoT), industri mobil tanpa supir (*driverless car*), *3D printing*, *nanotechnology*, *biotechnology*, *materials science*, *energy storage* dan *quantum computing* merupakan penanda bahwa era revolusi industri 4.0 sudah dimulai.

Hingga saat ini, begitu banyak bukti yang menunjukkan efek positif perkembangan teknologi pada semua bidang pekerjaan. Sektor pertanian termasuk salah satu dari sekian banyak sektor yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kita dengan mudah melihat begitu banyak petani di negara-negara ekonomi maju dan berkembang, seperti Eropa, Amerika Serikat, dan China menggunakan teknologi (kecerdasan buatan/*artificial intelligence*) untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Tidak heran jika negara berlahan pertanian sempit seperti Belanda mampu menghasilkan komoditas kentang dengan produksi dua kali lipat lebih banyak daripada pertanian konvensional. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan skala produksi usaha terus meningkat dan membuat biaya marginal produksi sama dengan nol.

Sebagai bagian dalam dunia yang berubah ini, pemerintah Kabupaten Bone sudah sepatutnya memahami dan menjadikan revolusi ini sebagai salah satu isu strategis pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Revolusi lingkungan eksternal ini sangat penting, mendasar, mendesak, dan berefek jangka menengah/panjang, dan sangat menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

## **2. Sustainable Development Goals (SDGs)**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan isu penting dalam pembangunan global saat ini dan 15 tahun ke depan (2016-2030). Secara konseptual, SDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDGs ini terdiri atas 17 sasaran, 169 target, dan 241 indikator pembangunan.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sektor swasta dan lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan secara eksplisit mengenai pentingnya mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa semua agenda-agenda SDGs benar-benar terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pencapaian SDGs harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Adapun capaian pembangunan SDG's Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

a. Indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone dan sudah

mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2018.

Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan  
Sudah Mencapai Target Nasional

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target
1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1-4 Pada tahun 2023, menjamin bahwa semua laki-laki dan Perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (a) 1.4.1 (b) 1.4.1 (c) 1.4.1 (e) 1.4.1 (g) 1.4.1 (h)  Jumlah : 6 Indikator
	1-5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1* 1.5.1.(b) 1.5.1.(e) 1.5.2.(a) 1.5.3*  Jumlah : 6 Indikator
2. Menghilangkan Kelaparan Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1 pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)
	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.* 2.2.1.(a) 2.2.2.(b) 2.2.2.(c)  Jumlah : 4 Indikator
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.* 3.1.2.(a)  Jumlah : 2 Indikator
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri	3.2.1.*



Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target
	kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan angka kematian balita 25 per 1.000.	3.2.2.* 3.2.2.(a) 3.2.2.(b)  Jumlah : 4 Indikator
	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) 3.3.2.(a)  Jumlah : 2 Indikator
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit yang tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a) 3.4.1.(b)  Jumlah : 2 Indikator
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e) 4.1.1.(g)  Jumlah : 2 Indikator
	4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2. (a)  Jumlah : 1 Indikator
	4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejujuran, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1.*  Jumlah : 1 Indikator
	4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan	4.5.1.*  Jumlah : 1 Indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target
	kejujuran, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	
	4.6 Pada tahun 2030, Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b) Jumlah : 1 Indikator
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1.* Jumlah : 1 Indikator
	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a) Jumlah : 1 Indikator
6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang Berkelanjutan	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus, pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b) 6.2.1.(c) Jumlah : 2 Indikator
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua	7.2 Pada Tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1.* Jumlah : 1 Indikator
	7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi ditingkat global sebanyak 2 kali lipat.	7.3.1.* Jumlah : 1 Indikator
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.	8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.* 8.9.1.(c) Jumlah : 2 Indikator
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri inklusif dan berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2 Mempromosikan Industrialisasi inklusi dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan	9.2.1.* 9.2.1.(a) Jumlah : 2 Indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target
	dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya dinegara kurang berkembang.	
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1* Jumlah: 1 indikator
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a) 11.5.1.(c) Jumlah: 2 indikator
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Jumlah: 1 indikator
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a) Jumlah: 1 indikator
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a) Jumlah: 1 indikator
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif,	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b) Jumlah: 1 indikator
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah	16.9.1.(b)

<b>Tujuan</b>	<b>Target (Isu Strategis)</b>	<b>Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target</b>
Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Jumlah: 1 indikator
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi mitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan Dan kerjasama Triangular secara Regional Dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi Yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	
<b>Jumlah Tujuan TPB: 14</b>	<b>Jumlah Target TPB (Isu Strategis): 28</b>	<b>Jumlah Indikator : 51</b>

Sumber : Hasil Analisis Data SDG's Kabupaten Bone Tahun 2017

b. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bone namun belum mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD tahun 2018. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2  
Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

<b>Tujuan</b>	<b>Target (Isu Strategis)</b>	<b>Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target</b>
1. Mengakhiri kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c) 1.3.1.(d)  Jumlah: 2 indikator
	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap	1.4.1.(d) 1.4.1.(j) 1.4.1.(k)  Jumlah: 3 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a) 1.5.1.(c)  Jumlah: 2 indikator
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2* 2.2.2.(a)  Jumlah: 2 indikator
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*  Jumlah: 1 indikator
	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3* 3.3.3.(a) 3.3.5* 3.3.5.(a)  Jumlah: 4 indikator
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c) 3.4.2.(a)  Jumlah: 2 indikator
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a) 4.1.1.(d)  Jumlah: 2 indikator

<b>Tujuan</b>	<b>Target (Isu Strategis)</b>	<b>Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target</b>
	4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*  Jumlah: 1 indikator
6. Menjamin tersedianya serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.1.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)  Jumlah: 1 indikator
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a) 8.9.1.(b)  Jumlah: 2 indikator
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau	9.1.2.(b) 9.1.2.(c)  Jumlah: 2 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	dan merata bagi semua.	
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b) 10.1.1.(c)  Jumlah: 2 indikator
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*  Jumlah: 1 indikator
<b>Jumlah Tujuan TPB: 11</b>	<b>Jumlah Target TPB (Isu Strategis): 18</b>	<b>Jumlah Indikator: 31</b>

Sumber : Hasil Analisis Data SDG's Kabupaten Bone Tahun 2017

c. Indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target

Berikut ini adalah indikator-indikator yang termasuk dalam kategori belum dilaksanakan namun belum mencapai target RPJMN 2019. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3  
Tujuan dan Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, Perempuan dan anak-anak Dari semua usia, yang hidup Dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*  Jumlah: 1 indikator
	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial	1.3.1.(a) 1.3.1.(b)  Jumlah: 2 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	bagi kelompok miskin dan rentan.	
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)  Jumlah: 1 indikator
	1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1* 1.a.2*  Jumlah: 2 indikator
2.Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1* 2.1.2* 2.1.2.(a)  Jumlah: 3 indikator
3.Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* 3.7.1.(a) 3.7.1.(b) 3.7.2* 3.7.2.(a)  Jumlah: 5 indikator
	3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a) 3.8.2* 3.8.2.(a)  Jumlah: 3 indikator
	3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)  Jumlah: 1 indikator



Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1* Jumlah: 1 indikator
	3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1* Jumlah: 1 indikator
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1* 4.1.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Jumlah: 1 indikator
5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* 5.2.1.(a) 5.2.2* Jumlah: 3 indikator
	5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* 5.3.1.(a) 5.3.1.(b) Jumlah: 3 indikator
	5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2* Jumlah: 1 indikator
	5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati	5.6.1.(a) 5.6.1.(b) Jumlah: 2 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b) 6.1.1.(c)  Jumlah: 2 indikator
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e) 6.2.1.(f)  Jumlah: 2 indikator
	6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a) 6.3.1.(b) 6.3.2.(b)  Jumlah: 3 indikator
	6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a) 6.5.1.(c) 6.5.1.(f) 6.5.1.(g)  Jumlah: 4 indikator
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* 8.10.1.(a) 8.10.1.(b)  Jumlah: 3 indikator
	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1* 8.1.1.(a)  Jumlah: 2 indikator
	8.3 Menggalakkan kebijakan	8.3.1*

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	Pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a) 8.3.1.(b) 8.3.1.(c)  Jumlah: 4 indikator
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* 8.5.2* 8.5.2.(a)  Jumlah: 3 indikator
	8.6 Pada tahun 2020, secara Substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*  Jumlah: 1 indikator
	8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*  Jumlah: 1 indikator
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*  Jumlah: 1 indikator
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang beradadi bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1* 10.1.1.(a) 10.1.1.(d) 10.1.1.(f)  Jumlah: 4 indikator
	10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin,	10.2.1*  Jumlah: 1 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	
	10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
	10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	0.4.1.(b)  Jumlah: 1 indikator
11.Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a) 11.1.1.(b)  Jumlah: 2 indikator
	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1* 11.5.2.(a)  Jumlah: 2 indikator
	11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
	11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan	11.b.2*  Jumlah: 1 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a) Jumlah: 1 indikator
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1* 13.1.2* Jumlah: 2 indikator
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1* Jumlah: 1 indikator
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c) Jumlah: 1 indikator
	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a) 16.1.2.(a) 16.1.3.(a) Jumlah: 3 indikator
	16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a) 16.2.1.(b) 16.2.3.(a) Jumlah: 3 indikator
	16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala	16.5.1.(a) Jumlah: 1 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	bentuknya.	
	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* 16.6.1.(a) 16.6.1.(b) 16.6.1.(c) 16.6.1.(d) 16.6.2.(a) Jumlah: 6 indikator
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a) Jumlah: 1 indikator
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1* 17.1.1.(a) 17.1.2* Jumlah: 3 indikator
	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b) 17.18.1.(c) 17.18.1.(d) Jumlah: 3 indikator
	17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b) 17.19.2.(c) 17.19.2.(d) Jumlah: 3 indikator
	17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik,	17.6.2.(b) Jumlah: 1 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	
	17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a) Jumlah: 1 indikator
<b>Jumlah Tujuan TPB: 15</b>	<b>Jumlah Target TPB: 50</b>	<b>Jumlah Indikator: 102</b>

Sumber : Hasil Analisis Data SDG's Kabupaten Bone Tahun 2017

d. Indikator belum Memiliki Data

Pada indikator untuk mencapai TPB di Kabupaten Bone terdapat beberapa indikator yang belum memiliki data pada setiap tujuan dalam TPB di Kabupaten Bone:

Tabel 4.4  
Tujuan dan Target TPB yang Belum Memiliki Data

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Memiliki Data
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1* Jumlah: 1 indikator
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a) 3.3.5.(b) Jumlah: 2 indikator
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi	3.4.2*

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Memiliki Data
	hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Jumlah: 1 indikator
	3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e) 3.5.2* Jumlah: 2 indikator
	3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a) Jumlah: 1 indikator
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1* Jumlah: 1 indikator
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil revidi dari konferensi konferensi tersebut.	5.6.1* Jumlah: 1 indikator
	5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1* Jumlah: 1 indikator
6. Menjamin Ketersediaan	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan	6.2.1.(a)



Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Memiliki Data
serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah: 1 indikator
	6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a) Jumlah: 1 indikator
	6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b) Jumlah: 1 indikator
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1* Jumlah: 1 indikator
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	9.1.1.(b) 9.1.1.(c) Jumlah: 2 indikator
	9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1* 9.3.2* Jumlah: 2 indikator
	9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara,	9.5.1* Jumlah: 1 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Memiliki Data
	pengembangan, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan Pengembangan	
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a) 9.c.1.(b)  Jumlah: 2 indikator
10.Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(e)  Jumlah: 1 indikator
	10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)  Jumlah: 1 indikator
11.Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(b) 11.3.2.(b)  Jumlah: 2 indikator
	11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)  Jumlah: 1 indikator
12.Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus	12.6.1.(a)  Jumlah: 1 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Memiliki Data
	pelaporan mereka.	
	12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
15.Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
16.Menguatkan Masyarakat yangInklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*  Jumlah: 1 indikator
	16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
17.Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a) 17.17.1.(b)  Jumlah: 2 indikator
	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)  Jumlah: 1 indikator
<b>Jumlah Tujuan TPB: 13</b>	<b>Jumlah Target TPB: 29</b>	<b>Jumlah Indikator: 36</b>

Sumber : Hasil Analisis Data SDG's Kabupaten Bone Tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 36 indikator TPB yang belum memiliki data yang berkaitan dengan 13 tujuan dalam TPB. 36 indikator yang belum memiliki data tersebut merupakan tanggung jawab dari OPD yang ada di Kabupaten Bone. OPD yang bertanggung jawab atas ketersediaan data setiap indikator yang belum memiliki data antara lain: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Satpol PP. Setiap OPD memiliki tanggung jawab pada beberapa indikator yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Ketersediaan data merupakan suatu hal penting yang perlu dipenuhi oleh setiap OPD agar dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan pembangunan Kabupaten Bone dapat sesuai dengan kondisi di wilayah perencanaan. Sehingga, perencanaan pembangunan khususnya RPJMD pun dapat sesuai. Oleh karena itu, OPD yang bertanggung jawab atas ketersediaan data di atas dapat menindaklanjuti sehingga mendapatkan data yang relevan untuk proses analisis perencanaan pembangunan Kabupaten Bone.

### **3. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan**

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan daerah menjadi salah satu isu penting untuk memastikan bahwa gender benar-benar memberi warna dalam perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

#### **4. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Terhitung sejak tahun 2015, negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang pada intinya tidak ada lagi hambatan terhadap arus barang dan jasa, manusia dan modal antara sesama negara ASEAN. Liberalisasi perdagangan ini akan berimbas pada meningkatnya intensitas persaingan di pasar domestik akibat membanjirnya produk-produk dari negara-negara ASEAN serta meningkatnya persaingan di pasar ekspor karena tidak adanya lagi hambatan dalam perdagangan internasional lingkup ASEAN. Kabupaten Bone tak terkecuali, akan menerima dampak atas kondisi ini, dan karena itu, perlu mengantisipasinya dengan meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, produktifitas, dan kemampuan berinovasi dari para pelaku ekonomi lokal.

#### **5. Pemanasan Global (*Global Warming*)**

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah dan upaya terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

## **6. Isu Strategis Nasional**

### **1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berjalan hampir dua dasawarsa terakhir, bukan hanya berimplikasi pada besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya, tetapi juga menuntut tumbuhnya potensi sumberdaya pembangunan daerah yang lebih mandiri dalam jangka panjang. Kemandirian pembangunan daerah dalam era desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya diperlukan untuk memperkuat pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumber daya alam secara maksimal dalam rangka pemerataan, keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat NKRI. Salah satu implikasi penting dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui penguatan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar dapat bekerja secara profesional, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

### **2. Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Untuk setiap jenis urusan, pemerintah daerah perlu menetapkan jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip SPM, agar pelayanan publik dapat lebih dioptimalkan. Seperti halnya SDGs, pencapaian SPM harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

### **3. Pembangunan Inklusif**

Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang terdiri atas tiga pilar, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Indeks ini dibuat untuk memastikan bahwa desain pembangunan nasional benar-benar bersifat inklusif. Pemerintah daerah juga didorong untuk mendesain pembangunan daerahnya sesuai dengan pilar pembangunan inklusif, terutama di daerah dengan tingkat ketimpangan dan kemiskinan yang tinggi. Mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Bone masih relatif tinggi, pemerintah Kabupaten Bone perlu memastikan agar pembangunan daerahnya bisa lebih inklusif. Desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone harus berdimensi ganda, di satu sisi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain, tetap mampu menciptakan pemerataan pendapatan dan pengurangan angka kemiskinan.

### **4. Penanggulangan Kemiskinan**

Pemerintah pusat menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi angka kemiskinan. Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu penghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan, diantaranya memperkuat kelembagaan, mendesaian kebijakan, mengkoordinasikan program, dan mengalokasikan anggaran yang signifikan. Pada saat yang sama, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk bersinergi dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendesain berbagai program yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan.

### **5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Seiring dengan perkembangan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka, maka

dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Bone, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Selain penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparat juga menjadi sebuah keharusan untuk menjamin peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga semakin kompleks. Agenda-agenda yang terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan harus benar-benar tercermin di dalam desain perencanaan pembangunan daerah.

## **6. Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Sekitar dua tahun lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Prioritas pembangunan kawasan perdesaan terletak pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan mencakup pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, dan pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.



## **7. Isu Strategis Regional (Pulau Sulawesi)**

### **1. Konektivitas Wilayah**

Pulau Sulawesi merupakan suatu entitas ekonomi yang diharapkan memiliki konektivitas antar wilayah melalui kegiatan industri, perdagangan, dan investasi. Integrasi jaringan transportasi darat, laut, dan udara menjadi faktor yang sangat strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah tersebut. Kabupaten Bone berada dalam jalur transportasi darat dan laut yang menghubungkan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Posisi strategis ini harus dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Bone untuk meningkatkan arus mobilitas barang dan orang sehingga pada gilirannya dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

### **2. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna di wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi penting dilakukan, bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah.

## **8. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan**

### **1. Pembangunan Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik dan air bersih di Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu dioptimalkan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, juga sangat terkait

dengan investasi di daerah. Isu pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan masih bertumpu pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan jaringan kereta api, pengembangan pelabuhan laut, pembangunan waduk dan jaringan irigasi, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

## **2. Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan**

Selama satu dekade terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai isu strategis daerah. Sejak tahun 2008, pemerintah Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah. Pada saat bersamaan, pemerintah Sulawesi Selatan juga mengimplementasikan kebijakan kesehatan gratis dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Di dalam RPJMD ini, Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih menggambarkan mengenai kondisi masa depan yang dicita-citakan atau ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional Tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

**“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

## **5.2. Misi**

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 5.1.  
Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

### **5.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025**

Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2023 merupakan turunan dan penjabaran dari Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Bone tahun 2025. Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025, Visi jangka panjang Kabupaten Bone tahun 2025 adalah:

**"Bone yang Lebih Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, Damai dan Agamis"**

Dengan Visi tersebut diharapkan Kabupaten Bone pada tahun 2025 mendatang terwujud menjadi:

1. Sejahtera, mengandung makna bahwa masyarakat mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
2. Demokratis, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan didukung dengan tata pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif sebagai gambaran *good governance*.
3. Berkeadilan, mengandung makna bahwa kesamaan hak dalam pelayanan kemasyarakatan.
4. Damai, mengandung makna bahwa terciptanya kondisi kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bone diliputi suasana damai, aman, dan tenteram tanpa rasa khawatir dan takut.
5. Agamis, mengandung makna bahwa kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budaya serta menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

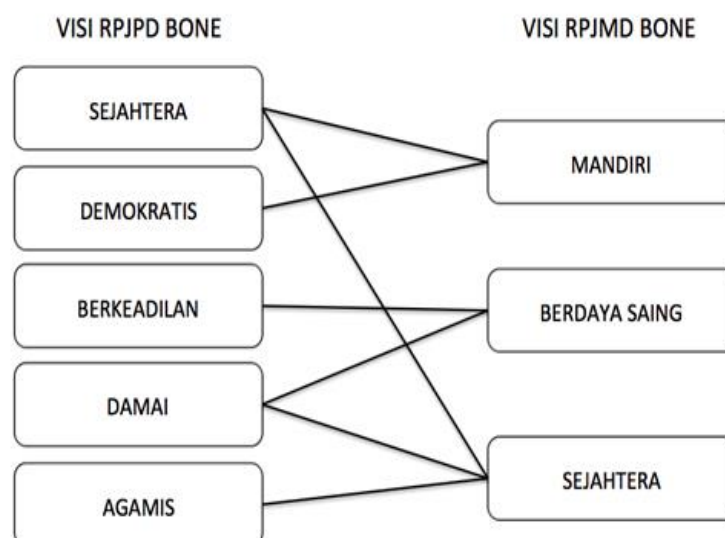
Agar Visi jangka panjang Kabupaten Bone tahun 2025 dapat diwujudkan maka ditempuh Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
3. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
4. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan stabilitas keuangan daerah, peningkatan investasi, dan penanggulangan kemiskinan.
6. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan kebudayaan, peranan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olah raga.
7. Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

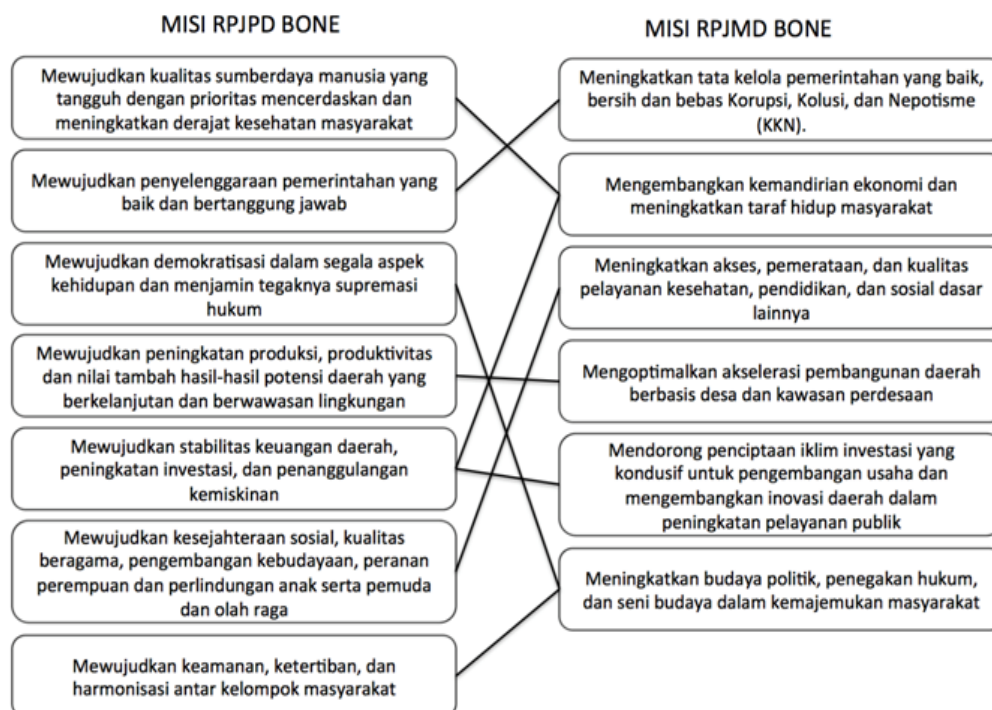
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.1  
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Bone dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone



Sedangkan keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.2.  
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Bone dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone



#### 5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan, Visi jangka menengah Kabupaten Bone harus tetap selaras dengan Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2028, Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah:

**“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**



Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagai berikut:

- Inovatif dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- Kompetitif dimaknakan sebagai Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.
- Produktif dilaksanakan sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- Inklusif dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
- Berkarakter dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

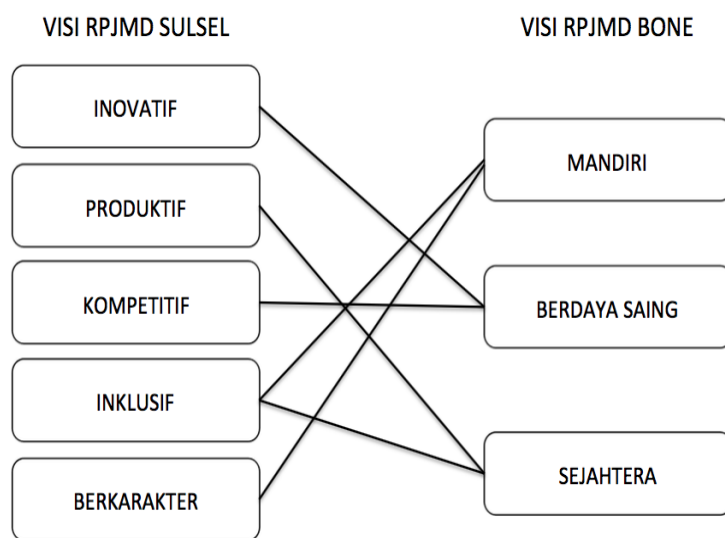
Untuk mencapai Visi tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan sejumlah Misi sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.

5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

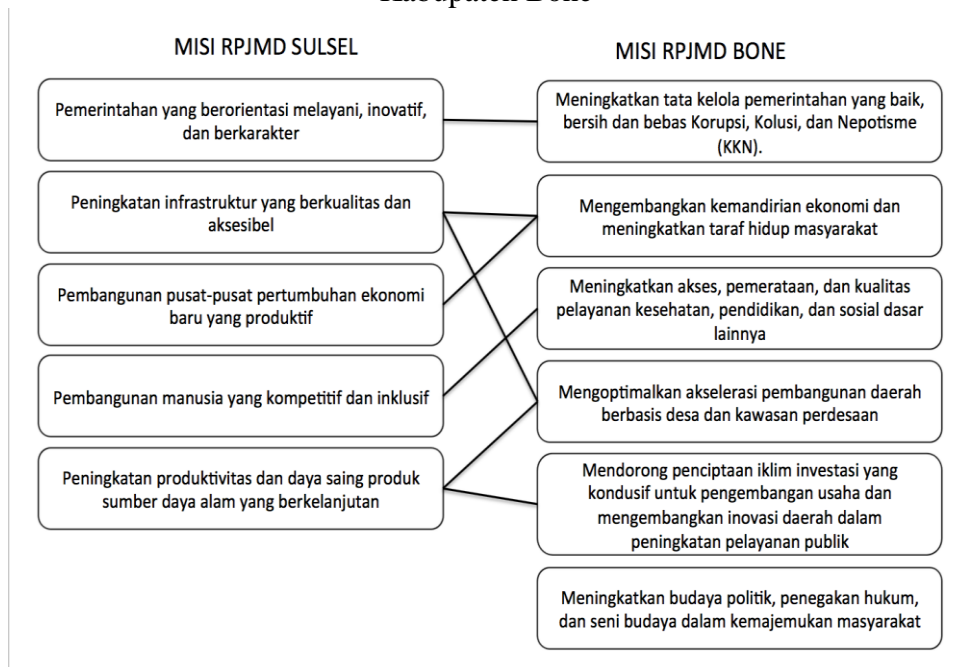
Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.3.  
Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi RPJMD  
Kabupaten Bone



Sedangkan keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.4.  
Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone



### 5.5. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2014-2019

Di dalam RPJMN tahun 2015-2019, Visi Pembangunan Nasional adalah:

**"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**

Disebutkan bahwa Visi ini disusun dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini.

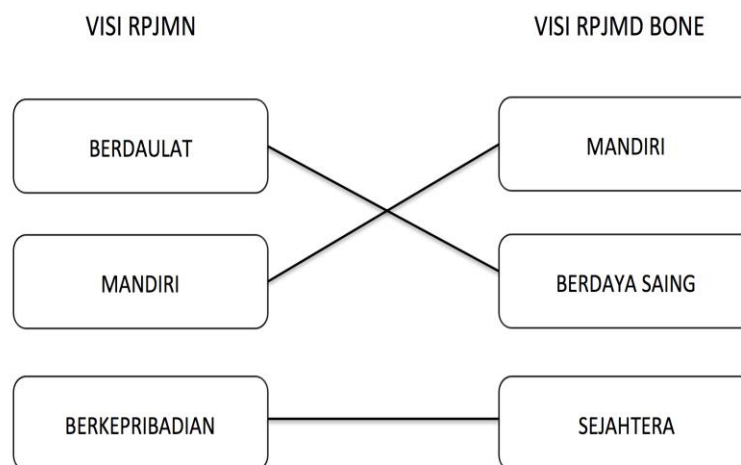
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

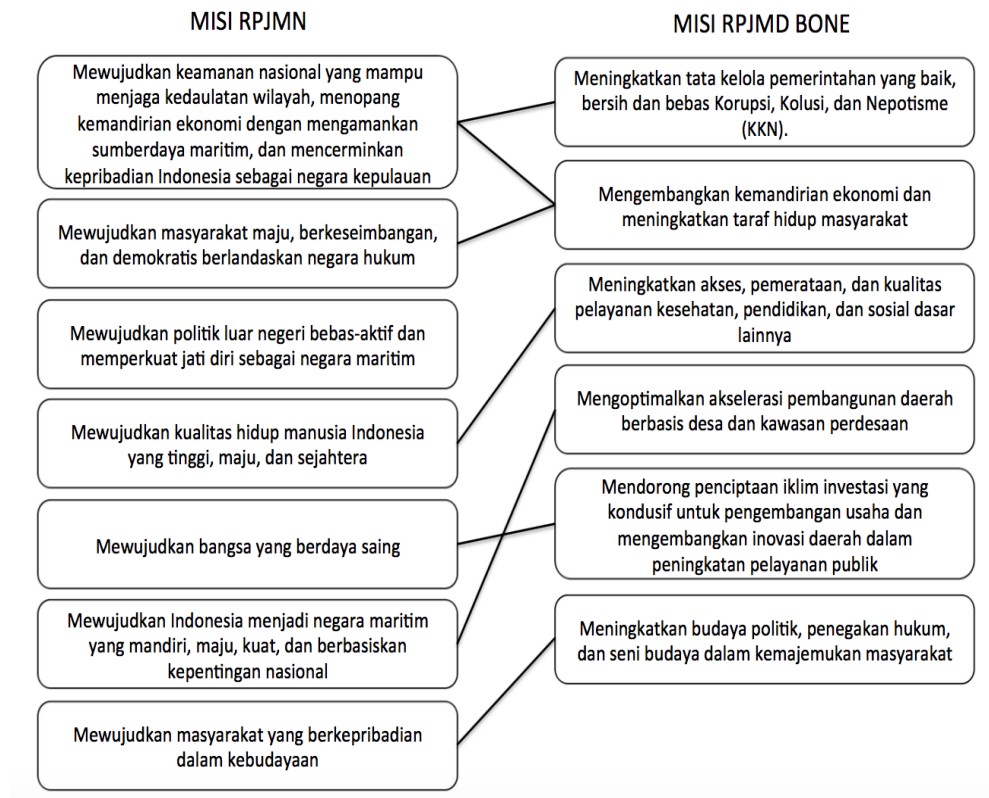
Keselarasan Visi RPJMN tahun 2014-2019 dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.5.  
Keselarasan Visi RPJMN dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone



Sedangkan keselarasan Misi RPJMN tahun 2014-2019 dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.6.  
Keselarasan Misi RPJMN dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone



## 5.6. Tujuan dan Sasaran

Tujuan didalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.

Tabel 5.2  
Penjabaran misi ke dalam formulasi tujuan

No.	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	2. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang berkelanjutan
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	4. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan
5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	5. Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik.
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum 7. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat

Sasaran didalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level impact dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran (kinerja dampak) pada periode 2018 - 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3.  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2023
							2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>“ Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera ”</b>										
	<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)</b>									
1	Tujuan 1	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	CC	CC	B	B	BB
	Sasaran 1.1	Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai SAKIP	Predikat	C	CC	CC	B	BB	BB	A
	Sasaran 1.2	Berkurangnya kasus KKN	Proporsi OPD yang bebas dari KKN	Persen	80	80	85	90	95	98	99
	<b>Misi 2</b>	<b>Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat</b>									
2	Tujuan 2	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang berkelanjutan	Indeks Gini	Indeks	0,386	0,384	0,380	0,377	0,373	0,370	0,366
	Sasaran 2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Persen	8,43	9,44	8,81	9,18	9,46	9,73	10,11
	Sasaran 2.2	Membaiknya daya beli masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	39,15	43,39	47,49	51,60	55,70	59,80	63,91
			Tingkat inflasi	Persen	5,54	5,54	4,66	4,38	4,01	3,75	3,50
	Sasaran 2.3	Tersedianya lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,55	4,40	4,30	4,10	3,90	3,80	3,75
	Sasaran 2.4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	10,28	10,55	10,08	10,00	9,89	9,80	9,75

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2023
							2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sasaran 2.5	Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50,5	60	68	69	70	74	75
	<b>Misi 3</b>	<b>Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya</b>									
3	Tujuan 3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	64,16	65,11	65,84	66,57	67,30	68,03	68,76
	Sasaran 3.1	Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,43	12,64	12,72	12,81	12,89	12,97	13,05
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,77	7,31	7,53	7,75	7,97	8,19	8,41
	Sasaran 3.2	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,22	66,51	66,64	66,78	66,91	67,05	67,18
			Persentase Balita Stunting	Persen	6,36	7,52	7,47	7,42	7,37	7,32	7,27
	Sasaran 3.3	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,93	91,95	91,96	91,98	92,01	92,04	92,07
			Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62,49	62,49	62,53	62,57	62,61	62,65	62,69
	<b>Misi 4</b>	<b>Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan</b>									
4	Tujuan 4	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan	Cakupan Desa/ Kelurahan Sehat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Sasaran 4.1	Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	0,2	0,21	0,21066	0,21132	0,21198	0,21264	0,21330
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih	Persen	78,35	78,75	80,5	82,25	84	85,75	85,75



No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2023
							2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang layak								
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi air limbah	Persen	75,61	76,18	77,62	79,06	80,5	81,99	83,43
			Rasio Jaringan Irigasi	Mtr/ Ha	3,71	4,30	4,68	5,06	5,44	5,83	6,21
			Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	59,18	59,18	60,16	61,14	62,12	63,10	64,08
	<b>Misi 5</b>	<b>Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik</b>									
5	Tujuan 5	Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61-88,30 (B)	76,61-88,30(B)	76,61-88,30(B)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)
	Sasaran 5.1	Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai PMDN/PMA	Rp Miliar	-	135	150	175	200	225	250
	Sasaran 5.2	Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Inovasi	-	-	1	1	1	1	1
	<b>Misi 6</b>	<b>Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat</b>									
	Tujuan 6.1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	72	73	74	75	76	78	79
	Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakat	Persentase angka kriminalitas tertangani	Persen	78,29	80,11	82,34	84,27	86,45	88,13	90,08

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2023
							2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sasaran 6.2	Berkurangnya kasus kriminalitas	Angka Kriminalitas	Kasus	1.193	1.073	966	870	783	704	634
	Tujuan 6.2	Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,165	0,176	0,189	0,202	0,215	0,228	0,241
	Sasaran 6.3	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Jumlah wisatawan	Orang	127.800	131.000	153.493	168.767	185.588	204.098	220.353

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### 6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Sub-bab ini akan menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.<sup>[1]</sup>

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka selanjutnya dirumuskan strategi yang disajikan dalam sebuah matriks keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).		
1.1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN	Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan	Melakukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi dan kearifan budaya lokal
	Berkurangnya kasus KKN	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengukuran dan capaian kinerja pembangunan
Misi 2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat		
2.1. Meningkatkan kinerja perekonomian	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan akses layanan infrastruktur

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
daerah yang berkelanjutan	Membaiknya daya beli masyarakat	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat
	Tersedianya lapangan pekerjaan	Membangun pusat-pusat ekonomi kawasan kecamatan
	Menurunnya angka kemiskinan	Mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin.
	Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Misi 3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya		
3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas
	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas
	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak	Menyebarkan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan kecakapan hidup
Misi 4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan		
4.1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan	Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Mempercepat dan meningkatkan layanan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan
Misi 5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik		
5.1. Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik	Meningkatnya daya tarik investasi	Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan
	Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik	Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital
Misi 6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat		

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
6.1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum	Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakat	Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat
	Berkurangnya kasus kriminalitas	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta upaya antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
6.2. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan seni serta pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal dengan melibatkan lembaga non pemerintah.

## 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang disesuaikan dengan masing-masing strategi yang telah dipilih. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Terdapat sejumlah strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tab 6.2.  
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Melakukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi dan kearifan budaya lokal	Penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan publik	Penguatan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan publik	Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
2	Meningkatkan	Penguatan	Optimalisasi	Konsistensi	Konsistensi	Konsistensi

No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
	kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengukuran dan capaian kinerja pembangunan	kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen perencanaan pembangunan daerah
3	Meningkatkan akses layanan infrastruktur	Pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota	Pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota	Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota	Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota	Pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota
4	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat	Peningkatan dukungan sarana dan prasarana sektor-sektor ekonomi di wilayah wilayah potensial	Peningkatan sarana dan prasarana sektor-sektor ekonomi di wilayah pesisir dan perbatasan	Akselerasi Peningkatan sarana dan prasarana sektor-sektor ekonomi di wilayah pesisir dan perbatasan	Akselerasi Peningkatan sarana dan prasarana sektor-sektor ekonomi di wilayah pesisir dan perbatasan	Pengembangan sektor-sektor ekonomi di wilayah pesisir dan perbatasan
5	Membangun pusat-pusat ekonomi kawasan kecamatan	Perbaikan infrastruktur dasar di kawasan kecamatan	Perbaikan infrastruktur dasar di kawasan kecamatan	Pengembangan industri kecil dan menengah	Akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan industri kecil dan menengah
6	Mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin	Identifikasi kebutuhan dasar penduduk miskin	Perbaikan sistem data dan informasi penduduk miskin	Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan TKPKD	Tanggung miskin bagi setiap Perangkat Daerah per kecamatan	Tanggung miskin bagi setiap Perangkat Daerah per kecamatan
7	Mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Identifikasi sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	Penyiapan regulasi dan SDM terkait dengan pengendalian lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan	Peningkatan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan	Peningkatan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan
8	Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas	Penguatan basis data terkait partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan dan penguatan kapasitas perencanaan	Penguatan perencanaan Pendidikan termasuk di tingkat desa untuk optimalisasi implementasi program dan kebijakan	Akselerasi implementasi program dan kebijakan termasuk diseminasi praktik-praktik baik untuk menjangkau yang belum terjangkau.	Akselerasi implementasi program dan kebijakan termasuk diseminasi praktik-praktik baik untuk menjangkau yang belum terjangkau.	Pemantapan dan revaluasi kapasitas kelembagaan dalam perencanaan Pendidikan di semua jenjang

No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan	Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan	Akselerasi pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, di seluruh kecamatan
		Pemerataan tenaga pendidik di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga pendidik di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga pendidik di desa-desa terpencil		
9	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan	Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan	Akselerasi pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan
		Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil
10	Menyebarkan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan kecakapan hidup	Pengembangan data terpilih terkait dengan pembangunan daerah	Pelibatan berbagai pelaku pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Pelibatan berbagai pelaku pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah	Peningkatan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah
11	Mempercepat dan meningkatkan layanan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan	Pengembangan jaringan infrastruktur jalan, listrik, sanitasi dan air bersih	Pengembangan jaringan infrastruktur jalan, listrik, sanitasi dan air bersih	Pengembangan jaringan infrastruktur jalan, listrik, sanitasi dan air bersih	Pengembangan jaringan infrastruktur jalan, listrik, sanitasi dan air bersih	Pengembangan jaringan infrastruktur jalan, listrik, sanitasi dan air bersih
12	Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan	Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat	Penciptaan iklim investasi yang kondusif termasuk kemudahan dalam perizinan	Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital	Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital	Pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital
13	Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital	Pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi	Penguatan sistem dan data base	Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital	Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital	Pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital

No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
					digital	
14	Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat	Kordinasi pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan pendidikan politik masyarakat	Pemantapan pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan pendidikan politik masyarakat	Pemantapan pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan pendidikan politik masyarakat	Akselerasi pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan pendidikan politik masyarakat	Pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan pendidikan politik masyarakat
15	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta upaya antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial	Kordinasi pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pemantapan pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pemantapan pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Akselerasi pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
16	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan seni serta pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal dengan melibatkan lembaga non pemerintah	Inventarisasi dan pemetaan daya tarik wisata dan seni budaya dan produk lokal	Perbaikan infrastruktur dasar di kawasan destinasi pariwisata	Pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal	Akselerasi pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal	Pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal

### 6.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bone untuk periode 2018-2023, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya.



4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan.
5. Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7. Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 6.3  
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone.

NO	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2019)	PRIORITAS SULSEL (Ranwal RPJMD Sulsel)	PRIORITAS KAB. BONE
1.	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2.	Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.	Penguatan infrastruktur wilayah.	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3.	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.	Pengembangan kawasan pertumbuhan.	Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya
4.	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi.	Percepatan pembangunan daerah dengan bertumpu pada pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
5.	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.	Pembangunan manusia.	Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6.		Hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam.	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7.		Pelestarian lingkungan hidup.	Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

#### 6.4. Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tabel 6.4  
Penyesuaian Nomenklatur Program KDH Terpilih ke dalam Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri 86/2016 Beserta Perubahannya.

NO	Program KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri 13/2006 Beserta Perubahannya
1	Program penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Pengembangan dan Implementasi E-Government
2	Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran badan usaha milik desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3	Pembangunan pusat ekonomi kawasan kecamatan	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4	Peningkatan bantuan usaha bagi industri dan UMKM dan menciptakan jenjang pemasaran hasil UMKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
5	Program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6	Program pengentasan kemiskinan by name by address	Program Perencanaan Sosial Budaya
7	Program pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
8	Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</li> </ul>
9	Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis dan paramedis	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
11	Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12	Program pemberian insentif imam	Bantuan Sosial

NO	Program KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri 13/2006 Beserta Perubahannya
	masjid dan guru mengaji	
13	Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
14	Pembangunan dan pemanfaatan pusat layanan keselamatan terpadu (tenaga medis dan paramedik-pemadam kebakaran-penanganan bencana)	(Ditempatkan di Arah Kebijakan) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
15	Program perwilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan	(Ditempatkan di Arah Kebijakan)
16	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam	(Ditempatkan di Arah Kebijakan) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
17	Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan peluang investasi ( <i>potential region dashboard</i> )	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
18	Program menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>• Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> <li>• Program Pengembangan Nilai Budaya</li> </ul>

Tabel 6.5  
Pemetaan Program Pembangunan Daerah Menurut Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
<b>Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN	Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Berkurangnya kasus KKN	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap
				Program Pengembangan Perikanan Budidaya
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
			Membaiknya daya beli masyarakat	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
				Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Hasil Peternakan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
				Program Pengembangan Perekonomian Daerah
			Tersedianya lapangan pekerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Menurunnya angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Program Perencanaan Sosial Budaya
			Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular
				Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan	Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Program Pengembangan Perumahan
				Program Pengembangan Sanitasi dan Air Minum
				Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik	Meningkatnya realisasi investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum	Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakat	Program Pengembangan (SIDa)
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
				Program Pendidikan Politik
			Berkurangnya kasus kriminalitas	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
		Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Tabel 6.6  
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif  
Kabupaten Bone

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/P rogram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM D (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD			
				Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)															
		Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN															
		Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan															
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (%)	95	100	228.402	100	262.662	100	296.923	100	331.183	100	365.443	100	1.484.613	Sekretariat DPRD
			Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar (%)	72,73	77,27	5.790.019	81,82	5.905.820	86,36	6.173.936	90,91	6.144.415	100	6.267.303	100	30.281.493	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (%)	29,61	29,69		29,78		29,86		29,94		30,10		30,10		
			Ketetapan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai ketentuan	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu				
			Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	38,43	36,98		50		50		50		50		50		
			Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD (%)	61,57	63,02		50		50		50		50		50		
			Persentase Belanja Modal terhadap total APBD (%)	11,75	30		30		30		30		30		30		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD			
				Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15,53	15,61		15,68		15,76		15,84		15,92		15,92			
		Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD (%)	21,63	21,74		21,85		21,96		22,07		22,18					
		Persentase SILPA terhadap Total APBD (%)	4,23	3,15		2,76		2,41		2,10		1,97					
		Persentase penyaluran Belanja Daerah (%)	95	96,85		97,24		97,59		97,90		98,03					
		Persentase penyajian LKPD sesuai SAP berbasis Akrua (%)	86,67	90,13		93,74		97,49		100		100					
		Presentase realisasi PAD terhadap pencapaian target (%)	100	100	4.145.591	100	6.054.224	100	6.356.936	100	6.674.782	100	7.008.522	100	30.240.055	Badan Pendapatan Daerah	
		Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan PAD yang tersusun setiap tahun (%)	100	100		100		100		100							
		Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Persentase peningkatan nilai SAKIP (%)	100	100	770.000	100	847.000	100	924.000	100	1.001.000	100	1.078.000	100	4.620.000	Sekretariat Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	687.000	100	744.051	100	818.456	100	900.302	100	990.332	100	4.140.141	Bappeda
		Berkurangnya kasus KKN															
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas kinerja minimal B (>60 – 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (%)	<50	55	2.020.000	65	2.540.000	75	2.665.000	85	2.720.000	95	2.870.000	95	12.815.000	Inspektorat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/P rogram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM D (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD		
				Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi (Skor)	>30-50	>50- 60		>50-60		>60-70		>60-70		>70-80		>70-80		
		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) (%)	<50	50		60		70		80		90				
		Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI (%)	85	90		95		95		100		100				
		Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab) (%)	75 75	80 80		85 85		90 90		95 95		100 100		100 100		
		Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	350	375		400		425		430		435		435		
		Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan (%)	85	90		95		95		100		100		100		
		Persentase peningkatan system pengawasan internal kecamatan (%)	100	100	1.072.5 68	100	1.179.8 25	100	1.297.8 07	100	1.427.58 8	100	1.570.34 7	100	6.548.135	Kecamatan
		Persentase terwujudnya pelaksanaan kebijakan KDH (%)	100	100	1.143.26 0	100	1.257.58 6	100	1.371.91 2	100	1.486.238	100	1.600.564	100	6.859.560	Sekretariat DPRD

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/P rogram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Kondisi Kinerja Awal RPJM D (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR (%)	95	96	182.500	97	186.150	98	189.873	99	193.670	100	197.544	100	949.737	Badan Peng. Keuangan dan Aset Daerah
2			Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat															
			Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang Berkelanjutan															
			Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi															
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan rehabilitasi dan revitalisasi pasar (%)	12	11	5.666.649	12	6.854.715	14	7.528.398	16	8.269.012	16	9.083.228	16	37.402.002	Dinas Perdagangan
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan peningkatan industri kecil dan menengah (%)	100	100	278.020	100	1.145.000	100	1.380.000	100	1.605.000	100	1.860.000	100	6.268.020	Dinas Perindustrian
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase pengembangan sentra-sentra industri potensial (%)	-	100	1.499.000	100	1.954.000	100	2.064.000	100	2.159.000	100	2.239.000	100	9.915.000	Dinas Perindustrian
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi : - Padi (ton) - Jagung (ton) - Kedelai (ton) - Bawang Merah - Cabe (ton) - Sukun (ton) - Kelapa (Ton) - Kopi (ton) - Kakao (ton) - Cengkeh (ton) - Tebu (ton)	1.428.883 402.486 13.047 26 22 40 14.282 319 10.692 4.949 40.561	1.514.616 426.635 13.830 28 23 42 15.139 338 1.134 5.246 42.995	12.394.000	1.605.493 452.233 14.660 29 25 45 16.047 358 12.014 5.561 45.574	14.901.000	1.701.823 479.367 15.539 31 26 48 17.010 380 12.734 5.894 48.309	15.166.600	1.803.932 508.129 16.472 33 28 50 18.031 403 13.498 6.248 51.207	17.471.060	1.912.168 538.617 1.760 35 29 54 19.113 427 14.308 6.623 54.280	19.854.816	1.912.168 538.617 1.760 35 29 54 19.113 427 14.308 6.623 54.280	79.787.476	Dinas Pertanian, Taanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				Cakupan ketersediaan energi dan protein (perkapita/hari)	1128,5	1130	1.027.068	1132	1.235.029	1134	1.317.855	1136	1.405.396	1136	1.495.045	1136	6.480.393	Dinas Ketahan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/P rogram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM D (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD					
				Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)	14	18	20		22		24		27		27					
				Tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	90	91		92		93		94		95					
				Tingkat Konsumsi Energi dan protein (perkapita/hari)	1.026	1.028		1.030		1.032		1.034		1.036			1.036		
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksifitas : - Padi (Kw/Ha) - Jagung (Kw/Ha) - Kedelai (ton) - Bawang Merah (Kw/Ha) - Cabe Besar (Kw/Ha) -Sukun (Kw/Ha) - Kelapa (Kw/Ha) - Kopi ((Kw/Ha) - Kakao (Kw/Ha) - Cengkeh (Kw/Ha) - Tebu (Kw/Ha)	59,03 55,89 19,42 84,50 42,70 0,60 1293,00 420,00 542,00 722,00 40,501,50	62,57 59,24 20,59 89,57 45,26 0,64 1370,58 445,2 552,84 736,44 41,311,53	904.887	66,33 62,8 21,82 94,94 47,98 0,67 1452,81 471,91 563,9 751,17 42,137,76	1.009.054	70,31 66,57 23,13 100,64 50,86 0,71 1539,98 500,23 575,17 766,19 42,980,52	1.129.432	74,52 70,56 24,52 100,68 53,91 0,76 1632,38 530,24 586,68 781,52 43,840,13	1.226.849	79,00 74,79 25,99 113,08 57,14 0,80 1730,33 562,05 598,41 797,15 44,716,93	1.324.178	79,00 74,79 25,99 113,08 57,14 0,80 1730,33 562,05 598,41 797,15 44,716,93	5.594.400	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	46.746,90	47.681,83	1.810.400	49.112,29	2.057.740	51.075,78	2.227.010	53.630,62	2.410.290	53.630,62	2.608.730	56.848,46	11.114.170	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah produksi nelayan (ton)	32.722,83	33.377,29		34.378,61		35.541,44		37.541,44		39.793,92				
				Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	356.896,90	371.172,56	2.529.550	389.731,19	2.777.480	413.115,068	3.039.210	442.033,12	3.332.080	442.033,12	3.653.680	477.395,77	15.332.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah produksi pokdakan (ton)	248.964	261.412		274.483		288.207		302.617		302.617		317.748		
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	100	100	398.120	100	399.143	100	400.176	100	401.219	100	402.273	100	2.000.931	Dinas Peternakan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/P rogram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Kondisi Kinerja Awal RPJM D (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD				
				Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD (%)	100	100	473.000	100	520.300	100	572.330	100	629.563	100	692.520	100	2.887.713	Bappeda
			Membaiknya daya beli masyarakat															
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani (%)	100	100	1.837.93 5	100	1.911.28 1	100	2.062.90 9	100	2.215.699	100	2.374.768	100	10.402.59 2	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase peningkatan kesejahteraan kelompok peternak (%)	85	90	502.795	90	507.423	95	512.097	100	516.818	100	584.616	100	2.623.749	Peternakan
			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase jumlah nelayan yang terberdayakan (%)	100	100	300.000	100	330.000	100	363.000	100	399.000	100	439.000	100	1.831.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase jumlah legalitas usaha pembudidayaan ikan yang terfasilitasi (%)	100	100	300.000	100	1.000.0 00	100	400.000	100	450.000	100	500.000	100	2.650.000	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan (%)	95	95	480.000	95	490.000	95	500.000	100	510.000	100	520.000	100	2.500.000	Dinas Peternakan
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (%)	80	85	121.576	90	216.025	95	237.628	100	261.390	100	287.529	100	1.124.148	Dinas Perdagangan
			Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perekonomian Daerah	-	100	1.300.00 0	100	1.430.00 0	100	1.560.00 0	100	1.690.000	100	1.820.000	100	7.800.000	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM D (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Tersedianya lapangan pekerjaan															
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	69,81	72,84	1.264.133	75,88	1.386.971	78,92	81,96	1.671.685	85	1.835.353	85	7.680.810	Dinas Ketenagakerjaan	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	59,50	64,60		69,70		74,80			79,90		85			85
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencaker yang terdaftar dan yang ditempatkan (%)	78,19	78,29	1.382.931	78,49	1.520.724	78,69	1.671.797	78,89	1.837.476	79,09	2.024.224	79,09	8.437.152	Dinas Ketenagakerjaan
		Menurunnya angka kemiskinan															
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	95,35	96,15	510.000	96,55	932.000	97,32	1.025.200	97,89	1.127.720	99,50	1.240.492	99,50	4.835.412	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	73,35	80,25	318.259	87,15	1.120.000	90,25	1.030.000	95,55	1.165.000	100	885.000	100	4.518.259	Dinas Sosial
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam RKPD (%)	100	100	575.000	100	632.500	100	695.750	100	765.325	100	841.857	100	3.510.432	Bappeda
		Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup															
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data tingkat pencemaran lingkungan hidup (%)	60	60	1.320.000	65	955.000	70	920.000	75	1.215.000	80	1.405.000	80	5.815.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Persentase pemenuhan kriteria penilaian adipura (%)	50	70		75		75		80		80		80		
			Persentase ketaatan pemrakarsa terhadap hukum lingkungan (%)	80	80		85		90		95		100		100		
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase ketersediaan data informasi kualitas udara wilayah perkotaan (%)	70	70	65.000	75	65.000	75	67.500	80	67.500	80	70.000	80	335.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampahkabupaten (%)	20	20	6.380.378	25	6.550.000	30	7.075.000	35	7.875.000	40	8.400.000	40	36.280.378	Dinas Lingkungan Hidup
3		Meningkatkan Akses, Pemerataan, Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Dan Sosial Dasar Lainnya															
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif															
		Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat															
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63,88	68,99	407.987	72,44	461.246	76,07	507.381	79,87	558.119	83,86	613.932	83,86	2.548.665	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,87	105,90	165.618.071	105,95	126.637.464	106	139.154.210	106,3	153.910.681	106,5	169.319.839	106,5	754.640.265	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	97,95	97,90		98,00		98,50		98,75		99,00		99,00		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	87,16	87,50		87,80		88,00		89,00		90,00		90,00		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	81,53	82,00		82,30		82,86		83,25		83,50		83,50		
			Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,11	0,10		0,09		0,09		0,08		0,07		0,07		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD			
				Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,20	0,18		0,15		0,12		0,10		0,08		0,08		
		Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat															
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan (%)	80	80	5.374.210	80	5.793.931	85	6.373.324	85	7.010.657	90	7.711.722	90	32.263.844	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (%)	-	-	-	90	110.000	90	121.000	95	133.100	95	146.410	95	510.510	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan penyehatan lingkungan (%)	100	100	14.731.200	100	16.204.320	100	17.824.752	100	19.607.227	100	21.567.949	100	89.935.448	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan realisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (%)	-	100	508.866	100	759.753	100	835.728	100	919.301	100	1.011.231	100	4.034.879	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Cakupan pelaksanaan pemantauan faktor resiko Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	266.585	100	458.244	100	504.068	100	554.475	100	609.922	100	2.393.294	Dinas Kesehatan
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelaksanaan perbaikan Gizi masyarakat (%)	100	100	802.815	100	1.033.097	100	1.136.406	100	1.250.047	100	1.375.051	100	5.597.416	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak															
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG aktif ditingkat kabupaten,kecamatan, desa dan kelurahan (%)	11,55	24,66	509.130	39,77	843.494	57,77	1.001.980	70	1.056.956	80	1.118.314	80	4.529.874	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak (%)	38,46	51,28		58,97		69,23		82,55		89,74		100		Perlindungan Anak	
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan (%)	44,88	44,88	465.130	53,33	847.160	60	881.314	66,66	918.283	66,66	958.349	66,66	4.270.236	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4		Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa Dan Kawasan Perdesaan																
			Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan															
			Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar															
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase capaian pengembangan perumahan yang representatif (%)	100	100	575.000	100	7.734.500	100	8.508.500	100	8.543.150	100	8.389.132	100	33.750.282	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Sanitasi dan Air Minum	Persentase peningkatan jumlah layanan air minum dan sanitasi yang layak(%)	77,26	78,19	8.717.600	79,78	9.253.862	81,50	9.852.751	82,49	10.486.027	84,59	11.162.469	84,59	49.472.709	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya	Persentase embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik (%)	70	80	10.200.000	100	10.200.000	100	10.200.000	100	10.200.000	100	10.200.000	100	51.000.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pembangunan jalan kabupaten(%)	25,21	26,17	32.500.000	28,09	52.500.000	30,34	72.500.000	32,58	72.500.000	34,83	72.500.000	34,83	302.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
				Persentase pembangunan jembatan (%)	31,31	31,83	3.000.000	32,45	4.000.000	33,17	5.000.000	33,89	4.500.000	34,62	4.500.000	34,62	21.000.000	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten yang dipelihara (%)	62,84	62,95	13.881.820	71,16	41.900.000	79,36	41.900.000	87,57	41.900.000	95,78	41.900.000	95,78	181.481.820	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
5		Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Pengembangan Usaha Dan Mengembangkan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik.															
		Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik															
		Meningkatnya realisasi investasi															
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor penanamanmodal (investor)	43	50	336.204	60	369.825	65	406.807	80	447.488	90	492.237	90	2.052.561	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai realisasi investasi (Milyar)	136	150	31.764	175	34.941	200	38.435	225	42.278	250	46.506	250	193.924	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik															
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	2.034.996	100	1.943.145	100	2.137.460	100	2.351.206	100	2.586.326	100	11.053.133	Sekretariat Daerah (semua Perangkat Daerah)
			Cakupan pemenuhan kualifikasi SDM sesuai standar RS tipe B (%)	100	100	8.420.000	100	8.860.000	100	9.300.000	100	9.740.000	100	10.180.000	100	46.500.000	RSUD
		Program Pengembangan (SIDa)	Persentase cakupan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah (%)	-	100	354.748	100	742.000	100	824.200	100%	893.620	100	969.782	100	3.784.350	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6		Meningkatkan Budaya Politik, Penegakan hukum, Dan Seni Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat.															
		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM D (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Piode RPJMD				
				Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakatan															
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Cakupan peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik (%)	90	92	3.220.832	94	3.681.874	95	3.865.968	96	4.059.266	97	4.262.229	98	19.090.169	Badan Kesbangpol
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan (%)	73	74	851.748	75	894.335	76	939.052	78	986.004	79	1.035.304	79	4.706.443	Badan Kesbangpol
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	5.530.600	100	6.083.660	100	6.692.026	100	7.361.229	100	8.097.351	100	33.764.866	Satpol PP
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	2.563.400	100	2.819.740	100	3.101.714	100	3.411.885	100	3.753.074	100	15.649.813	Satpol PP
			Berkurangnya kasus kriminalitas															
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	550.650	100	605.715	100	666.287	100	732.915	100	806.207	100	3.361.774	Satpol PP
			Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat															
			Meningkatnya daya tarikpariwisata															
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan objek daya tarik wisata (ODTW) (%)	100	100	5.064.653	100	9.300.000	100	12.450.000	100	13.225.000	100	13.885.000	100	53.924.653	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (orang)	153.493	153	981.800	169	1.000.000	186	1.000.000	204	1.010.000	220	1.020.000	220	5.011.800	Dinas Pariwisata
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase peningkatan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (%)	100	100	212.000	100	612.020	100	672.722	100	740.544	100	814.599	100	3.051.885	Dinas Kebudayaan



## BAB VII

### KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

#### 7.1. Kerangka Pendanaan

Subbab ini memuat Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone untuk periode 2018-2023. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah ini berasal dari perhitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang telah dihitung di bagian akhir Bab III Gambaran Keuangan Daerah. Kerangka Pendanaan ini dirinci menurut Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Tabel 7.1  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone, 2018-2023  
(Milyar Rupiah)

Kode	Kapasitas Riil/Belanja			Proyeksi					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
			<b>KAPASITAS RIIL</b>	766,39	890,50	1.026,14	1.206,41	1.403,66	1.639,75
			<b>BELANJA</b>	2.270,78	2.511,66	2.818,54	3.165,43	3.549,20	3.984,77
			<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.359,31	1.502,31	1.577,73	1.664,42	1.759,29	1.273,10
			Belanja Pegawai	849,6	1.017,0	1.067,9	1.128,8	1.196,5	1.273,1
			Belanja Bunga	253,3	-	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
			Belanja Hibah	97,60	25,33	26,60	27,93	29,33	30,79
			Belanja Bantuan Sosial	5,98	1,42	1,49	1,56	1,64	1,72
			Belanja bagi Hasil Kepada Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	4,59	5,98	6,58	7,24	7,96	8,76
			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	401,26	450,99	473,54	497,22	522,08	548,18
			Belanja Tidak Terduga	10,22	1,50	1,57	1,65	1,73	1,82
			<b>Belanja Langsung</b>	876,68	901,60	958,91	1.027,41	1.100,54	1.174,10
			Belanja Pegawai	-	17,33	13,87	11,09	8,87	7,10
			Belanja Barang dan jasa	611,42	592,64	628,20	665,89	705,85	748,20
			Belanja Modal	265,25	291,61	316,83	350,42	385,81	418,80

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD, 2018

## **7.2. Program Perangkat Daerah**

Sub-bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Program perangkat daerah merupakan rangkaian tindakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan daerah, baik permasalahan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah maupun yang terkait dengan permasalahan perangkat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, program perangkat daerah mencakup program pembangunan daerah yang relevan dengan urusan perangkat daerah bersangkutan dan program perangkat daerah itu sendiri.

Tab 7.2

## Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bone Tahun 2019-2023

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
		Pendidikan															
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63,88	68,99	407.987	72,44	461.246	76,07	507.381	79,87	558.119	83,86	613.932	83,86	2.548.665	DINAS PENDIDIKAN
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,87	105,90	165.618.071	105,95	126.637.464	106	139.154.210	106,3	153.910.681	106,5	169.319.839	106,5	754.640.265		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	97,95	97,90		98,00		98,50		98,75		99,00		99,00			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	87,16	87,50		87,80		88,00		89,00		90,00		90,00			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	81,53	82,00		82,30		82,86		83,25		83,50		83,50			
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,11	0,10		0,09		0,09		0,08		0,07		0,07			
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,20	0,18		0,15		0,12		0,10		0,08		0,08			
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	1017,0	1017,36	92.521	1068,23	122.773	1121,64	133.950	1177,72	146.645	1236,61	160.460	1236,61	656.349		
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	1471,11	1544,66		1621,89		1702,99		1788,14		1877,14		1877,14			
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (%)	100	100	1.050.000	100	6.980.000	100	5.252.375	100	6.223.456	100	5.929.085	100	25.434.916	
		Program Pendidikan Menengah	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf	60,30	60,35	3.035.647	62,16	3.439.700	64,03	3.783.670	65,95	4.162.037	67,92	4.578.241	67,92	18.999.295	
		Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	62,80	63,50	5.881.810	65,00	7.164.043	65,68	7.816.447	70,12	8.348.092	75,00	9.122.901	75,00	38.333.293	
		Kesehatan															
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan realisasi ketersediaan obat (%)	100	100	5.403.049	100	5.963.354	100	6.559.689	100	7.215.658	100	7.937.224	100	33.078.974	DINAS KESEHATAN
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan penyehatan lingkungan (%)	100	100	14.731.200	100	16.204.320	100	17.824.752	100	19.607.227	100	21.567.949	100	89.935.448	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Pengawasan obat dan makanan (%)	100	100	17.000	100	18.700	100	20.570	100	22.627	100	24.890	100	103.787	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	31.803.000	100	35.038.000	100	38.542.130	100	42.396.343	100	46.635.977	100	194.415.450	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelaksanaan perbaikan Gizi masyarakat (%)	100	100	802.815	100	1.033.097	100	1.136.406	100	1.250.047	100	1.375.051	100	5.597.416	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan lingkungan sehat (%)	100	100	721.643	100	823.807	100	906.188	100	996.806	100	1.096.487	100	4.544.931	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan realisasi pelayanan kesehatan penduduk miskin(%)	100	100	24.400	100	26.840	100	29.524	100	32.476	100	35.724	100	148.964	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS (%)	100	100	112.215.626	100	123.437.189	100	135.780.907	100	149.358.998	100	164.294.898	100	685.087.618	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Pustu dan Jaringannya	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di PKM dan jaringannya (%)	100	100	16.307.690	100	18.438.459	100	20.282.305	100	22.310.535	100	24.541.589	100	101.880.578	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan realisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (%)	-	100	508.866	100	759.753	100	835.728	100	919.301	100	1.011.231	100	4.034.879	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (%)	-	-	-	90	110.000	90	121.000	95	133.100	95	146.410	95	510.510	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan PKM yang melaksanakan program kesehatan lansia (%)	100	100	5.000	100	30.500	100	33.550	100	36.905	100	40.596	100	146.551	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (%)	100	100	13.750	100	15.125	100	16.638	100	18.301	100	20.131	100	83.945	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan	80	80	5.374.210	80	5.793.931	85	6.373.324	85	7.010.657	90	7.711.722	90	32.263.844	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			melahirkan (%)														
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Cakupan pelaksanaan pemantauan faktor resiko Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	266.585	100	458.244	100	504.068	100	554.475	100	609.922	100	2.393.294	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan PKM yang telah terakreditasi (%)	80	90	2.676.730	100	24.723.561	100	27.195.917	100	29.915.509	100	32.907.060	100	117.418.777	DINAS KESEHATAN
			StatusAkreditasi Rumah Sakit(%)	Paripurna	Paripurna	203.463	-	-	-	-	Paripurna	747.780	-	-	Paripurna	951.243	RSUD
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata	Cakupan pemenuhansaranadan prasarana RS KelasB (%)	73	75	40.546.271	77	65.000.000	80	67.000.000	85	70.000.000	90	73.000.000	95	315.546.271	RSUD
			Cakupan ketersediaan alat kesehatan dan sarana penunjang RS (%)	100	100	6.948.999	100	8.143.899	100	8.958.289	100	9.854.118	100	10.839.529	100	44.744.834	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kualifikasi SDM sesuai standar RS tipe B (%)	100	100	8.420.000	100	8.860.000	100	9.300.000	100	9.740.000	100	10.180.000	100	46.500.000	RSUD
		Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan realisasi pelayanan kesehatan rujukan (%)	100	100	71.969.362	100	74.969.362	100	77.969.362	100	80.969.362	100	83.969.362	100	389.846.810	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pembangunan jalan kabupaten(%)	25,21	26,17	32.500.000	28,09	52.500.000	30,34	72.500.000	32,58	72.500.000	34,83	72.500.000	34,83	302.500.000	
			Persentase pembangunan jembatan (%)	31,31	31,83	3.000.000	32,45	4.000.000	33,17	5.000.000	33,89	4.500.000	34,62	4.500.000	34,62	21.000.000	
		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten yangdipelihara (%)	62,84	62,95	13.881.820	71,16	41.900.000	79,36	41.900.000	87,57	41.900.000	95,78	41.900.000	95,78	181.481.820	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase pelaksanaan Undang-undang jasa konstruksi (%)	100	100	125.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	725.000	
		Progran Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan status kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat (%)	100	-	-	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	1.000.000	
		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase data base jalan dan jembatan yang berbasis SIG (%)	62,84	-	-	100	440.000	100	1.090.000	100	440.000	100	440.000	100	2.410.000	
		Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase pembangunan infrastruktur jalan desa (%)	48,79	49,87	6.538.000	50,95	4.000.000	52,04	4.000.000	53,12	4.000.000	54,20	4.000.000	54,20	22.538.000	
		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase sarana dan prasaranakebinamargaan dalam kondisi baik (%)	80	90	6.195.700	100	3.175.000	100	4.225.000	100	1.500.000	100	1.225.000	100	16.320.700	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang 100 persen (%)	100	100	927.150	100	1.230.000	100	730.000	100	730.000	100	1.230.000	100	4.847.150	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan ruang 100 persen (%)	100	100	260.000	100	260.000	100	260.000	100	260.000	100	260.000	100	1.300.000	
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian dan pengawasan ruang 100 persen (%)	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	250.000	
		Program Pengendalian Banjir	Persentase saranan dan prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik (%)	80	90	60.200.000	100	85.200.000	100	85.200.000	100	85.200.000	100	85.200.000	100	401.000.000	DINAS PENGELOLA NSDA
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya	Persentase embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik (%)	70	80	10.200.000	100	10.200.000	100	10.200.000	100	10.200.000	100	10.200.000	100	51.000.000	
		Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase bangunan bersuplai air baku yang termanfaatkan (%)	-	10	9.500.000	20	8.000.000	30	8.000.000	40	8.000.000	50	8.000.000	50	41.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Daerah Irigasi yang memiliki nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) minimal baik (%)	-	70	40.050.000	75	38.530.000	80	30.750.000	85	30.890.000	90	30.650.000	90	170.870.000	
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman															
		Program Pengembangan Sanitasi dan Air Minum	Persentase peningkatan jumlah layanan air minum dan sanitasi yang layak(%)	77,26	78,19	8.717.600	79,78	9.253.862	81,50	9.852.751	82,49	10.486.027	84,59	11.162.469	84,59	49.472.709	DINAS PERUMAHAN
		Program Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman	Persentase pengembangan luas wilayah strategis kawasan permukiman (%)	100	100	297.000	100	297.000	100	297.000	100	297.000	100	297.000	100	1.485.000	
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase capaian pengembangan perumahan yang representatif (%)	100	100	575.000	100	7.734.500	100	8.508.500	100	8.543.150	100	8.389.132	100	33.750.282	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Sehat Perumahan (%)	100	100	15.000.000	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	33.275.000	100	131.025.000	
		Program Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum (%)	100	100	8.996.657	100	9.041.657	100	9.091.157	100	9.145.607	100	9.205.502	100	45.480.580	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Persentase peningkatan jumlah sarana infrastruktur perkotaan (%)	100	100	12.970.000	100	14.267.000	100	15.693.700	100	17.263.070	100	18.989.376	100	79.183.146	
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	5.530.600	100	6.083.660	100	6.692.026	100	7.361.229	100	8.097.351	100	33.764.866	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	550.650	100	605.715	100	666.287	100	732.915	100	806.207	100	3.361.774	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				124.000				136.400				150.040			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	2.563.400	100	2.819.740	100	3.101.714	100	3.411.885	100	3.753.074	100	15.649.813	
		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Cakupan ketersediaan logistik penanggulangan bencana (%)	100	100	288.625	100	404.988	100	445.486	100	490.035	100	539.038	100	2.168.172	BPBD
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Cakupan peningkatan kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana (%)	100	100	192.000	100	211.200	100	232.320	100	255.552	100	281.107	100	1.172.179	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Cakupan peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana (%)	100	-	-	100	52.700	100	57.970	100	63.767	100	70.144	100	244.581	
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaan data kejadian bencana penanggulangan bencana (%)	100	100	190.750	100	291.825	100	321.007	100	353.108	100	388.419	100	1.545.109	
		Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Cakupan diklat aparatur penyelenggaraan penanggulangan bencana (%)	100	-	-	100	50.000	100	55.000	100	60.500	100	66.550	100	232.050	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Tahapan Paska Bencana	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahapan paska bencana (%)	100	100	210.000	100	6.094.200	100	6.703.620	100	6.746.982	100	6.794.680	100	26.662.482	DINAS DAMKAR
		Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	100	100	8.655.758	100	9.088.546	100	9.542.974	100	10.020.122	100	10.521.128	100	47.828.528	
		Sosial															
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	95,35	96,15	510.000	96,55	932.000	97,32	1.025.200	97,89	1.127.720	99,50	1.240.492	99,50	4.835.412	DINAS SOSIAL
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	73,35	80,25	318.259	87,15	1.120.000	90,25	1.030.000	95,55	1.165.000	100	885.000	100	4.518.259	
		Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	25	60.000	50	204.000	75	574.500	75	236.000	100	270.000	100	1.344.500	
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase disabilitas fisik dan mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (%)	32,20	48,15	60.000	65,05	241.500	76,90	202.000	89,70	441.500	98,10	235.000	98,10	1.180.000	
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (%)	17,53	18,21	75.000	19,50	166.000	21,75	181.000	23,50	200.000	25,15	238.000	25,15	860.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	4,03	5,05	80.000	6,06	690.000	7,07	730.000	8,08	815.000	9,09	880.000	9,09	3.195.000	
	Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Jumlah areal pemakaman yang ditangani (areal)	1	1	60.000	1	185.000	1	190.000	1	195.000	1	200.000	1	830.000	
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR															
	Tenaga Kerja															
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	2,24	2,20	430.000	2,17	500.000	2,15	570.000	2,12	640.000	2,09	715.000	2,09	2.855.000	DINAS TENAGA KERJA
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	100		100		100		100		100				
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek (%)	73,26	73,45		74,05		74,86		75,84		76,21		76,21		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	69,81	72,84	1.264.133	75,88	1.386.971	78,92	1.522.668	81,96	1.671.685	85	1.835.353	85	7.680.810	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	59,50	64,60		69,70		74,80		79,90		85		85		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencaker yang terdaftar dan yang ditempatkan (%)	78,19	78,29	1.382.931	78,49	1.520.724	78,69	1.671.797	78,89	1.837.476	79,09	2.024.224	79,09	8.437.152	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase ketersediaan kebijakan/regulasi daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (%)	2,98	2,98	126.000	14,95	145.000	14,95	190.000	57,70	154.000	57,70	154.000	57,70	769.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG aktif ditingkat kabupaten,kecamatan, desa dan kelurahan (%)	11,55	24,66	509.130	39,77	843.494	57,77	1.001.980	70	1.056.956	80	1.118.314	80	4.529.874	
		Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak (%)	38,46	51,28		58,97		69,23		82,55		89,74		100		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak (%)	100	100	234.750	100	794.390	100	895.055	100	971.585	100	1.118.131	100	4.013.911	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan (%)	44,88	44,88	465.130	53,33	847.160	60	881.314	66,66	918.283	66,66	958.349	66,66	4.270.236	
	Pangan															
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Cakupan ketersediaan energi dan protein (perkapita/hari)	1128,5	1130	1.027.068	1132	1.235.029	1134	1.317.855	1136	1.405.396	1136	1.495.045	1136	6.480.393	DINAS KETAPANG
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)	14	18		20		22		24		27				
		Tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	90	91		92		93		94		95				
		Tingkat Konsumsi Energi dan protein (perkapita/hari)	1.026	1.028		1.030		1.032		1.034		1.036				
	Lingkungan Hidup															
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan (%)	-	80	240.000	80	240.000	85	410.000	85	320.000	90	325.000	90	1.535.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampahkabupaten (%)	20	20	6.380.378	25	6.550.000	30	7.075.000	35	7.875.000	40	8.400.000	40	36.280.378	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data tingkat pencemaran lingkungan hidup (%)	60	60	1.320.000	65	955.000	70	920.000	75	1.215.000	80	1.405.000	80	5.815.000	
		Persentase pemenuhan kriteria penilaian adipura (%)	50	70		75		75		80		80				
		Persentase ketaatan pemrakarsa terhadap hukum lingkungan (%)	80	80		85		90		95		100		100		
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase ketersediaan data informasi kualitas udara wilayah perkotaan (%)	70	70	65.000	75	65.000	75	67.500	80	67.500	80	70.000	80	335.000	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA (%)	60	60	195.000	65	200.000	65	225.000	70	225.000	75	250.000	75	1.095.000	
		Persentase ketaatan pemrakarsa terehadap pengelolaan lingkungan (%)	80	80		85		90		95		100		100		
	Pertanahan															
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase peningkatan pemahaman tentang sistem pendaftaran tanah (%)	100	100	75.000	100	90.750	100	99.825	100	109.807	100	120.787	100	496.000	DINAS PERUMAHAN
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase peningkatan penataan dan penguasaan serta pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (%)	100	100	2.500.000	100	2.550.000	100	2.566.500	100	2.584.650	100	2.604.614	100	12.805.764	
	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian dan penanganan kasus/konflik tanah (%)	100	100	50.000	100	55.000	100	63.250	100	72.325	100	82.307	100	322.882	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai SOP (%)	85	85	2.907.562	85	3.039.081	85	3.342.989	87	3.677.287	90	4.045.016	90	17.011.935	DINAS DUK CAPIL
		Pemberdayaan Masyarakat Desa															
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Indeks keberdayaan masyarakat pedesaan (%)	70	73	1.053.000	73	1.700.000	73	1.700.000	75	1.700.000	75	1.700.000	75	7.853.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Indeks partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	75	75	794.840	75	900.000	75	4.700.000	75	3.700.000	75	700.000	75	10.794.840	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang bersertifikat (%)	60	60	800.000	70	2.800.000	70	1.800.000	75	2.035.000	75	1.500.000	75	8.935.000	
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK aktif di desa (%)	100	100	1.947.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	9.947.000	
		Program Pembinaan Administrasi Pemerintah, Keuangan dan Aset Desa	Persentase ketepatan penyampaian dokumen administrasi pemerintahan, keuangan dan aset desa (%)	-	75	249.840	75	695.000	75	670.000	75	410.000	75	430.000	75	2.454.840	
		Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Persentase KPMD aktif (%)	-	85	80.000	85	80.000	85	80.000	85	80.000	97	90.000	87	410.000	
		Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status desa (%)	-	85	319.710	85	400.000	85	400.000	87	400.000	90	400.000	90	1.919.710	
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif (%)	90	90	1.475.000	90	5.025.000	92	5.100.000	95	5.050.000	97	5.100.000	97	21.750.000	
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
		Program Penataan Pengendalian Penduduk	Cakupan dokumen data dan informasi KKBPK yang tersusun (%)	100	100	322.545	100	314.662	100	336.628	100	358.791	100	376.170	100	1.708.796	DINAS PENGEND UDUK DAN KB
		Program Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB	0,67	0,68	10.041.799	0,69	10.238.392	0,70	10.105.994	0,71	10.426.022	0,72	10.248.702	0,72	51.060.909	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penggunaan kontrasepsi (%)	28,93	30	89.750	32,5	150.643	35	201.561	37,5	232.508	40	200.035	40	874.497		
			Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	0,49	0,50		0,51		0,52		0,53		0,54					
		Program Pengembangan Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB (%)	35,02	36	142.464	37	152.214	38	162.000	39	172.000	40	182.000	40	810.678		
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB (%)	41		42		43		44		45		46			46
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	54,03		55		56		57		58		59			59
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan siswa yang telah diadvokasi (%)	-	75	366.615	75	612.360	75	638.731	75	655.292	75	682.050	75	2.955.048		
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja /mahasiswa (%)	-	100	151.125	100	155.000	100	160.000	100	165.000	100	165.000	100	796.125		
		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan PUS yang telah mengikuti penyuluhan KHIBA (%)	100	100	173.764	100	178.000	100	150.000	100	173.000	100	178.000	100	852.764		
		Perhubungan																
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan realisasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	100	-	-	100	415.000	100	1.515.000	100	2.275.000	100	1.980.000	100	6.185.000	DINAS PERHUBUNGAN	
		Program Peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan realisasi peningkatan pelayanan angkutan (%)	100	100	131.000	100	143.100	100	156.410	100	171.051	100	187.156	100	788.717		
		ProgramPembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan realisasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	100	100	185.000	100	200.000	100	226.500	100	244.650	100	269.615	100	1.125.765		
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan realisasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas (%)	100	100	299.000	150	1.114.900	100	541.500	100	1.379.050	100	1.063.455	100	4.397.905		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan realisasi rehabilitasi prasarana dan fasilitas LLAJ (%)	100	100	59.920	100	405.912	100	165.503	2.409	119.754	100	132.729	100	883.818	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Cakupan realisasi peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (%)	100	100	133.600	100	146.960	100	161.656	100	177.822	100	195.604	100	815.642	
	Komunikasi dan Informatika															
	Program Pengolahan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan pengolahan komunikasi dan informasi publik (%)	100	100	135.000	100	148.500	100	163.350	100	1790.685	100	197.654	100	2.435.189	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan komunikasi dan media massa (%)	100	100	1.658.000	100	3.332.700	100	3.665.970	100	4.032.567	100	4.087.747	100	16.776.984	
	Program Kerjasama dengan Mass Media	Cakupan pengembangan komunikasi dan media massa (%)	100	100	121.000	100	133.100	100	146.410	100	161.051	100	177.156	100	738.717	
	Program Fasilitas Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) yang melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi (%)	100	100	35.000	100	38.500	100	42.350	100	46.585	100	51.244	100	213.679	
	Program Pengembangan dan Implementasi E-Government	Persentase pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (%)	100	100	66.000	100	72.600	100	79.860	100	87.846	100	87.846	100	394.152	
	Program Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian	Persentase pengelolaan dokumen berita/ informasi layanan persandian (%)	100	100	110.000	100	121.000	100	133.100	100	145.605	100	160.165	100	669.870	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi (%)	80	80	720.138	80	786.000	80	851.500	80	881.500	80	912.500	80	4.151.638	DINAS KOPERASI & UKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha	Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro (%)	80	80	147.436	80	150.000	80	75.000	80	85.000	80	90.000	80	547.436	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Kecil Menengah															
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil menengah (%)	99.91	80	318.250	80	405.000	80	413.000	80	420.000	80	427.000	80	1.983.250	
		Penanaman Modal															
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai realisasi investasi (Milyar)	136	150	31.764	175	34.941	200	38.435	225	42.278	250	46.506	250	193.924	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor penanamanmodal (investor)	43	50	336.204	60	369.825	65	406.807	80	447.488	90	492.237	90	2.052.561	
		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase ketersediaan dokumendata base iklim investasi (%)	5	65	42.974	75	47.271	80	51.998	85	57.198	90	62.198	90	261.639	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur (%)	70	75	859.452	75	1.318.016	80	1.449.817	85	1.594.799	90	1.754.279	90	6.976.363	
		Kepemudaan dan Olahraga															
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	81	85	100.000	90	150.000	95	150.000	100	200.000	100	200.000	100	800.000	DINAS KEPENDUDaan DAN OLARAGA
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pembinaan kepemudaan (%)	45	60	1.193.300	70	1.400.000	80	1.500.000	90	1.600.000	100	1.700.000	100	7.393.300	
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda (%)	99	99	197.000	99	325.000	99	350.000	100	375.000	100	400.000	100	1.647.000	
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase peningkatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba (%)	45	20	300.000	40	325.000	60	350.000	80	375.000	100	400.000	100	1.750.000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)	58	60	300.000	65	310.000	70	320.000	75	330.000	80	340.000	80	1.600.000	
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	45	50	2.401.000	50	2.500.000	55	2.675.000	57	2.775.000	60	2.850.000	60	13.201.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga (%)	30	30	1.200.000	35	1.460.000	40	1.720.000	45	1.830.000	50	1.950.000	50	8.160.000	
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Cakupan peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik (%)	90	92	3.220.832	94	3.681.874	95	3.865.968	96	4.059.266	97	4.262.229	98	19.090.169	BADAN KESBANGPOL
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (%)	100	100	123.600	100	429.780	100	451.269	100	473.832	100	497.524	100	1.976.005	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan (%)	73	74	851.748	75	894.335	76	939.052	78	986.004	79	1.035.304	79	4.706.443	
		Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara	Presentase keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara (%)	4,7	5,6	564.587	6,8	592.816	7,8	622.457	8,8	653.580	9,9	686.259	9,9	3.119.699	
		Statistik															
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.	Persentase dokumen statistik daerah dirilis tepat waktu (%)	80	90	230.000	90	253.000	100	278.300	100	241.120	100	241.120	100	1.243.540	DINAS KOMINFO
		Kebudayaan															
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase peningkatan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (%)	100	100	212.000	100	612.020	100	672.722	100	740.544	100	814.599	100	3.051.885	DINAS KEBUDAYAAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase jumlah peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	813.069	100	1.709.976	100	1.880.974	100	2.069.070	100	2.275.978	100	8.749.067	
			Persentase peningkatan jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi (%)	100	100		100		100		100		100				
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase jumlah warisan tradisi yang terawat (%)	100	100	267.136	100	378.850	100	416.735	100	458.408	100	504.249	100	2.025.378	
		Perpustakaan															
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (%)	100	100	906.350	100	1.095.200	100	1.177.220	100	1.267.442	100	1.366.686	100	5.812.898	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Kearsipan															
		Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan ketersediaan kebijakan sistem pengelolaan kearsipan (%)	100	100	69.500	100	180.000	100	198.000	100	217.800	100	239.580	100	904.880	
		Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah (%)	100	100	387.000	100	435.500	100	479.050	100	254.705	100	584.651	100	2.140.906	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase kualitas pelayanan kearsipan (%)	100	100	50.000	100	75.000	100	82.500	100	90.750	100	99.825	100	398.075	
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan (%)	100	100	59.000	100	74.000	100	81.400	100	89.540	100	96.494	100	400.434	
		LAYANAN URUSAN PILIHAN															
		Pariwisata															
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (orang)	153.493	153	981.800	169	1.000.000	186	1.000.000	204	1.010.000	220	1.020.000	220	5.011.800	DINAS PARIWISATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Persentase peningkatan objek daya tarik wisata (ODTW) (%)	100	100	5.064.653	100	9.300.000	100	12.450.000	100	13.225.000	100	13.885.000	100	53.924.653	
	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS) (%)	100	100	651.736	100	350.000	100	400.000	100	460.000	100	520.000	100	2.381.736	
	Pertanian															
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani (%)	100	100	1.837.935	100	1.911.281	100	2.062.909	100	2.215.699	100	2.374.768	100	10.402.592	DINAS PERTANIAN TPHP
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Jumlah Produksi : - Padi (ton) - Jagung (ton) - Kedelai (ton) - Bawang Merah - Cabe (ton) - Sukun (ton) - Kelapa (Ton) - Kopi (ton) - Kakao (ton) - Cengkeh (ton) - Tebu (ton)	1.428.883 402.486 13.047 26 22 40 14.282 319 10.692 4.949 40.561	1.514.616 426.635 13.830 28 23 42 15.139 338 1.134 5.246 42.995	12.394.000	1.605.493 452.233 14.660 29 25 45 16.047 358 12.014 5.561 45.574	14.901.000	1.701.823 479.367 15.539 31 26 48 17.010 380 12.734 5.894 48.309	15.166.600	1.803.932 508.129 16.472 33 28 50 18.031 403 13.498 6.248 51.207	17.471.060	1.912.168 538.617 1.760 35 29 54 19.113 427 14.308 6.623 54.280	19.854.816	1.912.168 538.617 1.760 35 29 54 19.113 427 14.308 6.623 54.280		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Indeks Pertanaman Padi (IP) Persentase peningkatan diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%)	1,61 	1,75 		29.788.000		1,76 17,5		42.682.150		1,78 29,70		49.714.600	1,79 47,00	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan	Produksifitas : - Padi (Kw/Ha) - Jagung (Kw/Ha) - Kedelai (ton) - Bawang Merah (Kw/Ha) - Cabe Besar (Kw/Ha) - Sukun (Kw/Ha) - Kelapa (Kw/Ha) - Kopi ((Kw/Ha) - Kakao (Kw/Ha) - Cengkeh (Kw/Ha) - Tebu (Kw/Ha)	59,03 55,89 19,42 84,50 42,70 0,60 1293,00 420,00 542,00 722,00 40.501,50	62,57 59,24 20,59 89,57 45,26 0,64 1370,58 445,2 552,84 736,44 41.311,53	904.887		66,33 62,8 21,82 94,94 47,98 0,67 1452,81 471,91 563,9 751,17 42.137,76	1.009.054	70,31 66,57 23,13 100,64 50,86 0,71 1539,98 500,23 575,17 766,19 42.980,52		1.129.432	74,52 70,56 24,52 100,68 53,91 0,76 1632,38 530,24 586,68 781,52 43.840,13	1.226.849		79,00 74,79 25,99 113,08 57,14 0,80 1730,33 562,05 598,41 797,15 44.716,93	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Persentase tenaga penyuluh yang terlatih (%)	100	100	814.528	100	895.981	100	985.578	100	1.086.135	100	1.194.745	100	4.976.967	
	Program Standarisasi Kualitas Bahan baku	Persentase peningkatan produksi produktifitas	100	100	128.780	100	130.000	100	143.000	100	157.300	100	188.549	100	747.629	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)														
		Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan Berkelanjutan	Persentase peningkatan pendapatan petani (%)	100	100	159.500	100	170.500	100	181.500	100	192.500	100	203.500	100	907.500	
		Peternakan															
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	100	100	398.120	100	399.143	100	400.176	100	401.219	100	402.273	100	2.000.931	DINAS PETERNAKAN
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase tingkat penurunan kasus kejadian penyakit ternak (%)	100	100	240.000	100	240.000	100	240.000	100	240.000	100	240.000	100	1.200.000	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan kesejahteraan kelompok peternak (%)	85	90	502.795	90	507.423	95	512.097	100	516.818	100	584.616	100	2.623.749	
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan (%)	95	95	480.000	95	490.000	95	500.000	100	510.000	100	520.000	100	2.500.000	
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase ketersediaan produk peternakan unggulan (%)	-	-	-	85	375.000	90	375.000	95	375.000	100	375.000	100	1.500.000	
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase tingkat pemberdayaan penyuluh peternakan (%)	-	-	-	90	100.000	95	100.000	95	100.000	95	100.000	95	400.000	
		Energi dan Sumber Daya Mineral															
		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase hasil produksi di bidang pertambangan (%)	-	85	61.224	90	740.000	95	830.000	100	910.000	100	990.000	100	3.531.224	DINAS PERINDUSTRIAN
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan pengadaan, pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (%)	100	-	-	90	1.405.000	95	1.690.000	100	1.975.000	100	2.270.000	100	7.340.000	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas	Cakupan peningkatan mutu pelayanan bagi pengusaha BBM dan Elpiji (%)	100	100	53.600	100	270.000	100	280.000	100	290.000	100	300.000	100	1.193.600	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemetaan Geologi	Persentase pemetaan geologi (%)	-	100	161.350	100	690.000	100	780.000	100	850.000	100	920.000	100	3.401.350	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kegeologian dan AirTanah	Cakupan pembinaan pengembangan kegeologian dan air tanah (%)	-	-	-	100	1.960.000	100	2.790.000	100	3.620.000	100	5.250.000	100	13.620.000	
	Perdagangan															
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan rehabilitasi dan revitalisasi pasar (%)	12	11	5.666.649	12	6.854.715	14	7.528.398	16	8.269.012	16	9.083.228	16	37.402.002	DINAS PERDAGANGAN
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase ketersediaan data potensi unggulan (%)	75	80	155.376	85	170.914	90	188.005	95	206.805	95	227.486	95	948.586	
	Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah	Cakupan bina usaha /UKM (%)	20	25	22.000	30	24.200.000	40	26.620.000	50	29.282.000	50	32.210.200	50	112.334.200	
	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan bina pedagang kaki lima dan asongan (%)	20	25	10.347	30	876.382	40	964.020	50	1.060.422	50	1.166.464	50	4.077.635	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (%)	80	85	121.576	90	216.025	95	237.628	100	261.390	100	287.529	100	1.124.148	
	Perindustrian															
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi (%)	-	85	120.000	90	3.075.000	95	3.320.000	100	3.590.000	100	3.860.000	100	13.965.000	DINAS PERINDUSTRIAN
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan peningkatan industri kecil dan menengah (%)	100	100	278.020	100	1.145.000	100	1.380.000	100	1.605.000	100	1.860.000	100	6.268.020	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan peningkatan teknologi industri (%)	-	-	-	100	905.000	100	1.115.000	100	1.325.000	100	1.535.000	100	4.880.000	
	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan peningkatan struktur industri (%)	-	100	216.950	100	1.035.000	100	1.075.000	100	1.100.000	100	1.125.000	100	4.551.650	
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (PP)	Persentase pengembangan sentra-sentra industri potensial (%)	-	100	1.499.000	100	1.954.000	100	2.064.000	100	2.159.000	100	2.239.000	100	9.915.000	
	Kelautan dan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Perikanan															
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	46.746,90	47.681,83	1.810.400	49.112,29	2.057.740	51.075,78	2.227.010	53.630,62	2.410.290	53.630,62	2.608.730	56.848,46	11.114.170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah produksi nelayan (ton)	32.722,83	33.377,29		34.378,61		35.541,44		37.541,44		37.541,44		39.793,92			
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	356.896,90	371.172,56	2.529.550	389.731,19	2.777.480	413.115,068	3.039.210	442.033,12	3.332.080	442.033,12	3.653.680	477.395,77	15.332.000		
		Jumlah produksi pokdakan (ton)	248.964	261.412		274.483		288.207		302.617		302.617		317.748			
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Persentase jumlah pengembangan kawasan berbasis kluster (%)	100	100	750.500	100	825.550	100	908.105	100	998.915,50	100	1.098.805	100	4.581.875		
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase jumlah nelayan yang terberdayakan (%)	100	100	300.000	100	330.000	100	363.000	100	399.000	100	439.000	100	1.831.000		
		Persentase jumlah legalitas usaha pembudidayaan ikan yang terfasilitasi (%)	100	100	300.000	100	1.000.000	100	400.000	100	450.000	100	500.000	100	2.650.000		
		PENUNJANG URUSAN															
		Perencanaan Pembangunan															
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan aparat perencanaan yang telah mengikuti Bimtek perencanaan (%)	75	75	88.000	80	96.800	80	106.480	85	117.128	90	128.841	90	537.249	BAPPEDA	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	687.000	100	744.051	100	818.456	100	900.302	100	990.332	100	4.140.141		
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD (%)	100	100	473.000	100	520.300	100	572.330	100	629.563	100	692.520	100	2.887.713		
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam RKPD (%)	100	100	575.000	100	632.500	100	695.750	100	765.325	100	841.857	100	3.510.432		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dalam RKPD (%)	100	100	808.000	100	888.800	100	977.680	100	1.075.448	100	1.182.993	100	4.932.921	
		Keuangan															
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar (%)	72,73	77,27	5.790.019	81,82	5.905.820	86,36	6.173.936	90,91	6.144.415	100	6.267.303	100	30.281.493	BADAN PENGKEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (%)	29,61	29,69		29,78		29,86		29,94		30,10		30,10		
			Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai ketentuan	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
			Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	38,43	36,98		50		50		50		50		50		
			Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD (%)	61,57	63,02		50		50		50		50		50		
			Persentase Belanja Modal terhadap total APBD (%)	11,75	30		30		30		30		30		30		
			Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15,53	15,61		15,68		15,76		15,84		15,92		15,92		
			Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD (%)	21,63	21,74		21,85		21,96		22,07		22,18		22,18		
			Persentase SILPA terhadap Total APBD (%)	4,23	3,15		2,76		2,41		2,10		1,97		1,97		
			Persentase penyaluran Belanja Daerah (%)	95	96,85		97,24		97,59		97,90		98,03		98,03		
			Persentase penyajian LKPD sesuai SAP berbasis Akrua (%)	86,67	90,13		93,74		97,49		100		100		100		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang diterbitkan kurang 2 (dua) hari (%)	97,30	98	275.880	99	289.674	100	318.642	100	350.506	100	385.556	100	1.620.258	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan kerugian daerah	95	96	182.500	97	186.150	98	189.873	99	193.670	100	197.544	100	949.737	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR (%)														
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase realisasi PAD terhadap pencapaian target (%)	100	100	4.145.591	100	6.054.224	100	6.356.936	100	6.674.782	100	7.008.522	100	30.240.055	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan PAD yang tersusun setiap tahun (%)	100	100		100		100		100		100				
	Program Penatan PeraturanPerundang-Undangan	Persentase kenaikan objek pajak daerah setiap tahun (%)	0,14	0,16	166.980	0,18	201.054	0,20	211.107	0,22	221.662	0,25	232.745	0,25	1.033.548	
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan															
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur (%)	70	75	2.728.695	80	3.363.032	85	3.483.699	90	3.979.075	95	4.355.289	100	17.909.790	BKPSDM
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kediklatan (%)	65	70	130.000	75	285.000	80	190.000	85	325.000	90	190.000	95	1.120.000	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi (%)	70	75	95.500	80	100.500	85	105.500	90	110.500	95	120.500	100	532.500	
	Penelitian dan Pengembangan															
	Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Persentase peningkatan hasil - hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan (%)	100	100	421.892	100	1.800.000	100	1.950.000	100	2.100.000	100	2.250.000	100	8.521.892	BALITBANGDA
	Program Pengembangan SIDA	Persentase cakupan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah (%)	-	100	354.748	100	742.000	100	824.200	100%	893.620	100	969.782	100	3.784.350	
	Pengawasan															
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas kinerja minimal B (>60 – 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (%)	<50	55	2.020.000	65	2.540.000	75	2.665.000	85	2.720.000	95	2.870.000	95	12.815.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi (Skor)	>30-50	>50-60		>50-60		>60-70		>60-70		>70-80		>70-80		
		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) (%)	<50	50		60		70		80		90				
		Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI (%)	85	90		95		95		100		100				
		Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab) (%)	75 75	80 80		85 85		90 90		95 95		100 100				
		Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	350	375		400		425		430		435				
		Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan (%)	85	90		95		95		100		100				
		Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan (%)	85	90		95		95		100		100				

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase jumlah aparat pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan (%)	45	50	312.500	60	395.000	70	450.000	80	510.000	90	560.000	90	2.227.500	INSPEKTORAT DAERAH
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase jumlah elemen penilaian (Assessment) peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan (%)	50	67	30.000	83	35.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	200.000	
		Pemerintahan Umum															
		Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase pelayanan keagamaan yang terlaksana (%)	100	100	1.343.770	100	1.478.147	100	1.612.524	100	1.746.901	100	1.881.278	100	8.062.620	SEKRETARIS DAERAH
		Program Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Persentase kebijakan pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan (%)	100	100	255.140	100	280.654	100	306.168	100	331.682	100	357.196	100	1.530.840	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum dan informasi hukum daerah yang ditetapkan (%)	100	100	1.074.220	100	1.181.642	100	1.289.064	100	1.396.486	100	1.503.908	100	6.445.320	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terwujudnya pelaksanaan kebijakan KDH (%)	100	100	1.143.260	100	1.257.586	100	1.371.912	100	1.486.238	100	1.600.564	100	6.859.560	
		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase peningkatan kategori nilai LPPD (%)	100	100	767.974	100	844.771	100	921.569	100	998.366	100	1.075.164	100	4.607.844	
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina dalam bidang administrasi pemerintahan umum (%)	100	100	347.378	100	382.115	100	416.854	100	451.591	100	486.329	100	2.084.267	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan	Persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan	100	100	670.663	100	737.729	100	804.795	100	871.862	100	938.928	100	4.023.977	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penataan Pemerintah	penataan pemerintah (%)														
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian dan penegasan batas wilayah antar daerah (%)	100	100	153.500	100	168.850	100	184.200	100	199.550	100	214.900	100	921.000	
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah yang terlaksana (%)	100	100	640.550	100	704.605	100	768.660	100	832.715	100	896.770	100	3.843.300	
	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang efisien (tender) (%)	-	100	1.578.000	100	1.735.800	100	1.893.600	100	2.051.400	100	2.209.200	100	9.468.000	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik(%)	-	100	793.017	100	872.319	100	951.620	100	1.030.922	100	1.110.224	100	4.758.102	
	Program Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya alam (%)	-	100	920.000	100	1.012.000	100	1.104.000	100	1.196.000	100	1.288.000	100	5.520.000	
	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perekonomian Daerah	-	100	1.300.000	100	1.430.000	100	1.560.000	100	1.690.000	100	1.820.000	100	7.800.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Persentase peningkatan nilai SAKIP (%)	100	100	770.000	100	847.000	100	924.000	100	1.001.000	100	1.078.000	100	4.620.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur (%)	100	100	180.000	100	198.000	100	216.000	100	234.000	100	252.000	100	1.080.000	
	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda	Persentase realisasi penataan administrasi kelembagaan Pemda (%)	100	100	1.353.951	100	1.489.346	100	1.624.741	100	1.760.136	100	1.895.531	100	8.123.705	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (%)	95	100	228.402	100	262.662	100	296.923	100	331.183	100	365.443	100	1.484.613	
	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Persentase realisasi pelayanan kegiatan kehumasan (%)	98	100	1.250.000	100	1.375.000	100	1.500.000	100	1.625.000	100	1.750.000	100	7.500.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase cakupan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	100	100	8.773.030	100	9.650.333	100	10.527.636	100	11.404.939	100	12.282.242	100	44.742.453	
	Sekretariat Dewan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	100	15.340.000	100	18.995.000	100	20.250.000	100	21.625.000	100	23.790.000	100	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
		Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Persentase Realisasi Rancangan Perda Inisiatif DPRD Yang tersusun (%)	100	100	300.000	100	310.000	100	320.000	100	340.000	100	350.000	500	1.620.000	
		Kecamatan															
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan system pengawasan internal kecamatan (%)	100	100	1.072.568	100	1.179.825	100	1.297.807	100	1.427.588	100	1.570.347	100	6.548.135	KECAMATAN
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan (%)	100	100	21.854.433	100	24.039.876	100	26.443.864	100	29.088.250	100	31.997.075	100	133.423.498	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	100	212.715	100	233.987	100	257.385	100	283.124	100	311.436	100	1.298.647	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (%)	100	100	12.271.678	100	13.498.846	100	14.848.731	100	16.333.604	100	17.966.964	100	74.919.823	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	4.624.322	100	5.086.754	100	5.595.429	100	6.154.972	100	6.770.469	100	28.231.946	
		Program bersifat rutin dan pelayanan internal pada setiap PD															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	398.433.464	100	439.257.409	100	483.183.150	100	531.501.465	100	584.651.611	100	2.437.027.099	SEMUA PERANGKAT DAERAH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	43.310.118	100	47.924.519	100	52.716.971	100	57.988.668	100	63.787.535	100	265.727.811	



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)	100	100	1.312.775	100	1.444.053	100	1.588.458	100	1.747.304	100	1.922.034	100	8.014.624	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	2.034.996	100	1.943.145	100	2.137.460	100	2.351.206	100	2.586.326	100	11.053.133	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	1.639.394.	100	1.803.334	100	1.983.667	100	2.182.034	100	2.400.237	100	10.008.666	
		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	100	3.840.784	100	4.224.863	100	4.647.349	100	5.112.084	100	5.623.292	100	23.448.372	

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan pada akhir tahun perencanaan. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan akumulasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja sasaran (*impact based*) dan indikator kinerja program (*outcome based*) yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah selama periode RPJMD.

Kinerja yang hendak dicapai dinyatakan dengan suatu indikator yang jelas pada tahap perencanaan. Selanjutnya indikator kinerja juga diperuntukkan untuk menggambarkan tentang keadaan yang diharapkan dimasa mendatang. Ini penting untuk menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diperlukan dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, indikator dan target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C).

#### **8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) secara garis besar diklasifikasi kedalam tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Aspek pelayanan umum terdiri dari layanan umum wajib

dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan, dan layanan penunjang urusan.

Formulasi IKU disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program perangkat daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama dan pelayanan yang harus dilaksanakan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018-2023 yang telah direncanakan, dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar (*baseline*), tahun 2018 merupakan tahun awal RPJMD dan masih angkaperkiraan, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun akhir periode RPJMD. Seluruh indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk lima tahun ke depan dituangkan ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 8.1.  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP	Predikat	C	CC	CC	B	BB	BB	A	A
3	Proporsi OPD yang bebas dari KKN	Persen	80	80	85	90	95	98	99	99
4	Pertumbuhan ekonomi	Persen	8,43	9,44	8,81	9,18	9,46	9,73	10,11	10,11
5	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	39,15	43,39	47,49	51,60	55,70	59,80	63,91	63,91
6	Tingkat inflasi	Persen	5,54	5,54	4,66	4,38	4,01	3,75	3,50	3,50
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,55	4,40	4,30	4,10	3,90	3,80	3,75	3,75
8	Persentase penduduk miskin	Persen	10,28	10,55	10,08	10,00	9,89	9,80	9,75	9,75
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50,5	60	68	69	70	74	75	75
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,43	12,64	12,72	12,81	12,89	12,97	13,05	13,05
11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,77	7,31	7,53	7,75	7,97	8,19	8,41	8,41
12	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,22	66,51	66,64	66,78	66,91	67,05	67,18	67,18
	Persentase Balita Stunting	Persen	6,36	7,52	7,47	7,42	7,37	7,32	7,27	7,27
13	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,93	91,95	91,96	91,98	92,01	92,04	92,07	92,07
14	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62,49	62,49	62,53	62,57	62,61	62,65	62,69	62,69
15	Cakupan Desa/ Kelurahan Sehat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	0,2	0,21	0,21066	0,21132	0,21198	0,21264	0,21330	0,21330
17	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak	Persen	78,35	78,75	80,5	82,25	84	85,75	85,75	85,75
18	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi	Persen	75,61	76,18	77,62	79,06	80,5	81,99	83,43	83,43

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
	air limbah									
19	Rasio Jaringan Irigasi	Mtr/ Ha	3,71	4,30	4,68	5,06	5,44	5,83	6,21	
20	Nilai PMDN/PMA	Rp Miliar	-	135	150	175	200	225	250	
21	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Inovasi	-	-	1	1	1	1	1	
22	Persentase angka kriminalitas tertangani	Persen	78,29	80,11	82,34	84,27	86,45	88,13	90,08	
23	Angka Kriminalitas	Kasus	1.193	1.073	966	870	783	704	634	
24	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,165	0,176	0,189	0,202	0,215	0,228	0,241	
25	Jumlah wisatawan	Orang	127.800	131.000	153.493	168.767	185.588	204.098	220.353	

Tabel 8.2.  
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen		63,88	68,99	72,44	76,07	79,87	83,86	PENDIDIKAN
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen		105,87	105,90	105,95	106	106,3	106,5	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen		97,95	97,90	98,00	98.50	98.75	99,00	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	Persen		87,16	87,50	87,80	88,00	89,00	90,00	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	Persen		81.53	82,00	82,30	82,86	83,25	83,50	
	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	Persen		0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	
	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	Persen		0,20	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	
6	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Persen		1017,0	1017,36	1068,23	1121,64	1177,72	1236,61	
7	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Persen		1471,11	1544,66	1621,89	1702,99	1788,14	1877,14	
8	Persentase peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	
9	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf	Persen		60,30	60,35	62,16	64,03	65,95	67,92	
10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen		62,80	63,50	65,00	65,68	70,12	75,00	
	Kesehatan									
1	Cakupan realisasi ketersediaan obat (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	KESEHATAN
2	Cakupan penyelenggaraan penyehatan lingkungan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3	Cakupan Pengawasan obat dan makanan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
5	Cakupan pelaksanaan perbaikan Gizi masyarakat (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
6	Cakupan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan lingkungan sehat (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
7	Cakupan realisasi pelayanan kesehatan penduduk miskin(%)			100	100	100	100	100	100		
8	Cakupan Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
9	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di PKM dan jaringannya (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
10	Cakupan realisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (%)	Persen		-	100	100	100	100	100		
11	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (%)	Persen		-	-	90	90	95	95		
12	Cakupan PKM yang melaksanakan program kesehatan lansia (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
13	Cakupan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
14	Cakupan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan (%)	Persen		80	80	80	85	85	90		
15	Cakupan pelaksanaan pemantauan faktor resiko Penyakit Tidak Menular (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
16	Cakupan PKM yang telah terakreditasi (%)	Persen		80	90	100	100	100	100		
17	StatusAkreditasi Rumah Sakit(%)	Persen		Paripurna	Paripurna	-	-	Paripurna	-		
18	Cakupan pemenuhan saranadan prasarana RS Kelas B (%)	Persen		73	75	77	80	85	90		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
19	Cakupan ketersediaan alat kesehatan dan sarana penunjang RS (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
20	Cakupan pemenuhan kualifikasi SDM sesuai standar RS tipe B (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
21	Cakupan realisasi pelayanan kesehatan rujukan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase pembangunan jalan kabupaten(%)	Persen		25,21	26,17	28,09	30,34	32,58	34,83	PU-PTR	
2	Persentase pembangunan jembatan (%)	Meter		31,31	31,83	32,45	33,17	33,89	34,62		
3	Persentase jalan kabupaten yangdipelihara (%)	Km		62,84	62,95	71,16	79,36	87,57	95,78		
4	Persentase pelaksanaan Undang-undang jasa konstruksi (%)	Km		100	100	100	100	100	100		
5	Persentase jalan dan jembatan status kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat (%)	Persen		100	-	100	100	100	100		
6	Persentase data base jalan dan jembatan yang berbasis SIG (%)	Persen		62,84	-	-	100,00	-	-		
7	Persentase pembangunan infrastruktur jalan desa (%)	Persen		48,79	49,87	50,95	52,04	53,12	54,20		
8	Persentase sarana dan prasaranakebinamargaan dalam kondisi baik (%)	Persen		80	90	100	100	100	100		
9	Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang 100 persen (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
10	Persentase Pemanfaatan ruang 100 persen (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
11	Persentase pengendalian dan pengawasan ruang 100 persen (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
12	Persentase saranan dan prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik (%)	Persen		80	90	30,5	30,75	31	31,25		



No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
13	Persentase embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik (%)	Persen		70	80	100	100	100	100	PSDA	
14	Persentase bangunan bersuplai air baku yang termanfaatkan (%)	Persen		-	10	100	100	100	100		
15	Persentase Daerah Irigasi yang memiliki nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) minimal baik (%)	Persen		-	70	20	30	40	50		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
1	Persentase peningkatan jumlah layanan air minum dan sanitasi yang layak(%)	Persen		77,26	78,19	79,78	81,50	82,49	84,59	PERKIMTAN	
2	Persentase pengembangan luas wilayah strategis kawasan permukiman (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Persentase capaian pengembangan perumahan yang representatif (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Persentase Lingkungan Sehat Perumahan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
5	Persentase peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
6	Persentase peningkatan jumlah sarana infrastruktur perkotaan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	SATPOL PP	
2	Persentase Penegakan Perda (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Cakupan ketersediaan logistik penanggulangan bencana (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	BPBD	
5	Cakupan peningkatan kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
6	Cakupan peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana (%)	Persen		100	-	100	100	100	100		
7	Persentase ketersediaan data kejadian bencana penanggulangan bencana (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
8	Cakupan diklat aparaturnya penyelenggaraan penanggulangan bencana (%)	Persen		100	-	100	100	100	100		
9	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahapan paska bencana (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	DAMKAR	
	Sosial										
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	Persen		95,35	96,15	96,55	97,32	97,89	99,50	SOSIAL	
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	Persen		73,35	80,25	87,15	90,25	95,55	100		
3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	Persen		0	25	50	75	75	100		
4	Persentase disabilitas fisik dan mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (%)	Persen		32,20	48,15	65,05	76,90	89,70	98,10		
5	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (%)	Persen		17,53	18,21	19,50	21,75	23,50	25,15		
6	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	Persen		4,03	5,05	6,06	7,07	8,08	9,09		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
7	Jumlah areal pemakaman yang ditangani (areal)	Areal		1	1	1	1	1	1		
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
	Tenaga Kerja										
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	Persen		2,24	2,20	2,17	2,15	2,12	2,09	DISNAKER	
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek (%)	Persen		73,26	73,45	74,05	74,86	75,84	76,21		
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Persen		69,81	72,84	75,88	78,92	81,96	85		
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	Persen		59,50	64,60	69,70	74,80	79,90	85		
6	Besaran Pencaker yang terdaftar dan yang ditempatkan (%)	Persen		78,19	78,29	78,49	78,69	78,89	79,09		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase ketersediaan kebijakan/regulasi daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (%)	Persen		2,98	2,98	14,95	14,95	57,70	57,70	DPPA	
2	Persentase kelembagaan PUG aktif ditingkat kabupaten,kecamatan, desa dan kelurahan (%)	Persen		11,55	24,66	39,77	57,77	70	80		
3	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak (%)	Persen		38,46	51,28	58,97	69,23	82,55	89,74		
4	Persentase pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
5	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang	Persen		44,88	44,88	53,33	60	66,66	66,66		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan (%)										
	Pangan										
1	Cakupan ketersediaan energi dan protein (perkapita/hari)	Kapita/hari		1128,5	1130	1132	1134	1136	1136	KETAHANAN PANGAN	
2	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)	Kecamatan		14	18	20	22	24	27		
3	Tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	Persen		90	91	92	93	94	95		
4	Tingkat Konsumsi Energi dan protein (perkapita/hari)	Kapita/hari		1.026	1.028	1.030	1.032	1.034	1.036		
	Lingkungan Hidup										
1	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan (%)	Persen		-	80	80	85	85	90	DLH	
2	Persentase penanganan sampahkabupaten (%)	Persen		20	20	25	30	35	40		
3	Persentase ketersediaan data tingkat pencemaran lingkungan hidup (%)	Persen		60	60	65	70	75	80		
4	Persentase pemenuhan kriteria penilaian adipura (%)	Persen		50	70	75	75	80	80		
5	Persentase ketaatan pemrakarsa terhadap hukum lingkungan (%)	Persen		80	80	85	90	95	100		
6	Persentase ketersediaan data informasi kualitas udara wilayah perkotaan (%)	Persen		70	70	75	75	80	80		
7	Cakupan pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA (%)	Persen		60	60	65	65	70	75		
8	Persentase ketaatan pemrakarsa terehadap pengelolaan lingkungan (%)	Persen		80	80	85	90	95	100		
	Pertanahan										
1	Persentase peningkatan pemahaman tentang sistem pendaftaran tanah (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	PERKIMTAN	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Persentase peningkatan penataan dan penguasaan serta pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Persentase penyelesaian dan penanganan kasus/konflik tanah (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Cakupan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai SOP (%)	Persen		85	85	85	85	87	90	DUKCAPIL	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa										
1	Indeks keberdayaan masyarakat pedesaan (%)	Persen		70	73	73	73	75	75	DPMD	
2	Indeks partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	Persen		75	75	75	75	75	75		
3	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang bersertifikat (%)	Persen		60	60	70	70	75	75		
4	Persentase PKK aktif di desa (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
5	Persentase ketepatan penyampaian dokumen administrasi pemerintahan, keuangan dan aset desa (%)	Persen		-	75	75	75	75	75		
6	Persentase KPMD aktif (%)	Persen		-	85	85	85	85	97		
7	Persentase peningkatan status desa (%)	Persen		-	85	85	85	87	90		
8	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif (%)	Persen		90	90	90	92	95	97		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Cakupan dokumen data dan informasi KKBPK yang tersusun (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	BPPKB	
2	Ratio Akseptor KB	Persen		0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3	Persentase penggunaan kontrasepsi (%)	Persen		28,93	30	32,5	35	37,5	40		
4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	Persen		0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54		
5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB (%)	Persen		35,02	36	37	38	39	40		
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB (%)	Persen		41	42	43	44	45	46		
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	Persen		54,03	55	56	57	58	59		
8	Cakupan siswa yang telah diadvokasi (%)	Persen		-	75	75	75	75	75		
9	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja /mahasiswa (%)	Persen		-	100	100	100	100	100		
10	Cakupan PUS yang telah mengikuti penyuluhan KHIBA (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Perhubungan										
1	Cakupan realisasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	Persen		100	-	100	100	100	100	DISHUB	
2	Cakupan realisasi peningkatan pelayanan angkutan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Cakupan realisasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Cakupan realisasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
5	Cakupan realisasi rehabilitasi prasarana dan fasilitas LLAJ (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
6	Cakupan realisasi peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Komunikasi dan Informatika										
1	Cakupan pengolahan komunikasi dan informasi publik (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	KOMINFO	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Cakupan pengembangan komunikasi dan media massa (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Cakupan pengembangan komunikasi dan media massa (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) yang melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
5	Persentase pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
6	Persentase pengelolaan dokumen berita/ informasi layanan persandian (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi (%)	Persen		80	80	80	80	80	80	KOPRASI & UKM	
2	Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro (%)	Persen		80	80	80	80	80	80		
3	Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil menengah (%)	Persen		99.91	80	80	80	80	80		
	Penanaman Modal										
1	Jumlah nilai realisasi investasi (Milyar)	Milyar		136	150	175	200	225	250	DPMPTSP	
2	Jumlah investor penanamanmodal (investor)	Investor		43	50	60	65	80	90		
3	Persentase ketersediaan dokumendata base iklim investasi (%)	Persen		5	65	75	80	85	90		
4	Persentase jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur (%)	Persen		70	75	75	80	85	90		
	Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	Persen		81	85	90	95	100	100	KEPEMUDAA N &	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Cakupan pembinaan kepemudaan (%)	Persen		45	60	70	80	90	100	OLAHRAGA	
3	Persentase Wirausaha Muda (%)	Persen		99	99	99	99	100	100		
4	Persentase peningkatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba (%)	Persen		45	20	40	60	80	100		
5	Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)	Persen		58	60	65	70	75	80		
6	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	Persen		45	50	50	55	57	60		
7	Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga (%)	Persen		30	30	35	40	45	50		
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
1	Cakupan peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik (%)	Persen		90	92	94	95	96	97	KESATUAN BANGSA & POLITIK	
2	Persentase peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Persentase ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan (%)	Persen		73	74	75	76	78	79		
4	Presentase keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara (%)	Persen		4,7	5,6	6,8	7,8	8,8	9,9		
	Statistik										
1	Persentase dokumen statistik daerah dirilis tepat waktu (%)	Persen		80	90	90	100	100	100	KOMINFO	
	Kebudayaan										
1	Persentase peningkatan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	KEBUDAYAA N	
2	Persentase jumlah peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		



No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3	Persentase peningkatan jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Persentase jumlah warisan tradisi yang terawat (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Perpustakaan										
1	Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
	Kearsipan										
1	Cakupan ketersediaan kebijakan sistem pengelolaan kearsipan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
2	Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Persentase kualitas pelayanan kearsipan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	LAYANAN URUSAN PILIHAN										
	Pariwisata										
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (orang)	Orang		153.493	153	169	186	204	220	PARIWISATA	
2	Persentase peningkatan objek daya tarik wisata (ODTW) (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Persentase peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS) (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Pertanian										
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	PERTANIAN TPHP	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
2	Jumlah Produksi : - Padi (ton) - Jagung (ton) - Kedelai (ton) - Bawang Merah - Cabe (ton) -Sukun (ton) - Kelapa (Ton) - Kopi (ton) - Kakao (ton) - Cengkeh (ton) - Tebu (ton)	Ton		1.428.883 402.486 13.047 26 22 40 14.282 319 10.692 4.949 40.561	1.514.616 426.635 13.830 28 23 42 15.139 338 1.134 5.246 42.995	1.605.493 452.233 14.660 29 25 45 16.047 358 12.014 5.561 45.574	1.701.823 479.367 15.539 31 26 48 17.010 380 12.734 5.894 48.309	1.803.932 508.129 16.472 33 28 50 18.031 403 13.498 6.248 51.207	1.912.168 538.617 1.760 35 29 54 19.113 427 14.308 6.623 54.280					
	3		Indeks Pertanaman Padi (IP)		1,61	1,75	1,76	1,78	1,79		1,80			
	4		Persentase peningkatan diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%)	Persen			17,5	29,70	47,00		59,10			
	5		Produksifitas : - Padi (Kw/Ha) - Jagung (Kw/Ha) - Kedelai (ton) - Bawang Merah (Kw/Ha) - Cabe Besar (Kw/Ha) -Sukun (Kw/Ha) - Kelapa (Kw/Ha) - Kopi ((Kw/Ha) - Kakao (Kw/Ha) - Cengkeh (Kw/Ha) - Tebu (Kw/Ha)	Kw/Ha		59,03 55,89 19,42 84,50 42,70 0,60 1293,00 420,00 542,00 722,00 40,501,50	62,57 59,24 20,59 89,57 45,26 0,64 1370,58 445,2 552,84 736,44 41,311,53	66,33 62,8 21,82 94,94 47,98 0,67 1452,81 471,91 563,9 751,17 42,137,76	70,31 66,57 23,13 100,64 50,86 0,71 1539,98 500,23 575,17 766,19 42,980,52		74,52 70,56 24,52 100,68 53,91 0,76 1632,38 530,24 586,68 781,52 43,840,13	79,00 74,79 25,99 113,08 57,14 0,80 1730,33 562,05 598,41 797,15 44,716,93		
			6		Persentase tenaga penyuluh yang terlatih (%)	Persen	100	100	100		100	100		100
			7		Persentase peningkatan produksi produktifitas pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	Persen	100	100	100		100	100		100
			8		Persentase peningkatan pendapatan petani (%)	Persen	100	100	100		100	100		100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Peternakan										
1	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	PETERNAKAN	
2	Persentase tingkat penurunan kasus kejadian penyakit ternak (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Persentase peningkatan kesejahteraan kelompok peternak (%)	Persen		85	90	90	95	100	100		
4	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan (%)	Persen		95	95	95	95	100	100		
5	Persentase ketersediaan produk peternakan unggulan (%)	Persen		-	-	85	90	95	100		
6	Persentase tingkat pemberdayaan penyuluh peternakan (%)	Persen		-	-	90	95	95	95		
	Energi dan Sumber Daya Mineral										
1	Persentase hasil produksi di bidang pertambangan (%)	Persen		-	85	90	95	100	100	DINAS PERINDUSTRIAN	
2	Cakupan pengadaan,pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (%)	Persen		100	-	90	95	100	100		
3	Cakupan peningkatan mutu pelayanan bagi pengusaha BBM dan Elpiji (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Persentase pemetaan geologi (%)	Persen		-	100	100	100	100	100		
5	Cakupan pembinaan pengembangan kegeologian dan air tanah (%)	Persen		-	-	100	100	100	100		
	Perdagangan										
1	Cakupan rehabilitasi dan revitalisasi pasar (%)	Persen		12	11	12	14	16	16	PERDAGANGAN	
2	Persentase ketersediaan data potensi unggulan (%)	Persen		75	80	85	90	95	95		
3	Cakupan bina usaha /UKM (%)	Persen		20	25	30	40	50	50		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4	Cakupan bina pedagang kaki lima dan asongan (%)	Persen		20	25	30	40	50	50		
5	Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (%)	Persen		80	85	90	95	100	100		
	Perindustrian										
1	Persentase peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi (%)	Persen		-	85	90	95	100	100	PERINDUSTRIAN	
2	Cakupan peningkatan industri kecil dan menengah (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Cakupan peningkatan teknologi industri (%)	Persen		-	-	100	100	100	100		
4	Cakupan peningkatan struktur industri (%)	Persen		-	100	100	100	100	100		
5	Persentase pengembangan sentra-sentra industri potensial (%)	Persen		-	100	100	100	100	100		
	Kelautan dan Perikanan										
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton		46.746,90	47.681,83	49.112,29	51.075,78	53.630,62	53.630,62	DKP	
2	Jumlah produksi nelayan (ton)	Ton		32.722,83	33.377,29	34.378,61	35.541,44	37.541,44	37.541,44		
3	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton		356.896,90	371.172,56	389.731,19	413.115,068	442.033,12	442.033,12		
4	Jumlah produksi pokdakan (ton)	Ton		248.964	261.412	274.483	288.207	302.617	302.617		
5	Persentase jumlah pengembangan kawasan berbasis kluster (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
6	Persentase jumlah nelayan yang terberdayakan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
7	Persentase jumlah legalitas usaha pembudidayaan ikan yang terfasilitasi (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	PENUNJANG URUSAN										

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Perencanaan Pembangunan										
1	Persentase peningkatan aparat perencana yang telah mengikuti Bimtek perencanaan (%)	Persen		75	75	80	80	85	90	BAPPEDA	
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam RKPD (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
5	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dalam RKPD (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Keuangan										
1	Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar (%)	Persen		72,73	77,27	81,82	86,36	90,91	100	BPKAD	
2	Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (%)	Persen		29,61	29,69	29,78	29,86	29,94	30,10		
3	Ketetapan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai ketentuan	-		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
4	Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	Persen		38,43	36,98	50	50	50	50		
5	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD (%)	Persen		61,57	63,02	50	50	50	50		
6	Persentase Belanja Modal terhadap total APBD (%)	Persen		11,75	30	30	30	30	30		
7	Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	Persen		15,53	15,61	15,68	15,76	15,84	15,92		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8	Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD (%)	Persen		21,63	21,74	21,85	21,96	22,07	22,18		
9	Persentase SILPA terhadap Total APBD (%)	Persen		4,23	3,15	2,76	2,41	2,10	1,97		
10	Persentase penyaluran Belanja Daerah (%)	Persen		95	96,85	97,24	97,59	97,90	98,03		
11	Persentase penyajian LKPD sesuai SAP berbasis Akrua (%)	Persen		86,67	90,13	93,74	97,49	100	100		
11	Persentase SP2D yang diterbitkan kurang 2 (dua) hari (%)	Persen		97,30	98	99	100	100	100		
12	Persentase tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR (%)	Persen		95	96	97	98	99	100		
13	Presentase realisasi PAD terhadap pencapaian target (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
14	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan PAD yang tersusun setiap tahun (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	BAPENDA	
15	Persentase kenaikan objek pajak daerah setiap tahun (%)	Persen		0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25		
16	Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar (%)	Persen		72,73	77,27	81,82	86,36	90,91	100		
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
1	Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur (%)	Persen		70	75	80	85	90	95	BKSDM	
2	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kediklatan (%)	Persen		65	70	75	80	85	90		
3	Persentase pemanfaatan teknologi informasi (%)	Persen		70	75	80	85	90	95		
	Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase peningkatan hasil - hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	PENELITIAN & PENGEMBANGAN	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Persentase cakupan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah (%)	Persen		-	100	100	100	100	100	
	Pengawasan									
1	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas kinerja minimal B (>60 – 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (%)	Persen		<50	55	65	75	85	95	INSPEKTORAT
2	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi (Skor)	Persen		>30-50	>50-60	>50-60	>60-70	>60-70	>70-80	
3	Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) (%)			<50	50	60	70	80	90	
4	Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI (%)	Persen		85	90	95	95	100	100	
5	Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab) (%)	Persen		75 75	80 80	85 85	90 90	95 95	100 100	
6	Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	Persen		350	375	400	425	430	435	
7	Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan (%)	Persen		85	90	95	95	100	100	
8	Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan (%)	Persen		85	90	95	95	100	100	
9	Persentase jumlah aparat pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat	Persen		45	50	60	70	80	90	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan (%)										
10	Persentase jumlah elemen penilaian (Assessment) peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan (%)	Persen		50	67	83	100	100	100		
	Pemerintahan Umum										
	Persentase pelayanan keagamaan yang terlaksana (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase kebijakan pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase produk hukum dan informasi hukum daerah yang ditetapkan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase terwujudnya pelaksanaan kebijakan KDH (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase peningkatan kategori nilai LPPD (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina dalam bidang administrasi pemerintahan umum (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan penataan pemerintah (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase penyelesaian dan penegasan batas wilayah antar daerah (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah yang terlaksana (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang efisien (tender) (%)	Persen		-	100	100	100	100	100		
	Persentase paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik(%)	Persen		-	100	100	100	100	100		
	Persentase ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya alam (%)	Persen		-	100	100	100	100	100		
	Persentase ketersediaan data dan informasi perekonomian Daerah	Persen		-	100	100	100	100	100		



No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Persentase peningkatan nilai SAKIP (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase realisasi penataan administrasi kelembagaan Pemda (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (%)	Persen		95	100	100	100	100	100		
	Persentase realisasi pelayanan kegiatan kehumasan (%)	Persen		98	100	100	100	100	100		
	Persentase cakupan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Sekretariat Dewan										
1	Cakupan Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen		100	100	100	100	100	100	DPRD	
2	Persentase Realisasi Rancangan Perda Inisiatif DPRD Yang tersusun (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Kecamatan										
1	Persentase peningkatan system pengawasan internal kecamatan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	KECAMATAN	
2	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Cakupan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
5	Cakupan realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
	Program bersifat rutin dan pelayanan internal pada setiap PD										
1	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen		100	100	100	100	100	100	SEMUA PD	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
3	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
4	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
5	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		
6	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	Persen		100	100	100	100	100	100		

## **8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketentraman, ketertiban, dan pelayanan masyarakat; dan sosial. Seluruh indikator SPM sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum. Indikator SPM Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 8.3.

## Indikator Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

No.	Indikator SPM	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>									
1.1.	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Persen			100	100	100	100	100	100
1.2.	Jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Persen			100	100	100	100	100	100
1.3.	Jumlah warga negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen			100	100	100	100	100	100
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>									
2.1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.3.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.4.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.5.	Jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.6.	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.7.	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.8.	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.9.	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.10.	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.11.	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100
2.12.	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100	100

No.	Indikator SPM	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>									
3.1.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen			100	100	100	100	100	100
3.2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen			100	100	100	100	100	100
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>									
4.1.	Jumlah warga negarakorban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni	Persen			100	100	100	100	100	100
4.2.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen			100	100	100	100	100	100
<b>5.</b>	<b>Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>									
5.1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Persen			100	100	100	100	100	100
5.2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen			100	100	100	100	100	100
5.3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen			100	100	100	100	100	100
5.4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen			100	100	100	100	100	100
5.5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen			100	100	100	100	100	100
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>									
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen			100	100	100	100	100	100
6.2.	Jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Persen			100	100	100	100	100	100
6.3.	Jumlah warga negara lanjutusia telantar yang mendapatkan rehabilitasisosial di luar panti	Persen			100	100	100	100	100	100
6.4.	Jumlah warga negaragelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen			100	100	100	100	100	100
6.5.	Jumlah warga negara korban bencana	Persen			100	100	100	100	100	100

No.	Indikator SPM	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
	kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial								

### **8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Indikator TPB Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 8.4.  
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

N o.	Kode Indikator	Indikator TPB	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	2	2	1	1	1	0	0
2	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	Rp. 7.262.730.000	Rp. 6.338.708.934	Rp.5.414.687.868	Rp. 4.490.666.803	Rp. 3.566.645.737	Rp. 2.642.624.671	Rp1.718.603.605
3	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	6,29	5,95	5,60	5,26	4,92	4,57	4,23
4	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	79,39	82,83	86,26	89,70	93,13	96,57	100
5	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	84,44	94,39	100	100	100	100	100
6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	312	322	332	342	352	362	372
7	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,36	0,40
8	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	RT	19.417	19.523	19.630	19.737	19.844	19.951	20.058
9	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	79,39	82,83	86,26	89,70	93,13	96,57	100
10	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	66,82	70,00	75,00	85,00	95,00	99,00	100
11	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persen	72,90	73,36	84,50	90,00	95,00	99,86	100
12	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Persen	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52
13	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	3,63	3,03	2,42	1,82	1,21	0,61	0
14	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	33,82	32,85	31,88	30,91	29,94	28,97	28
15	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	92,28	92,40	92,52	92,64	92,76	92,88	93,00
16	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Rasio	0,09	0,08	0,06	0,05	0,03	0,02	0,00
17	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan	Orang	209	191	181	179	169	160	158



N o.	Kode Indikator	Indikator TPB	Satuan	Baseline 2017	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Filariasis dan Kusta).								
18	3.3.5.(a)	Jumlah desa dengan eliminasi Kusta.	Desa	14	18	22	26	30	34	38
19	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Unit	3	5	7	8	9	10	12
20	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	5	5	30	30	30	30	30
21	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	127	132	169	175	178	179	180
22	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	460	525	625	725	825	1000	1157
23	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	195	179	163	147	131	115	100
24	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	5	5	30	30	30	30	30
25	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	70	70	75	80	85	90	100

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1. PedomanTransisi**

Pedoman transisi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone periode 2018-2023. Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 (masatransisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah RPJMD tahun 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya (2023-2028).

Seluruh program pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multi-year* sehingga hasil dan dampaknya dapat di evaluasi pada akhir tahun perencanaan.

#### **9.1. Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
2. Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

3. Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun kedalam RKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam KUA-PPAS dan RAPBD.
4. Penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone periode 2018-2023. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJMD kedalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Bone dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 dilakukan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
7. RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

**BUPATI BONE,**

**DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**